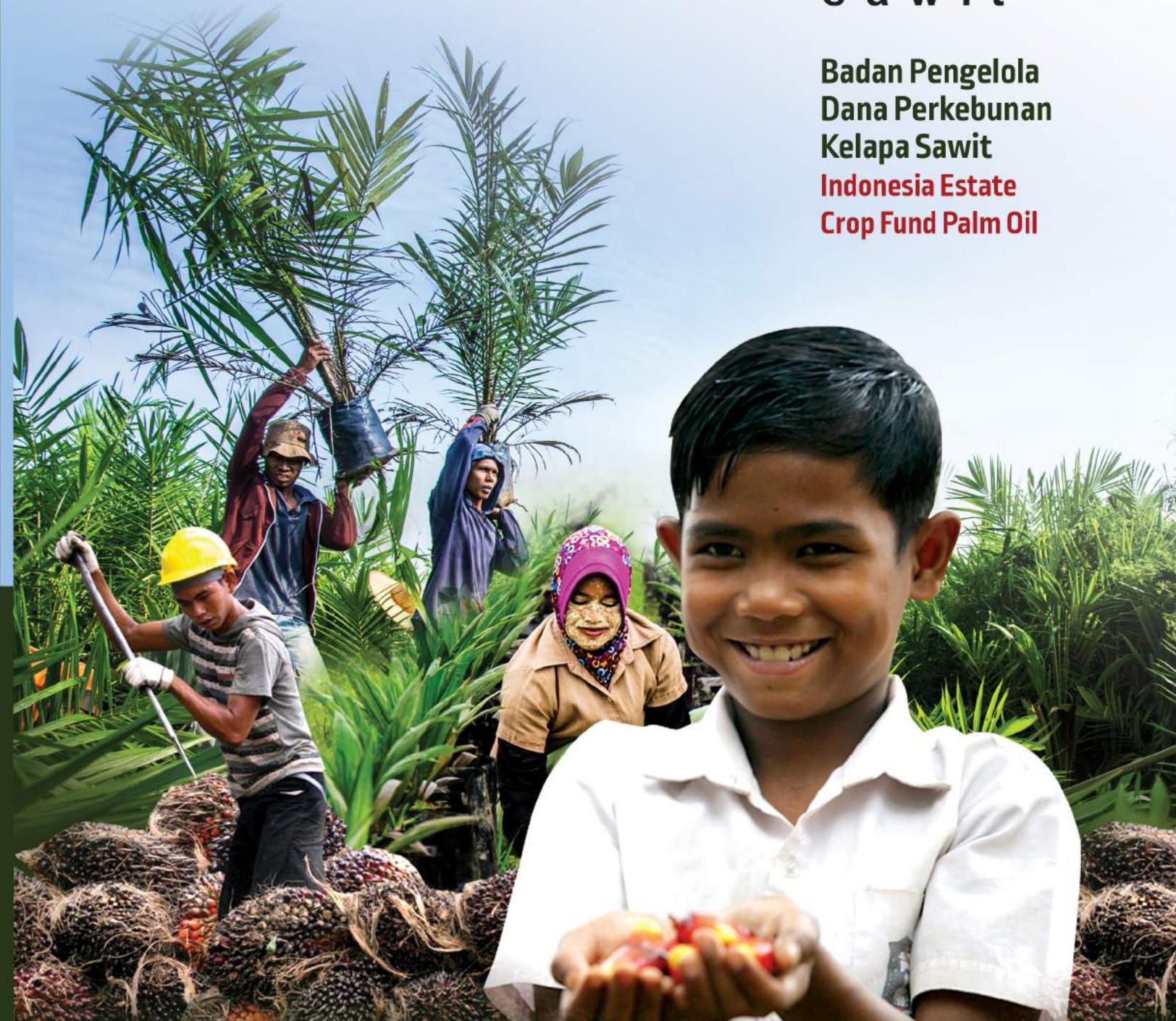




**Badan Pengelola
Dana Perkebunan Kelapa Sawit**
Indonesia Estate Crop Fund Palm Oil



**Badan Pengelola
Dana Perkebunan
Kelapa Sawit**
**Indonesia Estate
Crop Fund Palm Oil**



**Melanjutkan Dukungan
bagi Sawit Indonesia
yang Lebih Berkelanjutan**

Continuing to Support Sawit Indonesia
More Sustainable

2016
Laporan Tahunan
Annual Report



Melanjutkan Dukungan bagi Sawit Indonesia yang Lebih Berkelaanjutan

Continuing to Support Sawit Indonesia More Sustainable

Selama hampir dua tahun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah melakukan sejumlah kegiatan strategis sesuai dengan tugas yang diamanahkan. Mengacu pada visi BPDPKS yakni menjadi pengelola dana yang berperan dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan sebagai salah satu komoditas strategis Indonesia, BPDPKS telah menghimpun dan mengembangkan sumber Dana Perkebunan Kelapa Sawit (DPKS) secara berkelanjutan yang berasal dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan dana lembaga pembiayaan. Disamping itu, BPDPKS juga melakukan pengelolaan dana melalui investasi jangka panjang dan/atau jangka pendek dengan menjaga prinsip kehati-hatian.

Sepanjang tahun 2016, BPDPKS juga melakukan penyaluran dan pemanfaatan hasil pengelolaan dana untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja kelapa sawit, melakukan kegiatan promosi perkebunan, melakukan kegiatan peremajaan perkebunan, menyalurkan hasil pengelolaan dana untuk mendorong intensifitas pembangunan sarana dan prasarana perkebunan, pemenuhan hasil perkebunan kelapa sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi perkebunan kelapa sawit dan bahan bakar nabati (biofuel), melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait pemanfaatan DPKS, dan melakukan kajian untuk pengembangan usaha.

Jejak langkah ini menjadi tolok ukur untuk lebih meningkatkan kinerja kami di masa mendatang yang penuh peluang, tantangan sekaligus harapan. Untuk itu BPDPKS bersama seluruh pihak terkait akan senantiasa bersinergi dalam mewujudkan pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

For almost two years, the Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil (IECFPO) has performed a number of strategic activities according to the mandated duties. Referring to IECFPO vision to become the manager of funds in the development of sustainable palm oil as one of Indonesia's strategic commodities, IECFPO has sustainably collected and developed the sources of Crop Fund for Palm Oil from palm oil plantation business owners and financing institutions. IECFPO also carries out the fund management through long- and/or short-term investments by adhering to the prudential principle.

Throughout 2016, IECFPO has distributed and utilized the proceeds from the fund management for the research and development in order to improve the palm oil performance, promoting the plantations, rejuvenating the plantations, distributing the proceeds from the fund management to intensify the construction of plantation facilities and infrastructure, meeting the food requirements with palm oil plantation yield, downstream processing the palm oil plantation and biofuel, socializing about and enhancing the Crop Fund for Palm Oil utilization, and conducting business development studies.

This milestone helps creating a benchmark to improve our future performances that are full of opportunities, challenges, and expectations. To that reason, IECFPO and all relevant parties will continue to synergize in realizing sustainable palm oil plantation development.



Kesinambungan Tema Theme Continuity



2015

2016

2015

Memulai Dukungan bagi Sawit Indonesia yang Lebih Berkelaanjutan Starting to Support Sawit Indonesia More Sustainable

Pertengahan tahun 2015, adalah awal dimulainya perjalanan kami sebagai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kelahiran kami merupakan perwujudan amanah dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.

Kami telah berkomitmen seoptimal mungkin menjalankan peran yang ditugaskan untuk mendorong pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit yang berkelanjutan sebagai salah satu komoditas strategis Indonesia. Dalam rangka mewujudkannya, kami telah merumuskan peta strategis yang mencakup 11 (sebelas) sasaran strategi yang wajib kami capai.

Selama tahun 2015, kami telah menyelesaikan pencapaian hasil kinerja yang optimal. Dari sisi internal proses kami sedang menyempurnakan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang dibutuhkan untuk pengelolaan dana kelapa sawit. Pada periode selanjutnya, kami akan menyempurnakan *governance* yang ada sehingga dapat mencapai kinerja optimal.

Kami akan terus bekerja keras memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan industri dengan harapan dapat memberikan imbal hasil secara ekonomi, sosial dan manfaat lainnya, yang pada gilirannya mampu memberikan stimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Mid 2015 initiated our journey as the Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit). We were born from the manifestation of the mandate of Law Number 39 of 2014 concerning Plantation and Government Regulation Number 24 of 2015 concerning the Gathering of Plantation Funds.

We have been committed to optimally run our duties assigned to encourage a sustainable development of Palm Oil Plantation as one of strategic commodities in Indonesia. To realize this, we have formulated the strategic map which contains 11 strategic targets to achieve.

Throughout 2015, we have accomplished optimal performances. Internally, our process is currently improving the Standard Operating Procedure needed for the management of palm oil fund. In the subsequent period, we have planned to enhance our existing governance to reach optimal performance.

We will continue our hard work in providing the best service to the communities and industries so as to be able to provide economic and social yields as well as other benefits, which in turn may stimulate the national economic growth.

2016

Melanjutkan Dukungan bagi Sawit Indonesia yang Lebih Berkelaanjutan Continuing to Support Sawit Indonesia More Sustainable

Selama hampir dua tahun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah melakukan sejumlah kegiatan strategis sesuai dengan tugas yang diamanahkan. Mengacu pada visi BPDPKS yakni menjadi pengelola dana yang berperan dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan sebagai salah satu komoditas strategis Indonesia, BPDPKS telah menghimpun dan mengembangkan sumber Dana Perkebunan Kelapa Sawit (DPKS) secara berkelanjutan yang berasal dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan dana lembaga pembiayaan. Disamping itu, BPDPKS juga melakukan pengelolaan dana melalui investasi jangka panjang dan/atau jangka pendek dengan menjaga prinsip kehati-hatian.

Sepanjang tahun 2016, BPDPKS juga melakukan penyaluran dan pemanfaatan hasil pengelolaan dana untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja kelapa sawit, melakukan kegiatan promosi perkebunan, melakukan kegiatan peremajaan perkebunan, menyalurkan hasil pengelolaan dana untuk mendorong intensifikasi pembangunan sarana dan prasarana perkebunan, pemenuhan hasil perkebunan kelapa sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi perkebunan kelapa sawit dan bahan bakar nabati (biofuel), melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait pemanfaatan DPKS, dan melakukan kajian untuk pengembangan usaha.

Jejak langkah ini menjadi tolok ukur untuk lebih meningkatkan kinerja kami di masa mendatang yang penuh peluang, tantangan sekaligus harapan. Untuk itu BPDPKS bersama seluruh pihak terkait akan senantiasa bersinergi dalam mewujudkan pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

For almost two years, the Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil (IECFPO) has performed a number of strategic activities according to the mandated duties. Referring to IECFPO vision to become the manager of funds in the development of sustainable palm oil as one of Indonesia's strategic commodities, IECFPO has sustainably collected and developed the sources of Crop Fund for Palm Oil from palm oil plantation business owners and financing institutions. IECFPO also carries out the fund management through long- and/or short-term investments by adhering to the prudential principle.

Throughout 2016, IECFPO has distributed and utilized the proceeds from the fund management for the research and development in order to improve the palm oil performance, promoting the plantations, rejuvenating the plantations, distributing the proceeds from the fund management to intensify the construction of plantation facilities and infrastructure, meeting the food requirements with palm oil plantation yield, downstream processing the palm oil plantation and biofuel, socializing about and enhancing the Crop Fund for Palm Oil utilization, and conducting business development studies.

This milestone helps creating a benchmark to improve our future performances that are full of opportunities, challenges, and expectations. To that reason, IECFPO and all relevant parties will continue to synergize in realizing sustainable palm oil plantation development.

Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2016

Accountability for Annual Report 2016

Dewan Pengawas dan Direksi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit bertanggung jawab atas Laporan Tahunan ini, berikut informasi keuangan dan informasi lain yang terkait, yang telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Pengawas dan Direksi dengan membubuhkan tanda tangannya masing-masing dibawah ini.

The Supervisory Board and the Board of Directors of the Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil hold the accountability for this Annual Report, including the financial statements and other relevant information, which have been approved by all members of the Supervisory Board and the Board of Directors by affixing their signatures below.

Rusman Heriawan
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of Supervisory Board

Lukita Dinarsyah Tuwo
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Suahasil Nazara
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Arlinda
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Rida Mulyana
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Panggah Susanto
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Gamal Nasir
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Loso Judijanto
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Joko Supriyono
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Bayu Krisnamurti
Direktur Utama
President Director

Catur Ariyanto Widodo
Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan
dan Manajemen Risiko
Director of Finance, General,
Compliance and Risk Management

Agustinus Antonius
Direktur Perencanaan dan
Pengelolaan Dana
Director of Planning and Fund
Management

Herdrajat Natawidjaja
Direktur Penghimpunan Dana
Director of Fund Raising

Agustinus Antonius
Plt. Direktur Penyaluran Dana
Act. Director of Fund Distribution

.....
Direktur Kemitraan
Director of Partnership



Analisis Pembahasan Kinerja
Operasional dan Keuangan
Operational and Financial Performance
Discussion Analysis

Tata Kelola BPDPKS
IECFPO Governance

Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
IECFPO Social Responsibility

Laporan Keuangan Audited
Audited Financial Statements



Ringkasan Kinerja Tahun 2016

2016 Performance Summary



Rp12,32
Triliun Trillion

Total Pendapatan BPDPKS
Total IECFPO Revenue



19.580

Total Laporan Surveyor
Total Surveyor Report



Rp5,8
Triliun Trillion

Total Pendapatan BPDPKS
Total IECFPO Revenue



2.767.730

KL Trillion
Volume Biodiesel BPDPKS
IECFPO Biodiesel Volume





Rp10,9
Triliun Trillion

Penyaluran Dana BPDPKS
IECFPO Fund Distribution

Rp0,63
Triliun Trillion

Pendapatan Atas Pengelolaan Dana BPDPKS
Revenue from IECFPO Fund Management



Rp2,1
Triliun Trillion

Rata-rata Surplus Saldo BPDPKS
Average IECFPO Balance Surplus

- **Rp52,76** > Penyaluran Dana Riset BPDPKS
IECFPO Research Fund Distribution
- **Rp9,31** > Penyaluran Dana Peremajaan
Kelapa Sawit BPDPKS
IECFPO Palm Oil Replanting
Fund Distribution
- **Rp35,43** > Penyaluran Dana Promosi
Kelapa Sawit BPDPKS
IECFPO Palm Oil Promotional
Fund Distribution

Testimoni Testimonials



Darmin Nasution

Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian
Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian

Pemerintah berkomitmen untuk tetap melanjutkan program mandatori B20 sebagai salah satu wujud komitmen Pemerintah Indoensia dalam COP21 Paris yaitu menurunkan tingkat emisi, diversifikasi energi untuk ketahanan nasional serta mengurangi impor BMM sampai 6,9 juta kiloliter. Indonesia sebagai negara pertama yang mengimplementasikan B20, tentunya akan banyak tantangan yang akan hadir dari sisi teknis dan non teknis. Dengan keyakinan dan semangat untuk terus mengembangkan produksi dalam negeri, hal ini akan dapat diselesaikan dan Indonesia akan menjadi pionir biodiesel di dunia.

Kementerian ESDM sebagai regulator menegakkan kebijakan mandatori B20 tahun 2016 bersama PT Pertamina (Persero) dan BPDP Kelapa Sawit berusaha semaksimal mungkin mewujudkan program Mandatori Biodiesel B20 yang merupakan program Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan dalam negeri sekaligus mempromosikan era energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan.

Pemerintah berkomitmen untuk tetap melanjutkan program mandatori B20 sebagai salah satu wujud komitmen Pemerintah Indoensia dalam COP21 Paris yaitu menurunkan tingkat emisi, diversifikasi energi untuk ketahanan nasional serta mengurangi impor BMM sampai 6,9 juta kiloliter. Indonesia sebagai negara pertama yang mengimplementasikan B20, tentunya akan banyak tantangan yang akan hadir dari sisi teknis dan non teknis. Dengan keyakinan dan semangat untuk terus mengembangkan produksi dalam negeri, hal ini akan dapat diselesaikan dan Indonesia akan menjadi pionir biodiesel di dunia.

Kementerian ESDM sebagai regulator menegakkan kebijakan mandatori B20 tahun 2016 bersama PT Pertamina (Persero) dan BPDP Kelapa Sawit berusaha semaksimal mungkin mewujudkan program Mandatori Biodiesel B20 yang merupakan program Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan dalam negeri sekaligus mempromosikan era energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan.



Ilham Saputra (Salah satu penerima Beasiswa)

Anak Buruh Tani dari Desa Mamugo Kecamatan Tanah Putih Rokan Hilir

Penerima Beasiswa BPDPKS Yang bekerjasama dengan APKASINDO

Anak Buruh Tani dari Desa Mamugo Kecamatan Tanah Putih Rokan Hilir

Penerima Beasiswa BPDPKS Yang bekerjasama dengan APKASINDO

"Saya tidak pernah sama sekali bercita-cita dapat
berkuliah apalagi sampai ke Politeknik Sawit CWE Bekasi
Jawa Barat. Ini seperti mimpi jadinya, begitu diumumkan
di Media Internet bahwa saya salah satu yang lulus.
Terima kasih kepada Apkasindo dan BPDPKS khususnya
kepada kedua orangtua saya yang mau mengijinkan
saya untuk sementara tidak ikut membantu mungut
brondolan karena mesti mengikuti kuliah selama 1 tahun
di Bekasi."

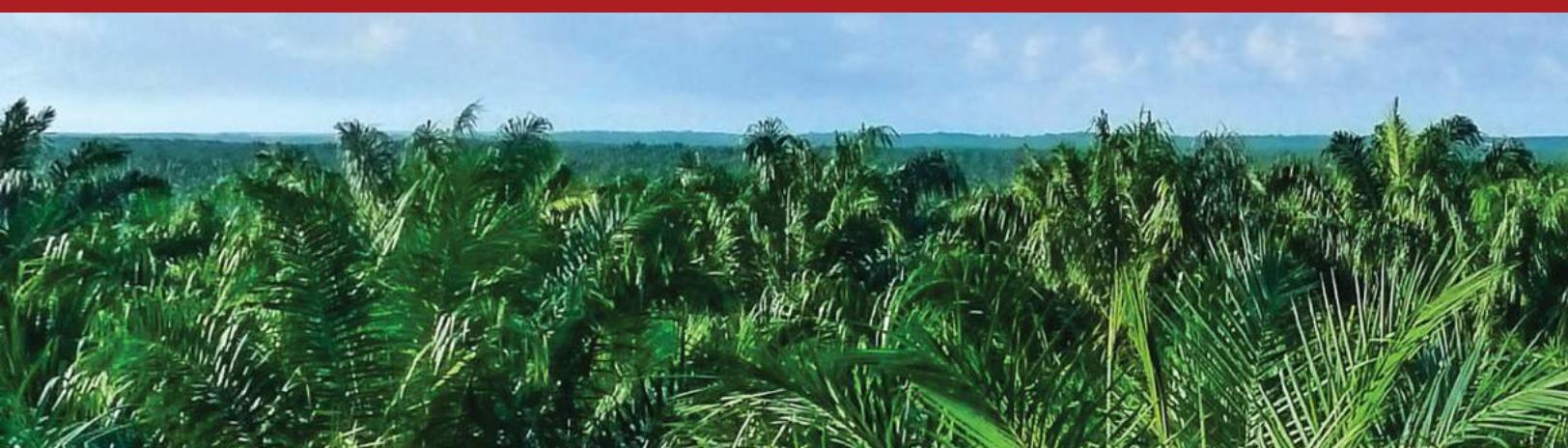
Sumber: www.infosawit.com

"Saya tidak pernah sama sekali bercita-cita dapat
berkuliah apalagi sampai ke Politeknik Sawit CWE Bekasi
Jawa Barat. Ini seperti mimpi jadinya, begitu diumumkan
di Media Internet bahwa saya salah satu yang lulus.
Terima kasih kepada Apkasindo dan BPDPKS khususnya
kepada kedua orangtua saya yang mau mengijinkan
saya untuk sementara tidak ikut membantu mungut
brondolan karena mesti mengikuti kuliah selama 1 tahun
di Bekasi."

Sumber: www.infosawit.com

Daftar Isi

Contents



01

Pendahuluan Introduction

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | Tema dan Penjelasan Tema
Theme and Explanation of Theme | |
| 2 | Kesinambungan Tema
Theme Continuity | |
| 4 | Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2016
Accountability for Annual Report 2016 | |
| 6 | Ringkasan Kinerja Tahun 2016
2016 Performance Summary | |
| 8 | Testimoni
Testimonials | |
| 10 | Daftar Isi
Contents | |
| 12 | Ikhtisar Data Keuangan dan Operasional
Tahun 2016
Financial and Operational Highlights in 2016 | |
| 14 | Peristiwa Penting Tahun 2016
Milestones in 2016 | |

26

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan Report To Regulator and Stakeholders

- | | | |
|----|--|--|
| 28 | Laporan Dewan Pengawas
Supervisory Board Report | |
| 32 | Profil Dewan Pengawas
Supervisory Board Profile | |
| 44 | Laporan Direksi
Board of Directors Report | |
| 48 | Profil Direksi
Board of Directors Profile | |

54

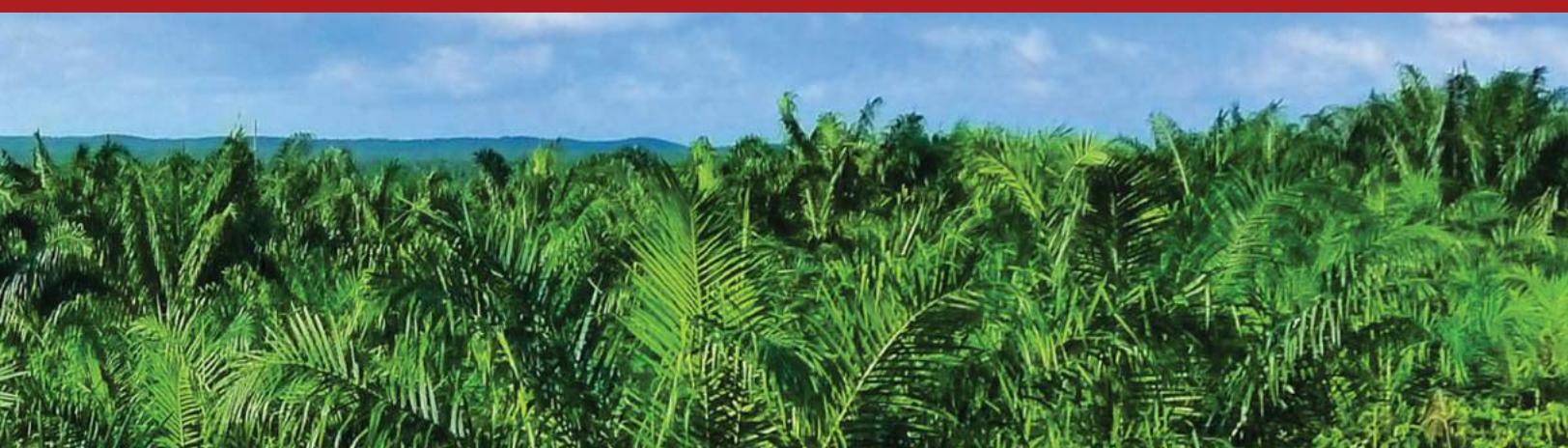
Profil BPDPKS IECFPO Profile

- | | | |
|----|---|--|
| 56 | Identitas BPDPKS
IECFPO Identity | |
| 58 | Riwayat Singkat
IECFPO At A Glance | |
| 61 | Visi Misi dan Tujuan
Vision, Mission, and Objectives | |
| 64 | Tugas, Fungsi, dan Peran
Duties, Function, and Roles | |
| 65 | Budaya Kerja
Work Culture | |
| 66 | Makna Logo
Meaning of Logo | |
| 67 | Struktur Organisasi
Organizational Structure | |
| 70 | Pejabat Satu Level di bawah Direksi
Officials One Level under the Board of Directors | |
| 72 | Profil Sumber Daya Manusia
Human Resource Profile | |
| 79 | Lembaga Profesi Penunjang
Professional Supporting Institutions | |
| 80 | Area dan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia
Indonesian Palm Oil Area and Production | |

84

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan Operational And Financial Performance Discussion Analysis

- | | | |
|----|--|--|
| 86 | Analisis Industri
Industrial Analysis | |
|----|--|--|



100	Kontribusi BPDPKS kepada Negara IECFPO Contribution to the Country	172	Akuntan Publik Public Accountant
104	Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis	174	Manajemen Risiko Risk Management
118	Analisis Kinerja Keuangan Financial Performance Analysis	181	Kebijakan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Remuneration Policy for Supervisory Board and Board of Directors
126	Manajemen Struktur Modal Capital Structure Management	184	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System
127	Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2016 & Proyeksi Tahun 2017 Comparison between 2016 Performance Target and Realization and 2017 Outlook	185	Perkara Hukum Legal Disputes
129	Informasi Keuangan Lainnya Other Financial Information	186	Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Information and Data
130	Prospek dan Strategi Usaha Business Outlook and Strategies	187	Kode Etik Perusahaan Code of Conduct
		188	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System
		190	Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Service Procurement
		196	Teknologi Informasi Information Technology
138		200	
Tata Kelola BPDPKS IECFPO Governance		Tanggung Jawab Sosial BPDPKS IECFPO Social Responsibility	
140	Pendahuluan Introduction		
142	Komite Pengarah Dana Perkebunan Crop Fund Steering Committee		
145	Dewan Pengawas Supervisory Board		
156	Komite Audit Supervisory Board Committee		
160	Sekretaris Dewan Pengawas Secretary to the Supervisory Board		
162	Direksi Board of Directors		
170	Audit Internal Internal Audit		
212		Laporan Keuangan Audited Audited Financial Statements	

Ikhtisar Data Keuangan dan Operasional Tahun 2016

Financial and Operational Highlights in 2016

(Dalam Rp In Rp)

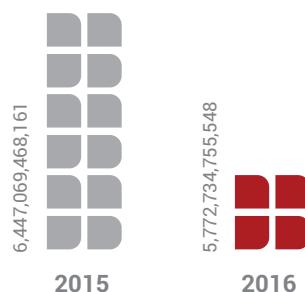
Laporan Posisi Keuangan	2015	2016	Statements of Financial Position
Aset	6,447,069,468,161	5,772,734,755,548	Assets
Aset Lancar	6,446,836,634,828	5,757,640,522,316	Current Assets
Aset Tidak Lancar	232,833,333	15,094,233,232	Non-Current Assets
Liabilitas	17,339,031,941	10,682,555,364	Liabilities
Liabilitas Jangka Pendek	17,339,031,941	10,682,555,364	Short-Term Liabilities
Ekuitas	6,429,730,436,220	5,762,052,200,184	Equity

Laporan Aktivitas	2015	2016	Statement of Activity
Pendapatan	6,981,019,217,854	12,321,204,623,969	Income
Beban Usaha	551,287,775,134	10,985,855,840,006	Operating Expenses
Surplus Usaha	6,429,731,442,720	1,335,348,783,963	Operating Surplus
Surplus sebelum Setor ke Kas Negara	6,429,731,442,720	1,335,348,783,963	Surplus before Deposit to State Treasury
Surplus setelah Setor ke Kas Negara	6,429,731,442,720	1,335,348,783,963	Surplus after Deposit to State Treasury

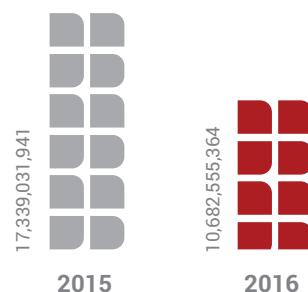
Laporan Arus Kas	2015	2016	Statement of Cashflow
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	6,442,406,435,456	1,303,611,901,381	Net Cash Flow from Operating Activities
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(3,962,033,850,000)	3,945,123,562,400	Net Cash Flow from (used for) Investing Activities
Arus kas bersih (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(2,000,000,000,000)	-	Net Cash Flow (used for) Financing Activities
Kenaikan bersih pada kas dan setara kas	2,480,372,585,456	3,248,735,463,781	Net Increase in Cash and Cash Equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	-	2,480,372,585,456	Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year
Kas dan Setara Kas pada akhir tahun	2,480,372,585,456	5,729,108,049,237	Cash and Cash Equivalents at the End of the Year

Laporan Posisi Keuangan Statements of Financial Position

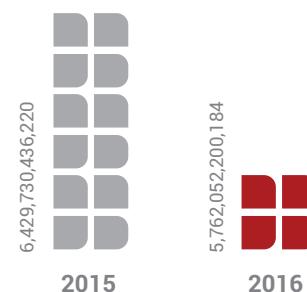
Jumlah Aset (Rp) Total Assets (Rp)



Jumlah Liabilitas (Rp) Total Liabilities (Rp)

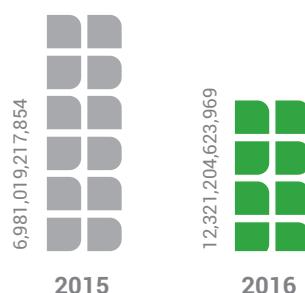


Jumlah Ekuitas (Rp) Total Equity (Rp)



Laporan Aktivitas Statement of Activity

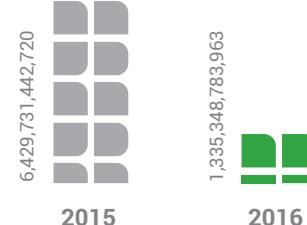
Jumlah Pendapatan (Rp) Total Income (Rp)



Jumlah Beban Usaha (Rp) Total Operating Expenses (Rp)

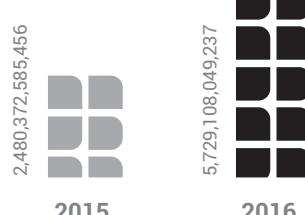


Surplus setelah Setor ke Kas Negara (Rp) Surplus after Deposit to State Treasury (Rp)



Laporan Arus Kas Statement of Cashflow

Kas dan Setara Kas pada akhir tahun (Rp) Cash and Cash Equivalents at the End of the Year (Rp)



Peristiwa Penting Tahun 2016

2016 Performance Summary



27 | Januari
January

Pertemuan Nasional Sawit Indonesia 2016 di Gedung Dhanapala Jakarta, dengan mengusung tema "Sawit Indonesia More Sustainable Than Ever, Menyatakan Langkah Membangun Sawit Indonesia Berkelanjutan". Acara tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Indonesia Palm Oil National Meeting 2016 at Jakarta Dhanapala Building, with the theme "Sawit Indonesia More Sustainable Than Ever, Unifying the Step of Sustainable Indonesian Sawit Building". The event was opened by Coordinating Minister of for the Economy Darmin Nasution.



18 | Februari - **01** | Maret
February - March

Pelatihan Teknologi dan Manajemen Kebun Kelapa Sawit bagi Siswa SMK Pertanian/Perkebunan di Provinsi Aceh bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP). Oil Palm Plantation Technical and Managerial Training for Agriculture/Plantation Vocational High School Students in Aceh Province in collaboration with the Plantation Training Institute (LPP)



25 | Februari - **08** | Maret
February - March

Pelatihan Teknologi dan Manajemen Kebun Kelapa Sawit bagi Siswa SMK Pertanian/Perkebunan di Jambi bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP). Oil Palm Plantation Technical and Managerial Training for Agriculture/Plantation Vocational High School Students in Jambi Province in collaboration with the Plantation Training Institute (LPP)



19 | Februari
February

Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Litbang SDM Kelapa Sawit.
Signing of Memorandum of Understanding for Palm Oil Human Resource R&D Collaboration



16 | Maret
March

Sosialisasi Rencana Kegiatan Pelatihan Petani Kelapa Sawit Indonesia bekerja sama Antara BPDPKS - APKASINDO.
Socialization of Indonesian Palm Oil Farmers' Training Plan in IECFPO-APKASINDO collaboration



05 | Februari
February

Lokakarya Pemberdayaan Petani Sawit Indonesia.
Indonesian Palm Oil Farmers' Empowerment Workshop



18 | Maret
March

Pelatihan Teknologi dan Manajemen Kebun Kelapa Sawit bagi SMK Pertanian.
Oil Palm Plantation Technical and Managerial Training for Agriculture Vocational High Schools



22 | Maret - **04** | April
March - April

Bimbingan Teknis bagi Siswa SMK Pertanian/Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP).
Technical Guidance for Agriculture/Plantation Vocational High School Students in South Sumatra and Bengkulu in collaboration with the Plantation Training Institute (LPP)



23 | Mei
May - **04** | Juni
June

Pelatihan Teknologi dan Manajemen Kebun Kelapa Sawit bagi Siswa SMK Pertanian/Perkebunan di Sampit, Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP).
Oil Palm Plantation Technical and Managerial Training for Agriculture/Plantation Vocational High School Students in Sampit, Central Kalimantan in collaboration with the Plantation Training Institute (LPP)



29 | Maret
March

Meeting Pegawai BPDPKS
Assesment Organisasi.
IECFPO Employee Meeting for Organizational Assessment



15 | April
April

Pemanfaatan Peta GENOM dalam Peremajaan Sawit.
GENOM Map Utilization in Palm Oil Replanting



16 | April
April

BPDPKS berpartisipasi dalam Pameran IPOC di JCC.
IECFPO Participation at the IPOC Expo in JCC



19 | April
April

Loka Karya Perumusan Program Desa Sawit Tanggap Api
Fire Response Palm Oil Village Program Formulation Workshop

Peristiwa Penting Tahun 2016 2016 Performance Summary



20 | April

Direktur Utama BPDPKS Bayu Krisnamurthi menandatangani Penyerahan Dana Peremajaan Kebun Kelapa Sawit kepada Petani Plasma.

IECFPO President Director, Bayu Krisnamurthi signed Oil Palm Plantation Replanting Fund Handover to Smallholders



22 | April

Sawit Goes to Campus, Sosialisasi Sawit untuk Indonesia.

"Sawit Goes to Campus", Palm Oil Socialization Program for Indonesia



03 | Mei

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel.
The signing of Cooperation Agreement for Biodiesel Provision



12 | Mei

Rapat Kerja Evaluasi Satu Tahun BPDPKS.
IECFPO One-Year Evaluation Work Meeting



20 | Mei

Direktur Utama BPDPKS Bayu Krisnamurthi menandatangani Persetujuan Pemberian Bantuan Peremajaan 4.610 HA Kebun Sawit Petani Mitra PT. Hindoli Kabupaten Musi Banyuasin.

IECFPO President Director, Bayu Krisnamurthi signed the Approval for Replanting Assistance for 4,610 Ha Oil Palm Plantation for Partner PT Hindoli in Musi Banyuasin Regency



26 | Mei

Direktur Utama BPDPKS Bayu Krisnamurthi menghadiri Peresmian Sistem Layanan Elektronik Pembayaran Pungutan Dana Sawit. IECFPO President Director, Bayu Krisnamurthi attended Palm Oil Fund Restitution e-Payment System



27 | Mei

Pisah Sambut Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPDPKS Yuniar Yanuar Rasyid dengan Catur Ariyanto Widodo.

Farewell and Welcome Event for the old Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management Yuniar Yanuar Rasyid and the new Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management, Catur Ariyanto Widodo



30 | Mei
May

Workshop Forum Komunikasi
Auditor ISPO.
ISPO Auditor Communication Forum
Workshop



02 | Juni
June

Profile Manajemen Risiko
Dilanjutkan dengan Serah Terima
Jabatan Direktur Keuangan, Umum,
Kepatuhan dan Manajemen Risiko
BPDPKS Yuniar Yanuar Rasyid
dengan Catur Ariyanto Widodo.
Risk Management Profile, Followed
by Transfer of Position from the old
Director of Finance, General Affairs,
Compliance, and Risk Management
Yuniar Yanuar Rasyid to the new
Director of Finance, General Affairs,
Compliance, and Risk Management,
Catur Ariyanto Widodo



10 | Juni
June

Rapat Kerja Perdana BPDPKS
dengan Komite Peremajaan dan
Pemberdayaan Petani.
IECFPO-Replanting and Farmers'
Empowerment Committee First
Work Meeting



16 | Juni
June

Buka Puasa Bersama BPDPKS
dengan Kemitraan dan Stakeholder.
Iftar (communal fast breaking) with
IECFPO, Partners, and Stakeholders



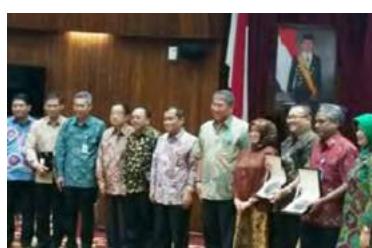
22 | Juni
June

Rapat Kerja Perumusan Peraturan
Direktur Utama Tentang BPDPKS.
Work Meeting on Formulation of
President Director Regulation on
IECFPO



21 | Juli
July

Halal Bihalal dan Stakeholder
Gathering.
Religious Gathering and Stakeholder
Gathering



12 | Agustus
August

Direktur Utama (Dirut) BPDPKS Bayu
Krisnamurthi menghadiri
Pembukaan Kuliah Pelatihan Teknik
Perkebunan Kelapa Sawit Setara D1
di Yogyakarta bekerja sama dengan
INSTIPER dan Apkasindo.
IECFPO President Director, Bayu
Krisnamurthi Attended the Opening
of Oil Palm Plantation Technical
Training for Diploma 1 Equivalent in
Yogyakarta, in collaboration with
INSTIPER and APKASINDO

Peristiwa Penting Tahun 2016 2016 Performance Summary



23 | Agustus
August

Kuliah Umum terkait Program Beasiswa Pelatihan Teknis Kebun Kelapa Sawit Setara Dipoloma 1 di Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, Cibitung, Jawa Barat. Public Lecture on Scholarship Program for Oil Palm Plantation Technical Training for Diploma 1 Equivalent at the Palm Oil Polytechnic Citra Widya Edukasi, Cibitung, West Java



02 | September
September

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Gran Riset Sawit K16-1 antara BPDPKS dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan di Bogor, Jawa Barat bantuan pendanaan riset-riset sawit unggulan kepada lembaga riset di Indonesia.

The Signing of Cooperation Agreement on Oil Palm K16-1 Research Grant between IECFPO and Research and Development Agency in Bogor, West Java, for the funding of quality oil palm research to Indonesian research agencies



09 | September
September

Seminar "Pemanfaatan Biomassa Kelapa Sawit sebagai Bahan Bakar Bioetanol" di Balai Kartini, Jakarta. Seminar on the Utilization of Palm Oil Biomass as Bioethanol Fuel at Balai Kartini, Jakarta



25 | Agustus
August

Sosialisasi Pemanfaatan Biodiesel 20% (B20) di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Socialization of Biodiesel 20% (B20) Utilization at the Regional Office of Director General of Treasury, Palangkaraya Municipality, Central Kalimantan Province



07-09 | September
September

Pelatihan Petani Kelapa Sawit di Pontianak, Kalimantan Barat dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan bertujuan untuk memberi pengetahuan dan pemahaman kepada khalayak luas mengenai pola tanam kelapa sawit sehingga menghasilkan kelapa sawit yang berkualitas.

Palm Oil Farmers' Training in Pontianak, West Kalimantan and Banjar Baru, South Kalimantan, aiming to provide knowledge and understanding to the public on oil palm planting pattern in order to produce quality palm oil



19 | September
September

Pelatihan Produktivitas Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur kerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman dan DPD Apkasindo Penajam Paser Utara.

Palm Oil Farmers' Productivity Training in Penajam Paser Utara Regency, East Kalimantan, in collaboration with the Faculty of Agriculture, Mulawarman University and Regional Leadership Council of APKASINDO Penajam Paser Utara



19-23 September

The 15th World Renewable Energy Congress (WREC) di Jakarta Convention Center (JCC).
The 15th World Renewable Energy Congress (WREC) at the Jakarta Convention Center (JCC)



23 September

In House Training Profil Bisnis "Industri Sawit A to Z".
Business Profile In-House Training on "Palm Oil Industry from A to Z"



22-28 September

Pelatihan Teknologi dan Manajemen Kebun Kelapa Sawit bagi Guru SMK Pertanian/Perkebunan di Medan, Sumatera Utara bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP).

Oil Palm Plantation Technical and Managerial Training for Agriculture/Plantation Vocational High School Teachers in Medan, North Sumatra in collaboration with the Plantation Training Institute (LPP)



03 Oktober



26-30 September

Forum Group Discussion (FGD) mengenai peremajaan (*replanting*) kelapa sawit di Hotel Grand Sahada, Labuhan Batu, Sumatera Utara, dan diselingi dengan penyampaian materi dari perbankan terkait prosedur penyaluran dana *replanting*. Focus Group Discussion (FGD) on oil palm replanting at Grand Sahada Hotel, Labuhan Batu, North Sumatra, and presentation of banking materials on replanting fund distribution



11-15 Oktober

Pelatihan Manajemen Usaha Perkoperasian bagi Pengurus/Manajer Usaha Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Angkatan I di Jambi kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Kampus Medan.



03 Oktober

Jajaran Direksi BPDPKS melakukan kunjungan ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jakarta. IECFPO Board of Directors visit to Regional House of Representatives Jakarta

Peristiwa Penting Tahun 2016 2016 Performance Summary



13 | Oktober
October

Town Hall Meeting seluruh pegawai BPDPKS dan sambutan Direktur Replanting BPDPKS yang baru Hendrajat Natawijaya.

Town Hall Meeting with all IECFPO employees and greetings from new IECFPO Director of Replanting, Hendrajat Natawijaya



14-19 | Oktober
October

Pelatihan Teknik dan Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit bagi Guru SMK Pertanian se-Kalimantan Tengah. Bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP).

Oil Palm Plantation Technical and Managerial Training for Agriculture Vocational High School Teachers of Central Kalimantan In Collaboration with the Plantation Training Institute (LPP)



31 | Oktober
October

Seminar Nasional dan Lokakarya FKPT-TPI 2016 FATEKA Universitas Jambi dengan tema "Peranan Teknologi Pertanian dalam Menciptakan Inovasi Teknologi untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Pertanian pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN". FKPT-TPI 2016 National Seminar and Workshop, Faculty of Agricultural Technology, Jambi University, bearing the theme "The Role of Agricultural Technology in Creating Technology Innovations to Increase Agricultural Product Competitiveness in the ASEAN Economic Community Era"



13-17 | Oktober
October

Pelatihan Peremajaan (replanting) Tanaman Kelapa Sawit bagi Petani Kabupaten Landak di Landak, Kalimantan Barat bekerjasama dengan Apkasindo, LPP Kampus Medan, dan instansi pemerintah setempat.

Oil Palm Replanting Training for Farmers in Landak Regency, West Kalimantan, in collaboration with Apkasindo, LPP Medan Campus, and local government institutions



28 | Oktober
October

01 | November
November

Pelatihan Peremajaan (replanting) Tanaman Kelapa Sawit bagi Petani Mamuju Utara, Sulawesi Barat bekerjasama dengan Apkasindo, LPP Kampus Medan, dan instansi pemerintah setempat.

Oil Palm Replanting Training for Farmers in Mamuju Utara, West Sulawesi, in collaboration with Apkasindo, LPP Medan Campus, and local government institutions



31 | Oktober
October

05 | November
November

Pelatihan Administrasi Keuangan dan Perkantoran bagi Pengurus/Manajer Keuangan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat (Angkatan II) di Lampung, bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Kampus Medan.
Financial and Office Administration Training for Oil Palm Community Plantation Cooperative Financial Managers Batch III in Lampung, in collaboration with the Plantation Training Institute (LPP), Medan Campus



31 | Oktober
October

Sosialisasi Program Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Jambi.
Socialization of Crop Fund for Palm Oil Distribution Program in Jambi



07-12 | November
November

Pelatihan Teknik dan Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit bagi Guru SMK Pertanian se-Jambi bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP).
Oil Palm Plantation Technical and Managerial Training for Agriculture Vocational High School Teachers in Jambi in collaboration with the Plantation Training Institute (LPP)



08-12 | November
November

Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial bagi General Manager (GM) Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Angkatan III di Medan, Sumatera Utara bekerjasama Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Kampus Medan.
Leadership and Managerial Training for Oil Palm Plantation Cooperative General Managers Batch III in Medan, North Sumatra, in collaboration with the Plantation Training Institute (LPP) Medan Campus



08-16 | November
November

Pelatihan Teknologi dan Manajemen Kebun Kelapa Sawit bagi Guru SMK Pertanian/Perkebunan di Pontianak, Kalimantan Barat bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP).
Oil Palm Plantation Technical and Managerial Training for Agriculture/Plantation Vocational High School Teachers in Pontianak, West Kalimantan in collaboration with the Plantation Training Institute (LPP)



09-14 | November
November

Pelatihan Teknik dan Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit bagi Guru SMK Pertanian se-Kalimantan Timur bekerjasama dengan dukungan dari Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP).
Oil Palm Plantation Technical and Managerial Training for Agriculture Vocational High School Teachers in East Kalimantan in collaboration with the Plantation Training Institute (LPP)

Peristiwa Penting Tahun 2016 2016 Performance Summary



09-16 | November
November

Pelatihan Teknologi dan Manajemen Kebun Kelapa Sawit bagi Siswa SMK Pertanian/Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP).

Oil Palm Plantation Technical and Managerial Training for Agriculture/Plantation Vocational High School Students in East Kalimantan in collaboration with the Plantation Training Institute (LPP)



14-21 | November
November

Pelatihan Teknologi dan Manajemen Kebun Kelapa Sawit bagi Guru SMK Pertanian/Perkebunan di Padang, Sumatera Barat bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP).

Oil Palm Plantation Technical and Managerial Training for Agriculture/Plantation Vocational High School Teachers in Padang, West Sumatra in collaboration with the Plantation Training Institute (LPP)



14-19 | November
November

Pelatihan Administrasi Keuangan dan Perkantoran bagi Pengurus/Manajer Keuangan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat (Angkatan III) di Medan, Sumatera Utara bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Kampus Medan.

Financial and Office Administration Training for Oil Palm Plantation Cooperative Financial Managers Batch III in Medan, North Sumatra, in collaboration with the Plantation Training Institute (LPP), Medan Campus



15-19 | November
November

Pelatihan Manajemen Usaha Perkoperasian bagi Pengurus/Manajer Usaha Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Angkatan II di Medan, Sumatera Utara bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Kampus Medan.

Cooperative Business Management Training for Oil Palm Community Plantation Cooperative Business Managers Batch II in Medan, North Sumatra, in collaboration with the Plantation Training Institute (LPP), Medan Campus



17 | November
November

Sosialisasi Pemanfaatan Biodiesel 20% (B20) BPDPKS Goes to School, dalam rangka menyukceskan penerapan B20 di Manado, Sulawesi Utara.

Socialization of Biodiesel 20% (B20) Utilization at BPDPKS Goes to School, to succeed the B20 campaign in Manado, North Sulawesi



14-19 | November
November

Pelatihan Teknik dan Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit bagi Guru SMK Pertanian se-Riau di Pekanbaru, Riau, dengan dukungan dari Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP).

Oil Palm Plantation Technical and Managerial Training for Agriculture Vocational High School Teachers in Pekanbaru, Riau in collaboration with the Plantation Training Institute (LPP)



19-26 | November
November

Pelatihan Teknologi dan Manajemen Kebun Kelapa Sawit Bagi Guru SMK Pertanian/Perkebunan di Balikpapan (Angkata IX), bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Kampus Medan.

Oil Palm Plantation Technical and Managerial Training for Agriculture/Plantation Vocational High School Teachers in Balikpapan (Batch IX), in collaboration with the Plantation Training Institute (LPP) Medan Campus



20 | November
November
04 | Desember
December

Pelatihan Teknologi dan Manajemen Kebun Kelapa Sawit bagi Siswa SMK Pertanian/Perkebunan Angkatan XXX dengan bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) di Manokwari, Papua Barat. Oil Palm Plantation Technical and Managerial Training for Agriculture/Plantation Vocational High School Students in Manokwari, West Papua (Batch XXX), in collaboration with the Plantation Training Institute (LPP)



21-27 | November
November

Pelatihan Administrasi Keuangan dan Perkantoran bagi Pengurus/Manajer Keuangan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat (Angkatan IV) di Pekanbaru, Riau bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Kampus Medan.

Financial and Office Administration Training for Oil Palm Community Plantation Cooperative Financial Managers Batch IV in Pekanbaru, Riau, in collaboration with the Plantation Training Institute (LPP), Medan Campus



24 | November
November
06 | Desember
December

Pelatihan Teknik dan Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit bagi Guru SMK Pertanian se-Sumatera Utara. Acara yang digelar di Medan bekerjasama dengan dukungan dari Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP).

Oil Palm Plantation Technical and Managerial Training for Agriculture Vocational High School Teachers of North Sumatra The event held in Medan was a collaboration with the Plantation Training Institute (LPP)



24 | November
November
06 | Desember
December

Pelatihan Teknik dan Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit bagi Siswa SMK Pertanian se-Sumatera Utara bekerjasama dengan dukungan dari Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP).

Peristiwa Penting Tahun 2016 2016 Performance Summary

Oil Palm Plantation Technical and Managerial Training for Agriculture Vocational High School Students in North Sumatra in collaboration with the Plantation Training Institute (LPP)



30 | November
November

Team Building And Employee Improvement Program di Neo Green Savana Sentul.

Team Building and Employee Improvement Program at the Neo Green Savana Sentul



06-07 | Desember
December

Workshop Pemberdayaan Fasilitator Daerah di Palembang, Sumatera Selatan dengan tema "Membangun Kebun Kelapa Sawit Rakyat Berkelanjutan".

Regional Facilitator Empowerment Workshop in Palembang, North Sumatra, bearing the theme "Establishing Sustainable Oil Palm Community Plantation"



13-15 | Desember
December

Pekan Riset Sawit Indonesia yang berlangsung di Bogor, untuk menggali pengembangan produk sawit dari hulu hingga ke hilir agar produk sawit tanah air memiliki daya saing. Kegiatan antara lain:

1. Seminar dan Pameran Hasil Penelitian GRS K15.
2. Lomba Riset Sawit Tingkat Mahasiswa yang akan melombakan 20 penelitian yang telah dipilih dari 360 pengusul dari seluruh universitas di Indonesia
3. Workshop Roadmap Riset Sawit Indonesia
4. Seminar Kajian Dampak Sosial Ekonomi Kelapa Sawit terhadap Kesejahteraan Petani dan Kemajuan Wilayah.

The Indonesian Palm Oil Research Week held in Bogor was aimed at exploring upstream and downstream palm oil product development to give competitive power to domestic palm oil products. The event among others arranged the followings:

1. Seminar and Expo on GRS K15 Research Outcome
2. Palm Oil Research Competition for University Students, participating 20 select researches from 360 applicants from various Indonesian universities
3. Workshop on Indonesian Palm Oil Research Roadmap
4. Seminar on Study of Palm Oil Socio-Economic Impact towards Farmers' Welfare and Regional Development.



21 | Desember
December

Festival Pasar Rakyat di Bentara Budaya Jakarta, yang diselenggarakan oleh Kompasiana. BPDPKS memberi dukungan terhadap keberadaan dan perkembangan pasar tradisional (pasar rakyat) di Indonesia melalui sejumlah program yang telah dijalankan. Di tengah maraknya pasar modern, pasar tradisional masih menjadi pilihan utama bagi sebagian masyarakat Indonesia. Community Market Festival at Bentara Budaya Jakarta, held by Kompasiana IECFPO supports the existence and development of Indonesian traditional markets, through a number of implemented programs. Amid the growing modern markets, traditional markets remain the key choice of a part of the Indonesian people.



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan

Report to Regulator and Stakeholders





Laporan Dewan Pengawas

Message from the Supervisory Board

Dalam upaya meningkatkan kinerja, Dewan Pengawas selalu mendorong manajemen agar mampu menjaga dan mengelola BPDPKS dengan baik. Oleh karenanya, kami senantiasa memberikan perhatian khusus dalam pengawasan atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

In order to improve performance, the Supervisory Board always encourages the management to properly maintain and manage IECFPO. To that reason, we always pay special attention to the supervision of Good Corporate Governance implementation in pursuant to applicable laws and regulations.



Rusman Heriawan
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of The Supervisory Board

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, perkenankan saya mewakili Dewan Pengawas menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan dan penasehatan atas pengelolaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ("BPDPKS") sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan BPDPKS Tahun 2016.

By sending our gratitude to the God Almighty, allow me to represent the Supervisory Board and deliver the report for the execution of the supervisory and advisory duties for the management of the Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil ("IECFPO") as contained in IECFPO Annual Report 2016.

Penilaian atas Kinerja Direksi Assessment of the Board of Directors' Performance

Selama tahun 2016, Dewan Pengawas BPDPKS secara proaktif melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi. Pengawasan dilakukan secara langsung termasuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi baik yang dilakukan melalui Rapat Dewan Pengawas dan Direksi maupun melalui rekomendasi tertulis. Tugas pengawasan tersebut dimaksudkan agar Direksi dan segenap manajemen BPDPKS terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanannya serta menjalankan pengelolaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata kelola yang baik.

Dewan pengawas menilai bahwa Direksi dan seluruh jajarannya telah bekerja sesuai dengan arahan strategi BPDPKS. Di tahun 2016 BPDPKS berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp12.321.204.623.969 meningkat 76,50% dari tahun 2015 sebesar Rp6.981.019.217.854. Pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit meningkat signifikan dari Rp6.902.212.717.058 di tahun 2015 menjadi Rp11.690.819.130.021 di tahun 2016 atau meningkat 69,38%. Disamping itu, BPDPKS juga berhasil membukukan Surplus setelah Setor ke Kas Negara sebesar Rp1.335.348.783.963 menurun 79% dari tahun 2015 sebesar Rp6.429.731.442.720. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyaluran dana melalui pembayaran selisih harga biodiesel yang meningkat signifikan di tahun 2016.

Dewan Pengawas menyampaikan apresiasi kepada Direksi yang telah berusaha secara maksimal menjalankan strategi BPDPKS dalam rangka menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Throughout 2016, IECFPO Supervisory Board proactively conducted supervision and provided inputs to the Board of Directors. The supervision was carried out directly, which include monitoring the follow-up on Supervisory Board's recommendation to the Board of Directors, both through the Supervisory Board and Board of Directors Meetings and through written recommendation. The supervisory duty is intended to encourage the Board of Directors and IECFPO management to always make improvements and development of their service quality according to the laws and regulations and good corporate governance.

The Supervisory Board considers that the Board of Directors and its lines have performed according to IECFPO strategic directions. In 2016, IECFPO managed to record income of Rp12,321,204,623,969 increased by 76.50% compared to 2015 with Rp6,981,019,217,854. Income from palm oil estate restitution increased significantly from Rp6,902,212,717,058 in 2015 to Rp11,690,819,130,021 in 2016, or increased by 69.38%. Additionally, IECFPO in 2016 managed to record a Surplus after Deposit to State Treasury amounting to Rp1,335,348,783,963, which was a decrease by 79% from 2015 of Rp6,429,731,442,720. Such decrease was mainly due to fund distribution through biodiesel price variance payment which significantly increased in 2016.

The Supervisory Board appreciates the Board of Directors for the optimum effort in running IECFPO strategies for facing various challenges.

Laporan Dewan Pengawas Message from the Supervisory Board

BPDPKS juga telah melakukan penyaluran dan pemanfaatan hasil pengelolaan dana untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja kelapa sawit, melakukan kegiatan promosi perkebunan, melakukan kegiatan peremajaan perkebunan, menyalurkan hasil pengelolaan dana untuk mendorong intensifitas pembangunan sarana dan prasarana perkebunan, pemenuhan hasil perkebunan kelapa sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi perkebunan kelapa sawit dan bahan bakar nabati (biofuel), melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait pemanfaatan BPDPKS, dan melakukan kajian untuk pengembangan usaha. Ke depannya agar penggunaan dana sawit harus dapat lebih berimbang dari segi manfaat yang diterima oleh pekebun, korporasi besar, pemerintah, dan masyarakat luas.

Dalam upaya meningkatkan kinerja, Dewan Pengawas selalu mendorong manajemen agar mampu menjaga dan mengelola BPDPKS dengan baik. Oleh karenanya, kami senantiasa memberikan perhatian khusus dalam pengawasan atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Pengawas juga mendukung upaya Direksi untuk terus mendorong penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko di BPDPKS.

IECFPO has also distributed and utilized the proceeds from the fund management for the research and development in the efforts of improving palm oil performance, promoting the estates, rejuvenating the plantations, distributing proceeds from the fund management to intensify the construction of plantation facilities and infrastructure, meeting food requirements with palm oil plantation yield, downstream processing palm oil estates and biofuel, socializing and giving guidelines for IECFPO utilization, and conducting business development studies. In the future, CPO fund must be used with more balance in terms of benefits for the sake of croppers, large corporates, the government, and the community at large.

In order to improve performance, the Supervisory Board always encourages the management to properly maintain and manage IECFPO. To that reason, we always pay special attention to the supervision of Good Corporate Governance implementation pursuant to applicable laws and regulations. The Supervisory Board also supports the Board of Directors' efforts in implementing internal control and risk management systems at IECFPO.

Keberadaan Organ Penunjang Dewan Pengawas The Presence of Supporting Organs for the Supervisory Board

Dewan Pengawas mendukung langkah Direksi melakukan penataan organisasi dan pengisian posisi-posisi penting dalam organisasi sebagai upaya membangun efektifitas proses bisnis. Sejalan dengan penerapan GCG, Dewan Pengawas telah membentuk Komite yang bertugas untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dengan membentuk Komite Audit. Seluruh Anggota Komite memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik dan melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing dengan baik serta memberikan dukungan yang positif terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Pengawas. Selama tahun 2016, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya melakukan review antara lain terhadap kegiatan Internal Audit, hasil audit dan tindak lanjut rekomendasi Internal Audit serta melakukan review atas hasil audit yang dilaksanakan oleh Auditor Independen.

Selain itu, Dewan Pengawas juga dibantu Sekretaris Dewan Pengawas yang memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Dewan Pengawas guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Dewan Pengawas. Selama tahun 2016, tidak terdapat perubahan susunan Dewan Pengawas sehingga komposisinya masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu:

The Supervisory Board supports Board of Directors' steps in managing and assuming key positions in the organization as the effort to increase the effectiveness of business processes. In line with GCG implementation, the Supervisory Board has established Audit Committee with the duties to support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities of the Supervisory Board. All Committee members have the proper integrity, competence, reputation, and ability to assume their respective roles and responsibilities while providing positive support for the implementation of the Supervisory Board's supervisory duty. Throughout 2016, the Audit Committee has performed its duties, among others reviewing Internal Audit activities, audit result follow-ups on Internal Audit's recommendations, and audit result performed by Independent Auditor.

The Supervisory Board is assisted by a Secretary which provides administrative and secretarial support to the Supervisory Board in streamlining the implementation of the Board's duties. There were no changes to the Supervisory Board composition in 2016, and therefore it remains the same with the previous year's composition:

Nama Pejabat Name of Official	Jabatan Position	Representative Representative	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Rusman Heriawan	Ketua Chairman	Kementerian Pertanian Ministry Of Agriculture	
Lukita Dinarsyah Tuwo	Anggota Member	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Coordinating Ministry for Economic Affairs	
Suahasil Nazara	Anggota Member	Kementerian Keuangan Ministry of Finance	
Arlinda	Anggota Member	Kementerian Perdagangan Ministry of Trade	
Rida Mulyana	Anggota Member	Kementerian ESDM Ministry of Energy and Mineral Resources	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/KMK.05/2015 Tanggal 26 Juni 2015
Panggah Susanto	Anggota Member	Kementerian Perindustrian Ministry of Trade	Minister of Finance Decree Number 714/KMK.05/2015 dated Friday, June 26, 2015
Gamal Nasir	Anggota Member	Kementerian Pertanian Ministry of Agriculture	
Loso Judijanto	Anggota Member	Kementerian Negara PPN/ Bappenas Ministry of National Development Planning/Bappenas	
Joko Supriyono	Anggota Member	GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) IPOA (Indonesian Palm Oil Association)	

Dengan komposisi yang ada saat ini, kami merasakan kerjasama dan soliditas Dewan Pengawas mampu terjalin dengan baik terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penasehatan kepada Direksi.

With the current composition, we are certain that the cooperation and solidity of the Supervisory Board is well established, particularly in the implementation of supervisory and advisory functions to the Board of Directors.

Ucapan Terima Kasih

Acknowledgment

Akhirnya, atas nama Dewan Pengawas, saya menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pengarah Direksi, dan seluruh pegawai atas pencapaian kinerja yang baik sepanjang tahun 2016. Kami harapkan semangat, dedikasi, dan kerjasama tim sepanjang tahun ini dapat lebih ditingkatkan untuk mengatasi tantangan yang lebih besar lagi pada tahun mendatang. Tidak lupa kami juga berterima kasih kepada egenap pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan para pemangku kepentingan atas perannya terhadap kesuksesan dan kontribusinya terhadap perkembangan bisnis BPDPKS secara keseluruhan. Hubungan yang harmonis ini akan menjadi dasar bagi BPDPKS untuk meraih performa lebih baik di masa yang akan datang. Kami yakin akan dapat berkembang dan mencapai kesuksesan bersama.

Eventually, on behalf of the Supervisory Board, I offer our appreciation to the Board of Directors and all employees for the outstanding performance throughout 2016. I hope the spirit, dedication, and collaboration between teams can be improved to face bigger challenges in more years to come. I would also express our gratitude to palm oil business owners and the stakeholders for the roles in achieving success and contributing to the development of IECFPO business as a whole. A harmonious relationship among us will become a ground for IECFPO to score better performance in the future. We believe that together, we can develop and achieve greatness.

Jakarta, ... 2016

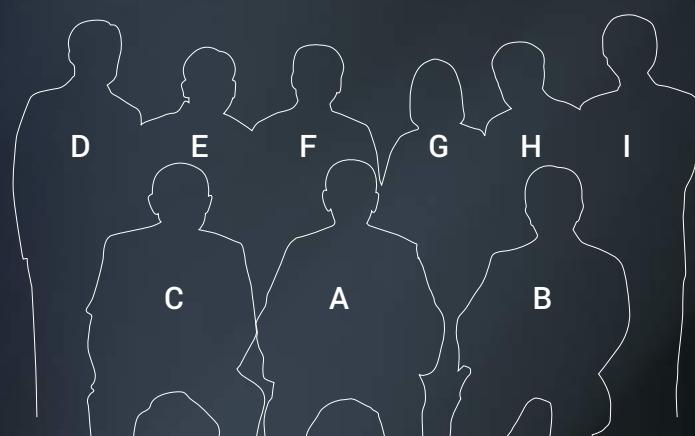
Atas Nama Dewan Pengawas On behalf of the Supervisory Board
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil

Rusman Heriawan
Ketua Dewan Pengawas Chairman of Supervisory Board

Profil Dewan Pengawas

Supervisory Board Profile





A | **Rusman Heriawan**
Ketua **Chairman** B | **Panggah Susanto**
Anggota **Member**

C | **Gamal Nasir**
Anggota **Member** D | **Joko Supriyono**
Anggota **Member**

E | **Loso Judijanto**
Anggota **Member** F | **Suahasil Nazara**
Anggota **Member**

G | **Arlinda**
Anggota **Member** H | **Lukita Dinarsyah Tuwo**
Anggota **Member**

I | **Rida Mulyana**
Anggota **Member**

Profil Dewan Pengawas Supervisory Board Profile



Rusman Heriawan

Ketua Chairman

Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor, 4 November 1951 (65 tahun), berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BPDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/ KMK.05/ 2015 Tanggal 26 Juni 2015.
Citizen of Indonesia, born in Bogor, November 04, 1951 (65 years old), domiciled at Jakarta. Serving as the Chairman of IECFPO Supervisory Board pursuant to Minister of Finance Decree Number 714/KMK.05/2015 dated June 26, 2015.

Memperoleh gelar Diploma Tiga di Akademi Statistik, (AIS) Jakarta (1974), Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (1983), meraih gelar Magister Perencanaan Wilayah dan Perdesaan (PWD) (2002) dan gelar Doktor di Institut Pertanian Bogor (2004).

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting, antara lain: Kepala Badan Pusat Statistik (2006 - 2011), Deputi Bidang Statistik Sosial (2004 - 2006), Direktur Statistik Perdagangan dan Jasa (2001-2004) dan Peneliti Utama, Balitbang Pertanian-Kementerian Pertanian, (2006 s.d. sekarang) *Platform Advisor on Indonesia Sustainable Palm Oil*, UNDP.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya.

He earned Diploma 3 from the Academy of Statistics Jakarta (1974), Bachelor of Economics, University of Indonesia (1983), Master's Degree in Regional and Rural Planning (2002), and Doctorate Degree from Bogor Agricultural University (2004).

Throughout his career, he has been assigned to serve key positions, such as: Head of Central Bureau of Statistics (2006-2011), Deputy of Social Statistics Department (2004-2006), Director of Trade and Service Statistics (2001-2004), and Main Researcher, Research and Development Agency - Ministry of Agriculture (2006-currently), Platform Advisor on Indonesia Sustainable Palm Oil, UNDP.

He has no affiliations with the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Lukita Dinarsyah Tuwo

Anggota Member

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 25 September 1961 (55 tahun), berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/KMK.05/2015 Tanggal 26 Juni 2015.
Citizen of Indonesia, born in Bandung, September 25, 1961 (55 years old), domiciled at Jakarta. Serving as the Member of IECFPO Supervisory Board pursuant to Minister of Finance Decree Number 714/KMK.05/2015 dated June 26, 2015.



Memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1980 - 1985), serta meraih gelar MA di bidang Ekonomi dari Vanderbilt University di Nashville, Tennessee, USA (1991 - 1992), gelar Ph.D di bidang Ekonomi dari University of Illinois, Urbana-Champaign, Illinois, USA (1994 - 1998).

Perjalanan karir profesional beliau diawali tahun 1986 hingga 1987 di PT Unilever Indonesia sebagai Management Trainee, Production Planner, Elida Gibbs Division. Selanjutnya bergabung di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 1987 - 1998 sebagai Staf Biro Perencanaan Makro & Studi Kuantitatif, dan diangkat sebagai Direktur Neraca Pembayaran dan Kerjasama Ekonomi Internasional (1998 - 2005). Sebagai Deputi Menteri PPN Bidang Pendanaan Pembangunan (2005 - Agustus 2010), dan Ketua Komite untuk Efektivitas Bantuan Luar Negeri (2008 - 2012). Selanjutnya pada 6 Januari 2010 - 5 Oktober 2014 diangkat sebagai Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI, serta sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Oktober - Desember 2014). Sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) tahun 2005 hingga Oktober 2012. Serta bergabung sebagai anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dari tahun 2000 - 2002 dan menjabat sebagai sekretaris dari tahun 2002 - 2006. Saat ini beliau juga menjabat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Desember 2014 - sekarang).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya.

He earned Bachelor's Degree in Industrial Engineering, Bandung Institute of Technology (1980-1985), Master's Degree (MA) in Economy from Vanderbilt University of Nashville, Tennessee, USA (1991-1992), and Doctorate Degree (Ph.D) in Economy, University of Illinois, Urbana-Champaign, Illinois, USA (1994-1998).

His professional career was initiated at PT Unilever Indonesia as a Management Trainee, Production Planner, Elida Gibbs Division (1986-1987). He further joined the National Development Planning Agency (Bappenas) as a Staff of Macro Planning and Quantitative Study Bureau (1987-1998) and was appointed as Director of Balance of Payment and International Economic Cooperation (1998-2005). He also served as Deputy Minister for National Development Planning, Department of Development Funding (2005-August 2010) and Head of Committee for Foreign Aid Effectiveness (2008-2012). Further, he was appointed as Vice Minister for National Development Planning (January 6, 2010-October 5, 2014) and as Special Staff of the Coordinating Minister for Economic Affairs at the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia (October-December 2014). As Vice President Commissioner of PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) 2005-October 2012). He joined as the member of Financial Sector Policy Committee (2000-2002) and served as the institution's secretary (2002-2006). He is currently serving as the Secretary for the Coordinating Ministry for Economic Affairs (December 2014-current).

He has no affiliations with the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Profil Dewan Pengawas Supervisory Board Profile



Suahasil Nazara
Anggota Member

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 23 November 1970 (46 tahun), berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/KMK.05/2015 Tanggal 26 Juni 2015.

Citizen of Indonesia, born in Jakarta, November 23, 1970 (46 years old), domiciled at Jakarta. Serving as the Member of IECFPO Supervisory Board pursuant to Minister of Finance Decree Number 714/KMK.05/2015 dated June 26, 2015.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia, Indonesia (1994), serta gelar *Master of Science* di Cornell University USA (1997) dan meraih gelar *Doctor of Philosophy* (PhD.) dari University of Illinois at Urbana Champaign USA (2003).

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting, antara lain: Menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan sejak Februari 2015 dan telah menjadi pejabat definitif pada 31 Oktober 2016. Pernah menjadi Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (PPIE), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2004 - 2005), Kepala Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2005 - 2008), Sekretaris Tim Review UU no. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (2006), Tim Ahli Desentralisasi Fiskal untuk Menteri Keuangan (2008 - 2011), Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi UI (2009 - 2013) sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah tahun 2009 sampai dengan sekarang. Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Kantor Wakil Presiden, Republik Indonesia (2011 - 2015) serta menjadi Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013 - 2014. Jabatan lain yang pernah didudukinya adalah Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2014 - 2015).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya.

He obtained Bachelor of Economy from the University of Indonesia (1994), Master of Science from the Cornell University, USA (1997), and Doctor of Philosophy (PhD) from the University of Illinois at Urbana Champaign USA (2003).

Throughout his career, he has been assigned to serve key positions, such as: He has been serving as the Acting Head of Fiscal Policy Department, Ministry of Finance (February 2015-current) and has become a definitive official on October 31, 2016. He also served as the Head of Postgraduate Department of Economics, Faculty of Economics, University of Indonesia (2004-2005), Head of Institute of Demography, Faculty of Economics, University of Indonesia (2005-2008), Secretary to The Review Team of Law No. 13 of 2003 concerning Employment (2006), Fiscal Decentralization Expert Team for the Minister of Finance (2008-2011), Head of Department of Economics, Faculty of Economics, University of Indonesia (2009-2013), as well as serving as Head of Supervisory Committee of the Regional Autonomy Implementation (2009-current). Coordinator of the Policy Work Group of the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction Secretariat, Office of the Vice President of the Republic of Indonesia (2011-2015) and Member of the National Economic Committee Board (2013-2014). Other position he served include Special Staff for the Coordinating Ministry of Economic Affairs (2014-2015).

He has no affiliations with the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Arlinda
Anggota Member

Warga Negara Indonesia, lahir di Palembang, 24 Maret 1963 (53 tahun, berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/KMK.05/2015 Tanggal 26 Juni 2015.
Citizen of Indonesia, born in Palembang, March 24, 1963 (53 years old), domiciled at Jakarta. Serving as the Member of IECFPO Supervisory Board pursuant to Minister of Finance Decree Number 714/KMK.05/2015 dated June 26, 2015.



Memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1985), gelar Master Degree in Economics di bidang Ekonomi dari University Of Colorado At Boulder, United State of America (USA) (1993).

Selama kurun waktu 1994 sampai dengan saat ini, beliau aktif mengikuti dan mewakili Indonesia di forum internasional, baik bilateral, regional maupun multilateral dan juga aktif mempromosikan produk-produk dan jasa Indonesia di mancanegara untuk meningkatkan ekspor non migas dan nation branding Indonesia. Beberapa jabatan strategis Kementerian Perdagangan yang pernah diemban antara lain: Atase Perdagangan - KBRI di Washington DC USA (2006 - 2009), Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan (2009 - 2011), Direktur Impor, Dit. Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (2012), Kepala Pusat Hubungan Masyarakat (2012 - 2013), Staf Ahli Bidang Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (2013 - 2015), Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa (2015 – 2016).

Beliau juga dipercaya untuk terlibat aktif di beberapa Tim Teknis dalam rangka peningkatan ekspor non migas Indonesia, yaitu:

- Anggota Tim Teknis Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Juli 2015 - September 2016);
- Ketua Tim Deregulasi Kebijakan Perdagangan (Agustus 2015 – Agustus 2017);
- Ketua Tim Percepatan Turunan Peraturan UU Perdagangan No. 7 Tahun 2004 (Januari 2016 - Agustus 2017).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya.

She earned Bachelor of Agriculture from Bogor Institute of Agriculture (1985), Master's Degree in Economics from the University of Colorado at Boulder, United States of America (1993).

Since 1994 until currently, she has been participating and representing Indonesia in international forums, either bilateral, regional, or multilateral, while actively promoting Indonesian products and services to foreign countries to increase Indonesia's non-oil and gas exports and nation branding. She has been serving several strategic positions at the Ministry of Trade, among others: Trade Attaché - Indonesian Embassy at the Washington, D.C., USA (2006-2009), Head of Center for Trade Policy Harmonization (2009-2011), Director of Import, Directorate of Import, Directorate General of Foreign Trade (2012), Head of Center for Public Relations (2012-2013), Expert Staff of Foreign Trade Policy and Development of Special Economic Zone (2013-2015), Expert Staff of Service Trade (2015-2016).

She is also entrusted with active participation in several Technical Teams to increase Indonesian non-oil and gas exports, including:

- Member of Technical Team of Batam Free Trade Region and Free Port (July 2015-September 2016);
- Chair of Trade Policy Deregulation Team (August 2015-August 2017);
- Chair of Trade Law No. 7 of 2014 Derivative Acceleration Team (January 2016-August 2017).

She has no affiliations with the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Profil Dewan Pengawas Supervisory Board Profile



Rida Mulyana
Anggota Member

Warga Negara Indonesia, lahir di Sumedang, 2 Mei 1963 (53 tahun), berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/ KMK.05/ 2015 Tanggal 26 Juni 2015.

Citizen of Indonesia, born in Sumedang, May 02, 1963 (53 years old), domiciled at Jakarta. Serving as the Member of IECFPO Supervisory Board pursuant to Minister of Finance Decree Number 714/KMK.05/2015 dated June 26, 2015.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Perminyakan dari Institut Teknologi Bandung (1988), serta gelar *Master of Science* di dari London University, Inggris (1992).

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting, diantaranya: Sekretaris Direktorat Jenderal Migas (2009), Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas", Badan Litbang ESDM (2009 - 2010), Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian ESDM (2010 - 2013), Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM (Februari 2013 - sekarang).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya.

He earned the Bachelor's Degree in Petroleum Engineering, Bandung Institute of Technology (1998) and Master of Science from London University, United Kingdom (1992).

Throughout his career, he has been assigned to serve key positions, such as: Secretary to the Directorate General of Oil and Gas (2009), Head of the Center for Oil and Gas Technology Research and Development "Lemigas", Energy and Mineral Resources Research and Development Department (2009-2010), Head of Planning and Cooperation Bureau, Ministry of Energy and Mineral Resources (2010-2013), Director General of New Energy, Renewable and Energy Conservation, Ministry of Energy and Mineral Resources (February 2013-current).

He has no affiliations with the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Panggah Susanto
Anggota Member

Warga Negara Indonesia, lahir di Temanggung, 19 Oktober 1958 (58 tahun), berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/ KMK.05/ 2015 Tanggal 26 Juni 2015. Citizen of Indonesia, born in Temanggung, October 19, 1958 (58 years old), domiciled at Jakarta. Serving as the Member of IECFPO Supervisory Board pursuant to Minister of Finance Decree Number 714/KMK.05/2015 dated June 26, 2015.



Meraih gelar Sarjana Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (1984), dan Magister Manajemen STEI IPWI (1997).

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting, antara lain: Direktur Industri Maritim dan Jasa Keteknikan (2005 - 2008), Direktur Industri Alat Transportasi Darat dan Kedirgantaraan (2008 - 2010), Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur (2010 - 2013), Plt Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (2014 - 2015), Direktur Jenderal Industri Agro (Juli 2013 - sekarang). Selain itu beliau juga mendapat penugasan khusus sebagai Komisaris PT Petrokimia Gresik (2016), Komisaris Utama PT Rekayasa Industri (2014 - 2016), Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur (2011 - 2014), Komisaris PT Dok & Perkapalan (1997 - 2011), Sekretaris Dewan Komisaris PT Petrokimia Gresik (1996 - 2003) dan Staf Dewan Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur (1994 - 1996). Selama kurun waktu 1994 sampai saat ini, beliau juga mendapat penugasan ke luar negeri untuk berpartisipasi dalam berbagai forum terkait perdagangan internasional serta melakukan berbagai kajian terkait teknologi proses pupuk.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya.

He earned Bachelor's Degree in Chemical Engineering, Bandung Institute of Technology (1984) and Master's Degree in Management, STIE IPWI (1997).

Throughout his career, he has been assigned to serve key positions, such as: Director of Maritime Industry and Engineering Services (2005-2008), Director of Land Transportation Modes Industry and Aviation (2008-2010), Director General of Manufacture Based Industries (2010-2013), Acting Director General of High-Technology Based Leading Industry (2014-2015), Director General of Agroindustry (July 2013-current). He also received special assignments as the Commissioner of PT Petrokimia Gresik (2016), President Commissioner of PT Rekayasa Industri (2014-2016), Commissioner of PT Pupuk Kalimantan Timur (2011-2014), Commissioner of PT Dok & Perkapalan (1997-2011), Secretary to the Board of Commissioners of PT Petrokimia Gresik (1996-2003), and Staff of the Board of Commissioners of PT Pupuk Kalimantan Timur (1994-1996). Since 1994 until currently, he has been receiving overseas assignments to participate in various international trade forums as well as reviews on fertilizer processing technology.

He has no affiliations with the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Profil Dewan Pengawas Supervisory Board Profile



Gamal Nasir
Anggota Member

Warga Negara Indonesia, lahir di Medan, 28 Juli 1956 (60 tahun), berdomisili di Bogor. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/ KMK.05/ 2015 Tanggal 26 Juni 2015.

Citizen of Indonesia, born in Medan, July 28, 1956 (60 years old), domiciled at Bogor. Serving as the Member of IECFPO Supervisory Board pursuant to Minister of Finance Decree Number 714/KMK.05/2015 dated June 26, 2015.

Meraih gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Pajajaran Bandung (1982), dan Magister Sains dari Universitas Pajajaran Bandung (1990).

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting, antara lain: Direktur Perbenihan, Ditjen. Tanaman Pangan (2004 - 2005), Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Ditjen. Perkebunan (2005 - 2010), Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perkebunan (PPNS), Ditjen. Perkebunan (2007 - 2010), Sekretaris I Perhimpunan Agronomi Indonesia (PERAGI) (2008 - sekarang), Sekretaris Jenderal Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo), Ditjen. Perkebunan (2008 - sekarang), Komisaris pada PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) (2008 - 2012). Selain menjabat sebagai Direktur Jenderal Perkebunan sejak 2010 - sekarang, beliau juga mendapat penugasan khusus dari Kementerian BUMN menjadi Komisaris Utama pada PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) sejak tahun 2012 - sekarang.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya.

He earned Bachelor's Degree in Agriculture from Padjadjaran University, Bandung (1982) and Master of Science from Padjadjaran University, Bandung (1990).

Throughout his career, he has been assigned to serve key positions, such as: Director of Seeds, Directorate General of Food Crop (2004-2005), Secretary to the Directorate General of Plantation, Directorate General of Plantation (2005-2010), Coordinator of Plantation Civil Servant Investigators (PPNS), Directorate General of Plantation (2007-2010), Secretary I to the Indonesian Agronomy Association (PERAGI) (2008-current), Secretary General to the Indonesian Plantation Farmers Association (Gapperindo), Directorate General of Plantation (2008-current), Commissioner of PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) (2008-2012). Apart from serving as Director General of Plantation since 2010-current, he also received special assignment from the Ministry of State-Owned Enterprises as the President Director of PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) since 2012 until currently.

He has no affiliations with the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Loso Judijanto
Anggota Member

Warga Negara Indonesia, Lahir di Magetan, 19 Januari 1971 (45 tahun), berdomisili di Bekasi. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/KMK.05/2015 Tanggal 26 Juni 2015.
Citizen of Indonesia, born in Magetan, January 19, 1971 (45 years old), domiciled at Bekasi. Serving as the Member of IECFPO Supervisory Board pursuant to Minister of Finance Decree Number 714/KMK.05/2015 dated June 26, 2015.



Meraih gelar Sarjana Sains dari Institut Pertanian Bogor (1994), dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia (1995) dan memperoleh gelar *Master of Statistics* The University of New South Wales, Sydney, Australia (1998).

Berbagai pengalaman profesional beliau sejak tahun 1995 - 2015 yaitu: Peneliti Kebijakan Publik di *Center for Policy and Implementation Studies* (Oktober 1995 - Juni 1996), Sekretaris Dewan Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda (Januari 1999 - Desember 2003), *Partner and Managing Partner - SDP Corporate Governance Specialists* (Januari 2001 - November 2004), Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika (November 2004 - Maret 2007), Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Desember 2007 - Mei 2009), Tenaga Ahli Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Mei 2009 - Februari 2011), Komisaris Independen PT Bank Bukopin Tbk (Maret 2009 - Maret 2010) dan Ketua Komite *Risk Management Oversight* PT Bank Bukopin Tbk, Komisaris PT Telkomsel (Juli 2007 - Mei 2012), Komite Audit PT Indonesia Infrastructure Finance (2012 - 2014), PT Berau Coal Energy Tbk (2010 - 2014), PT Trimegah Securities Tbk (2010 - 2014), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2007 - 2009) dan Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Oktober 2014 - Agustus 2015), Staf Khusus Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Agustus 2015 – Agustus 2016), dan Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (Agustus 2016 - sekarang).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya.

He earned Bachelor of Science from Bogor Agricultural University (1994), Master of Management from the University of Indonesia (1995), as well as Master of Statistics from the University of New South Wales, Sydney, Australia (1998).

The followings are his professional resume throughout 1995-2015: Public Policy Researcher at the Center for Policy and Implementation Studies (October 1995-June 1996), Secretary to the Board of Commissioners of PT Pupuk Iskandar Muda (January 1999-December 2003), Partner and Managing Partner - SDP Corporate Governance Specialist (January 2001-November 2004), Special Staff of the Minister of Communication and Informatics (November 2004-March 2007), Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (December 2007-May 2009), Expert Staff of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (May 2009-February 2011), Independent Commissioner of PT Bank Bukopin Tbk (March 2009-March 2010), Chairman of Risk Management Oversight Committee of PT Bank Bukopin Tbk, Commissioner of PT Telkomsel (July 2007-May 2012), Member of Audit Committee of PT Indonesia Infrastructure Finance (2012-2014), PT Berau Coal Energy Tbk (2010-2014), PT Trimegah Securities Tbk (2010-2014), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2007-2009), and Special Staff of the Coordinating Minister for Economic Affairs (October 2014-August 2015), Special Staff for the State Minister for National Development Planning/Head of National Development Planning Agency (August 2015-August 2016), and special Staff for the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency (August 2016-current).

He has no affiliations with the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Profil Dewan Pengawas Supervisory Board Profile



Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1986) dan Magister Manajemen di STIE IPWI (1996).

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting, antara lain: Asisten Afdeling di PT Perkebunan II, Medan (1986 - 1994), Tenaga Instruktur di PT Wahana Kendali Mutu, Jakarta (1986 - 1994). Selama kurun waktu tahun 1995 sampai sekarang menduduki beberapa jabatan di PT Astra Agro Lestari Tbk sebagai *Departemen Head-Human Resources* (1995 - 1999), *Division Head - Human Resources* (2000 - 2002), *Area Director - Riau Region* (2002 - 2005), *Deputy Director - Operation* (2005 - 2007), *Director - Human Resources* (2007 - 2009), *Director - Env & Social Responsibility* (2009 - 2011), *Director in charge of Sustainability and Public Relation*, *President Director of Sumatera Operation* (2011 - 2015), *Director in charge of Sustainability and Public Relation*, *President Commisioner of Sumatera Operation* (2015 - sekarang).

Selain itu beliau juga menduduki berbagai jabatan di organisasi profesi antara lain: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Riau sebagai Ketua (2003 -2006), Anggota Komite GAPKI Pusat (2008 -2009), Sekretaris Jenderal GAPKI Pusat (2009 -2015), Ketua Umum GAPKI Pusat (2015 - sekarang), Ketua Bidang Infrastruktur dan Lahan di Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) (2012 - 2015).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya.

Joko Supriyono
Anggota Member

Warga Negara Indonesia, lahir di Nganjuk, 20 Mei 1962 (54 tahun), berdomisili di Bekasi. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/ KMK.05/ 2015 Tanggal 26 Juni 2015.

Citizen of Indonesia, born in Nganjuk, May 20, 1962 (54 years old), domiciled at Bekasi. Serving as the Member of IECFPO Supervisory Board pursuant to Minister of Finance Decree Number 714/KMK.05/2015 dated June 26, 2015.

Earned Bachelor's Degree from the Faculty of Agriculture, Gadjah Mada University, Yogyakarta (1986) and Master of Management from STIE IPWI (1996).

Throughout his career, he has been assigned to serve key positions, such as: Division Assistant at PT Perkebunan II, Medan (1986-1994), Instructor at PT Wahana Kendali Mutu, Jakarta (1986-1994). Since 1995 until currently he has been serving various positions at PT Astra Agro Lestari Tbk as Department head - Human Resources (1995-1999), Division Head - Human resources (2000-2002), Area Director - Riau Region (2002-2005), Deputy Director - Operation (2005-2007), Director - Human Resources (2007-2009), Director - Env. and Social Responsibility (2009-2011), Director in Charge of Sustainability and Public Relation, President Director of Sumatra Operation (2011-2015), Director in Charge of Sustainability and Public Relation, President Commissioner of Sumatra Operation (2015-current).

He also serves the positions in professional organizations as follows: Chairman of the Indonesian Palm Oil Association (IPOA) Riau Branch (2003-2006), Member of the Indonesian Palm Oil Association (IPOA) Central Committee (2008-2009), Secretary General to the Indonesian Palm Oil Association (IPOA) Central (2009-2015), General Chairman of the Indonesian Palm Oil Association (IPOA) Central (2015-current), Chairman of Infrastructure and Land, Indonesian Palm Oil Board (IPOB) (2012-2015).

He has no affiliations with the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Analisis Pembahasan Kinerja
Operasional dan Keuangan
Operational and Financial Performance
Discussion Analysis

Tata Kelola BPDPKS
IECFPO Governance

Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
IECFPO Social Responsibility

Laporan Keuangan *Audited*
Audited Financial Statements



Laporan Direksi Board of Directors Report

**Sampai dengan 31 Desember 2016,
BPDPKS berhasil menghimpun dana
sebesar Rp11.563.088.494.773 dengan
volume sebanyak 30.913.154 ton.**

**Jumlah penghimpunan dana ini
meningkat dibandingkan tahun
2015 sebesar
Rp6.902.212.717.059.**

**Sampai dengan 31 Desember 2016,
BPDPKS berhasil menghimpun dana
sebesar Rp11.563.088.494.773
dengan volume sebanyak
30.913.154 ton. Jumlah
penghimpunan dana ini meningkat
dibandingkan tahun 2015 sebesar
Rp6.902.212.717.059.**

Bayu Krisnamurthi
Direktur Utama
President Director



Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan ini kami atas nama Direksi menyampaikan laporan pencapaian kinerja BPDPKS di tahun 2016. Memasuki tahun kedua perjalannya, BPDPKS Sawit telah melakukan sejumlah kegiatan strategis sesuai dengan tugas yang diamanahkan yaitu menghimpun dan mengembangkan sumber Dana Perkebunan Kelapa Sawit secara berkelanjutan yang berasal dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan dana lembaga pembiayaan. Disamping itu, BPDP Sawit juga melakukan pengelolaan dana melalui investasi jangka panjang dan/atau jangka pendek dengan menjaga prinsip kehati-hatian.

Sampai dengan 31 Desember 2016, BPDPKS berhasil menghimpun dana sebesar Rp11.563.088.494.773 dengan volume sebanyak 30.913.154 ton. Jumlah penghimpunan dana ini meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp6.902.212.717.059. Sumber penghimpunan dana berasal dari Pelaku Usaha perkebunan sawit dan turunannya, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan/atau dana lain yang sah. Selanjutnya dalam kurun waktu yang sama, BPDPKS juga melakukan penyaluran dan pemanfaatan hasil pengelolaan dana untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja kelapa sawit, melakukan kegiatan promosi perkebunan, melakukan kegiatan peremajaan perkebunan, menyalurkan hasil pengelolaan dana untuk mendorong intensifitas pembangunan sarana dan prasarana perkebunan, pemenuhan hasil perkebunan kelapa sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi perkebunan kelapa sawit dan bahan bakar nabati (biofuel), melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait pemanfaatan DPKS, dan melakukan kajian untuk pengembangan usaha.

Tahun 2016, BPDPKS mencatat jumlah Aset sebesar Rp5.772.734.755.548 menurun 10,46% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp6.447.069.468.161. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada aset lancar yaitu investasi jangka pendek yang jatuh tempo pada tahun 2016.

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan ini kami atas nama Direksi menyampaikan laporan pencapaian kinerja BPDPKS di tahun 2016. Memasuki tahun kedua perjalannya, BPDPKS Sawit telah melakukan sejumlah kegiatan strategis sesuai dengan tugas yang diamanahkan yaitu menghimpun dan mengembangkan sumber Dana Perkebunan Kelapa Sawit secara berkelanjutan yang berasal dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan dana lembaga pembiayaan. Disamping itu, BPDP Sawit juga melakukan pengelolaan dana melalui investasi jangka panjang dan/atau jangka pendek dengan menjaga prinsip kehati-hatian.

Sampai dengan 31 Desember 2016, BPDPKS berhasil menghimpun dana sebesar Rp11.563.088.494.773 dengan volume sebanyak 30.913.154 ton. Jumlah penghimpunan dana ini meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp6.902.212.717.059. Sumber penghimpunan dana berasal dari Pelaku Usaha perkebunan sawit dan turunannya, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan/atau dana lain yang sah. Selanjutnya dalam kurun waktu yang sama, BPDPKS juga melakukan penyaluran dan pemanfaatan hasil pengelolaan dana untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja kelapa sawit, melakukan kegiatan promosi perkebunan, melakukan kegiatan peremajaan perkebunan, menyalurkan hasil pengelolaan dana untuk mendorong intensifitas pembangunan sarana dan prasarana perkebunan, pemenuhan hasil perkebunan kelapa sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi perkebunan kelapa sawit dan bahan bakar nabati (biofuel), melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait pemanfaatan DPKS, dan melakukan kajian untuk pengembangan usaha.

Tahun 2016, BPDPKS mencatat jumlah Aset sebesar Rp5.772.734.755.548 menurun 10,46% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp6.447.069.468.161. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada aset lancar yaitu investasi jangka pendek yang jatuh tempo pada tahun 2016.

Laporan Direksi Board of Directors Report

Adapun kewajiban BPDPKS mengalami penurunan 38,39% yaitu sebesar Rp10.682.555.364 dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp17.339.031.941. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan dari seluruh komponen liabilitas. Utang pajak di tahun 2016 hanya terdiri dari utang pajak PPh pasal 21 sebesar Rp10.645.000. Jumlah beban yang masih harus dibayar terutama terdiri dari untuk jasa surveyor, yaitu masing-masing adalah Rp10.641.240.320 pada tahun 2016 dan sebesar Rp10.615.763.400 pada tahun 2015.

Jumlah ekuitas BPDPKS pada tahun 2016 adalah sebesar Rp5.762.052.200.184 menurun 10,38% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp6.429.730.436.220. Hal ini disebabkan oleh penurunan surplus tahun berjalan yaitu dari Rp6.429.730.436.220 di tahun 2015 menjadi Rp1.335.348.783.963 di tahun 2016. Di tahun 2016 berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp12.321.204.623.969 meningkat 76,50% dari tahun 2015 sebesar Rp6.981.019.217.854. Pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit meningkat signifikan dari Rp6.902.212.717.058 di tahun 2015 menjadi Rp11.690.819.130.021 di tahun 2016 atau meningkat 69,38% yang berasal dari Pendapatan operasional jasa layanan yang terdiri dari Pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit dan Pendapatan atas pengelolaan dana.

Dalam upaya meningkatkan kinerja, segenap jajaran manajemen BPDPKS senantiasa berupaya menerapkan Tata Kelola Perubahan (*Good Corporate Governance*) pada setiap lini bisnisnya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG guna mempertahankan eksistensi BPDPKS dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha di masa-masa mendatang. BPDPKS juga telah menyusun kebijakan-kebijakan operasional dalam rangka mendukung terlaksananya penerapan GCG diantaranya Kebijakan Teknologi Informasi dan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa serta membentuk Komite Audit dalam rangka membantu pengawasan Dewan Pengawas BPDPKS.

BPDPKS menyadari bahwa kegiatan bisnis yang dijalankan akan menghadapi faktor internal dan eksternal yang membuat ketidakpastian, BPDPKS berkomitmen akan senantiasa mengelola risiko secara konsisten sesuai dengan standar penerapan manajemen risiko yang baik sehingga dapat mencapai target kinerja secara optimal sesuai yang telah ditetapkan serta melakukan pengembangan kebijakan dan prosedur kerja sebagai langkah awal menciptakan tata kerja yang efektif dan taat regulasi.

Selain itu juga telah dilakukan pengisian posisi-posisi penting dalam organisasi sebagai upaya membangun efektifitas proses bisnis. Seiring dengan hal tersebut, Direksi juga terus melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan, penyempurnaan kebijakan dan proses bisnis serta penegakan budaya yang sesuai dengan visi BPDPKS.

Adapun kewajiban BPDPKS mengalami penurunan 38,39% yaitu sebesar Rp10.682.555.364 dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp17.339.031.941. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan dari seluruh komponen liabilitas. Utang pajak di tahun 2016 hanya terdiri dari utang pajak PPh pasal 21 sebesar Rp10.645.000. Jumlah beban yang masih harus dibayar terutama terdiri dari untuk jasa surveyor, yaitu masing-masing adalah Rp10.641.240.320 pada tahun 2016 dan sebesar Rp10.615.763.400 pada tahun 2015.

Jumlah ekuitas BPDPKS pada tahun 2016 adalah sebesar Rp5.762.052.200.184 menurun 10,38% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp6.429.730.436.220. Hal ini disebabkan oleh penurunan surplus tahun berjalan yaitu dari Rp6.429.730.436.220 di tahun 2015 menjadi Rp1.335.348.783.963 di tahun 2016. Di tahun 2016 berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp12.321.204.623.969 meningkat 76,50% dari tahun 2015 sebesar Rp6.981.019.217.854. Pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit meningkat signifikan dari Rp6.902.212.717.058 di tahun 2015 menjadi Rp11.690.819.130.021 di tahun 2016 atau meningkat 69,38% yang berasal dari Pendapatan operasional jasa layanan yang terdiri dari Pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit dan Pendapatan atas pengelolaan dana.

Dalam upaya meningkatkan kinerja, segenap jajaran manajemen BPDPKS senantiasa berupaya menerapkan Tata Kelola Perubahan (*Good Corporate Governance*) pada setiap lini bisnisnya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG guna mempertahankan eksistensi BPDPKS dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha di masa-masa mendatang. BPDPKS juga telah menyusun kebijakan-kebijakan operasional dalam rangka mendukung terlaksananya penerapan GCG diantaranya Kebijakan Teknologi Informasi dan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa serta membentuk Komite Audit dalam rangka membantu pengawasan Dewan Pengawas BPDPKS.

BPDPKS menyadari bahwa kegiatan bisnis yang dijalankan akan menghadapi faktor internal dan eksternal yang membuat ketidakpastian, BPDPKS berkomitmen akan senantiasa mengelola risiko secara konsisten sesuai dengan standar penerapan manajemen risiko yang baik sehingga dapat mencapai target kinerja secara optimal sesuai yang telah ditetapkan serta melakukan pengembangan kebijakan dan prosedur kerja sebagai langkah awal menciptakan tata kerja yang efektif dan taat regulasi.

Selain itu juga telah dilakukan pengisian posisi-posisi penting dalam organisasi sebagai upaya membangun efektivitas proses bisnis. Seiring dengan hal tersebut, Direksi juga terus melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan, penyempurnaan kebijakan dan proses bisnis serta penegakan budaya yang sesuai dengan visi BPDPKS.

Selama tahun 2016, Jumlah anggota Direksi mengalami perubahan yaitu dari 6 (enam) orang menjadi 4 orang, komposisi Direksi sebagai berikut:

1. Direktur Utama President Director

Bayu Krisnamurthi

2. Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Catur Ariyanto Widodo

3. Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana
Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana

Agustinus Antonius

4. Direktur Penghimpunan Dana
Direktur Penghimpunan Dana

Herdrajat Natawidjaja

Adapun posisi Direktur Penyaluran Dana dan Kemitraan, sampai dengan 31 Desember 2016 masih dijabat sementara oleh pejabat pelaksana yang ditunjuk. Kami mengucapkan selamat bergabung kepada jajaran anggota Direksi baru dan mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Sdr. Dadan Kusdiana, Sdr. R.C. Eko Santoso Budianto, Sdr.Witjaksana Darmosarkorodan dan Sdri. Yuniar Yanuar Rasyid atas sumbangsihnya yang sangat berharga selama bertugas, Soliditas yang terus dijaga tercermin dalam peran aktif setiap Anggota Direksi dalam memberikan fungsi pengelolaan perusahaan sehingga kinerja BPDPKS menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Selama tahun 2016, Jumlah anggota Direksi mengalami perubahan yaitu dari 6 (enam) orang menjadi 4 orang, komposisi Direksi sebagai berikut:

Adapun posisi Direktur Penyaluran Dana dan Kemitraan, sampai dengan 31 Desember 2016 masih dijabat sementara oleh pejabat pelaksana yang ditunjuk. Kami mengucapkan selamat bergabung kepada jajaran anggota Direksi baru dan mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Sdr. Dadan Kusdiana, Sdr. R.C. Eko Santoso Budianto, Sdr.Witjaksana Darmosarkorodan dan Sdri. Yuniar Yanuar Rasyid atas sumbangsihnya yang sangat berharga selama bertugas, Soliditas yang terus dijaga tercermin dalam peran aktif setiap Anggota Direksi dalam memberikan fungsi pengelolaan perusahaan sehingga kinerja BPDPKS menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Apresiasi

Apresiasi

Atas nama jajaran Direksi, saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pegawai dan dengan dukungan segenap jajaran manajemen yang telah menunjukkan dedikasi dan semangat kerjanya sehingga dapat memberikan karya yang baik sepanjang tahun 2016. Tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pengarah, Dewan Pengawas, dan Pelaku Usaha atas kepercayaan, kontribusi, kerjasama dan dukungan yang telah diberikan. Kami yakin bahwa dengan kemampuan, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas, disertai semangat yang kuat, BPDPKS dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada secara optimal sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh stakeholders serta berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional melalui pengembangan potensi kelapa sawit di Indonesia.

Atas nama jajaran Direksi, saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pegawai dan dengan dukungan segenap jajaran manajemen yang telah menunjukkan dedikasi dan semangat kerjanya sehingga dapat memberikan karya yang baik sepanjang tahun 2016. Tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pengarah, Dewan Pengawas, dan Pelaku Usaha atas kepercayaan, kontribusi, kerjasama dan dukungan yang telah diberikan. Kami yakin bahwa dengan kemampuan, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas, disertai semangat yang kuat, BPDPKS dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada secara optimal sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh stakeholders serta berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional melalui pengembangan potensi kelapa sawit di Indonesia.

Jakarta, ... 2016

Atas Nama Direksi On behalf of the Board of Directors

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil

Bayu Krisnamurthi
Direktur Utama President Director

Profil Direksi

Board of Directors Profile



Agustinus Antonius
Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana
Director of Planning and Fund Management

Bayu Krisnamurthi
Direktur Utama
President Director



Analisis Pembahasan Kinerja
Operasional dan Keuangan
Operational and Financial Performance
Discussion Analysis

Tata Kelola BPDPKS
IECFPO Governance

Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
IECFPO Social Responsibility

Laporan Keuangan Audited
Audited Financial Statements



Catur Ariyanto Widodo

Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Director of Finance, General, Compliance and Risk Management

Hendrajat Natawidjaja

Direktur Penghimpunan Dana
Director of Fund Raising

Profil Direksi Board of Directors Profile



Bayu Krisnamurthi

Direktur Utama President Director

Warga Negara Indonesia, lahir Lahir di Manado, 18 Oktober 1964 (52 tahun), berdomisili di Bogor. Menjabat sebagai Direktur Utama BPDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 754/ KMK.05/2015 Tanggal 13 Juli 2015.

Warga Negara Indonesia, lahir Lahir di Manado, Citizen of Indonesia, born in Manado, October 18, 1964 (52 years old), domiciled at Bogor. Serving as the President Director of IECFPO pursuant to Minister of Finance Decree Number 754/KMK.05/2015 dated July 13, 2015.

Meraih gelar Sarjana Agribisnis, Institut Pertanian Bogor (1987), Magister Sains Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor (1991), Doktor Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor (1998).

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting, antara lain: Staf Ahli Menteri untuk Penanggulangan Kemiskinan/Pelaksana Tugas Deputi Menteri Koordinator, Bidang Pertanian dan Kelautan, Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia (2005 - 2008), Koordinator Perekonomian Republik Indonesia (2008 - 2010), Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan (2007- 2009), Wakil Menteri Pertanian, Republik Indonesia (2009 -2011), Wakil Menteri Perdagangan, Republik Indonesia (2011-2014), Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) (2011 - sekarang).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya.

He has earned the Bachelor of Agribusiness, Bogor Agricultural University (1987), Master of Science in Agricultural Economics, Bogor Agricultural University (1991), and Doctorate Degree in Agricultural Economics, Bogor Agricultural University (1998).

Throughout his career, he has been assigned to serve key positions, such as: Minister Expert Staff for Poverty Alleviation/Acting Deputy Coordinating Minister, Agriculture and Marine Department, Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia (2005-2008); Economic Coordinator of the Republic of Indonesia (2008-2010), Deputy Coordinating Minister, Agriculture and Marine Department (2007-2009), Vice Minister of Agriculture, Republic of Indonesia (2009-2011), Vice Minister of Trade, Republic of Indonesia (2011-2014), General Chairman of the Indonesian Society of Agricultural Economics (Perhepi) (2011-current).

He has no affiliations with the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Agustinus Antonius

Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana
Director of Planning and Fund Management

Warga Negara Indonesia, lahir di Palembang, 29 Agustus 1967 (49 tahun), berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Direktur Kemitraan BPDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 754/KMK.05/ 2015 Tanggal 13 Juli 2015. Citizen of Indonesia, born in Palembang, August 29, 1967 (49 years old), domiciled at Jakarta. Serving as IECFPO Director of Partnership pursuant to Minister of Finance Decree Number 754/KMK.05/2015 dated July 13, 2015.



Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Pertanian (Bidang Konsentrasi Ilmu Tanah), Universitas Jambi, (1990) dan meraih gelar Magister Manajemen (Bidang konsentrasi Keuangan dan Agribisnis), Universitas Gadjah Mada (1992).

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting, antara lain: Credit Department Head - Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (dahulu Bank Sumitomo Niaga), *Risk Management* - Kepala Divisi - Senior Manager - Bank Commonwealth (1997 - 1999), Unit *Risk Management* - *Credit Officer* - Senior Manager - Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1999 - 2000), Unit *Risk Management* - Senior *Credit Officer* - Assistant Vice President - Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2000 - 2002), Staff Senior - Vice President - Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Mei 2002 - Oktober 2003), Kepala Divisi - Vice President - Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Oktober 2003 - Februari 2004). Berpengalaman dalam bidang perkelapa sawitan sebagai direksi di berbagai perusahaan, dan terakhir sebagai Direktur Utama PT Teguhkarsa Wanalestari (Perkebunan Kelapa Sawit), (2013 - Juli 2014).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya.

He earned Bachelor's Degree from the Faculty of Agriculture (Majoring in Soil Science), Jambi University, (1990), and Master of Management (Majoring in Finance and Agribusiness) Gadjah Mada University, (1992).

Throughout his career, he has been assigned to serve key positions, such as: Credit Department Head - Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (previously Bank Sumitomo Niaga), Risk Management - Division Head - Senior Manager - Commonwealth Bank, (1997-1999), Risk Management Unit - Credit Officer - Senior Manager - Indonesian Bank Restructuring Agency, (1999-2000), Risk Management Unit - Senior Credit Officer - Assistant Vice President - Indonesian Bank Restructuring Agency, (2000-2002), Senior Staff - Vice President - Indonesian Bank Restructuring Agency, (May 2002-October 2003), Division Head - Vice President - Indonesian Bank Restructuring Agency, (October 2003-February 2004). He has experiences in palm oil industry as a member of the Board of Directors in several companies, lastly as President Director of PT Teguhkarsa Wanalestari (Palm Oil Plantation), (2013-July 2014).

He has no affiliations with the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Profil Direksi Board of Directors Profile



Catur Ariyanto Widodo

Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan
Manajemen Risiko Director of Finance, General,
Compliance and Risk Management

Warga Negara Indonesia, lahir di Ungaran, Jawa Tengah,
22 Februari 1971 (45 tahun), berdomisili di Jakarta. Menjabat
sebagai Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan
Manajemen Risiko BPDPKS berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 372/KMK.01/UP.11/2016

An Indonesian citizen, born in Ungaran, Central Java on
February 22, 1971 (45 years old), domiciled at Jakarta. Serving
as Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk
Management Directorate of IECFPO based on Decree of the
Minister of Finance Number 372/KMK.01/UP.11/2016 dated
May 20, 2016.

Meraih gelar Diploma Tiga di Sekolah Tinggi Akuntansi
(STAN) (1993), Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia
(1999).

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki
berbagai jabatan penting di Ditjen Perbendaharaan, yaitu
Kepala Seksi Pembinaan Akuntansi Instansi III, Kepala
Seksi Analisis Laporan Keuangan, Kabid Pembinaan
Perbendaharaan, Kasubdit Pembinaan Kinerja BLU,
Kasubdit PPK BLU II, Kabag Umum Kanwil DJPB Prov.
Sulbar dan jabatan terakhir sebagai Kakanwil DJPB Prov.
Sulbar sebelum diangkat sebagai Direktur Keuangan,
Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPDPKS.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi lainnya.

He earned Diploma 3 Degree from the State College of
Accountancy (STAN) (1993), Bachelor of Economy from
the University of Indonesia (1999).

Throughout his career, he has been assigned to serve
key positions at the Directorate General of Treasury, i.e.
Head of Institutional Accounting Development Section
III, Head of Financial Reporting Analysis Section, Head
of Treasury Development Department, Head of Public
Service Agency Performance Development Sub-
Directorate, Head of Commitment-Making Official Public
Service Agency II Sub-Directorate, Head of General Affairs
Development of Directorate General of Treasury Regional
Office West Sulawesi, and lastly serving as Head of
Directorate General of Treasury Regional Office West
Sulawesi prior to his appointment as the Director of
Finance, General Affairs, Compliance, and Risk
Management Directorate of IECFPO.

He has no affiliations with the other members of the
Supervisory Board and the Board of Directors.

Herdrajat Natawidjaja
Direktur Penghimpunan Dana
Director of Fund Raising

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 28 Februari 1957 (59 tahun), berdomisili di Tangerang. Menjabat sebagai Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor/KMK..../ 2016 Tanggal 2016.

Citizen of Indonesia, born in Bandung, February 28, 1957 (59 years old), domiciled at Tangerang. Serving as the IECFPO Director of Fund Raising pursuant to Minister of Finance Decree Number/KMK..../ 2016 dated, 2016.



Meraih gelar Sarjana Jurusan Proteksi Tanaman Universitas Mulawarman Samarinda (1982), gelar S2 Jurusan Nematology University of Gent Belgium, Belgia (1994) dan gelar Doctor dari Jurusan Plant Pathology (Major) Entomology, Dev Communication (Minor) Univ. Philippines Los Banos Philippina (2003).

Selama kurun waktu 2007 sampai saat ini, beliau juga mendapat penugasan ke luar negeri baik sebagai anggota, ketua maupun sebagai pembicara untuk menghadiri berbagai forum kerjasama bilateral antar berbagai negara. Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting, diantaranya Penguji Luar Komisi Kandidat Doktor (S3) pada Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB), sejak tahun 2007, Ketua Tim Penilai ISPO dan Sekretaris Komisi ISPO.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya.

He earned Bachelor's Degree in Plant Protection from the University of Mulawarman Samarinda (1982), Master's Degree in Nematology from the University of Gent Belgium (1994), and Doctorate Degree from Plant Pathology (Major) Entomology, Dev. Communication (Minor) from the University of the Philippines Los Banos (2003).

From 2007 until currently, he has also been receiving assignments abroad, either as a member, chairman, or speaker in bilateral cooperation forum in various countries. Throughout his career, he has been assigned to serve key positions, such as External Examiner for Doctorate Candidate Commission at the Postgraduate School of Bogor Institute of Agriculture, since 2007, Chairman of ISPO Assessment Team and Secretary to ISPO Committee.

He has no affiliations with the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Profil BPDPKS

IECFPO Profile

Analisis Pembahasan Kinerja
Operasional dan Keuangan
Operational and Financial Performance
Discussion Analysis

Tata Kelola BPDPKS
IECFPO Governance

Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
IECFPO Social Responsibility

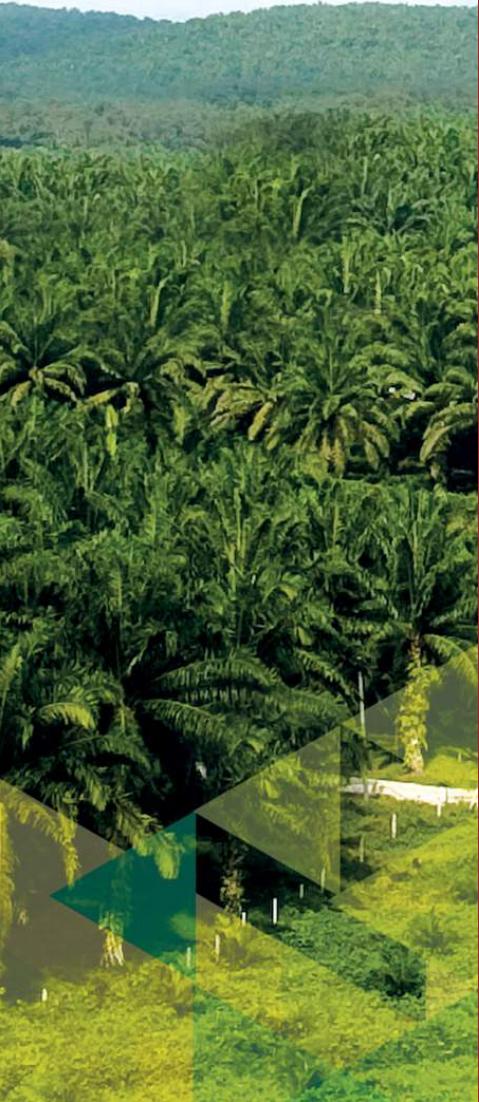
Laporan Keuangan Audited
Audited Financial Statements



Identitas BPDPKS

IECFPO Profile

Nama Name	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil
Nama Panggilan Perusahaan Company Call Name	BPDPKS IECFPO
Kegiatan Usaha Line of Business	Menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana yang bertujuan untuk mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Penghimpunan dana bersumber dari Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Dana Lembaga Pembiayaan, Dana Masyarakat dan Dana lain yang sah. Dana yang dihimpun meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit dan/atau turunannya dan iuran. Collecting, administering, managing, storing, and distributing funds with the aim to promote sustainable oil palm plantation development. The fund raised is sourced from Palm Oil Business Owners, Financing Institution Funds, Community Funds, and other legal Funds. The collected funds cover restitution of the export of oil palm plantation commodity and/or its derivatives and contributions.
Kepemilikan Ownership	Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia
Tanggal Pendirian Date of Establishment	10 Juni 2015 June 10, 2015
Jumlah Pegawai Number of Employees	85 orang 85 staff
Alamat Kantor Office Address	Graha Mandiri Lt.5 Jl. Imam Bonjol No.61, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310
Website	www.bpdp.or.id
Info Kontak Contact Info	Telp : (021) 123-4567890, (021) 123-0987654 Email : info@bpdp.or.id Jam Operasional Operating Hour: Senin - Jumat 09.00 - 18.00 WIB Monday-Friday at 09:00-18:00 Western Indonesia Time



Riwayat Singkat BPDPKS

IECFPO at A Glance

**“Pengoptimalan Pembangunan Industri Sawit
untuk Energi Terbarukan
dan Mutu Perkebunan Petani Plasma”**



Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana perkebunan kelapa sawit.

The Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil (IECFPO) is a work unit under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia formed as a Public Service Agency which collects, administers, manages, reserves, and distributes CPO fund.

Pada tanggal 10 Juni 2015, BPDPKS ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan BLU secara penuh melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Penetapan BPDPKS pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh.

On June 10, 2015, IECFPO was established as a governmental institution which fully applies the Public Service Agency financial pattern pursuant to Decree of the Minister of Finance Number 113/PMK.01/2015 concerning the Determination of IECFPO at the Ministry of Finance as a Governmental Institution which Fully Applies the Public Service Agency Financial Management.



Landasan hukum pendirian BPDPKS adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perkebunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan ini telah dirubah dengan PP 74 tahun 2012;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penghimpunan Dana dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

The legal bases for IECFPO establishment are as follows:

1. Law Number 17 of 2003 dated April 05, 2003 concerning State Finance;
2. Law Number 1 of 2004 dated January 14, 2004 concerning State Treasury;
3. Law Number 39 of 2014 dated October 17, 2014 concerning Plantations;
4. Government Regulation Number 23 of 2005 dated June 13, 2005 concerning Financial Management of Public Service Agencies. This Regulation has been amended by the Government Regulation Number 74 of 2012;
5. Government Regulation Number 38 of 2008 dated May 19, 2008 concerning Amendment to Government Regulation Number 6 of 2006 dated March 14, 2006 concerning the Management of State/Regional Properties;
6. Government Regulation Number 24 of 2015 dated May 25, 2015 concerning Collection of Plantation Funds;
7. Presidential Regulation Number 61 of 2015 dated May 25, 2015 concerning Collection and Utilization of Crude Palm Oil Funds;
8. Minister of Finance Regulation Number 76/PMK.05/2008 dated May 23, 2008 concerning Accounting and Financial Reporting Guidelines for Public Service Agencies;

Riwayat Singkat BPDPKS | IECFPO at A Glance

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Kualitas Piutang Kementerian/ Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak tertagih;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
11. Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
9. Minister of Finance Regulation Number 69/PMK.06/2014 dated April 24, 2014 concerning Accounts Receivable Quality and Formation of Allowance for Doubtful Accounts for the State Ministries/Agencies;
10. Minister of Finance Regulation Number 113/PMK.01/2015 concerning the Organization and Work Procedures of the Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil,
11. Minister of Energy and Mineral Resource Regulation Number 29 of 2015 dated September 11, 2015 concerning the Biofuel Provision and Utilization of Biodiesel for Financing by the Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil;
12. Government Regulation Number 24 of 2016 concerning Amendment to Government Regulation Number 61 of 2015 concerning Collection and Utilization of Crude Palm Oil Funds.

Pendapatan BPDPKS akan dicatat dalam APBN melalui prosedur pengesahan pada akhir periode pelaporan. Dengan demikian pendapatan BPDPKS diakui sebagai pendapatan negara pada saat pengesahan pendapatan tersebut. Sementara untuk pendapatan yang digunakan untuk biaya operasional BPDPKS akan masuk ke realisasi APBN pada saat yang sama dengan pengesahan pendapatan. BPDPKS hanya melaporkan pendapatan tersebut ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Biro Perencanaan Keuangan Kementerian Keuangan.

IEFCPO income shall be recorded in the State Budget (APBN) through approval procedure at the end of the reporting period. Therefore, IEFCPO income is recognized as state income during the approval of such income. Meanwhile, income used for IEFCPO operating expense shall be posted into State Budget realization at the same time with the income approval. IEFCPO shall only report the income to the Directorate General of Treasury and the Financial Planning Bureau of the Ministry of Finance.



Visi, Misi dan Tujuan

Vision, Mission and Objectives



VISI **VISION**

Menjadi pengelola dana yang berperan dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan sebagai salah satu komoditas strategis Indonesia

To become the manager of funds in the sustainable development of palm oil as one of Indonesia's strategic commodities.

MISI **MISSION**

Mengelola dan menumbuhkembangkan dana pengembangan dana kelapa sawit secara profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan untuk menjamin keberlangsungan program kelapa sawit berkelanjutan sebagai bentuk peningkatan dan stabilitas komoditas strategis

To manage and foster the palm oil development funds in professional, transparent, accountable, and sustainable manners to ensure the course of the palm oil sustainability program as an effort to improve and stabilize the strategic commodity.

Visi, Misi dan Tujuan Vision, Mission and Objectives

**Melakukan pengelolaan DPKS untuk
menjamin keberlangsungan program kelapa
sawit berkelanjutan sebagai komoditas
strategis nasional dunia**

To manage the CPO Fund to ensure the
sustainability of palm oil program as a
global strategic commodity;

**Meningkatkan dan menjaga
stabilitas pendapatan usaha
perkebunan kelapa sawit
dengan mengoptimalkan
harga di tengah fluktuasi
harga komoditas kelapa
sawit dunia**

To improve and maintain the
stability of palm oil business
income by optimizing the
price amid the fluctuating
global palm oil commodity
price

**Meningkatkan
kapasitas sumber
daya manusia
di bidang kelapa sawit**
To enhance the palm
oil human resource
capacity

TUJUAN OBJECTIVES

**Meningkatkan optimalisasi
penggunaan hasil perkebunan kelapa
sawit untuk bahan baku industri, energi
terbarukan, dan ekspor**

To optimize the utilization of palm oil
yields for industrial raw materials,
renewable energy, and export

**Mendorong
pengembangan industri
hilir kelapa sawit**
To encourage
developments in palm oil
downstream industry

Maksud pembentukan BPDPKS menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana yang bertujuan untuk mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Penghimpunan dana bersumber dari Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Dana Lembaga Pembiayaan, Dana Masyarakat dan Dana lain yang sah. Dana yang dihimpun meliputi pungutan atas eksport komoditas perkebunan kelapa sawit dan/atau turunannya dan iuran. Selanjutnya dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan:

- a. Pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, profesionalisme kemandirian dan berdaya saing serta untuk meningkatkan kemampuan teknis, manajerial dan kewirausahaan.
- b. Penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, dimaksudkan untuk (1) pemenuhan hasil perkebunan kelapa sawit; (2) kebutuhan pangan; (3) hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit; (5) penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel.
- c. Promosi Perkebunan Kelapa Sawit, dimaksudkan untuk meningkatkan (1) citra nilai produk Kelapa Sawit (2) informasi pasar kelapa sawit, (3) memperluas pasar kelapa sawit,(4) meningkatkan investasi perkebunan kelapa sawit dan atau (5) menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas perkebunan kelapa sawit,
- d. Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, dimaksudkan untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit serta menjaga luasan lahan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal
- e. Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, dimaksudkan untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan kelapa sawit. Sarana dan prasarana terdiri atas benih, pupuk, pestisida, alat pasca panen dan pengolahan hasil, jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan, alat transportasi, mesin pertanian, pembentukan infrastruktur pasar dan verifikasi atau penelusuran teknis.

IECFPO was established to collect, administer, manage, store, and distribute funds with the aim to promote sustainable oil palm plantation development. The fund raised is sourced from Palm Oil Business Owners, Financing Institution Funds, Community Funds, and other legal Funds. The collected funds cover restitution of the export of oil palm plantation commodity and/or its derivatives and contributions. Further, the collected funds are used for the purposes of:

- a. Palm oil human resource development to increase their knowledge, skills, professionalism, independence, and competitiveness while enhancing their technical, managerial, and entrepreneurial expertises.
- b. Oil palm estate research and development is conducted in order to (1) meet oil palm plantation produce; (2) food requirements; (3) oil palm plantation industrial downstreaming; and (4) biofuel-biodiesel provision and utilization.
- c. Oil Palm Estate promotion is intended to increase (1) Palm Oil products image, (2) information on palm oil market, (3) palm oil market expansion, (4) investment in palm oil estates, and/or (5) development of palm oil estate commodity marketing center.
- d. Oil Palm Estate Replanting was aimed to improve the oil palm estate productivity and maintain the optimal utilization of oil palm estate.
- e. Facilities and Infrastructures of Oil Palm Estate was aimed to improve oil palm estate's production, productivity, and quality. The facilities and infrastructure comprise seedlings; fertilizers; pesticides; post-harvesting and yield processing equipment; plantation road and access road to public road and/or port; means of transportation; agricultural machineries; market infrastructure construction; and technical verification or tracing.

Tugas, Fungsi, dan Peran Duties, Function, and Roles



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tugas BPDPKS adalah mengumpulkan pungutan dan iuran dari Kelapa sawit atau turunannya dan menyalurkannya sesuai fungsi - fungsi sebagai berikut:

- Melakukan pengelolaan DPKS untuk menjamin keberlangsungan program kelapa sawit berkelanjutan sebagai komoditas strategis nasional;
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelapa sawit;
- Mendorong pengembangan industri hilir kelapa sawit;
- Meningkatkan optimasi penggunaan hasil perkebunan kelapa sawit untuk bahan baku industri, energi terbarukan, dan ekspor;
- Meningkatkan dan menjaga stabilitas pendapatan usaha perkebunan kelapa sawit dengan mengoptimalkan harga di tengah fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dunia.

Pursuant to the Regulation of the Minister of Finance Number 113/PMK.01/2015 concerning the Organization and Work Procedures of the Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil, the IECFPO assumes the duties to collect duties and contributions from palm oil or its derivatives and distribute the fund according to the following functions:

- To manage the CPO Fund to ensure the sustainability of palm oil program as a national strategic commodity;
- To enhance the palm oil human resource capacity;
- To encourage developments in palm oil downstream industry;
- To optimize the utilization of palm oil yields for industrial raw materials, renewable energy, and export;
- To improve and maintain the stability of palm oil business income by optimizing the price amid the fluctuating global palm oil commodity price.

Budaya Kerja Work Culture

BPDPKS memiliki nilai-nilai inti yang menjadi budaya kerjanya yang selaras dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu:

IECFPO holds the core work values that are aligned with the values of the Ministry of Finance, in particular:

INTEGRITAS | BPDPKS memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas dengan berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral

INTEGRITY | The IECFPO commits to uphold the integrity in assuming the duties by thinking, speaking, behaving, and acting properly and correctly while upholding code of ethics and moral principles.

KESEMPURNAAN
BPDPKS senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk memberikan dan menjadi yang terbaik

PERFECTION
The IECFPO strives to constantly improve in all aspects to provide and be the best.



PROFESIONALISME

BPDPKS memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas dengan berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral

PROFESSIONALISM

The IECFPO constantly strives to thoroughly and accurately work with the best competence, with full responsibility and high commitment.



BUDAYA KERJA WORK CULTURE

CUSTOMER
FEEDBACK
UPPORT
INNOVATIVE
QUALITY
EXCELLENT
FRIENDLY

PELAYANAN
BPDPKS akan senantiasa berupaya memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan, yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman

SERVICE

The IECFPO will constantly strive to provide satisfactory services to the stakeholders, wholeheartedly, in transparent, fast, accurate, and secure manners.



SINERGI

BPDPKS akan senantiasa membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan

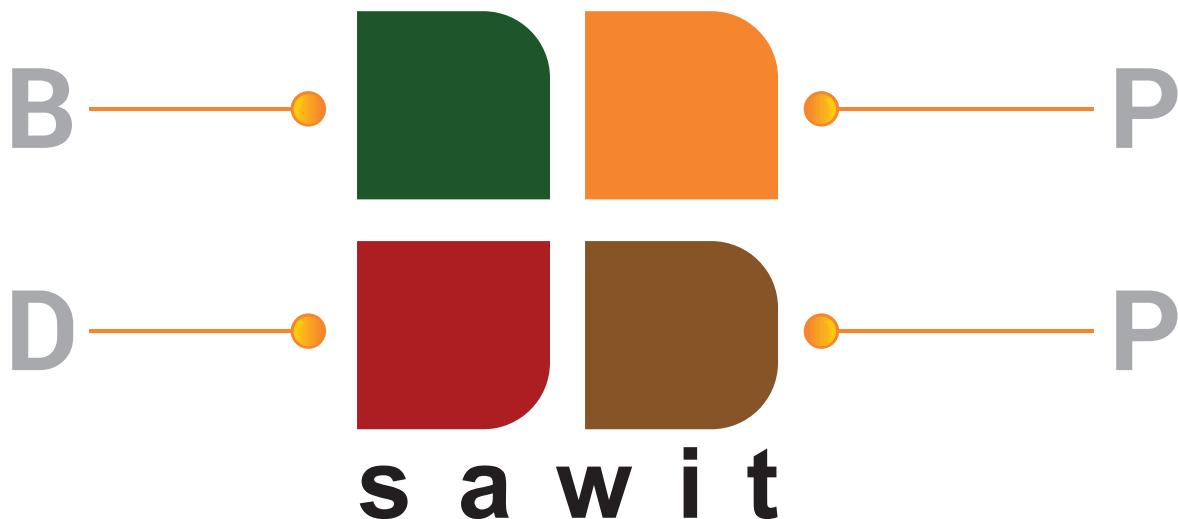
SYNERGY

The IECFPO will continue to develop and ensure productive internal work relations and harmonious partnership with the stakeholders.

Makna Logo Meaning of Logo

Logo itu merupakan paduan dari huruf B (HIJAU dan MERAH), P (ORANYE), D (COKLAT) dan P (ORANYE) = BPDP.

The logo is a combination of letters B (GREEN and RED), P (ORANGE), D (BROWN) and P (ORANGE) = BPDP.



Masing-masing warna mempunyai makna yaitu:

Masing-masing warna mempunyai makna yaitu:

Hijau Green



> Kelestarian, *Sustainability*, Ramah Lingkungan
Preservation, Sustainability, Environmentally-friendly

Merah Red



> Energi, Pemberdaya/*Enabler*
Energy, Enabler

Oranye Orange



> Bisnis, Profesionalisme
Business, Professionalism

Coklat Brown



> Lahan, Rakyat, Petani
Land, Community, Farmers

Semua berada didasar / latar belakang warna putih
= transparansi, akuntabilitas. Tulisan sawit = dana
dan pemberdayaan dari dan untuk sawit

All colors are presented on top of a white background
= transparency, accountability. The word "sawit" =
fund and empowerment from and for palm oil (sawit)

Struktur Organisasi

Organizational Structure



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2015, BPDPKS berada di bawah koordinasi Menteri Perekonomian. Menurut Peraturan Menteri Keuangan tersebut, struktur organisasi BPDPKS terdiri dari:

1. Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
2. Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana;
3. Direktorat Penghimpunan Dana;
4. Direktorat Penyaluran Dana;
5. Direktorat Kemitraan;
6. Satuan Pemeriksaan Intern; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Under the Regulation of the Minister of Finance Number 113/PMK.05/2015, IECFPO operates under the coordination of the Minister of Economic Affairs. According to the Regulation of the Minister of Finance, IECFPO organizational structure consists of:

1. Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management Directorate;
2. Fund Planning and Management Directorate;
3. Fund Collection Directorate;
4. Fund Distribution Directorate;
5. Partnership Directorate;
6. Internal Audit Unit; and
7. Functional Position Groups.

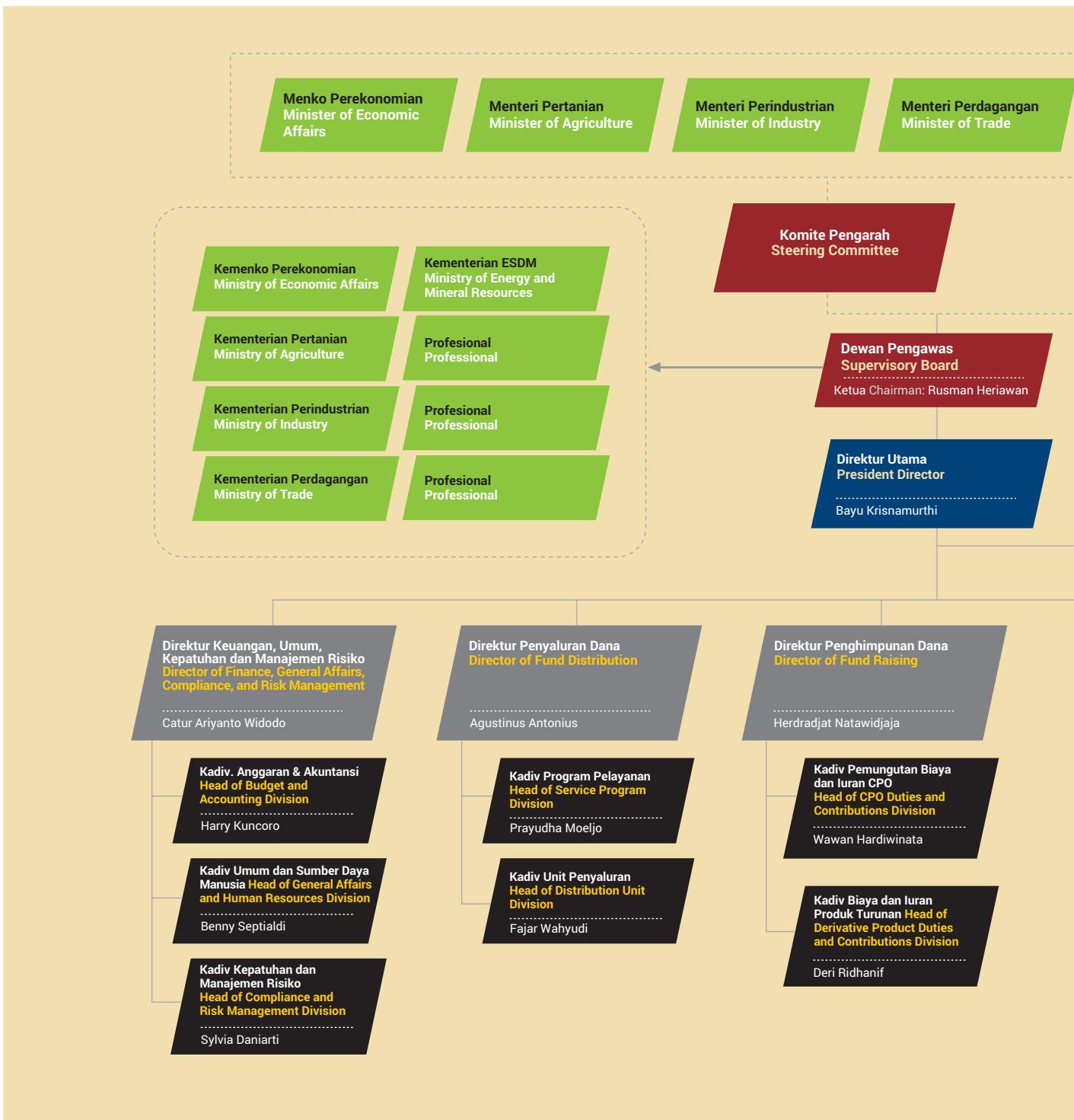
Struktur Organisasi Organizational Structure

Adapun bagan organisasi BPDPKS adalah sebagai berikut;

Susunan Organisasi BPDPKS Sesuai PMK Nomor 113/PMK.01/2015

The following is the chart of IECFPO organizational structure:

IECFPO Organizational Structure according to the Regulation of the Minister of Finance Number 113/PMK.01/2015



Analisis Pembahasan Kinerja
Operasional dan Keuangan
Operational and Financial Performance
Discussion Analysis

Tata Kelola BPDPKS
IECFPO Governance

Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
IECFPO Social Responsibility

Laporan Keuangan Audited
Audited Financial Statements



Menteri Keuangan
Minister of Finance

Menteri ESDM
Minister of Energy and
Mineral Resources

Profesional
Professional

Profesional
Professional

Profesional
Professional

Menteri Keuangan
Minister of Finance

Anggota komite pengarah dan
menteri penanggung jawab BLU
Anggota komite pengarah dan
menteri penanggung jawab BLU

Satuan Pemeriksaan Internal
Head of Internal Control Unit
Vacant

Direktur Perencanaan dan
Pengelolaan Dana
Director of Planning and
Fund Management

Agustinus Antonius

Direktur Kemitraan
Director of Partnership

Plt.

Kadiv Pengembangan Biodesel
Head of Biodiesel Development
Division

Muhammad Ferian

Kadiv Usaha Kecil, Menengah
dan Koperasi Head of Small and
Medium Entrepreneurs and
Cooperatives Division

Vacant

Kadiv Replanting, Reforestation
dan Promosi Perkebunan
Head of Replanting, Reforestation,
and Plantation Promotion Division

Kurniadi Perdana Putra

Kadiv Perusahaan
Head of Corporate Division

Vacant

Kadiv Pendidikan SDM, Litbang, dan
Pengembangan Sarana dan
Prasarana Head of HR Education,
Research and Development, and
Facility and Infrastructure
Development Division

Arfie Thahar

Kadiv Lembaga Kemasyarakatan
& Civil Society
Head of Community Institutions
and Civil Society Division

Kus Emry Puspita Dewi

Pejabat Satu Level di bawah Direksi Officials One Level under the Board of Directors



**HARI
KUNCORO**

Kepala Divisi Anggaran dan Akuntansi
Head of Budget and Accounting Division



**BENNY
SEPTIALDI**

Kepala Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia
Head of General Affairs and Human Resources Division



**SYLVIA
DANIARTI**

Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Head of Compliance and Risk Management Division



**KURNIADI
PERDANA
PUTRA**

Kepala Divisi Pengembangan Biodesel
Head of Biodiesel Development Division



**MUHAMMAD
FERIAN**

Kepala Divisi *Replanting, Reforestation*
dan Promosi Perkebunan
Head of Replanting, Reforestation, and
Plantation Promotion Division



**MOCHAMAD
FACHRUDIN**

Kepala Divisi Pendidikan SDM, Litbang, dan
Pengembangan Sarana dan Prasarana
Head of HR Education, Research and Development, and
Facility and Infrastructure Development Division



**WAWAN
HARDIWINATA**

Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO
Head of CPO Duties and Contributions Division



**DERI
RIDHANIF**

Kepala Divisi Biaya dan Iuran Produk Turunan
Head of Derivative Product Duties and Contributions Division



**ARFIE
TAHAR**

Kepala Divisi Program Pelayanan
Head of Service Program Division



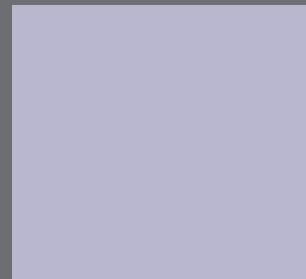
**FAJAR
WAHYUDI**

Kepala Divisi Unit Penyaluran
Head of Distribution Unit Division



VACANT

Kepala Divisi Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi
Head of Small and Medium Entrepreneurs and
Cooperatives Division



**AGAM
FATCHURROHMAN**

Kepala Divisi Perusahaan
Head of Corporate Division



**KUS EMY
PUSPITA DEWI**

Kepala Divisi Lembaga Kemasyarakatan & Civil Society
Head of Community Institutions and Civil Society Division



**PRAYUDHA
MOELJO**

Kepala Satuan Pengawasan Internal
Head of Internal Control Unit

Profil Sumber Daya Manusia

Human Resource Profile



Dalam menjalankan usaha yang terus berkembang, Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi aset utama yang perlu dikelola dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan metode yang efektif. BPDPKS menerapkan metode pendekatan *Human Capital Management* dalam melakukan pengelolaan SDM, metode ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas SDM yang dimiliki BPDPKS sehingga mampu meningkatkan kapasitas SDM dalam menghadapi tuntutan pertumbuhan perusahaan.

In running the continuously developing business, Human Resources are the key assets which require sustainable management and development through effective methods. IECFPO applies the Human Capital Management approach in managing Human Resources. The method puts emphasis on the improvement of existing human resources to develop their capacities in facing the Company's growing demands.

Struktur Pengelola SDM HR Management Structure

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2015, pengelolaan fungsi SDM BPDPKS dilakukan oleh Divisi Sumber Daya Manusia & Umum yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Struktur Pengelola SDM BPDPKS tahun 2016 adalah sebagai berikut:



Pursuant to the Minister of Finance Regulation Number 113/PMK.05/2015, the management of IECFPO HR function is conducted by HR & General Affairs Division which is directly responsible to the Directorate of Finance, General Affairs, Compliance and Risk Management.

IECFPO HR Management Structure in 2016 is as follows:

Komposisi Pegawai Employee Composition

Jumlah pegawai BPDPKS pada tahun 2016 adalah 86 pegawai, meningkat 45,35% dari tahun 2015 yang berjumlah 47 pegawai. Peningkatan jumlah pegawai ini sejalan dengan rencana pengembangan BPDPKS yang menekankan pada peningkatan produktivitas. BPDPKS akan meningkatkan jumlah pegawai seiring dengan meningkatnya pertumbuhan perusahaan. Distribusi pegawai berdasarkan status, level jabatan, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan usia adalah sebagai berikut:

A | Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Employee Composition by Employment Status

Status	2016	%*	2015	%*
Pegawai Tetap Permanent Employees	85	100	47	100
Pegawai Kontrak Magang Interns/Contracts	0	0	0	0
Jumlah Amount	85	100	47	100

* Persentase terhadap jumlah keseluruhan pada tahun berjalan
Percentage against the overall number in current year

In 2016, IECFPO was supported by 86 employees, which was an improvement by 45.35% from 2015 with 47 employees. The increase in the number of employees was in accordance with IECFPO development plan which emphasizes on the improvement of productivity. IECFPO will continue increasing the number of employees along with the growth of the Company. The employee distributions by status, position, sex, education, and age are as shown below:

Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan
Status Kepegawaian
Chart of Employee Composition by Employment Status



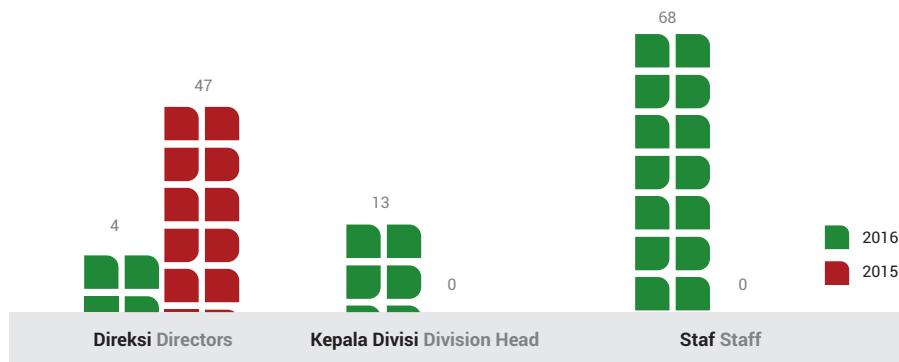
Profil Sumber Daya Manusia Human Resource Profile

B Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Jabatan
Employee Composition by Position

Status	2016	%*	2015	%*
Direksi Directors	4	4.7	47	100
Kepala Divisi Division Head	13	15.3	0	0
Staf Staff	68	80	-	-
Jumlah Amount	85	100	47	100

* Persentase terhadap jumlah keseluruhan pada tahun berjalan Percentage against the overall number in current year

Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Jabatan Chart of Employee Composition by Position

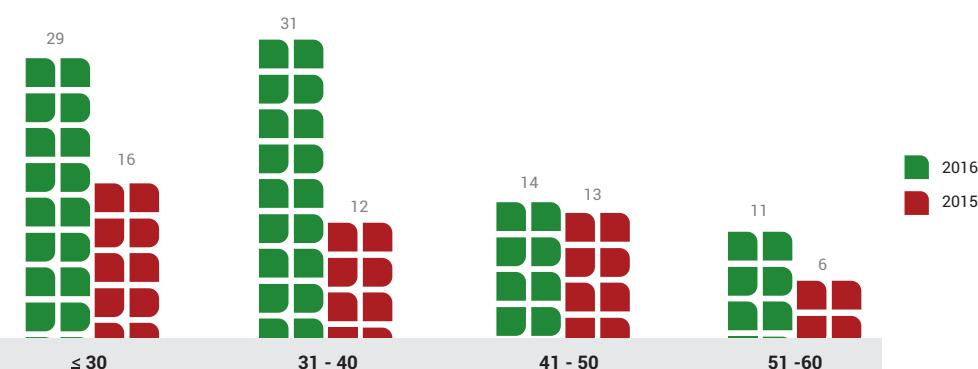


C Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia
Employee Composition by Age

Usia Age	2016	%*	2015	%*
≤ 30	29	34.1	16	34,04
31 - 40	31	36.4	12	25,53
41 - 50	14	16.4	13	27,66
51 -60	11	13.1	6	12,77
Jumlah Amount	86	100	47	100

* Persentase terhadap jumlah keseluruhan pada tahun berjalan
Percentage against the overall number in current year

Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia Chart of Employee Composition by Age

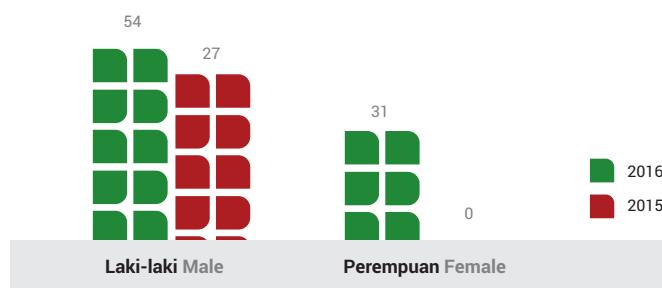


D Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Employee Composition by Sex

Status	2016	%*	2015	%*
Laki-laki Male	54	63.5	47	100
Perempuan Female	31	36.5	0	0
Jumlah Amount	85	100	47	100

* Persentase terhadap jumlah keseluruhan pada tahun berjalan
Percentage against the overall number in current year

Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Chart of Employee Composition by Sex



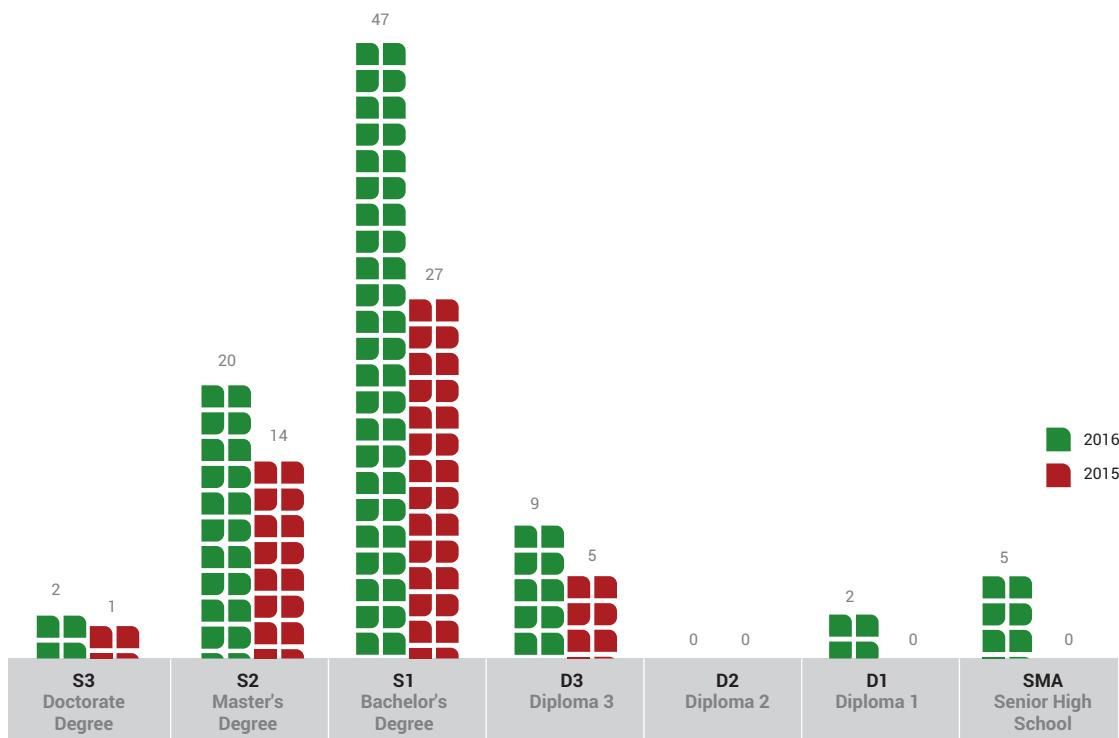
E Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Employee Composition by Education

Status	2016	%*	2015	%*
S3 Doctorate Degree	2	2.3	1	2,13
S2 Master's Degree	20	23.5	14	29,79
S1 Bachelor's Degree	47	55.3	27	57,45
D3 Diploma 3	9	10.6	5	10,64
D2 Diploma 2	0	0	-	-
D1 Diploma 1	2	2.5	-	-
SMA Senior High School	5	5.8	-	-
Jumlah Amount	85	100	47	100

* Persentase terhadap jumlah keseluruhan pada tahun berjalan
Percentage against the overall number in current year

Profil Sumber Daya Manusia Human Resource Profile

Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



* Persentase terhadap jumlah keseluruhan pada tahun berjalan Percentage against the overall number in current year

Kesempatan yang Sama kepada Pegawai Equal Opportunity for Employees

BPDPKS senantiasa berkomitmen untuk menjunjung kesetaraan dalam menyeleksi sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para pelamar untuk menjadi calon pegawai yang profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender atau kondisi fisik mulai dari penerimaan pegawai, melaksanakan tugasnya secara profesional, dan memperoleh kompensasi. BPDPKS menjamin tidak terjadinya diskriminasi sehingga tercipta perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong pegawai sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-masing untuk mencapai kinerja excellence. Dengan demikian BPDPKS berupaya melakukan proses pengelolaan SDM berdasarkan faktor kemampuan (*competency*) dan kinerja (*performance*) yang sejalan dengan aspek *fairness*.

IECFPO is always committed to supporting equality in selecting human resources by providing equal opportunities to applicants to become professional employee candidates regardless of their ethnicity, religion, race, class, gender, or physical condition since their admission, to conduct their duties professionally, and to earn compensations. IECFPO ensures zero discrimination to give fair and honest treatment in encouraging employees in accordance with their respective potential, ability, experience, and skills to achieve excellent performance. Therefore, IECFPO strives to conduct HR management based on the competency and performance in accordance with the fairness factor.



Proses Rekrutmen yang Berkualitas

Quality Recruitment Process

Rekrutmen merupakan proses mendapatkan SDM terbaik sesuai dengan Rencana Jangka Pendek maupun Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Perekruit yang dilakukan bersifat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme yang dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan pegawai. BPDPKS membuka kesempatan yang sama bagi semua kandidat tanpa membedakan suku, agama, ras maupun gender selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Recruitment is a process to obtain the best human resources according to the Company Short-Term and Long-Term Plans. The recruitment is carried out transparently by upholding professionalism according to the analyzed employee requirements. IECFPO provides equal opportunities for all candidates regardless of ethnicity, religion, race, or gender as long as they meet the determined requirements.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Trainings and Competency Building

BPDPKS telah memiliki program pengembangan kompetensi yang terencana, sistematis dan terfokus sesuai perkembangan bisnis perusahaan. Salah satu program pengembangan kompetensi utama yang telah dilaksanakan secara konsisten adalah Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang mendukung proses pemeliharaan dan peningkatan kualitas SDM.

IECFPO has planned, systematic, and focused competency building program according to the Company's business development. One of the main competency development programs which was consistently held is Education and Training Program. It supports the maintenance and development of HR quality.

Profil Sumber Daya Manusia Human Resource Profile

Setiap pegawai BPDPKS dituntut untuk memiliki kompetensi yang baik sesuai dengan kebutuhan posisi jabatannya.

Dalam upaya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kerja, BPDPKS memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh baik di dalam maupun luar negeri.

Sebagai bentuk antisipasi BPDPKS dalam menghadapi perkembangan dunia global maupun untuk mendukung tercapainya visi misi, BPDPKS juga menjalankan program pendidikan sekolah lanjutan baik di dalam maupun luar negeri. Peserta yang mengikuti program tersebut adalah pegawai pilihan yang memang akan direncanakan mengisi jabatan tertentu serta memenuhi kompetensi perusahaan di masa mendatang. Selain itu, secara tidak langsung program ini dapat memberikan benefit bagi pegawai sekaligus memacu mereka dalam meningkatkan kinerja.

Each and every IECFPO employees must possess well competence according to the positional requirements.

To improve work skills and expertise, IECFPO provides vast opportunities for eligible employees to participate in local or international education/training programs.

To anticipate the global development and to achieve its vision and mission, IECFPO also held local or international post-education program. The program-attending participants were the selected employees planned to fill certain positions and meeting the competence required by the Company. In addition, indirectly this program would be beneficial for the employees yet encouraging such employees to improve their performance.

Program Kesejahteraan Pegawai Employee Welfare Program

BPDPKS berupaya untuk memenuhi kesejahteraan pegawai melalui beberapa aspek antara lain :

- Gaji
- Tunjangan
- Bonus
- Jaminan kesehatan

IECFPO strives to provide employee welfare through several aspects, which include:

- Salary
- Benefits
- Bonus
- Health Insurance

Sistem Manajemen Kinerja BPDPKS IECFPO Performance Management System

Pengukuran kinerja di BPDPKS dilaksanakan berdasarkan prinsip obyektivitas dan keadilan. Sistem penilaian yang dibangun mampu menjadi pembeda antara pegawai berkinerja tinggi dengan pegawai berkinerja rendah. Penilaian kinerja mengukur pencapaian pekerja terhadap target individu yang merupakan turunan dari sasaran/target BPDPKS. Target individu pekerja ditetapkan dan disepakati bersama atasan di awal tahun, sebagai turunan dari target/sasaran atasannya dan sejalan dengan *Key Performance Indicator (KPI)* Direktorat.

In IECFPO, performance measurement is carried out based on objectivity and fairness principles. The assessment system developed manages to separate between high-performing employees and low-performing employee. Performance assessment measures employee achievement of individual targets as the derivatives of IECFPO objectives/target. Employee individual targets are determined and jointly agreed with the superior at the beginning of the year, as a derivative of the superior's objective/target and in line with Directorate's Key Performance Indicators.

Lembaga Profesi Penunjang

Supporting Professional Institutions



Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Obligasi Subordinasi ini adalah sebagai berikut :

Capital Market-Supporting Professional Institutions which assist and act in the Subordinated Bonds Offering are as follows:

Keterangan Description	Profesi Penunjang Supporting Professions
Akuntan Publik Public Accountant	dbsd&a Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Registered Public Accountants Branch License Number 862/KM.1/2015
Auditor Pemerintah Government's Auditor	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) The Audit Board of the Republic of Indonesia
	Kantor Pusat Head Office Menara Kuningan 11th Floor Jl. HR Rasuna Said Blok X-7 Kav 5 Jakarta 12940 Indonesia

Area dan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia

Indonesian Palm Oil Area and Production



Sulawesi Barat

West Sulawesi

Jumlah Luas (Ha)	111.836
Total Area (Ha)	
Jumlah Produksi (Ton)	319.455
Total Production (Tons)	

Sulawesi Tengah

Central Sulawesi

Jumlah Luas (Ha)	86.990
Total Area (Ha)	
Jumlah Produksi (Ton)	303.200
Total Production (Tons)	

Gorontalo

Jumlah Luas (Ha)	8.024
Total Area (Ha)	
Jumlah Produksi (Ton)	121
Total Production (Tons)	

Sulawesi Tenggara

Southeast Sulawesi

Jumlah Luas (Ha)	49.391
Total Area (Ha)	
Jumlah Produksi (Ton)	85.097
Total Production (Tons)	

Sulawesi Selatan

South Sulawesi

Jumlah Luas (Ha)	38.939
Total Area (Ha)	
Jumlah Produksi (Ton)	117.250
Total Production (Tons)	

Papua Barat

West Papua

Jumlah Luas (Ha)	52.920
Total Area (Ha)	
Jumlah Produksi (Ton)	86.934
Total Production (Tons)	

Maluku

Jumlah Luas (Ha)	10.616
Total Area (Ha)	
Jumlah Produksi (Ton)	50
Total Production (Tons)	

Papua

Jumlah Luas (Ha)	54.194
Total Area (Ha)	
Jumlah Produksi (Ton)	161.132
Total Production (Tons)	

Area dan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia Indonesian Palm Oil Area and Production

Propinsi	Perkebunan Rakyat Smallholder		Perkebunan Negara Government	
	Luas (Ha) Areas (Ha)	Produksi (Ton) Production (Tons)	Luas (Ha) Areas (Ha)	Produksi (Ton) Production (Tons)
Aceh	226.984	226.984	41.937	68.844
Sumatera Utara	226.984	422.597	324.419	1.246.900
Sumatera Barat	198.484	198.484	9.668	28.196
Riau	1.360.855	3.651.687	92.130	322.970
Kepulauan Riau	1.302	1.531	-	-
Jambi	457.321	1.013.114	23.991	90.699
Sumatera Selatan	439.958	1.230.201	49.551	138.718
Kep. Bangka Belitung	63.458	109.355	-	-
Bengkulu	193.296	455.074	4.903	17.540
Lampung	113.837	167.896	15.629	47.921
WILAYAH SUMATERA	3.478.093	8.715.780	562.228	1.961.787
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	261	224	9.818	25.601
Banten	9.432	1.977	9.800	17.975
Jawa Tengah	-	-	-	-
D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
Jawa Timur	-	-	-	-
WILAYAH JAWA	9.693	9.488	19.617	43.576
Bali	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
WILAYAH NUSA TENGGARA	-	-	-	-
Kalimantan Barat	386.801	741.812	51.696	124.638
Kalimantan Tengah	150.059	243.627	-	-
Kalimantan Selatan	83.865	190.936	17.040	59.132
Kalimantan Timur	307.209	492.922	57.671	160.960
Kalimantan Utara	27.548	48.523	-	-
WILAYAH KALIMANTAN	955.482	1.708.821	126.407	344.730
Sulawesi Utara	-	-	-	-
Gorontalo	4.810	16	-	-
Sulawesi Tengah	77.936.	144.421	1.183	1.786
Sulawesi Selatan	34.377	69.683	19.350	40.828
Sulawesi Barat	62.163	168.496	-	-
Sulawesi Tenggara	6.513	214	3.961	5.868
WILAYAH SULAWESI	185.798	382.831	24.494	48.482
Maluku	859	50	-	-
Maluku Utara	-	-	-	-
Papua	14.808	10.122	12.281	72629.
Papua Barat	11.915	38.593	2.920	8.169
WILAYAH MALUKU & PAPUA	27.582	48.765	15.201	37.895
INDONESIA	4.656.648	10.856.685	747.948	2.436.471

Perkebunan Swasta Private		Jumlah Total		Province
Luas (Ha) Areas (Ha)	Produksi (Ton) Production (Tons)	Luas (Ha) Areas (Ha)	Produksi (Ton) Production (Tons)	
139.717	377.264	408.638	673.092	Aceh
549.471	2.396.753	1.100.874	4.066.250	North Sumatra
191.576	488.508	399.728	715.188	West Sumatra
977.523	4.531.989	2.347.591	8.215.973	Riau
18.891	50.801	20.193	52.332	Riau Islands
254.783	806.216	736.095	1.910.029	Jambi
498.875	1.694.278	988.384	3.063.197	South Sumatra
154.540	439.712	78.912	549.067	Bangka Belitung Islands
99.988	294.405	298.187	751.233	Bengkulu
84.180	240.061	137.884	455.878	Lampung
2.969.545	11.319.986	7.009.866	21.997.553	SUMATRA REGION
-	-	-	-	DKI Jakarta
4.226	9.401	14.305	35.226	West Java
2.203	1.925	11.733	21.877	Banten
-	-	-	-	Central Java
-	-	-	-	D.I. Yogyakarta
-	-	-	-	East Java
6.429	11.326	35.739	64.390	JAVA REGION
-	-	-	-	Bali
-	-	-	-	West Nusa Tenggara
-	-	-	-	East Nusa Tenggara
-	-	-	-	NUSA TENGGARA REGION
1.016.686	1.479.792	1.455.183	2.346.242	West Kalimantan
1.033.665	3.586.460	1.183.724	3.830.087	Central Kalimantan
336.657	948.122	422.226	1.198.190	South Kalimantan
568.972	1.126.627	933.852	1.635.645	East Kalimantan
141.122	253.024	168.670	301.547	North Kalimantan
3.097.103	7.394.024	4.178.992	9.137.318	KALIMANTAN REGION
-	-	-	-	North Sulawesi
7.543	105	8.024	121	Gorontalo
78.710	156.993	86.990	303.200	Central Sulawesi
2.627	6.739	38.939	117.250	South Sulawesi
49.673	150.959	111.836	319.455	West Sulawesi
38.917	79.015	49.391	85.097	Southeast Sulawesi
177.379	393.811	387.671	825.124	SULAWESI REGION
9.757	-	10.616	50	Maluku
-	-	-	-	North Maluku
27.105	78.381	54.194	161.132	Papua
40.713	40.172	52.920	86.934	West Papua
77.576	118.553	120.359	205.213	MALUKU & PAPUA REGION
6.328.031	19.237.700	11.732.627	32.530.856	INDONESIA

Analisis Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Operational and Financial Performance Discussion Analysis





Analisis Industri Industrial Analysis



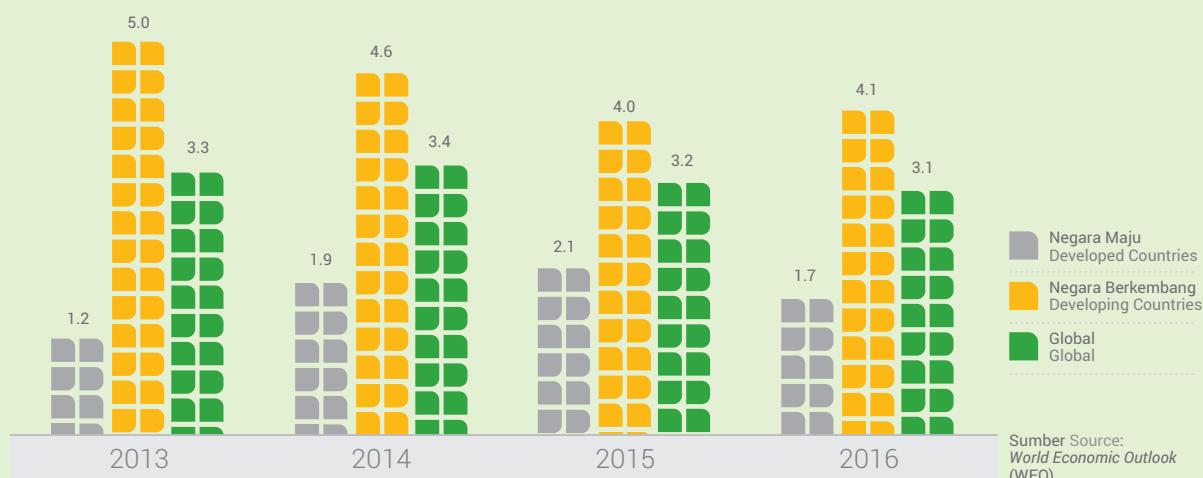
Sekilas Perekonomian Global

Global Economic Overview

Berdasarkan data *International Monetary Fund* (IMF) dalam *World Economic Outlook* (WEO) edisi April 2017, pertumbuhan global untuk tahun 2016 adalah sebesar 3,1%.

Based on the data from the International Monetary Fund (IMF) in the World Economic Outlook (WEO) published in April 2017, the global growth for 2016 was 3.1%.

Grafik Perekonomian Global Tahun 2013-2016 (%) Chart of Global Economy in 2013-2016 (%)



Dalam cakupan regional, Asia masih terus memimpin pertumbuhan ekonomi global dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,4% yoy pada tahun 2016.

In regional scope, Asia remained a leader in the global economy, with 6.4% of growth (yoY) in 2016.



Sekilas Perekonomian Nasional

National Economic Overview

Produk Domestik Bruto

Gross Domestic Product

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2016 triwulan III, perekonomian Indonesia tahun 2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp12.406,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp47,96 juta atau USD3.605,1.

Ekonomi Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02% lebih tinggi dibanding capaian tahun 2015 sebesar 4,88%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,90%. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga sebesar 6,62%.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2016 bila dibandingkan triwulan IV-2015 (y-on-y) tumbuh 4,94%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,57%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga sebesar 6,72%.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2016 bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 1,77%. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami kontraksi 21,24%. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan Ekspor neto.

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial Tahun 2016 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,49%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,03%, dan Pulau Kalimantan 7,85%.

(Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik No. 16/02/Th.XX, 6 Februari 2017)

From the Q3 2016 data of the Central Bureau of Statistics (BPS), Indonesian economy measured by the Gross Domestic Products (GDP) at current prices reached Rp12,406.8 trillion, while GDP per capita reached Rp47.96 million or USD3,605.1.

Indonesian economy in 2016 grew by 5.02%, which was higher compared to in 2015 with 4.88%. From production, the highest growth was attained by Financial Service and Insurance Business Sector with 8.90%. From expenditure, the highest growth was attained by Non-Profit Institutions Serving Household (LNPR) Consumption Expenditure with 6.62%.

Indonesian economy in Q4 2016 as compared to in Q4 2015 (yoy) grew by 4.94%. From production, the highest growth was attained by Information and Communication Business Sector with 9.57%. From expenditure, the highest grow was attained by Non-Profit Institutions Serving Household (LNPR) Consumption Expenditure with 6.72%.

Indonesian economy in Q4 2016 as compared to the previous quarter (q-to-q) grew by 1.77%. From production, this was triggered by seasonal effect on Agriculture, Forestry, and Fishery Business Sector which contracted 21.24%. From expenditure, this was caused by decline in net export.

Spatially, Indonesian economic structure in 2016 was dominated by provincial groups in Java and Sumatra Islands. Provincial group in Java Island has contributed to the Gross Domestic Product by 58.49%, followed by Sumatra Island by 22.03% and Kalimantan Island by 7.85%.

(Source: BPS, BeritaResmiStatistik No. 16/02/Th.XIX, February 6, 2017)

Ekonomi Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02% lebih tinggi dibanding capaian tahun 2015 sebesar 4,88%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,90%. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga sebesar 6,62%.

Indonesian economy in 2016 grew by 5.02%, which was higher compared to in 2015 with 4.88%. From production, the highest growth was attained by Financial Service and Insurance Business Sector with 8.90%. From expenditure, the highest growth was attained by Non-Profit Institutions Serving Household (LNPRT) Consumption Expenditure with 6.62%.

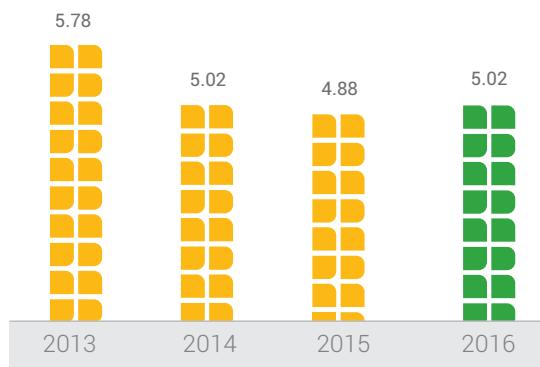
Tabel Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran Tahun 2016 (%) Table of GDP Growth Rate by Expenditure in 2016 (%)

No	Komponen Component	Triw III-2016 Terhadap Triw II-2016 Q3-2016 to Q2-2016	Triw IV-2016 terhadap Triw III-2016 Q4-2016 to Q3-2016	Triw III-2016 terhadap Triw III-2015 Q3-2016 to Q3-2015	Triw IV-2016 terhadap Triw IV-2015 Q4-2016 to Q4-2015	Laju Pertumbuhan 2016 Growth Rate 2016	Sumber Pertumbuhan 2016 Source of Growth 2016
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Household Consumption Expenditure	3,45	(0,02)	5,01	4,99	5,01	2,72
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT Non-Profit Institutions Serving Household Consumption Expenditure	4,26	2,83	6,64	6,72	6,62	0,07
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Government Consumption Expenditure	(0,19)	39,49	(2,95)	(4,05)	(0,15)	(0,01)
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto Gross Fixed Capital Formation	3,52	4,56	4,24	4,80	4,48	1,45
5	Perubahan Inventori Inventory Changes	-	-	-	-	-	-
6	Ekspor Barang dan Jasa Goods and Service Export	(3,64)	8,93	(5,65)	4,24	(1,74)	(0,39)
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa Minus Goods and Service Export	(5,09)	12,67	(3,67)	2,82	(2,27)	(0,47)
Produk Domestik Bruto (PDB) Gross Domestic Product (GDP)		3,13	(1,77)	5,01	4,94	5,02	5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Source: Central Bureau of Statistics (BPS)

Analisis Industri Industrial Analysis

Laju Pertumbuhan PDB Tahun 2013-2016 (%) GDP Growth Rate in 2013-2016 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Source: Central Bureau of Statistics (BPS)

Tingkat Inflasi

Inflation Rate

Inflasi terkendali pada level yang rendah dan berada di bawah kisaran sasaran inflasi 2016 ($4\pm1\%$). Realisasi inflasi IHK pada bulan Desember 2016 tercatat sebesar 0,42% (mtm), atau lebih rendah dari bulan November 2016 yang sebesar 0,47% (mtm), sehingga secara keseluruhan tahun inflasi 2016 menjadi sebesar 3,02% (yoY). Inflasi yang rendah tersebut didukung oleh inflasi inti yang rendah dan *administered prices* yang minimal, di tengah inflasi *volatile food* yang masih meningkat. Pencapaian tersebut didukung oleh kebijakan Bank Indonesia dan koordinasi dengan Pemerintah yang semakin solid, baik di pusat maupun di daerah, dalam mengendalikan inflasi.

Inflasi inti tetap terkendali pada level yang rendah, baik secara bulanan maupun tahunan. Inflasi kelompok inti pada bulan Desember 2016 tercatat sebesar 0,23% (mtm), sedikit lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,15% (mtm), sehingga secara keseluruhan tahun sebesar 3,07% (yoY). Rendahnya inflasi inti tersebut dipengaruhi oleh masih terbatasnya permintaan domestik, lemahnya tekanan eksternal, dan membaiknya ekspektasi inflasi.

Terkendalinya inflasi inti ini tidak terlepas dari konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan mengarahkan ekspektasi inflasi. Berdasarkan komponennya, rendahnya inflasi inti bulan Desember 2016 bersumber dari melambatnya inflasi *inti traded*, sementara inflasi *inti non traded* mengalami kenaikan. Di samping itu, menurunnya ekspektasi inflasi sepanjang tahun 2016 turut memengaruhi rendahnya inflasi inti. Hal ini tercermin dari hasil survei yang menunjukkan ekspektasi inflasi konsumen dan pedagang eceran 3 bulan yang cenderung menurun.

Inflation was controlled at a low level and was above the lower range of the 2016 inflation target ($4\pm1\%$). The Consumer Price Index inflation realization in December 2016 was recorded at 0.42% (mtm) or lower than in November 2016 at 0.47% (mtm), resulting in overall inflation at 3.02% (yoY) in 2016. Such a low inflation was supported by low core inflation and minimum administered prices, amidst increasing volatile food inflation. The achievement was supported by Bank Indonesia policy and increasingly solid coordination with the Government at the central and regional levels, in controlling inflation.

Core inflation remained controlled at a low level, both on monthly and annual basis. The core group inflation in December 2016 was recorded at 0.23% (mtm), slightly higher than in the previous month at 0.15% (mtm), resulting in overall inflation at 3.07% (yoY). Such a low core inflation was influenced by limited domestic demand, weak external pressure, and recovery in inflation expectation.

The controlled core inflation was inseparable from the consistency in Bank Indonesia policy to maintain the stability of exchange rate and direct the inflation expectation. By components, low core inflation in December 2016 was resulted by the traded core inflation slowdown, while the non-traded core inflation increased. Also, the decline in inflation expectation throughout 2016 affected the low core inflation. This is reflected from the survey result which showed declining trend in quarterly consumer and retail inflation.

Secara spasial, realisasi inflasi di berbagai daerah secara agregat mendukung pada tercapainya sasaran inflasi nasional sebesar 4±1%. Realisasi inflasi pada Desember 2016 di berbagai daerah secara umum berada pada tingkat yang cukup rendah seiring dengan meredanya tekanan kenaikan inflasi kelompok bahan makanan. Sumatera Barat dan Sulawesi Barat bahkan tercatat mengalami deflasi pada Desember 2016. Secara keseluruhan tahun, inflasi yang cukup rendah terutama terjadi Jawa, diikuti Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Sumatera yang masing-masing tercatat sebesar 2,59% (yo), 2,90% (yo) dan 4,53% (yo). Lebih tingginya inflasi di wilayah Sumatera disumbang oleh kenaikan inflasi yang cukup tinggi di beberapa daerah di wilayah ini, seperti Kepulauan Bangka Belitung (6,75%,yo), Sumatera Utara (6,34%,yo) dan Bengkulu (5,00%). Tingginya kenaikan inflasi di Sumatera terutama dipicu oleh kenaikan harga beberapa komoditas hortikultura, khususnya cabai merah, yang cukup signifikan paruh kedua tahun 2016.

Spatially, aggregate inflation realization in various regions supported the achievement of the national inflation target at 4±1%. In general, inflation realization in various regions per December 2016 was at relatively low level, in line with the calming in the inflation boost of foodstuffs. West Sumatra and West Sumatra even suffered deflation in December 2016. In overall year, low inflation took place particularly in Java, followed by Eastern Indonesia and Sumatra, at consecutively 2.59% (yo), 2.90% (yo), and 4.53% (yo). Higher inflation in Sumatra was contributed by relatively high increase in inflation in several regions, such as Bangka Belitung Islands (6.75%, yo), North Sumatra (6.34%, yo), and Bengkulu (5.00%, yo). High increase in inflation in Sumatra was mainly triggered by the significant price increase of several horticulture commodities, such as chili pepper, in 2016.



Analisis Industri Industrial Analysis

Gambar Peta Inflasi Daerah Desember 2016 (% , yoy) Figure of Regional Inflation Map in December 2016 (% , yoy)

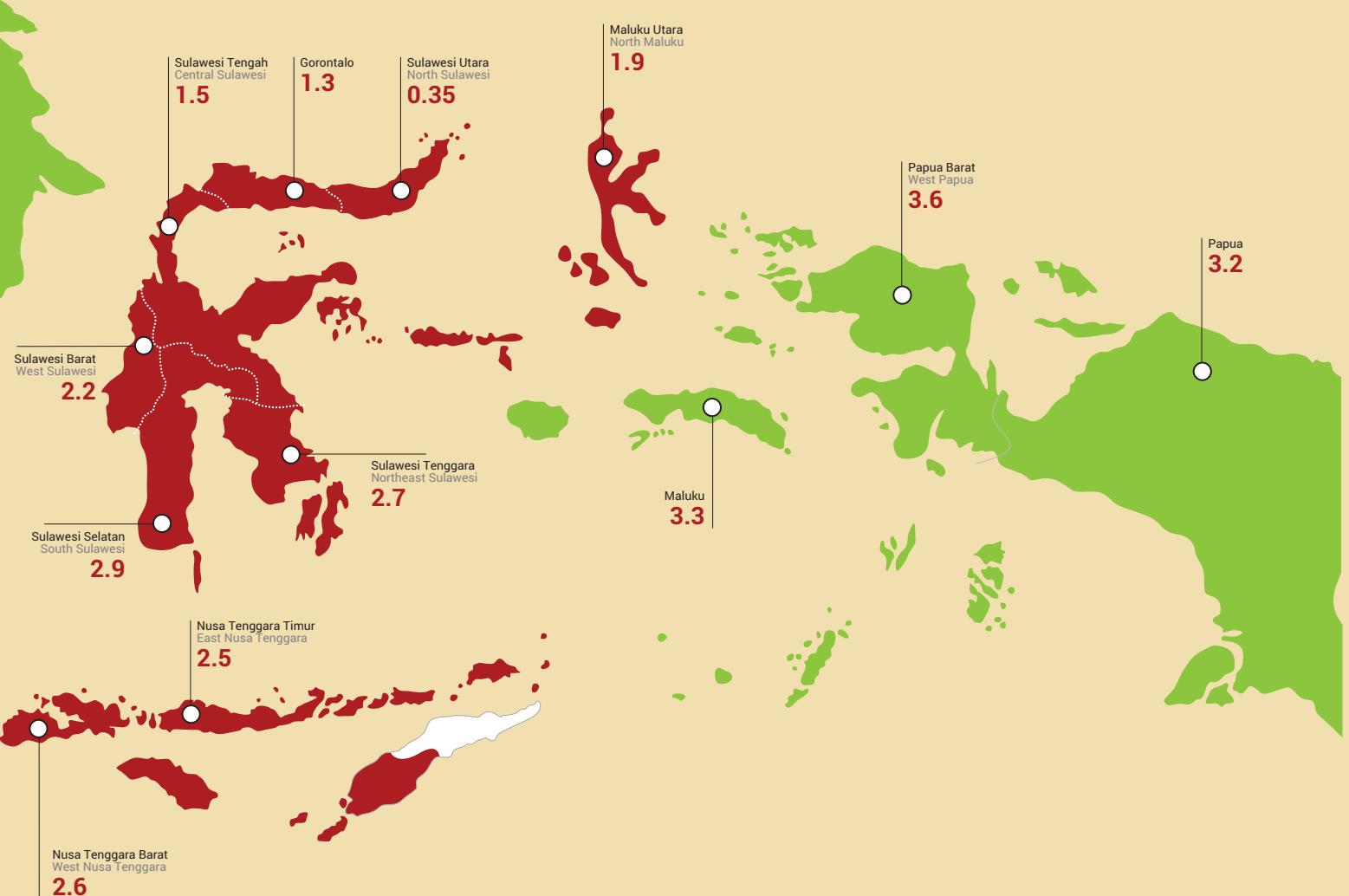


Inf ≤ 5.0%

4.0% ≤ Inf < 5.0%

3.0% ≤ Inf < 4.0%

Inf < 3.0%



Sumber: Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, diolah
Source: Bank Indonesia and Central Bureau of Statistics, processed

Analisis Industri Industrial Analysis

Nilai Tukar Mata Uang

Exchange Rate

Setelah mengalami tekanan pasca pengumuman Pemilu Presiden AS, nilai tukar Rupiah menguat di bulan Desember seiring dengan aliran modal yang kembali masuk. Secara *point to point*, Rupiah terapresiasi 0,59% (mtm) menjadi Rp13.473/USD. Penguatan tersebut sejalan dengan peningkatan aliran dana masuk terutama di Surat Utang Negara (SUN). Sementara itu, *outflow* yang terjadi di pasar saham berkurang setelah kenaikan FFR dan bahkan mendorong *inflow* di akhir Desember 2016. Selama tahun 2016, secara *point to point* Rupiah telah menguat sebesar 2,32% (ytd) terutama didukung oleh persepsi positif investor terhadap perekonomian domestik yang mendorong aliran dana masuk.

Faktor risiko eksternal dan domestik yang mempengaruhi nilai tukar pada bulan Desember 2016 mengalami perbaikan dibanding kondisi pada bulan November 2016. Hal ini tercermin dari tren penurunan VIX Index dan *Credit Default Swap* (CDS) Indonesia selama bulan Desember 2016. Secara rata-rata VIX dan CDS pada bulan Desember 2016 sebesar 12,5 dan 163,5 atau lebih rendah dibandingkan rata-rata bulan November 2016 yaitu 15,2 dan 170,3. Perbaikan faktor eksternal terutama terjadi pasca kenaikan *Federal Funds Rate* (FFR) sebesar 25 bps yang sudah diantisipasi pasar. Di sisi domestik, penguatan Rupiah di topang perbaikan data-data perekonomian, seperti neraca perdagangan dan indeks keyakinan konsumen yang positif.

Penguatan Rupiah disertai dengan volatilitas yang menurun. Peningkatan volatilitas Rupiah yang cukup tinggi sempat terjadi pada pertengahan bulan Desember 2016 jelang *Federal Open Market Committee* (FOMC) meeting, namun volatilitas Rupiah kembali menurun pasca kenaikan FFR sebesar 25 bps yang sesuai dengan ekspektasi pasar. Dengan demikian, sepanjang 2016, volatilitas Rupiah lebih rendah dari volatilitas tahun 2015 dan masih lebih rendah dibandingkan rata-rata volatilitas sebagian mata uang negara peers seperti Rand (Afrika Selatan), Real (Brazil), Lira (Turki), Ringgit (Malaysia), dan Won (Korea Selatan).

Following the pressure post-Presidential Election in the US, Rupiah exchange rate strengthened in December, along with the incoming investments. By point to point, Rupiah was appreciated by 0.59% (mtm) to Rp13,473/US Dollar. The strengthening was in line with the increase in incoming funds, particularly in the form Government Bonds. Meanwhile, the outflow in the stock market lessened after the increase of FFR, even encouraged inflow at the end of December 2016. Throughout 2016, point to point, Rupiah has strengthened by 2.32% (ytd), which was mainly supported by positive investors' perception towards the domestic economy which eventually encouraging inflowing funds.

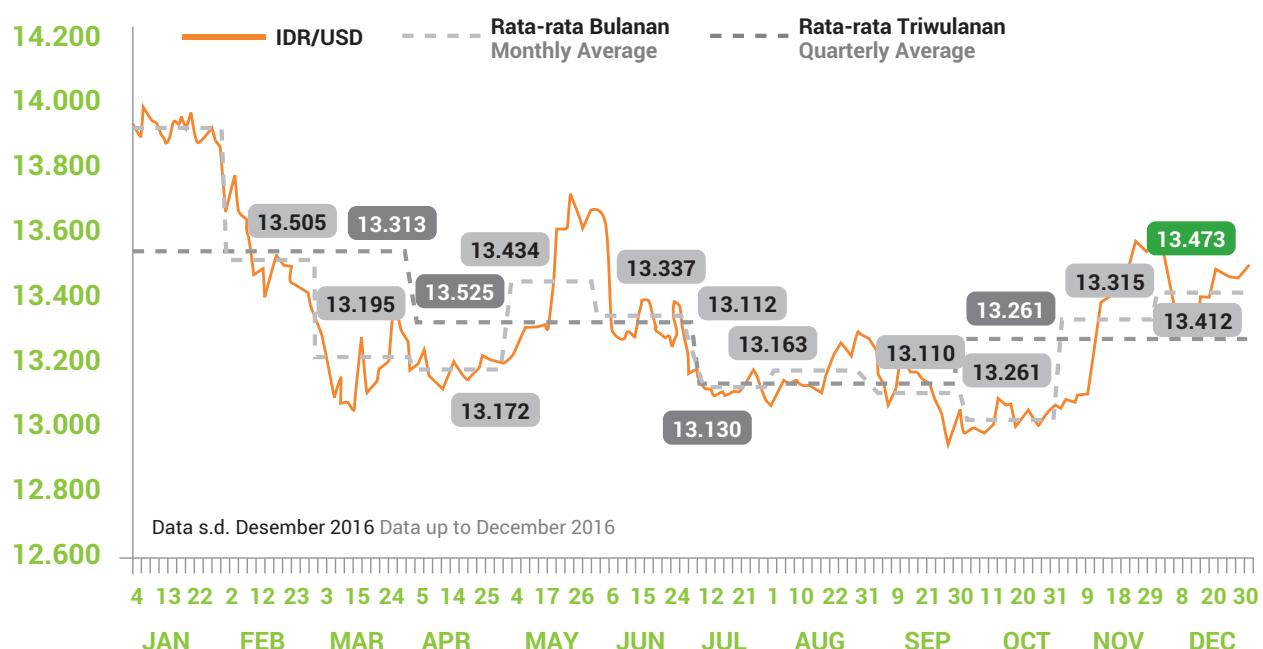
External and domestic risk factors affecting the exchange rate in December 2016 improved compared to in November 2016. This is reflected from the declining trend in VIX Index and Indonesian Credit Default Swap (CDS) in December 2016. On average, VIX and CDS in December 2016 were consecutively at 12.5 and 163.5, which were lower than the November 2016's average at 15.2 and 170.3. Improvement in external factor happened particularly after the increase in Federal Funds Rate (FFR) at 25 bps which was anticipated by the market. Domestically, the strengthening in Rupiah was supported by improvement in economic data such as trade balance and positive consumer confidence index.

Rupiah strengthening was accompanied by declining volatility. Significant increase in Rupiah volatility happened in mid-December 2016, nearing the Federal Open Market Committee (FOMC) meeting, but later declined following the increase in FFR by 25 bps in accordance with the market expectation. Therefore, throughout 2016, Rupiah volatility was lower compared to in 2015, and also lower compared to average volatility in several peer countries' currencies such as Rand (South Africa), Real (Brazil), Lira (Turkey), Ringgit (Malaysia), and Won (South Korea).

Faktor risiko eksternal dan domestik yang mempengaruhi nilai tukar pada bulan Desember 2016 mengalami perbaikan dibanding kondisi pada bulan November 2016. Hal ini tercermin dari tren penurunan VIX Index dan Credit Default Swap (CDS) Indonesia selama bulan Desember 2016.

External and domestic risk factors affecting the exchange rate in December 2016 improved compared to in November 2016. This is reflected from the declining trend in VIX Index and Indonesian Credit Default Swap (CDS) in December 2016.

Grafik Nilai Tukar Rupiah terhadap USD Tahun 2016 Chart of Rupiah Exchange Rate against US Dollar in 2016



Sumber: Bank Indonesia Source: Bank Indonesia

Analisis Industri Industrial Analysis

Sekilas Industri Crude Palm Oil (CPO)

Crude Palm Oil (CPO) Industry Overview

Pada tahun 2015, industri sawit di Indonesia menghadapi tantangan yang berat karena isu kebakaran lahan. Namun dengan upaya penanggulangan yang maksimal dari berbagai pihak, pada tahun 2016 kejadian kebakaran lahan sangat minim terjadi.

Selain kebakaran lahan, fenomena El Niño yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2015 membawa dampak menurunnya produksi minyak sawit Indonesia pada tahun 2016. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), produksi Crude Palm Oil (CPO) di tahun 2016 hanya mampu mencapai 31,5 juta ton dan *Palm Kernel Oil* (PKO) sebesar 3 juta ton sehingga total keseluruhan produksi minyak sawit Indonesia adalah 34,5 juta ton. Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 sebesar 35,5 juta ton yang terdiri dari CPO 32,5 juta ton dan PKO 3 juta ton.

Tingkat ekspor pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 5% atau dari 26,4 juta ton pada tahun 2015 menjadi 25,1 juta ton di tahun 2016. Penyebab utama penurunan eksport tersebut adalah dikarenakan permintaan pasar global yang melemah hampir di semua negara tujuan eksport dan penggunaan CPO untuk program *mandatory* bahan bakar nabati (B-20) yang telah berjalan secara konsisten.

Hampir seluruh negara tujuan utama eksport kelapa sawit Indonesia mengalami penurunan kecuali Amerika Serikat dan Negara Uni Eropa. Ekspor ke Amerika Serikat meningkat secara signifikan yaitu 43% yaitu dari 758,55 ribu ton di tahun 2015 menjadi 1,08 juta ton di tahun 2016. Peningkatan eksport juga terjadi ke Negara-negara Uni Eropa dengan mencatatkan kenaikan sebesar 3% atau dari 4,2 juta di tahun 2015 meningkat menjadi 4,4 juta ton di tahun 2016. Selain Amerika Serikat dan Negara-negara Uni Eropa, negara tujuan eksport lainnya mengalami penurunan yaitu India, China, dan Pakistan. China mencatatkan penurunan permintaan yang signifikan sebesar 19% yaitu dari 3,99 juta ton di tahun 2015 menjadi 3,23 juta ton di tahun 2016. Penurunan eksport ke China dipengaruhi oleh adanya program penggalakan peternakan, sehingga China lebih banyak mengimpor kedelai untuk pakan ternak dan mendapatkan pasokan minyak dari proses *crushing* kedelai.

Indonesian CPO industry in 2015 faced serious challenge from land fire. Thanks to optimal countermeasures of various parties, land fire could be minimized in 2016.

In addition to land fire, El Niño phenomenon which hit Indonesia in 2015 still showed its effect with the declined palm oil production in 2016. From the Indonesian Palm Oil Association (IPOA) data, Crude Palm Oil (CPO) production in 2016 reached only 31.5 million ton, while Palm Kernel Oil (PKO) was 3 million ton, making the overall total Indonesian palm oil production at 34.5 million ton. The figure was a decline from 2015 at 35.5 million ton, comprising 32.5 million ton of CPO and 3 million ton of PKO.

The export in 2016 declined by 5% from 26.4 million ton in 2015 to 25.1 million ton in 2016. This was mainly caused by weakening global market demands in almost all destination countries, apart from mandatory use of CPO for biofuel (B-20) which has been running consistently.

Almost all destination countries of Indonesian palm oil export suffered from decline, except the United States and the EU Countries. Export to US increased significantly by 43%, from 758.55 thousand ton in 2015 to 1.08 million ton in 2016. Improvements also happened in EU Countries, with 3% increase from 4.2 million ton in 2015 to 4.4 million ton in 2016. Destination countries outside the US and EU Countries, i.e. India, China, and Pakistan suffered from decline. China recorded significant decline in demands by 19%, from 3.99 million ton in 2015 to 3.23 million ton in 2016. The decline in export to China was affected by the cattle ranching intensification, which increased China's soybean import for animal feed and oil supply from soybean crushing process.

Selanjutnya Pakistan mencatatkan penurunan permintaannya di tahun 2016 sebesar 5,5% dari 2,19 juta ton di tahun 2015 menjadi 2,07 juta ton di tahun 2016. Sedangkan India mencatatkan penurunan yang tipis yaitu 0,3% dari 5,8 juta ton di tahun 2015 menjadi 5,78 juta ton di tahun 2016.

Dari sisi harga, CPO global sudah mulai stabil yang awalnya di angka USD558 per metric ton di awal tahun 2016 dan terus meningkat positif menjadi USD789 per metric ton dipenutupan akhir tahun 2016 yang dipicu oleh penipisan stok. Harga rata-rata sepanjang tahun 2016 juga tercatat naik 14% dibandingkan tahun 2015.

Meanwhile, Pakistan recorded a decline in demands by 5.5%, from 2.19 million ton in 2015 to 2.07 million ton in 2016. India, on the other hand, recorded a slight decline in demands by 0.3%, from 5.8 million ton in 2015 to 5.78 million ton in 2016.

The global CPO price started to be steady, at the initial price of USD558 per metric ton in the beginning of 2016, which increasing positively to USD789 per metric ton at the end of 2016 due to stock depletion. The average price in 2016 also increased by 14% compared to in 2015.

Grafik Perkembangan Harga CPO Tahun 2016 (USD/Ton) Chart of CPO Price Growth in 2016 (USD/ton)



Sumber: CIF Rotterdam Source: CIF Rotterdam

Devisa yang dihasilkan dari ekspor CPO di tahun 2016 mencapai USD18,1 miliar menurun dibandingkan tahun 2015 USD18,67 miliar atau menurun 3%.

The foreign exchange income from CPO export in 2016 reached USD18.1 billion, which was a decrease by 3% from 2015 at USD18.67 billion.

Analisis Industri Industrial Analysis



Dampak Penerbitan dan Perubahan Regulasi terhadap Kinerja BPDPKS Impact of Publications and Regulatory Changes on IECFPO Performance

Patuh dan taat terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh regulasi terkait menjadi sebuah komitmen BPDPKS dalam menjalankan setiap operasionalnya. Selama tahun 2016, terdapat penerbitan baru dan perubahan peraturan sebagaimana dalam tabel berikut:

Compliance with every law and regulation issued by relevant regulators becomes IECFPO's commitment in running its operations. Throughout 2016, there were several new publications and regulatory changes as shown in the following table.

Tabel Penerbitan Baru dan Perubahan Peraturan di Tahun 2016 Table of New Publications and Regulatory Changes in 2016

No	Nama Peraturan Regulation Name	Keterangan Perubahan yang Signifikan Description on Significant Amendment	Dampak terhadap BPDPKS yang Signifikan Significant Impact on IECFPO
1	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2016 on Amendment to Presidential Regulation Number 61 of 2015 on Collection and Utilization of Crude Palm Oil Funds.	Perubahan Susunan Komite Pengarah BPDPKS Change in IECFPO Steering Committee Composition	<p>Susunan Komite Pengarah menjadi:</p> <p>a) Ketua: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;</p> <p>b) Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Pertanian; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Perindustrian; 4. Menteri Perdagangan; 5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Menteri Badan Usaha Milik Negara; dan 7. Menteri Perencanaan. <p>The new Steering Committee composition:</p> <p>a) Chair: Coordinating Minister for Economic Affairs;</p> <p>b) Member:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minister of Agriculture; 2. Minister of Finance; 3. Minister of Industry; 4. Minister of Trade; 5. Minister of Energy and Mineral Resources; 6. Minister of State-Owned Enterprises; and 7. Minister of Planning.
2	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Minister of Finance Regulation Number 220/PMK.05/2016 concerning Accounting and Financial Reporting Guidelines for Public Service Agencies;	Perubahan pernyataan standar akuntansi pemerintahan tentang pelaporan keuangan BLU. Change in the statements of government accounting standards concerning financial reporting of Public Service Agency.	BPDPKS cukup menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. IECFPO shall simply prepare its financial statements based on the government accounting standards.
3	PMK Nomor 30/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan Minister of Finance Regulation Number 30/PMK.05/2016 on Amendment to Minister of Finance Regulation Number 133/PMK.05/2015 on Service Tariff of Public Service Agency of Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil at the Ministry of Finance.	Terdapat beberapa komoditas yang dikenakan pungutan oleh BPDKS. There are several commodities which are subjects to restitutions by IECFPO.	BPDPKS melakukan pungutan atas beberapa komoditas tambahan dengan tarif yang telah ditentukan. Restitutions are imposed by IECFPO for several additional commodities with specified tariffs.
4	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 798/KMK.05/2016 tentang Penyetoran Surplus Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Keuangan Minister of Finance Decree Number 798/KMK.05/2016 on Budget Surplus Deposit of Public Service Agency Work Unit at the Ministry of Finance	Penerbitan Baru New Publication	BPDPKS memiliki kewajiban untuk melakukan setoran sebesar Rp2 triliun kepada kas Negara. IECFPO has the obligation to contribute Rp2 trillion to the State treasury.

Kontribusi BPDPKS kepada Negara

IECFPO Contribution to the Country



Kontribusi pada Industri Sawit Kelapa Sawit Contribution to Palm Oil Industry

Kontribusi utama BPDPKS dalam industri kelapa sawit tercermin pada kegiatan operasional yaitu meningkatkan harga, memperkuat industri hilir dan membangun komoditas kelapa sawit yang berkelanjutan.

Adapun langkah-langkah BPDPKS dalam mengembangkan industri kelapa sawit, secara umum tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pembayaran selisih harga biodiesel,
2. Penyaluran dana riset,
3. Promosi kelapa sawit,
4. Pengembangan SDM kelapa sawit,
5. Penyaluran dana peremajaan kebun kelapa sawit,
6. Persiapan penyediaan sarana dan prasarana kebun kelapa sawit.

IECFPO's main contribution in palm oil industry is shown by its operating activities i.e. increasing price, strengthening downstream industry and establishing sustainable palm oil commodity.

Measures taken by IECFPO in developing palm oil industry in 2016 were as follows:

1. Biodiesel price variance payment expenses
2. research fund-distribution
3. Palm oil promotion
4. Palm oil HR development expenses
5. Palm oil estate replanting fund distribution
6. Preparation of palm oil estate facilities and infrastructure procurements.

Kontribusi dalam Pembayaran Pajak Tax Contribution

Terkait dengan hasil kinerja keuangan, BPDPKS memenuhi kewajiban melalui pembayaran pajak. BPDPKS berperan dalam melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas pajak-pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi, PPh pasal 23 atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan, dan PPh pasal 22 serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Setoran pajak BPDPKS pada tahun 2016 adalah sebesar Rp995.638.719.427 meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp96.901.286.626.

Related to the financial performance outcomes, IECFPO meets its obligation by tax contribution. IECFPO actively participates in the withholding, payment, and report of taxes such as Income Tax Article 21 for income received by individual taxpayer, Income Tax Article 23 for income received by corporate taxpayer, and Income Tax Article 22, as well as Value Added Tax (PPN).

IECFPO's tax contribution in 2016 was Rp995,638,719,427, increased by Rp96,901,286,626 compared to the 2015's.

Tabel Pembayaran Pajak Tahun 2015-2016 (Rp) Table of Tax Contribution in 2015-2016 (Rp)

Jenis Pajak Tax Types	2015	2016
PPH Pasal 21 Income Tax Article 21	1.828.666.044	4.315.651.785
PPH Pasal 22 Income Tax Article 22	27.212.910	168.223.734
PPH Pasal 23 Income Tax Article 23	1.839.824.262	3.695.142.799
PPH Pasal 4 Income Tax Article 4	-	995.235.480
PPN VAT	93.205.583.410	986.464.465.629
Jumlah Total	96.901.286.626	995.638.719.427

BPDPKS tidak pernah terlambat dalam penyampaian dokumen kewajiban perpajakan (SPT Tahunan dan Bulanan), serta tidak pernah terlambat dalam penyampaian dokumen wajib yang harus dilaporkan kepada regulator.

IECFPO constantly submits its taxation documents on time (Annual and Monthly Tax Returns) and mandatory documents that must be submitted to regulator.

Analisis Kinerja Operasional

Operational Performance Analysis



Analisis Pencapaian Kinerja Utama

Main Performance Analysis

Berikut adalah pencapaian IKU BPDPKS selama tahun 2016:

The following details show IECFPO Key Performance Indicators in 2016.

Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Utama BPDPKS Tahun 2016 Table of ECFPO Key Performance Indicators in 2016

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama Strategic Goal/ Key Performance Indicator	Target Target				Realisasi Realization			
	Q1 Q1	Q2/ Smt I Q2/ Smt I	Q3/ s.d. Q3 Q3/ s.d. Q3	Q4/ Y-16 Q4/ Y-16	Q1	Q2/ Smt I Q2/ Smt I	Q3/ s.d. Q3 Q3/ s.d. Q3	Q4/ Y-16 Q4/ Y-16
Terwujudnya dana kelapa sawit yang sustainable Realization of sustainable CPO fund								
1 Persentase dana pendapatan yang sesuai RBA	Percentage of income fund suitable with the Budget Business Plan	25%	50%	75%	100%	32,11%	59,95%	88,27% 129,13%
2 Persentase pencapaian target penyaluran dana perkebunan kelapa sawit yang sesuai RBA	Percentage of palm oil plantation fund distribution target outcome suitable with the Budget Business Plan	25,70%	48,24%	73,68%	100%	6,02%	34,75%	70,93% 82,70%
3 Deviasi target harga CPO (Target harga CPO Q1:\$550, Q2:\$575, Q3: \$600, Q4: \$625)	Deviation in CPO price target (CPO price target Q1:\$550, Q2:\$575, Q3: \$600, Q4: \$625)	20%	20%	20%	20%	12,50%	22,46%	20,07% 21,07%
Perencanaan bisnis yang berkualitas Qualified Business Plan								
4 Persentase program replanting yang diselesaikan sesuai RBA (target 48.000 ha)	Percentage of replanting program completed based on WP&B (target of 48,000 ha)	10%	30%	70%	100%	0%	1,28%	0,52% 1,59%
Penyelenggaraan penyaluran dana yang efektif Effective fund distribution								
5 Jumlah riset yang akan dibiayai	Number of researches to be funded	-	-	-	50	4	9	35 68
6 Persentase volume biodiesel yang disubsidi (target 2.536.500 KL)	Percentage of total volume of subsidized biodiesel (target of 2,536,500 KL)	23,89%	48,51%	73,87%	100%	22,99%	52,36%	76,57% 109,12%
Pengelolaan kemitraaan yang berkelanjutan Sustainable partnership management								
7 Persentase program promosi yang sesuai RBA	Percentage of promotion program suitable with the WP&B	20%	50%	70%	100%	37,50%	56,14%	120% 120%

Terwujudnya Dana Kelapa Sawit yang Sustainable

Realization of Sustainable CPO fund

Percentase Dana Pendapatan yang Sesuai RBA

Target pendapatan yang sesuai RBA tahun 2016 adalah sebesar Rp9.541.455.524.000 dengan realisasi mencapai Rp12.321.222.957.719 atau sebesar 129,13%. Untuk mencapai target tersebut, BPDPKS didukung melalui upaya-upaya yang selalu dilakukan diantaranya adalah:

Percentage of Income Fund Suitable with the WP&B

Income target based on WP&B of 2016 was Rp9,541,455,524,000 with realization of Rp12,321,222,957,719 or at 129.13%. To achieve these targets, IECFPO was supported by an ongoing effort such as:

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

- Melakukan sosialisasi pembayaran pungutan secara online untuk mempermudah eksportir dalam melakukan kegiatan ekspor sawit dan turunannya.
- Monitoring dan evaluasi pelabuhan muat eksport kelapa sawit untuk mengetahui masalah yang dihadapi baik dari surveyor maupun dari eksportir.
- Melakukan monitoring pendapatan secara rutin (berkala).

- Disseminating online restitution payment to facilitate exporters in the export of palm oil and its derivatives.
- Monitoring and evaluation of loading port of oil palm exports to find out the problems faced by both surveyors and exporters.
- Conducting regular income monitoring.

Persentase Pencapaian Target Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang Sesuai RBA

Penyaluran dana perkebunan kelapa sawit terdiri dari penyaluran untuk replanting, sarana prasarana, promosi, pengembangan SDM sawit, biodiesel dan riset. Realisasi penyaluran dana perkebunan kelapa tahun 2016 mencapai Rp10.825.334.598.468 atau sebesar 82,70% dari target tahun 2016.

Percentage of Palm Oil Estate Fund Distribution Target Outcome Suitable with WP&B

The distribution of palm oil estate fund consisted of distribution for replanting, facilities and infrastructures, promotion, human resources development, biodiesel and research. The realization of palm oil estate fund distribution in 2016 was Rp10,825,334,598,468 or 82.70% of the target in 2016.

Deviasi Target Harga CPO

Rata-rata harga CPO (dari CIF Rotterdam Index) bulan Desember adalah sebesar USD789 per ton sehingga deviasi harga CPO terhadap target harga acuan adalah sebesar 21,07%. Kenaikan harga CPO pada triwulan IV Tahun 2016 antara lain disebabkan oleh permintaan minyak sawit dunia yang tinggi. Oleh karena itu, BPDPKS senantiasa melakukan monitoring pergerakan harga CPO baik dari sumber CIF Rotterdam, KPBN (Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara), dan MPOB (*Malaysian Palm Oil Board*).

Deviation in CPO Price Target

The average CPO price (from the CIF Rotterdam Index) in December was USD789 per ton thus the CPO price deviation against the reference price target was at 21.07%. The increased CPO price in the fourth quarter of 2016 was partly due to the global high demand of palm oil. Therefore, IECFPO constantly monitored CPO price movement from CIF Rotterdam sources, KPBN (Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara), and MPOB (Malaysian Palm Oil Board).

Perencanaan Bisnis yang Berkualitas

Qualified Business Plan

Persentase Program *Replanting* yang Diselesaikan Sesuai RBA

Target program *replanting* triwulan IV tahun 2016 sesuai dengan revisi RBA T.A. 2016 berubah dari yang sebelumnya sebesar Rp800.000.000.000 dengan luasan lahan sebesar 48.000 ha menjadi sebesar Rp400.000.000.000 dengan luasan lahan sebesar 16.000 ha.

Berdasarkan revisi DIPA T.A. 2016, realisasi program replanting tahun 2016 adalah sebesar 254 ha atau sebesar 1,59%. Realisasi penyaluran dana *replanting* tersebut terkendala karena Peraturan Menteri Keuangan (PMK) masih disusun dan dibahas di tingkat Kementerian.

Percentage of Replanting Program Completed Based on WP&B

The target of the fourth quarter replanting program in 2016 was in accordance with the revised WP&B of 2016 Budget Year from Rp800,000,000,000 with a land area of 48,000 ha to Rp400,000,000,000 with a land area of 16,000 ha.

In accordance with Excerpt of Budget Implementation List of 2016 Budget Year, replanting program realization in 2016 was 245 ha or at 1.59%. The realization of the replanting fund distribution was constrained because the Minister of Finance Regulation (PMK) remain drafted and discussed at the Ministerial level.

Diharapkan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan ini, akan dibentuk Tim Penilai Kelayakan Peremajaan sebagai verifikator dari Pekebun dan Calon Lahan yang akan diremajakan.

It is expected that under this Regulation of the Minister of Finance, Replanting Feasibility Assessment Team would be established. It served as verifier of Planters and Prospective Land that would be replanted.

Penyelenggaraan Penyaluran Dana yang Efektif

Effective Fund Distribution

Jumlah Riset yang akan Dibiaya

Target pembiayaan riset pada Triwulan IV adalah sebanyak 50 riset, sementara realisasi tahun 2016 telah mencapai 68 riset dengan penyaluran dana mencapai Rp52,76 miliar.

Saat ini BPDPKS telah memiliki *roadmap* riset sawit Indonesia yang disusun oleh tim *roadmap* yang terdiri dari para pakar/ahli di bidang perkelapa-sawitan, untuk lebih mengarahkan riset-riset yang didanai agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Pembayaran riset dilakukan berdasarkan tagihan yang masuk sehingga nilai penyaluran riset berfluktuatif per bulannya.

Number of Researches to be Funded

The target of research funding in the fourth Quarter was 50 researches, while the realization of 2016 has reached 68 researches with Rp52.76 billion of fund distributed.

Currently IECFPO already has prepared Indonesian palm oil research roadmap compiled by a roadmap team consisting of experts in the field of palm oil estate, to further direct funded research to better suit the needs of the industry. Research payment was based on incoming invoices therefore the value of research distribution fluctuated every month.

Persentase Volume Biodiesel yang Disubsidi

Target penyaluran dana volume biodiesel tahun 2016 adalah sebesar 2.536.500 KL. Realisasi volume biodiesel tahun 2016 telah mencapai 2.767.730 KL atau sebesar 109,12%. Pembayaran biodiesel untuk periode penyaluran bulan November 2016 s.d. April 2017 masih menunggu penandatangan kontrak antara BU BBM dan BU BBN.

Percentage of Total Volume of Subsidized Biodiesel

The target of biodiesel volume fund distribution in 2016 amounted to 2,536,500 KL. The actual volume of biodiesel in 2016 has reached 2,767,730 KL or 109.12%. Biodiesel payments for the November 2016 disbursement period to April 2017 was currently waiting for contract execution between BU BBM and BU BBN.

Pengelolaan Kemitraaan yang Berkelanjutan

Sustainable Partnership Management

Persentase Program Promosi yang Sesuai RBA

Target program promosi yang sesuai RBA adalah sebanyak 57 kegiatan dengan realisasi program promosi tahun 2016 adalah sebanyak 74 kegiatan. Kegiatan yang dilakukan mulai dari *stakeholders gathering* sampai dengan mengikuti event sawit internasional.

Percentage of Promotion Program Based on WP&B

The target of promotion program based on WP&B was 57 activities with the realization of promotion programs in 2016 with 74 activities. Activities conducted started from stakeholders gathering to attending international oil palm event.

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Analisis Operasi Per Direktorat Operational Analysis per Directorate

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sasaran strategis diturunkan menjadi indikator per direktorat yang terbagi menjadi 5 (lima) direktorat. Penetapan indikator disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab direktorat bersangkutan. Adapun tugas dan tanggung jawab direktorat telah diuraikan sebelumnya pada sub bab Direksi.

Based on Key Performance Indicators, strategic objectives were divided into indicator per directorate divided into 5 (five) directorates. Determination of indicator was adjusted to the duties and responsibilities of such directorate. The duties and responsibilities of the directorate were described earlier in the sub chapter of the Board of Directors.

Kinerja Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Performance of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management Directorate

Tabel Pencapaian IKU Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Tahun 2016
Table of the KPI Achievement of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management Directorate in 2016

No	Kode IKU KPI Code	IKU KPI	Target Target	Realisasi Realization	% Capaian % Outcome
1	1a-CP	Percentase dana pendapatan sesuai dengan RBA	Percentage of income fund according to Budget Business Plan	43,47%	65,98%
2	2a-CP	Indeks kepatuhan pengguna layanan yang tinggi	Index of high service user compliance	3	3
3	7a-CP	Indeks penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu	Index of punctual financial statements preparation	3	4
4	8a-CP	Percentase pegawai yang memenuhi standar jamlat	Percentage of employees meeting standard training hours	30,47%	54,65%
5	10a-CP	Percentase penyediaan sarana dan prasarana perkantoran	Percentage of office facility and infrastructure provision	18,08%	51,21%
6	11a-CP	Percentase kualitas pelaksanaan anggaran internal setker BPDPKS sebagaimana <i>baseline</i>	Percentage of IECFPO work unit internal budget implementation quality according to baseline	49,67%	41,92%
7	11b-CP	Percentase penerbitan SP3B BLU bulanan secara akurat	Percentage of accurate monthly Public Service Agency Budget Approval Order	100,00%	100,00%

Berdasarkan tabel diatas, dari 7 (tujuh) IKU, telah tercapai 6 (enam) IKU. Sedangkan untuk Percentase kualitas pelaksanaan anggaran internal setker BPDPKS sebagaimana *baseline* belum tercapai maksimal.

From the table above, six (6) out of seven (7) KPIs were met. The Percentage of IECFPO work unit internal budget implementation quality according to baseline was not optimally achieved.



Kinerja Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana

Performance of Planning and Fund Management Directorate

Tabel Pencapaian IKU Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana Tahun 2016
Table of KPI Achievement of the Planning and Management Directorate in 2016

No	Kode IKU KPI Code	IKU KPI	Target Target	Realisasi Realization	% Capaian % Outcome
1	1a-CP	Pendapatan dana pendapatan sesuai dengan RBA	Income fund according to Budget Business Plan	100,00%	122,00%
2	1b-CP	Deviasi proyeksi harga CPO	Deviation in CPO price estimation	20,00%	21,00%
3	3a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian analisis penghimpunan dana	Index of punctual fund collection analysis completion	3	4
4	3b-N	Persentase pengembangan alokasi dana	Percentage of fund allocation development	100,00%	174,00%
5	4a-N	Indeks ketepatan waktu penyediaan perencanaan sistem informasi BPDPKS	Index of punctual preparation of IECFPO information system planning	3	3

Berdasarkan tabel diatas, dari 5 (lima) IKU, telah tercapai 4 (empat) IKU. Sedangkan untuk Deviasi proyeksi harga CPO belum tercapai maksimal.

From the table above, four (4) out of five (5) KPIs were met. Deviation in CPO price estimation was not optimally.

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Kinerja Direktorat Penghimpunan Dana

Performance of Fund Raising Directorate

Tabel Pencapaian IKU Direktorat Penghimpunan Dana Tahun 2016
Table of KPI Achievement of the Fund Raising Directorate in 2016

No	Kode IKU KPI Code	IKU KPI	Target Target	Realisasi Realization	% Capaian % Outcome
1	1a-CP	Deviasi proyeksi harga CPO	Deviation in CPO price estimation	20,00%	21,00%
2	1b-CP	Persentase pencapaian target penyaluran dana perkebunan sawit yang sesuai RBA	Percentage of palm oil estate fund distribution target outcome according to Budget Business Plan	100,00%	7,23%
3	2a-C	Persentase program <i>replanting</i>	Percentage of replanting program	100,00%	1,59%
4	2b-N	Persentase program pemberdayaan petani sawit	Percentage of palm oil farmers empowerment program	100,00%	120,00%
5	2c-N	Persentase rapat koordinasi/rapat kerja terkait program <i>replanting</i>	Percentage of coordination meeting/work meeting on replanting program	100,00%	120,00%
6	2d-N	Persentase rapat koordinasi/rapat kerja terkait program pemberdayaan petani sawit	Percentage of coordination meeting/work meeting on palm oil farmers empowerment program	100,00%	120,00%
7	2e-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian penyusunan peraturan mengenai tata cara pemberdayaan petani sawit rakyat	Index of punctual completion of the preparation of provisions on smallholders empowerment procedures	3	3
8	2f-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian penyusunan Surat Keputusan Direktur Utama tentang pemberdayaan petani sawit rakyat	Index of punctual completion of the preparation of President Director Decree on Smallholders Fund Assistance	3	3
9	2g-N	Persentase program seminar dan training	Percentage of seminar and training programs	100,00%	100,00%

Berdasarkan tabel diatas, dari 9 (sembilan) IKU, telah tercapai 7 (tujuh) IKU. Terdapat 2 (dua) IKU yang belum tercapai. Untuk IKU Persentase pencapaian target penyaluran dana perkebunan sawit yang sesuai RBA dan Persentase program replanting belum tercapai secara maksimal.

From the table above, seven (7) out of nine (9) KPIs were met. Two remaining KPIs were unmet. The KPI for the Percentage of palm oil estate fund distribution target outcome according to Budget Business Plan and Percentage of replanting program not optimally achieved.

Kinerja Direktorat Penyaluran Dana

Performance of Fund Distribution Directorate

Tabel Pencapaian IKU Direktorat Penyaluran Dana Tahun 2016
Table of KPI Achievement of Fund Distribution Directorate in 2016

No	Kode IKU KPI Code	IKU KPI	Target Target	Realisasi Realization	% Capaian % Outcome
1	1b-CP	Percentase pencapaian target penyaluran dana perkebunan kelapa sawit	Percentage of palm oil estate fund distribution target outcome	100,00%	87,48%
2	1c-C	Deviasi proyeksi harga CPO	Deviation in CPO price estimation	20,00%	19,01%
3	5a-C	Percentase penyelesaian penilaian dan verifikasi permohonan dana tepat waktu	Percentage of punctual assessment and fund proposal verification completion	100,00%	100,00%
4	5b-C	Jumlah riset yang dibiayai	Number of researches funded	50	60
5	5c-C	Percentase volume biodiesel yang disubsidi (target 2.536.500 KL)	Percentage of total volume of subsidized biodiesel (target of 2,536,500 KL)	100,00%	108,49%
6	1b-N	Percentase penyelesaian regulasi dan peraturan pelaksanaan penyaluran dana	Percentage of completion of fund distribution implementation regulation and provisions	100,00%	100,00%
7	1b-N	Jumlah laporan penyaluran dana stabilisasi harga sawit untuk biodiesel dan riset	Number of report of palm oil price stabilization fund distribution for biodiesel and research	2	4
8	6b-N	Percentase penyelesaian program pengembangan SDM sawit sesuai RBA untuk program S2 & S3	Percentage of completion of palm oil HR development program according to Budget Business Plan for Master's and Doctorate Programs	100,00%	0

Berdasarkan tabel diatas, dari 8 (delapan) IKU, telah tercapai 6 (enam) IKU. Terdapat 2 (dua) IKU yang belum tercapai. Untuk IKU Percentase pencapaian target penyaluran dana perkebunan kelapa sawit, persentase penyelesaian program pengembangan SDM sawit sesuai RBA untuk program S2 & S3 belum tercapai maksimal.

From the table above, six (6) out of eight (8) KPIs were met. Two remaining KPIs were unmet. The KPI for the Percentage of palm oil estate fund distribution target outcome, Percentage of completion of palm oil HR development program according to Budget Business Plan for Master's and Doctorate Programs not optimally achieved.

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Kinerja Direktorat Kemitraan Partnership Directorate Performance

Tabel Pencapaian IKU Direktorat Kemitraan Tahun 2016 Table of KPI Achievement of the Partnership Directorate in 2016

No	Kode IKU IKU Code	IKU IKU		Target Target	Realisasi Realization	% Capaian % Capaian
1	1b-CP	Percentase pencapaian target penyaluran dana perkebunan kelapa sawit	Percentage of palm oil estate fund distribution target outcome	100,00%	52,71%	52,71%
2	1b-CP	Deviasi proyeksi harga CPO	Deviation in CPO price estimation	20,00%	21,00%	95,00%
3	2a-N	Indeks kepuasan mitra atas layanan Direktorat Kemitraan	Index of partner satisfaction of Directorate of Partnership's services	3	3	100,00%
4	3a-CP	Percentase program promosi sesuai RBA	Percentage of promotion program according to Budget Business Plan	100,00%	130,00%	120,00%
5	3b-CP	Percentase penyelesaian program pengembangan SDM sawit yang sesuai RBA	Percentage of completion of palm oil HR development program according to Budget Business Plan	100,00%	143,00%	120,00%
6	4a-N	Indeks pengelolaan layanan website yang berkualitas	Index of quality website service management	3	3	100,00%

Berdasarkan tabel diatas, dari 6 (enam) IKU, telah tercapai 4 (empat) IKU. Terdapat 2 (dua) IKU yang belum tercapai. Untuk IKU Percentase pencapaian target penyaluran dana perkebunan kelapa sawit dan Deviasi proyeksi harga CPO belum tercapai maksimal.

From the table above, four (4) out of five (6) KPIs were met. Two remaining KPIs were unmet. The KPI for the Percentage of palm oil estate fund distribution target outcome and Deviation in CPO price estimation not optimally achieved.

Analisis Operasi Per Aktivitas Usaha Operational Analysis per Business Activity

Berdasarkan Peraturan Presiden No.61 Tahun 2015 Pasal 20, kegiatan operasional BPDPKS mencakup enam aktivitas yaitu melakukan perencanaan dan penganggaran, penghimpunan dana, pengelolaan dana, penyaluran penggunaan dana, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan. Pelaksanaan kegiatan operasional BPDPKS tersebut di bawah tanggung jawab lima Direktorat yang berkoordinasi dengan Direktur Utama. Keenam aktivitas tersebut dilaksanakan secara maksimal oleh BPDPKS untuk mendukung pengembangan industri kelapa sawit nasional terutama sebagai upaya meningkatkan harga, memperkuat industri hilir dan membangun komoditas kelapa sawit yang berkelanjutan.

Pursuant to Article 20 of the Presidential Regulation No. 61 of 2015, IECFPO operational activities cover six activities including planning and budgeting, fund collection, fund management, fund distribution and utilization, administration and accountability, and supervision. The implementation of these operational activities is under the responsibility of five Directorates with coordination with the President Director. These activities are optimally implemented by IECFPO to support national palm oil industry development particularly in the effort of increasing price, strengthening downstream industries, and building sustainable palm oil commodity.

Kegiatan Operasional BPDPKS Kegiatan Operasional BPDPKS

01

Perencanaan dan Penganggaran
Planning and Budgeting

02

Penghimpunan Dana
Fund Raising

03

Pengelolaan Dana
Fund Management

04

Penyaluran dan Penggunaan Dana
Fund Distribution and Utilization

05

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Administration and Accountability

06

Pengawasan
Supervision

Perencanaan dan Penganggaran

Planning and Budgeting

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses awal yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi tentang gambaran kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan tertentu. Kegiatan perencanaan dan penganggaran yang telah dilaksanakan oleh BPDPKS tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Planning and budgeting is the initial process made based on facts and assumptions on the depiction of activities to be performed in achieving certain objectives. Planning and budgeting activities that have been implemented by IECFPO in 2016 are as follows:

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Sampai dengan 31 Desember 2016, BPDPKS berhasil menghimpun dana sebesar Rp11.563.088.494.773 dengan volume sebanyak 30.913.154 ton. Jumlah penghimpunan dana ini meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp6.902.212.717.059

Sampai dengan 31 Desember 2016, BPDPKS berhasil menghimpun dana sebesar Rp11.563.088.494.773 dengan volume sebanyak 30.913.154 ton. Jumlah penghimpunan dana ini meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp6.902.212.717.059

Penghimpunan Dana

Fund Raising

Sumber penghimpunan dana yang dilakukan BPDPKS terdiri dari Pelaku usaha perkebunan sawit dan turunannya, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan/atau dana lain yang sah. Pelaku usaha perkebunan sawit dikenakan pungutan atas ekspor hasil perkebunan kelapa sawit dan iuran. Besarnya iuran ditentukan berdasarkan kesepakatan BPDPKS dengan pelaku usaha. Iuran diterapkan secara berkala atau sewaktu-waktu dan hanya dikenakan untuk perusahaan perkebunan sawit bukan pekebun. Dana lembaga pembiayaan berupa pembiayaan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank. Dana masyarakat berasal dari perseorangan, asosiasi, dan/atau lembaga masyarakat yang tidak mengikat. Dana yang diperoleh dari sumber lain yang sah berupa hibah, bantuan yang tidak mengikat dari pihak lainnya, dan/atau hasil pengelolaan Dana.

Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana BPDPKS di bawah tanggung jawab Direktorat Penghimpunan Dana yang dilaksanakan oleh Divisi Pemungutan Biaya dan iuran *Crued Palm Oil* dan Divisi Pemungutan Biaya dan iuran Produk Turunan. Divisi Pemungutan Biaya dan iuran *Crued Palm Oil* mempunyai tugas memungut dan menghimpun Dana berupa biaya ekspor *Crued Palm Oil* dan iuran berkala dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Divisi Pemungutan Biaya dan iuran Produk Turunan mempunyai tugas memungut dan menghimpun Dana berupa biaya dari ekspor produk turunan kelapa sawit dan iuran berkala dari pelaku usaha industri berbahan baku kelapa sawit.

Sampai dengan 31 Desember 2016, BPDPKS berhasil menghimpun dana sebesar Rp11.563.088.494.773 dengan volume sebanyak 30.913.154 ton. Jumlah penghimpunan dana ini meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp6.902.212.717.059.

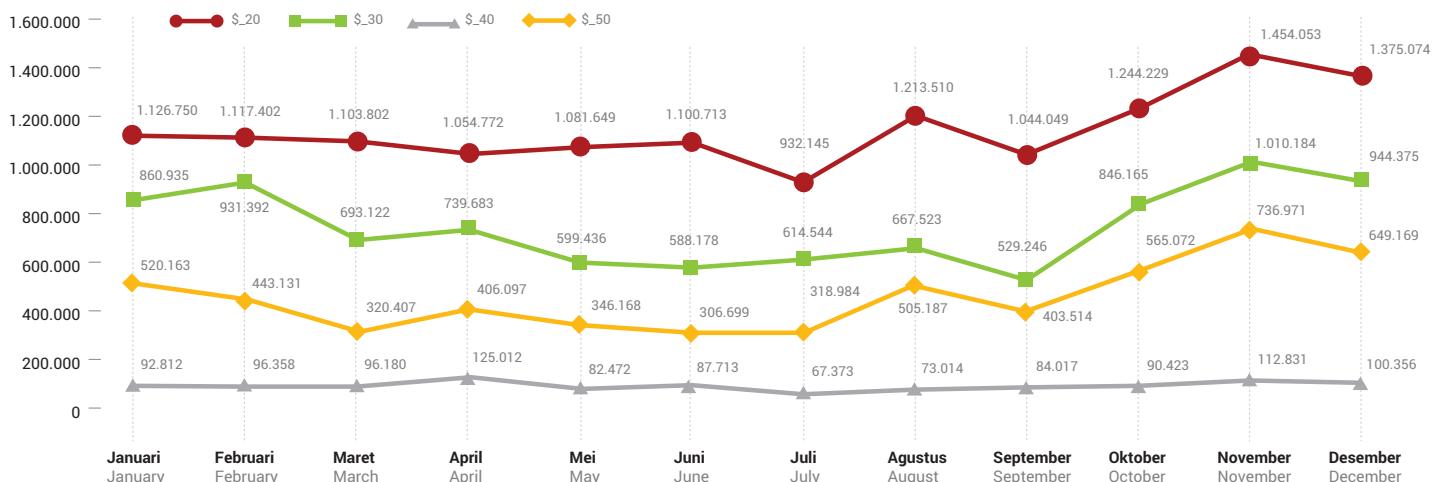
The sources of IECFPO fund collection are comprised of palm oil and palm oil derivatives business owners, financing institution funds, community funds, and/or other legal funds. Palm oil business owners are subjects to palm oil export restitution and contributions. The amount of contribution is determined based on agreements between IECFPO and business owners. The contribution is determined on a regular basis or incidentally and only subjected to palm oil plantation companies instead of farmers. Financing institution fund comes from banking or non-banking institutions financing. Community fund comes from individuals, associations, and/or non-binding community institutions. Funds obtained from other legal sources include grants, non-binding assistance from other parties, and/or Fund management yields.

The IECFPO fund collection under the responsibility of the Fund Collection Directorate is performed by the Crude Palm Oil Duties and Contributions Division and Derivative Product Duties and Contributions Division. The Crude Palm Oil Duties and Contributions Division assumes the duties to collect duties and funds in the form of Crude Palm Oil export fees and regular contributions from palm oil business owners. Derivative Product Duties and Contributions Division assumes the duties to collect duties and funds in the form of palm oil derivatives export fees and regular contributions from palm oil-based industry business owners.

As of December 31, 2016, IECFPO managed to collect fund of Rp11,563,088,494,773 with a volume 30,913,154 ton. Total fund collection increased compared to in 2015 of Rp6,902,212,717,059.

Berikut disajikan besarnya volume ekspor kelapa sawit berdasarkan besaran pungutan.

The following are the palm oil export volume by restitution amount.



Pungutan \$50 Restitution \$50

1. Crude Palm Oil (CPO)
2. Crude Palm Kernel Oil (CPKO)
3. Crude Palm Olein
4. Crude Palm Stearin
5. Crude Palm Kernel Olein
6. Crude Palm Kernel Stearin

Pungutan \$40 Restitution \$40

1. Palm Fatty Acid Distilate (PFAD)
2. Palm Kernel Fatty Acid Distilate (PKFAD)

Pungutan \$30 Restitution \$30

1. Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan/ atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam
Split Fatty Acid from Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, and/or its raw fraction with acidic content
2. Split Palm Fatty Acid Distilate (SPFAD) dengan kandungan asam lemak bebas $\geq 70\%$
Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD) with free fatty acid content $\geq 70\%$
3. Split Palm Kernel Fatty Acid Distilate (SPKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas $\geq 70\%$
Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD) with free fatty acid content $\geq 70\%$
4. (RBD) Palm Olein
(RBD) Palm Olein

Pungutan \$20 Restitution \$20

1. Buah sawit, biji sawit, dan kernel kelapa sawit
Palm Fruit, Pericarp, and Palm Kernel
2. RBD Palm Oil
3. RBD Palm Stearin
4. RBD Palm Kernel Oil
5. RBD Palm Kernel Olein
6. RBD Palm Kernel Stearin
7. RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto $> 25\text{kg}$ RBD Palm Olein in branded packages with net weight $> 25\text{kg}$
8. Biodiesel dari minyak sawit dengan kandungan Metil Ester lebih dari 96,5% - Volume Biodiesel from palm oil with Methyl Ester content above 96,5% - Volume
9. Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari buah sawit dan kernel sawit Oil Cake and other solid residue from Palm Fruit and Palm Kernel

Pungutan \$10 Restitution \$10

Tandan kosong sawit
Empty Fruit Bunches

Pungutan \$3 Restitution \$3

Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 mesh
Kernel Palm Shell in the forms of chips and powder with particle size ≥ 50 mesh

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Pengelolaan Dana

Fund Management

Pengelolaan atas dana yang dihimpun digunakan untuk aktivitas pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit, penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, promosi perkebunan kelapa sawit, peremajaan perkebunan kelapa sawit, dan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh BPDPKS dalam rangka pengembangan perkebunan sawit dan pemenuhan hasil perkebunan kelapa sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel. BPDPKS menetapkan prioritas penggunaan dana untuk masing-masing kegiatan tersebut dengan memperhatikan program Pemerintah dan kebijakan Komite Pengarah.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana BPDPKS di bawah tanggung jawab Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana yang dilaksanakan oleh Divisi Pengembangan Biodiesel, Divisi Replanting, Reforestation dan Promosi Perkebunan; dan Divisi Pendidikan Sumber Daya Manusia, Litbang, dan Pengembangan Sarana dan Prasarana. Divisi Pengembangan Biodiesel mempunyai tugas melaksanakan rencana pengalokasian dana, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran Dana, riset serta manajemen data terkait pengembangan biodiesel. Divisi Replanting, Reforestation dan Promosi Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan rencana pengalokasian dana, pengdolaaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran Dana, riset serta manajemen data terkait peremajaan perkebunan, reforestation, dan promosi perkebunan. Divisi Pendidikan Sumber Daya Manusia, Litbang, dan Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pengalokasian Dana, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran dana, riset serta manajemen data terkait pendidikan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta pengembangan sarana dan prasarana.

The management of collected funds is used for oil palm plantation human resources development, oil palm plantation research and development, oil palm plantation promotion, oil palm plantation rejuvenation, and oil palm plantation facilities and infrastructure. These activities were conducted in order to develop oil palm plantation and meet the oil palm plantation produce for food requirements, oil palm plantation industrial down streaming, and biofuel-biodiesel provision and utilization. IECFPO determine the priority for fund utilization for each of the activities by taking into account Government's programs and Steering Committee's policies.

IECFPO fund management under the responsibility of the Fund Planning and Management Directorate is performed by Biodiesel Development Division, Replanting, Reforestation, and Plantation Promotion Division, and HR Education, Research and Development, and Facility and Infrastructure Development Division. Biodiesel Development Division assumes the duties to implement the fund allocation plan, fund cooperation management, fund distribution plan preparation, and research and data management on biodiesel development. Replanting, Reforestation, and Plantation Promotion Division assumes the duties to implement the fund allocation plan, fund cooperation management, fund distribution plan preparation, and research and data management on plantation rejuvenation, reforestation, and plantation promotion. HR Education, Research and Development, and Facility and Infrastructure Development Division assumes the duties to implement fund allocation plan, fund cooperation management, fund distribution plan preparation, and research and data management on human resource education, research and development, and facility and infrastructure development.

Penyaluran dan Penggunaan Dana

Fund Distribution and Utilization

Penyaluran dan penggunaan dana merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana pengelolaan dana yang diuraikan di atas. Penggunaan dana untuk pengembangan sumber daya manusia perkebunan sawit dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan berdaya saing; dan meningkatkan kemampuan teknis, manajerial dan kewirausahaan. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan pendampingan fasilitasi. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh lembaga pendidikan formal maupun non-formal.

Penggunaan dana untuk penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit dilakukan untuk peningkatan pengetahuan tentang pemuliaan, budidaya, pasca panen dan pengolahan hasil, industri, pasar, rantai nilai produk hasil Perkebunan dari hulu ke hilir, dan potensi pengembangan usaha. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembentukan dan penguatan lembaga riset yang fokus pada teknologi, sektor industri, inovasi produk, skema pembiayaan, pengetahuan pasar, dan adopsi lingkungan.

Penggunaan dana untuk promosi dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap signifikansi perkebunan sawit sebagai produk yang mempunyai nilai strategis. Pelaksanaan promosi tersebut dapat meningkatkan citra nilai produk, informasi pasar, memperluas pasar, meningkatkan investasi, menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas perkebunan sawit.

Penggunaan dana untuk peremajaan perkebunan sawit dilaksanakan sebagai upaya peningkatan produktivitas tanaman perkebunan sawit maupun menjaga luasan lahan perkebunan sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Penggunaan dana untuk sarana dan prasarana perkebunan sawit dilakukan untuk peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil perkebunan. Sarana dan prasarana tersebut antara lain benih; pupuk; pestisida; alat pasca panen dan pengolahan hasil; jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan; alat transportasi; mesin pertanian; pembentukan infrastruktur pasar; dan verifikasi atau penelusuran teknis.

Fund distribution and utilization is the activity performed as fund management described above. Fund utilization for oil palm plantation human resource development is conducted to improve knowledge, skills, professionalism, independence, competitiveness, as well as to enhance technical, managerial, and entrepreneurial capabilities. Human resource development is performed through provision of counseling, education, training, and facilitation. Human resource development is performed by either formal or non-formal educational institutions.

Fund utilization for oil palm plantation research and development is conducted for increasing knowledge on plant breeding, cultivation, post-harvesting and produce processing, industry, market, Plantation product value chain from upstream to downstream, and business development prospects. This activity is performed through the establishment and strengthening of research institution which focuses on technology, industry sector, product innovation, financing scheme, market knowledge, and environmental adoption.

Fund utilization for promotion is performed to increase knowledge on oil palm plantation significance as product with strategic value. The promotion may improve product value image, market information, expand the market, increase investments, and grow oil palm plantation commodity marketing center.

The utilization of fund for oil palm plantation rejuvenation is performed as the effort to increase oil palm plant productivity and maintain optimal utilization of oil palm plantation area.

Fund utilization for oil palm plantation facilities and infrastructure is performed to improve production, productivity, and plantation yield quality. The facilities and infrastructure comprise seedlings; fertilizers; pesticides; post-harvesting and yield processing equipment; plantation road and access road to public road and/or port; means of transportation; agricultural machineries; market infrastructure construction; and technical verification or tracing.

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis



Pelaksanaan kegiatan penyaluran dan penggunaan dana BPDPKS di bawah tanggung jawab Direktorat Penyaluran Dana yang dilaksanakan oleh Divisi Program Pelayanan dan Divisi Unit Penyaluran. Divisi Program Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana penyaluran Dana, penilaian dan verifikasi terhadap proposal permohonan Dana, pengembangan Dana, penetapan usulan calon penerima Dana. Divisi Unit Penyaluran mempunyai tugas melakukan penyaluran Dana untuk pembiayaan pengembangan, monitoring dan evaluasi penyaluran Dana, menjalankan fungsi kustodian atas Dana termasuk pencatatan, pengawasan dan laporan penyimpanan Dana, dan laporan realisasi penyaluran Dana.

The distribution and utilization of IECFPO fund under the responsibility of the Fund Distribution Directorate are assumed by the Service Program Division and Distribution Unit Division. Service Program Division assumes the duties to perform fund distribution plan preparation, assessment and verification of fund application proposal, fund development, and determination of fund acceptor candidate proposal. Distribution Unit Division assumes the duties to perform fund distribution for development financing, fund distribution monitoring and evaluation, in addition to serve as fund custodian for the recording, monitoring, and reporting of fund storage, and to report the fund distribution realization.

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Administration and Accountability

Penatausahaan dan pertanggungjawaban senantiasa dilaksanakan oleh setiap pimpinan BPDPKS dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan maupun antar satuan organisasi di lingkungan BPDPKS serta dengan instansi lain di luar BPDPKS sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, berkoordinasi dengan bawahan masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Selain itu, setiap pimpinan juga wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Administration and accountability is constantly upheld by every IECFPO leader by applying the principles of coordination, integration, and synchronization internally among organizational units as well as with other external institutions in accordance with each unit's duties. Every organizational unit leader is responsible to lead and coordinate with their subordinates while providing guidance and directives for the implementation of subordinates' duties. These leaders also have the obligation to comply with their superiors' directives as well as report to respective superior and submit regular reports on time.



Pertanggungjawaban diwujudkan dengan kegiatan penyampaian laporan kepada atasan yang tembusannya wajib disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Laporan tersebut diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut sebagai petunjuk kepada bawahan. Para Direktur dan Kepala Satuan Pemeriksaan Internal menyampaikan laporan kepada Direktur Utama yang selanjutnya akan memerintahkan pejabat terkait untuk melaksanakan penatausahaan.

Accountability is realized by the submission of report to superiors, the copy of which shall be forwarded to the leaders of other organizational unit(s) with relevant duties. The report is processed and used as the material for preparing further reports as directives to subordinates. The Directors and Head of Internal Audit Unit submit the report to the President Director who subsequently shall request relevant official to implement the administration duty.

Pengawasan

Supervision

BPDPKS melakukan pengawasan pelaksanaan kewajiban pungutan atas ekspor komoditas perkebunan sawit. Hasil pungutan tersebut disampaikan oleh BPDPKS kepada Menteri Keuangan yang disertai dengan rekomendasi pengenaan sanksi administratif berupa denda jika kewajiban Pungutan atas ekspor komoditas perkebunan sawit tidak dipenuhi. Besarnya denda yang dibayarkan sesuai tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan menggunakan mata uang Rupiah. BPDPKS juga berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menunjuk surveyor dalam melakukan verifikasi atau penelusuran teknis dalam pelaksanaan pembayaran pungutan tersebut agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh surveyor sebagaimana dimaksud pada dimuat dalam bentuk laporan surveyor.

IECFPO supervises the implementation of obligatory fund restitution for oil palm plantation commodity export. The collected fund shall be then submitted by IECFPO to the Minister of Finance along with recommendation of administrative sanction imposition such as fine when such obligatory fund restitution for oil palm plantation commodity export is not complied. The amount of fine paid follows the rate regulated by the Minister of Finance in Rupiah currency. IECFPO also coordinates with the Ministry of Trade to assign a surveyor in conducting technical verification and tracing in the payment of such restitution to comply with the provisions of laws and regulations. The result of verification conducted by the surveyor as intended is presented as surveyor report.

Analisis Kinerja Keuangan Financial Performance Analysis



Laporan Posisi Keuangan

Statements of Financial Position

Posisi keuangan BPDPKS tahun 2016 terdiri dari Aset sebesar Rp5.772.734.755.548, Liabilitas sebesar Rp10.682.555.364 dan Ekuitas sebesar Rp5.772.734.755.548.

IECFPO's financial position in 2016 comprised of Assets amounted to Rp5,772,734,755,548, Liabilities amounted to Rp10,682,555,364, and Equity amounted to Rp5,772,734,755,548.

Tabel Posisi Keuangan Tahun 2016 (Rp) Table of Financial Position in 2016 (Rp)



Aset

Assets

Jumlah aset BPDPKS pada tahun 2016 adalah sebesar Rp5.772.734.755.548 menurun 10,46% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp6.447.069.468.161. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada aset lancar yaitu investasi jangka pendek yang jatuh tempo pada tahun 2016.

IECFPO's total asset in 2016 was Rp5,772,734,755,548, decreased by 10.46% compared to the 2015's of Rp6,447,069,468,161. The decrease was mainly due to a decrease in current assets i.e. short-term investments due in 2016.

Analisis Kinerja Keuangan Financial Performance Analysis

Tabel Aset Tahun 2015-2016 (Rp) Table of Assets in 2015-2016 (Rp)

	2015	2016	Perubahan (%) Change (%)	ASSETS
ASET	6.447.069.468.161	5.772.734.755.548	(10,46)	ASSETS
Aset Lancar	6.446.836.634.828	5.757.640.522.316	(10,69)	Current Assets
Kas dan setara kas	2.480.372.585.456	5.729.108.049.237	130,98	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	3.961.777.000.000	-	(100,00)	Short-term investment
Piutang	4.133.850.372	25.294.448.346	511,89	Receivables
Persediaan	48.810.500	233.902.900	379,21	Office Supplies
Beban dibayar di muka	504.388.500	3.004.121.833	495,60	Prepaid expenses
Aset Tidak Lancar	232.833.333	15.094.233.232	6.382,85	Non-Current Assets
Aset tetap - bersih	-	13.975.498.859	-	Fixed assets - net
Aset tak berwujud - bersih	232.833.333	1.118.734.373	380,49	Intangible assets - net

Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari Kas dan setara kas, Investasi jangka pendek, Piutang, Persediaan, Beban dibayar di muka. Jumlah aset lancar BPDPKS pada tahun 2016 adalah sebesar Rp5.757.640.522.316 menurun 10,69% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp6.446.836.634.828. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek pada tahun 2015 merupakan pembelian Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Investasi jangka pendek tersebut ditujukan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Pada tahun 2016, per 31 Desember 2016, investasi jangka pendek tersebut sudah jatuh tempo, dan tidak dilakukan pembelian lanjutan oleh BPDPKS.

Untuk akun kas dan setara kas, per 31 Desember 2016, jumlah Deposito Berjangka BPDPKS meningkat signifikan, yaitu dari Rp2.075.602.972.398 pada tahun 2015, menjadi Rp5.592.105.158.409 pada tahun 2016.

Piutang BPDPKS pada tahun 2016 utamanya adalah dari piutang bunga deposito yang jumlah mencapai Rp25.228.443.346.

Jumlah persediaan BPDPKS mengalami peningkatan pada tahun 2016, dari Rp48.810.500 pada tahun 2015 menjadi Rp233.902.900, terdiri dari perlengkapan kantor dan barang-barang promosi.

Beban dibayar di muka BPDPKS pada tahun 2016, adalah biaya-biaya yang dibayarkan untuk sewa kendaraan.

Current Assets

Current assets include cash and cash equivalents, short-term investment, Receivables, Office supplies, and Prepaid expenses. IECFPO's current assets in 2016 was Rp5,757,640,522,316, decreased by 10.69% compared to the 2015's of Rp6,446,836,634,828. Such decrease was mainly due to a decrease in short-term investment. Short-term investment in 2015 was performed through the purchase of the Conventional Based Government (CBG). Such investment was aimed as investment held to maturity. In 2016, as of December 31, 2016, such short-term investments were due and no further purchases were made by IECFPO.

For cash and cash equivalents, as of December 31, 2016, the amount of IECFPO's Time Deposit increased significantly, from Rp2,075,602,972,398 in 2015, to Rp5,592,105,158,409 in 2016.

IECFPO's Receivables in 2016 were mainly from the deposit interest receivables of Rp25,228,443,346.

Total IECFPO's office supplies increased in 2016, from Rp48,810,500 in 2015 to Rp233,902,900, consisting of office supplies and promotional items.

Pre-paid expenses in 2016 were fees paid for vehicle rent.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar terdiri dari Aset tetap dan Aset tak berwujud. Jumlah aset tidak lancar BPDPKS pada tahun 2016 adalah sebesar Rp15.094.233.232 meningkat 6.382,85% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp232.833.333. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap. Pada tahun 2015, BPDPKS belum memiliki aset tetap, dan di tahun 2016, BPDPKS melakukan pembelian aset tetap terutama alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, peralatan kantor, perlengkapan kantor dan operasional, serta yang terbesar adalah kapitalisasi beban renovasi kantor BPDPKS. Nilai kapitalisasi atas beban renovasi kantor BPDPKS yang terjadi pada tahun 2016 mencapai nilai sebesar Rp5.454.243.706. Pembelian aset tetap lainnya yang memiliki nilai yang signifikan adalah untuk alat rumah tangga, sebesar Rp3.026.169.894 dan untuk unit komputer yang mencapai sebesar Rp2.544.029.600.

Jumlah aset tak berwujud BPDPKS pada tahun 2016 mengalami peningkatan, dari Rp232.833.333 setelah beban amortisasi di tahun 2015 meningkat menjadi Rp1.118.734.373 setelah beban amortisasi pada tahun 2016.

Non-Current Assets

Non-current assets comprised of Fixed and Intangible Assets. IECFPO's non-current assets in 2016 was Rp15,094,233,232 increased by 6,382.85% compared to the 2015's of Rp232,833,333. Such increase was mainly due to increased fixed assets. In 2015, IECFPO has no fixed assets, and in 2016, IECFPO purchased fixed assets particularly land motorized vehicles, non-motorized land transport equipment, office supplies, office equipment and operations, and the largest was capitalization of IECFPO's office renovation expenses. The capitalization of IECFPO's office renovation expenses incurred in 2016 was Rp5,454,243,706. Other fixed asset purchases that have significant value were for household appliances of Rp3,026,169,894 and for computer units of Rp2,544,029,600.

The number of IECFPO's intangible assets in 2016 increased from Rp232,833,333 after amortization expense in 2015 increased to Rp1,118,734,373 after amortization expense in 2016.

Liabilitas

Liabilities

Jumlah liabilitas BPDPKS pada tahun 2016 adalah sebesar Rp10.682.555.364 menurun 38,39% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp17.339.031.941. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan dari seluruh komponen liabilitas. Utang pajak di tahun 2016 hanya terdiri dari utang pajak PPh pasal 21 sebesar Rp10.645.000. Jumlah beban yang masih harus dibayar terutama terdiri dari untuk jasa surveyor, yaitu masing-masing adalah Rp10.641.240.320 pada tahun 2016 dan sebesar Rp10.615.763.400 pada tahun 2015.

IECFPO's liabilities in 2016 was Rp10,682,555,364, decreased by 38.39% compared to the 2015's of Rp17,339,031,941. Such decrease was mainly due to a decrease in liabilities components. The taxes payable in 2016 comprised only of taxes payable of Income Tax article 21 of Rp10,645,000. Total accrued expenses comprised primarily of surveyor services, which were Rp10,641,240,320 respectively in 2016 and Rp10,615,763,400 in 2015.

Tabel Liabilitas Tahun 2015-2016 (Rp) Table of Liabilities in 2015-2016 (Rp)

	2015	2016	Perubahan (%) Change (%)	LIABILITY
LIABILITAS	17.339.031.941	10.682.555.364	(38,39)	
Liabilitas Jangka Pendek	17.339.031.941	10.682.555.364	(38,39)	Short-Term Liabilities
Utang pajak	240.940.475	10.645.000	(95,58)	Taxes payable
Beban yang masih harus dibayar	17.098.091.466	10.671.910.364	(37,58)	Accrued expenses

Analisis Kinerja Keuangan Financial Performance Analysis

Ekuitas

Equity

Jumlah ekuitas BPDPKS pada tahun 2016 adalah sebesar Rp5.762.052.200.184 menurun 10,38% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp6.429.730.436.220. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan surplus tahun berjalan. Surplus tahun berjalan BPDPKS pada tahun 2016 ini, mengalami penurunan dari Rp6.429.730.436.220 di tahun 2015 menjadi Rp1.335.348.783.963 di tahun 2016.

IECFPO's equity in 2016 was Rp5,762,052,200,184, decreased by 10.38% compared to the 2015's of Rp6,429,730,436,220. Such decrease was mainly due to a decrease in current year surplus. IECFPO's current year surplus in 2016 decreased from Rp6,429,730,436,220 in 2015 to Rp1,335,348,783,963 in 2016.

Tabel Ekuitas Tahun 2015-2016 (Rp) Table of Equity in 2015 (Rp)

	2015	2016	Perubahan (%) Change (%)	EQUITY
EKUITAS	6.429.730.436.220	5.762.052.200.184	(10,38)	
Penyesuaian surplus tahun berjalan	(1.006.500)	(3.027.019.999)	300.647,14	Current year surplus adjustment
Surplus tahun lalu	-	4.429.730.436.220	-	Previous year surplus
Surplus tahun berjalan	6.429.731.442.720	1.335.348.783.963	(79,23)	Current Year Surplus

Laporan Aktivitas

Statement of Activity

BPDPKS di tahun 2016 berhasil membukukan Surplus setelah Setor ke Kas Negara sebesar Rp1.335.348.783.963 menurun 79% dari tahun 2015 sebesar Rp6.429.731.442.720. penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyaluran dana melalui pembayaran selisih harga biodiesel yang meningkat signifikan di tahun 2016.

IECFPO in 2016 managed to book Surplus after Deposit to State Treasury of Rp1,335,348,783,963, decreased by 79% from 2015's of Rp6,429,731,442,720. Such decrease was mainly due to fund distribution through biodiesel price variance payment expenses which significantly increased in 2016.

Tabel Laporan Aktivitas Tahun 2015-2016 (Rp) Table of Statement of Activity in 2015-2016 (Rp)

	2015	2016	Perubahan (%) Change (%)	
Pendapatan	6.981.019.217.854	12.321.204.623.969	76,50	Income
Beban Usaha	551.287.775.134	10.985.855.840.006	1.892,76	Operating Expenses
Surplus Usaha	6.429.731.442.720	1.335.348.783.963	(79,23)	Operating Surplus
Pendapatan Diluar Usaha	-	-	-	Non-Operating Income
Beban Diluar Usaha	-	-	-	Non-Operating Expenses
Pos Luar Biasa	-	-	-	Extraordinary Items
Surplus sebelum Setor ke Kas Negara	6.429.731.442.720	1.335.348.783.963	(79,23)	Surplus before Deposit to State Treasury
Surplus setelah Setor ke Kas Negara	6.429.731.442.720	1.335.348.783.963	(79,23)	Surplus after Deposit to State Treasury

Pendapatan

Income

Pendapatan BPDPKS berasal dari Pendapatan operasional jasa layanan yang terdiri dari Pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit dan Pendapatan atas pengelolaan dana. Di tahun 2016 berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp12.321.204.623.969 meningkat 76,50% dari tahun 2015 sebesar Rp6.981.019.217.854. Pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit meningkat signifikan dari Rp6.902.212.717.058 di tahun 2015 menjadi Rp11.690.819.130.021 di tahun 2016 atau meningkat 69,38%.

IECFPO's income was earned from Service operating income consisting of income from palm oil estate restitution income and Income from fund management. In 2016, IECFPO managed to record income of Rp12,321,204,623,969 increased by 76.50% compared to 2015's of Rp6,981,019,217,854. Income from palm oil estate restitution increased significantly from Rp6,902,212,717,058 in 2015 to Rp11,690,819,130,021 in 2016, or increased by 69.38%.

Tabel Pendapatan Tahun 2015-2016 (Rp) Table of Income in 2015 (Rp)

	2015	2016	Perubahan (%) Change (%)	
Pendapatan Operasional Jasa Layanan				Operating Income from Operation
Pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit	6.902.212.717.058	11.690.819.130.021	69,38	Income from fund restitution of palm oil estate
Pendapatan atas pengelolaan dana	78.806.500.796	630.385.493.948	699,92	Income from fund management
Jumlah Pendapatan	6.981.019.217.854	12.321.204.623.969	76,50	Total Income

Beban Usaha

Operating Expenses

Jumlah Beban usaha BPDPKS pada tahun 2016 adalah sebesar Rp10.985.855.840.006 meningkat 1.892,76% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp551.287.775.134. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada pembayaran selisih harga biodiesel yang meningkat signifikan dari Rp467.217.788.632 di tahun 2015 menjadi Rp10.683.276.780.982 di tahun 2016 atau meningkat 2.186,57%. Selain itu, hamper seluruh komponen beban usaha meningkat di tahun 2016 dibandingkan tahun 2015.

IECFPO's operating expenses in 2016 was Rp10,985,855,840,006, increased by 1,892.76% compared to 2015's of Rp551,287,775,134. The increase was primarily due to an significant increase in biodiesel price variance payment from Rp467,217,788,632 in 2015 to Rp10,683,276,780,982 in 2016 or an increase by 2,186.57%. In addition, almost all components of operating expenses increased in 2016 compared to in 2015.

Analisis Kinerja Keuangan Financial Performance Analysis

Tabel Beban Usaha Tahun 2015-2016 (Rp) Table of Operating Expenses in 2015-2016 (Rp)

	2015	2016	Perubahan (%) Change (%)	
Beban pembayaran selisih harga biodiesel	467.217.788.632	10.683.276.780.982	2.186,57	Biodiesel price variance payment expenses
Beban surveyor	53.315.463.300	103.108.856.431	93,39	Surveyor expenses
Beban penyaluran dana riset	10.254.345.405	52.760.887.446	414,52	Research fund distribution expenses
Beban promosi kelapa sawit	9.744.245.138	35.366.464.339	262,95	Palm oil promotion expenses
Beban gaji dan tunjangan	6.799.388.074	37.470.710.066	451,09	Salaries and allowances expenses
Beban perjalanan dinas operasional	1.197.380.318	3.921.903.428	227,54	Operational traveling expenses
Beban barang keperluan perkantoran	866.438.132	3.953.442.713	356,29	Office supplies expenses
Beban pengembangan SDM kelapa sawit	672.574.200	44.560.036.252	6.525,30	Palm oil HR development expenses
Beban penyaluran dana peremajaan kebun kelapa sawit	623.491.181	9.311.029.449	1.393,37	Palm oil plantation regeneration fund expenses
Beban jasa profesional	319.300.000	2.916.463.725	813,39	Professional service expenses
Beban sewa	252.972.500	5.964.760.667	2.257,87	Rent expenses
Beban perencanaan dan pengelolaan dana	-	601.027.349	-	Planning and fund management expenses
Beban pelatihan dan diklat pegawai	-	472.583.000	-	Employee education and training expenses
Beban pemeliharaan	-	444.856.458	-	Maintenance expenses
Beban penyusutan dan amortisasi	24.016.667	1.726.037.701	7.086,83	Depreciation & amortization expenses
Beban lainnya	371.587	-	(100,00)	Other expenses
Jumlah Beban Usaha	551.287.775.134	10.985.855.840.006	1.892,76	Total Operating Expenses

Laporan Arus Kas
Statements of Cash Flow

Jumlah Kas dan setara kas tahun 2016 adalah sebesar Rp5.729.108.049.237 meningkat 130,98% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp2.480.372.585.456. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh arus kas pada aktivitas investasi meningkat secara signifikan yaitu Penyaluran investasi pada instrumen jangka pendek.

Total cash and cash equivalent in 2016 was Rp5,729,108,049,237, increased by 130.98% compared to 2015's of Rp2,480,372,585,456. The increase was mainly due to significant increase in cash flow on investment activity, namely investment distribution in short-term instruments.



Tabel Arus Kas Tahun 2015-2016 (Rp) Table of Cash Flow in 2015-2016 (Rp)

	2015	2016	Perubahan (%) Change (%)	
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	6.442.406.435.456	1.303.611.901.381	(79,77)	Net Cash Flow from Operating Activities
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(3.962.033.850.000)	3.945.123.562.400	200,43	Net cash flow was earned from (used for) investment activities
Arus kas bersih (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	-	(2.000.000.000.000)	-	Net Cash Flow (used for) Financing Activities
Kenaikan bersih pada kas dan setara kas	2.480.372.585.456	3.248.735.463.781	30,98	Net increase on cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	-	2.480.372.585.456	-	Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	2.480.372.585.456	5.729.108.049.237	130,98	Cash and cash equivalents In the End of the Year

Manajemen Struktur Modal

Capital Structure Management

Struktur Modal

Capital Structure

Di tahun 2016, struktur modal BPDPKS terdiri dari surplus yang diperoleh yaitu selisih antara pendapatan (pungutan dana perkebunan kelapa sawit dan pengelolaan dana) dengan beban usaha. Berikut adalah perubahan ekuitas BPDPKS:

In 2016, IECFPO capital structure comprised of earned surpluses i.e. difference between income (fund restitution of oil palm estate and fund management) and operating expenses. The following are IECFPO's equity changes:

Tabel Perubahan Ekuitas Tahun 2015-2016 (Rp) Table of Equity Changes in 2015-2016 (Rp)

Penyertaan Modal Pemerintah Government Capital Investment	Akumulasi Surplus Surplus Accumulation	Jumlah Ekuitas Total Equity	
Saldo Ekuitas pada 01 Juli 2015	-	-	Equity Balance on July 1, 2015
Penyesuaian surplus tahun berjalan	(1.006.500)	(1.006.500)	Current year surplus adjustment
Surplus tahun berjalan	6.429.731.442.720	6.429.731.442.720	Current Year Surplus
Saldo Ekuitas pada 31 Desember 2015	6.429.730.436.220	6.429.730.436.220	Equity Balance on Thursday, December 31, 2015
Setoran ke kas negara	(2.000.000.000.000)	(2.000.000.000.000)	Deposit to state treasury
Penyesuaian surplus tahun berjalan	(3.027.019.999)	(3.027.019.999)	Current year surplus adjustment
Surplus tahun berjalan	1.335.348.783.963	1.335.348.783.963	Current Year Surplus
Saldo Ekuitas pada 31 Desember 2016	5.762.052.200.184	5.762.052.200.184	Equity Balance on Saturday, December 31, 2016

Mekanisme Review Struktur Modal

Capital Structure Review Mechanism

Pelaksanaan *review* struktur modal dilakukan BPDPKS melalui monitor pada kegiatan pemungutan dana perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengelolaan dana. Pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit untuk tahun 2016 mengalami peningkatan signifikan, yaitu dari Rp6.902.212.717.058 pada tahun 2015, naik menjadi Rp11.690.819.130.021. Sedangkan pendapatan atas pengelolaan dana BPDPKS pada tahun 2016 mengalami kenaikan signifikan yaitu dari Rp78.806.500.796 di tahun 2015 meningkat menjadi Rp630.385.493.948.

Implementation of capital structure mechanism was carried out by monitoring collection of oil palm estate fund and fund management activities. Income earned from oil palm fund collection in 2016 was increased significantly, i.e. from Rp6,902,212,717,058 in 2015 increased to Rp11,690,819,130,021. Whereas income from IECFPO fund management in 2016 was increased significantly, i.e. from Rp78,806,500,796 in 2015 increased to Rp630,385,493,948.

Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2016, serta Proyeksi 2017

Comparison between 2016 Performance Target and 2017 Projection

Jumlah pendapatan di tahun 2016 tercapai 129,13% dari target RBA 2016 yaitu dengan realisasi sebesar Rp12.321.204.623.969. Selanjutnya sesuai dengan RBA 2017, jumlah pendapatan diproyeksikan sebesar Rp10.345.480.000.000.

Jumlah beban usaha di tahun 2016 tercapai 82,70% dari target RBA 2016 yaitu dengan realisasi sebesar Rp10.985.855.840.006. Selanjutnya sesuai dengan RBA 2017, jumlah beban usaha diproyeksikan sebesar Rp10.364.589.375.975.

Total 2016 Income achieved a percentage of 129.13% of 2016 WP&B target i.e. with realization of Rp12,321,204,623,969. Subsequently based on 2017 WP&B, total projected income is Rp10,345,480,000,000.

Total 2016 operating expenses achieved a percentage of 82.70% of 2016 WP&B target i.e. with realization of Rp10,985,855,840,006. Subsequently based on 2017 WP&B, total projected operating expense is Rp10,364,589,375,975.

Tabel Target dan Realisasi Aktivitas Tahun 2016 (Rp) Table of Target and Realization of Activities of 2016 (Rp)

	Tahun 2016 Year of 2016			Proyeksi RBA 2017 Projection 2017 WP&B	
	RBA 2016 2016 WP&B	Realisasi Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)		
Pendapatan	9.541.455.524.000	12.321.204.623.969	129,13	10.345.480.000.000	Income
Beban Usaha	13.089.894.531.000	10.985.855.840.006	82,70	10.364.589.375.975	Operating Expenses
Surplus setelah Setor ke Kas Negara		1.335.348.783.963			Surplus after Deposit to State Treasury

Asumsi Proyeksi Tahun 2017 2017 Projection Assumption

Angka proyeksi RBA di tahun 2017 ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Harga CPO berkisar antara \$600 - \$720 per ton.
2. Jumlah ekspor menggunakan baseline tingkat ekspor pada tahun 2016 dengan CAGR 2% untuk 2017 hingga tahun 2020.
3. Penerimaan berasal dari hasil pemungutan biaya ekspor CPO dan turunannya. Dari sektor hulu pungutan sebesar \$50 untuk CPO dan CPKO, \$40 untuk PFAD dan PKFAD, \$30 untuk Split Crude Oil. Dari sektor hilir sebesar \$30 untuk RBD Palm Olein, \$20 untuk RBD Oil, dan \$20 untuk Biodiesel (kandungan Metil Ester > 96,5 volume).
4. Tingkat pertumbuhan dari pemungutan biaya cenderung flat untuk hulu dan 5-10% untuk hilir setiap tahunnya.

The projected WP&B 2017 is determined based on the following assumptions:

1. CPO price ranges between US\$600 and US\$720 per ton.
2. The amount of export uses export rate baseline in 2016 with CAGR 2% for 2017 to 2020.
3. Revenue is sourced from the fund restitution of CPO and CPO derivatives export fee. In upstream sector, fund restitution comprises US\$50 for CPO and CPKO, US\$40 for PFAD and PKFAD, and US\$30 for Split Crude Oil. In downstream sector, fund restitution comprises US\$30 for RBD Palm Olein, US\$20 for RBD Oil, and US\$20 for Biodiesel (Methyl Ester content > 96.5 volume).
4. The growth rate of fund restitution tends to be flat for upstream and 5-10% for downstream sectors each year.

Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2016, serta Proyeksi 2017 Comparison between 2016 Performance Target and 2017 Projection

5. Biaya investasi program replanting adalah Rp25.000.000/Ha, Sementara untuk cakupan lahan adalah 15.400 Ha.
6. Program Riset adalah rata-rata Rp1.000.000.000/research dengan jumlah paket diperkirakan sebanyak 50 buah.
7. Program pengembangan SDM Sawit adalah untuk program diploma 1 dan 3 Rp50.000.000/orang per tahun, program strata 2 Rp200.000.000/orang per tahun dan untuk program strata 3 Rp600.000.000/orang per tahun. Peningkatan jumlah orang setiap tahun meningkat sebesar 5% per tahun.
8. Program Promosi dan Kemitraan adalah Rp106.848.344.082.
9. Surveyor adalah anggaran yang disediakan untuk pembayaran jasa verifikasi ekspor produk kelapa sawit oleh surveyor sebesar Rp11.000.000.000/bulan.
10. Dukungan Manajemen, pengeluaran ini untuk membiayai seluruh kegiatan yang berhubungan dengan operasional BPDPKS. Anggaran Dukungan Manajemen adalah 1,25% yaitu sebesar Rp162.839.106.025.
11. Dana yang disediakan untuk dukungan pelaksanaan mandatori biodiesel adalah 90% dari total belanja.
12. Untuk setiap penggunaan 1 KL Biodiesel, membutuhkan dana pembiayaan selisih harga HIP BBN dan HIP Solar sebesar Rp4.000.000 - Rp6.000.000/KL.
13. Pengolahan Dana Cadangan Menggunakan investasi dengan yield return rata-rata 7% atau sebesar Rp350.000.000.000.
14. Asumsi-asumsi makro:
 - a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% yoy,
 - b. Tingkat inflasi sebesar 4% yoy,
 - c. Nilai tukar mata uang Rp13.300/US\$,
 - d. Suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3%,
 - e. Harga Crude Oil ICP sebesar US\$45/barrel.

Informasi Keuangan Lainnya Other Financial Information



Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Pihak Afiliasi

Material Transactional Information Containing Conflict of Interest and/or
Transactions with Affiliates

Sampai dengan 31 Desember 2016, BPDPKS tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi.

As of December 31, 2016, IECFPO did not conduct transaction containing conflict of interest and/or transactions with affiliates.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts Occurring after the Date of Auditor's Report

Tidak terdapat peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan BPDPKS yang dapat mempengaruhi secara signifikan kewajaran penyajian laporan keuangan BPDPKS untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016.

There was no significant information occurred following IECFPO's financial reporting date that significantly affected the fairness of IECFPO's financial reporting presentation for year ended on December 31, 2016.

Prospek dan Strategi Usaha

Business Outlook and Strategies

Prospek Usaha

Business Outlook

Prospek Perekonominian

Economic Outlook

Berdasarkan World Economic Outlook Januari 2017, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2016, 2017 dan 2018 diperkirakan sebesar 3,1%; 3,4%; dan 3,6% stabil dibandingkan proyeksi Oktober 2016. Perkiraan tersebut mengkonfirmasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2016 diperkirakan tidak lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun 2015 sebesar 3,10% dan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2017 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2016 sebesar 3,4%.

Pertumbuhan ekonomi negara berkembang diproyeksikan sebesar 4,1% pada tahun 2016, direvisi ke bawah sebesar 0,1% dari proyeksi pertumbuhan ekonomi 2016 yang dikeluarkan Oktober 2016. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 4,5% diproyeksikan ke bawah sebesar 0,1% dari proyeksi pertumbuhan ekonomi 2017 yang dikeluarkan Oktober 2016. Peningkatan pertumbuhan ekonomi negara berkembang masih di dukung oleh pertumbuhan ekonomi China dan India yang diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi. Membaiknya perekonomian Tiongkok dan Peningkatan harga komoditas akan mendorong kinerja ekspor yang akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 diperkirakan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Perkiraan ini mempertimbangkan potensi dan berbagai risiko ekonomi baik yang berasal dari eksternal maupun domestik. Perekonomian global yang diperkirakan membaik di tahun 2017 diharapkan mampu mendukung kinerja perekonomian nasional. Meskipun demikian, perbaikan tersebut menghadapi sejumlah risiko seperti perkiraan penurunan kinerja ekonomi Tiongkok, adanya ketidakpastian ekonomi Eropa yang sedang melakukan penyesuaian terhadap Brexit, dan risiko stabilitas akibat perubahan arah kebijakan ekonomi AS setelah pemilihan umum Presiden.

Based on World Economic Outlook published in January 2017, global economic growth in 2016, 2017, and 2018 was projected at 3.1%; 3.4%; and 3.6%. Such projection was stable compared to projection in October 2016. The projection confirmed that global economic growth in 2016 was not expected to be better than 3.10% growth in 2015 and global economic growth in 2017 would be expected to be better than in 2016 of 3.4%.

Developing countries' economic growth was projected at 4.1% in 2016, revised by 0.1% of the 2016 economic growth projection published in October 2016. In line with such projection, economic growth in 2017 of 4.5% was projected by 0.1% of the 2017 economic growth projection published in October 2016. Developing countries' economic growth was still supported by China and India's growing economic growth. Improving China's economy and rising commodity prices will boost export performance. It subsequently will have an impact on increasing public purchasing power.

Whereas Indonesia's economic growth in 2017 was projected to be improved compared to previous year. This projection considered the potential and various economic risks of both external and domestic. The estimated global economic recovery in 2017 was expected to support the performance of national economy. Nevertheless, such improvement faced a number of risks such as China's economic performance decline, the uncertainty of the European economy due to Brexit, and the risk of stability due to changes in the direction of US economic policy after the Presidential election.

Dari sisi sektoral, pertumbuhan sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar dalam perekonomian juga diperkirakan menunjukkan penguatan yang salah satunya dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi dan arah kebijakan ekspor terhadap produk bernilai tambah tinggi. Komitmen Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur diperkirakan juga tetap mendorong kinerja pertumbuhan sektor konstruksi, transportasi, dan pergudangan. Selain itu, sektor keuangan juga diperkirakan meningkat sejalan dengan peningkatan arus dana dari kebijakan amnesti pajak.

From sectoral point of view, the growth of manufacturing industry sector as the biggest contributor in the economy was also expected to strengthen which one of which was affected by economic improvement and export policy direction toward high value added products. The Government's commitment in infrastructure development was also expected to encourage growth performance in the construction, transportation and warehousing sectors. In addition, the financial sector was also expected to improve in line with increased flow of funds from the tax amnesty policy.

Dari sisi domestik, perkiraan perbaikan kinerja ekonomi nasional dalam tahun 2017 didukung oleh membaiknya konsumsi rumah tangga sejalan dengan inflasi yang relatif stabil terutama harga barang kebutuhan pokok. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga diperkirakan tetap memiliki kinerja cukup baik yang didorong oleh keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan penguatan konektivitas nasional. Selain itu, kebijakan amnesti pajak diharapkan juga mampu mendorong investasi di sektor riil melalui penguatan likuiditas dari hasil repatriasi dana yang ada di luar negeri. Seiring membaiknya perekonomian global, kinerja perdagangan internasional juga diharapkan mengalami perbaikan.

Dari sisi sektoral, pertumbuhan sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar dalam perekonomian juga diperkirakan menunjukkan penguatan yang salah satunya dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi dan arah kebijakan ekspor terhadap produk bernilai tambah tinggi. Komitmen Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur diperkirakan juga tetap mendorong kinerja pertumbuhan sektor konstruksi, transportasi, dan pergudangan. Selain itu, sektor keuangan juga diperkirakan meningkat sejalan dengan peningkatan arus dana dari kebijakan amnesti pajak.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan terkini perekonomian global dan domestik, kebijakan yang diambil pemerintah, serta potensi dan risiko ke depan, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan sebesar 5,3%. Perkiraan ini lebih baik dibanding proyeksi realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,2%.

In terms of domestic, the improvement in national economic performance in 2017 was supported by improved household consumption which was in line with a relatively stable inflation, particularly the price of basic commodities. Gross Fixed Capital Formation (PMTB) was projected to have a favorable performance. It was supported by sustainable infrastructure development which later was expected to improve competitiveness and strengthened national connectivity. In addition, tax amnesty policy was expected to boost investment in real sector. It was achieved by strengthening liquidity from abroad fund repatriation. As the global economy improved, international trade performance was also expected to improve.

From sectoral point of view, the growth of manufacturing industry sector as the biggest contributor in the economy was also expected to strengthen which one of which was affected by economic improvement and export policy direction toward high value added products. The Government's commitment in infrastructure development was also expected to encourage growth performance in the construction, transportation and warehousing sectors. In addition, the financial sector was also expected to improve in line with increased flow of funds from the tax amnesty policy.

Therefore, by considering the latest developments in the global and domestic economy, government policies, as well as future potentials and risks, the 2017 economic growth would be projected at 5.3%. This outlook was better than the projected realization of economic growth in 2016 of 5.2%.

Prospek dan Strategi Usaha Business Outlook and Strategies

Tabel Outlook Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Lapangan Usaha 2017 (% ,yoy)
Table of Expenditures and Business GDP Outlook in 2017 (% yoy)

2017*		
Pertumbuhan Ekonomi	Economic Growth	5,3
Sisi Pengeluaran:	In Terms of Expenses:	
Konsumsi Rumah Tangga**	Household Consumption**	5,1
Konsumsi Pemerintah**	Government Consumption**	5,4
PMTB	Gross Fixed Capital Formation	6,4
Ekspor Barang dan Jasa	Goods and Service Export	1,1
Impor Barang dan Jasa	Goods and Service Import	2,2
Sektor Lapangan Usaha:	Business Sector:	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Agriculture, Forestry, and Fishery	3,9
Pertambangan dan Penggalian	Mining and Excavation	0,1
Industri Pengolahan	Manufacturing Industry	5,4
Pengadaan Listrik dan Gas	Electricity and Gas Procurement	3,8
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	Water Procurement, Waste Management, Sewage Treatment, and Recycling	7,3
Konstruksi	Constructions	8,1
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Wholesale and Retails, Car and Motorcycle Repair	3,8
Transportasi dan Pergudangan	Transportation and Warehousing	7,1
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Provision of Accommodation and Food & Beverages	5,5
Informasi dan Komunikasi	Information and Communications	10,6
Jasa Keuangan dan Asuransi	Financial Service and Insurance	8,9
Real Estate	Real Estate	5,7
Jasa Perusahaan	Company Service	8,5
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Government Administration, Defense, and Obligatory Social Security	5,4
Jasa Pendidikan	Educational Service	8,3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Health Service and Social Activities	8,4
Jasa Lainnya	Other Services	8,4

* Perkiraan Estimated

** Termasuk LNPRT Non-Profit Institutions Serving Household Included

Sumber: Bappenas dan Kemenkeu Source: Bappenas and Kemenkeu

Prospek Industri Crude Palm Oil (CPO) Crude Palm Oil Industry Outlook

Berdasarkan data yang diolah GAPKI, produksi CPO tahun 2016 hanya mampu mencapai 31,5 juta ton dan PKO sebesar 3 juta ton sehingga total keseluruhan produksi minyak sawit Indonesia adalah 34,5 juta ton. Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 3% jika dibandingkan dengan produksi tahun 2015 yaitu 35,5 juta ton yang terdiri dari CPO 32,5 juta ton dan PKO 3 juta ton.

GAPKI memproyeksikan total produksi minyak sawit Indonesia tahun 2017 sebanyak 38,7 juta ton. Angka itu terdiri dari produksi minyak sawit mentah (CPO) sebanyak 35,5 juta ton dan minyak inti sawit (PKO) sebanyak 3,2 juta ton. Secara umum, prospek industri minyak sawit di tahun 2017 diperkirakan masih cukup cerah. Sebab, Pemerintah terus menggalakkan program mandatori bahan bakar nabati.

From the Indonesian Palm Oil Association (IPOA)'s processed data, CPO production in 2016 reached only 31.5 million ton, while PKO was 3 million ton, making the overall total Indonesian palm oil production at 34.5 million ton. The figure was a decline by 3% from 2015 at 35.5 million ton, comprising 32.5 million ton of CPO and 3 million ton of PKO.

The IPOA projects a total of 38.7 million ton Indonesian palm oil production for 2017. The figure consists of 35.5 million ton of Crude Palm Oil (CPO) and 3.2 million ton of Palm Kernel Oil (PKO). In general, the outlook of palm oil industry in 2017 remains favorable. This is thanks to the Government's continuous mandatory biofuel program.

Tabel Proyeksi Produksi dan Penggunaan Minyak Sawit Tahun 2017-2020 (Ton)
Table of Projected Palm Oil Production and Utilization in 2017-2020 (Ton)

Tahun Year	Total Produksi Total Production	Penggunaan Penggunaan								Total Penggunaan Total Utilization	
		Biodiesel Biodiesel		Minyak Goreng, Margarin, Shortening, RBD Oil Cooking Oil, Margarine, Shortening, RBD Oil		Oleochemical Oleochemical		CPO CPO			
		Domestik Domestic	Eksport Export	Domestik Domestic	Eksport Export	Domestik Domestic	Eksport Export	Eksport Export	Domestik Domestic	Eksport Export	
2017	36.525.294	9.189.373	1.500.000	6.301.724	14.139.665	657.524	1.178.513	3.558.495	16.148.621	20.376.673	
2018	38.351.560	9.522.360	1.500.000	6.490.776	14.281.062	683.825	1.216.473	4.657.064	16.696.961	21.654.599	
2019	40.269.138	9.855.347	1.500.000	6.685.499	14.423.872	711.178	1.255.631	5.837.611	17.252.024	23.017.114	
2020	42.282.594	10.188.333	1.500.000	6.886.064	14.568.111	739.625	1.296.022	7.104.439	17.814.022	24.468.572	

Sumber: data diolah GAPKI
Source: IPOA processed data

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa produksi minyak sawit Indonesia mengalami peningkatan. Penggunaan minyak sawit domestik terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan biodiesel. Minyak sawit yang dieksport terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti minyak goreng, margarin, shortening, dan RBD oil sebagai bahan baku penting dalam pembuatan sabun mandi, sabun cuci, dan produk kebersihan dan perawatan diri lainnya.

From the table above, it can be assumed that Indonesian palm oil industry improves. The utilization of domestic palm oil is mainly used for meeting the biodiesel requirements. Exported palm oil is particularly used to meet food requirements such as cooking oil, margarine, shortening, and RBD oil as important raw material in the production of bath soap, laundry soap, and other hygiene and sanitary products.

Prospek dan Strategi Usaha Business Outlook and Strategies

Sampai dengan tahun 2020 luas area lahan perkebunan kelapa sawit diperkirakan juga akan mengalami peningkatan sebesar 5% setiap tahun. Lahan perkebunan kelapa sawit tersebut diperkirakan akan dikuasai terutama oleh rakyat dengan penguasaan terhadap lahan meningkat ±7% setiap tahun sehingga berkontribusi sebesar 50,61%. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan rakyat akan meningkat seiring dengan peran rakyat dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit ke depan. Proyeksi pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam lima tahun ke depan ditunjukkan dalam tabel berikut.

Until 2020, the oil palm plantation area is also predicted to grow by 5% annually. These oil palm plantations are predicted to be owned by particularly the community, with land tenure increasing by ±7% annually, which will contribute around 50.61%. This indicates that community welfare will improve along with people's role in future oil palm plantation development. The projection of oil palm plantation development for the next five years is shown in the following table.

Tabel Proyeksi Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2016-2020
Table of Projected Oil Palm Plantation Development in 2016-2020

Tahun Year	Penguasaan Lahan (ha) Land Tenure			Total Luas Area (ha) Total Area (ha)	Kontribusi (%) Contribution (%)		
	Rakyat Community	Swasta Private	BUMN SOE		Rakyat Community	Swasta Private	BUMN SOE
2017	5.585.049	5.524.182	711.153	11.820.384	47,25	46,73	6,02
2018	6.006.787	5.689.907	714.708	12.411.402	48,40	45,84	5,76
2019	6.453.087	5.860.604	718.282	13.031.973	49,52	44,97	5,51
2020	6.925.276	6.036.423	721.873	13.683.572	50,61	44,11	5,28

Sumber: data diolah GAPKI Source: IPOA processed data

Menurut GAPKI, terdapat tantangan di tahun 2017 terkait perdagangan global kelapa sawit yaitu:

1. Promosi minya kelapa sawit Indonesia di pasar India, Pakistan, dan negara-negara Timur Tengah,
2. Penanganan isu negatif seperti:
 - a. Isu *super tax* Perancis ada kemungkinan akan digulirkan kembali diwaktu mendatang,
 - b. Isu 3-MCPD yaitu kandungan karsinogenik pada minyak nabati yang sudah muncul di Italia dan diperkirakan akan semakin marak meskipun belum terdapat pembuktian secara sains yang kuat,
 - c. Sawit dituduh sebagai penyebab utama deforestasi masih akan tetap ada terutama di Uni Eropa,
 - d. Ersepsi negatif terhadap minyak sawit sebagai minyak nabati *less healthier* dan *low quality* dibereberapa negara masih terus dibicarakan hamper semua negara pengimpor,
 - e. Daya saing minyak sawit akan semakin lemah dibandingkan dengan minyak nabati lainnya terutama minyak Bunga matahari,
 - f. Peningkatan standar REDD+ untuk ambang batas CPO sebagai biomassa energi terbarukan dan pengurangan *mandatory biodiesel* yang berasal dari *first generation*.

According to the IPOA, there are challenges in the palm oil global trade for 2017, i.e.:

1. Indonesian palm oil promotion in Indian, Pakistan, and Middle Eastern countries;
2. The handling of adverse issues such as:
 - a. Re-introduction of French super-tax in the near future;
 - b. 3-MPCD or carcinogen content in biofuel – the issue has occurred in Italy and is predicted to spread, although there are currently no scientific evidences which strengthen the issue;
 - c. Accusation of palm oil as the main cause of deforestation, particularly in the European Union;
 - d. Ongoing talks and negative perception against palm oil as less healthier and low quality biofuel in almost all importing countries;
 - e. Weakening competitive power in the part of palm oil compared to other biofuel, particularly sunflower oil;
 - f. Increased REDD+ standard for CPO threshold as renewable biomass energy and declined mandatory biodiesel from the first generation.

3. Penganganan isu domestik seperti:
 - a. Penanganan lahan gambut dan pencegahan kebakaran lahan,
 - b. Sosialisasi kepada stakeholders tentang strategis dan pentingnya industri sawit.

3. The handling of domestic issues such as:
 - a. The handling of peatlands and prevention off land fire;
 - b. Socialization to stakeholders on the strategies and importance of palm oil industry.

Strategi Usaha Business Strategies

Strategi usaha BPDPKS dalam rangka menghadapi tantangan dan menangkap peluang pada industri kelapa sawit mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan, Rencana Strategis Kementerian pertanian dan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian yang disusun dalam Rencana Strategis Bisnis BPDPKS Tahun 2015-2019. Penyusunan Rencana Strategis ditujukan untuk mendukung pengembangan industri kelapa sawit nasional terutama sebagai upaya meningkatkan harga, memperkuat industri hilir dan membangun

BPDPKS melakukan analisis kondisi internal dan eksternal sebagai upaya mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (DPKS) dalam 5 tahun ke depan. Tantangan-tantangan tersebut terdiri dari:

- Menata organisasi dan melengkapi perangkat-perangkat hukum (peraturan/ketentuan/keputusan) sebagai landasan untuk memberikan layanan yang prima dalam rangka pencapaian visi dan misi;
- Membangun komitmen dengan para pihak yang memiliki hubungan (termasuk semua pemangku kepentingan) dalam pemungutan biaya, pengalokasian, dan pengelolaan DPKS;
- Menerapkan standar pelayanan yang terukur dengan memperhatikan profesionalisme pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta mempersiapkan sistem pemberian *rewards* dan *punishment* yang memotivasi pencapaian kinerja;
- Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas kewenangan dalam pengelolaan DPKS;
- Meningkatkan koordinasi, sinergi dan membangun kemitraan jangka panjang dengan para pemangku kepentingan dan lembaga pengelolaan dana sejenis; dan
- Membangun sistem pelaksanaan tugas dan fungsi berbasiskan teknologi.

IECFPO's business strategy to face challenges and seize opportunities in the palm oil industry referred to the Strategic Plan of the Ministry of Finance, Strategic Plan of the Ministry of Agriculture and Strategic Plan of the Ministry of Industry, which was prepared in IECFPO Business Strategic Plan of 2015-2019. The preparation of the Strategic Plan was aimed at supporting the development of the national palm oil industry primarily as an effort to increase prices, strengthen downstream and build industry.

IECFPO analyzes the internal and external conditions as an effort to identify challenges faced in managing CPO Fund in the next five years. These challenges include:

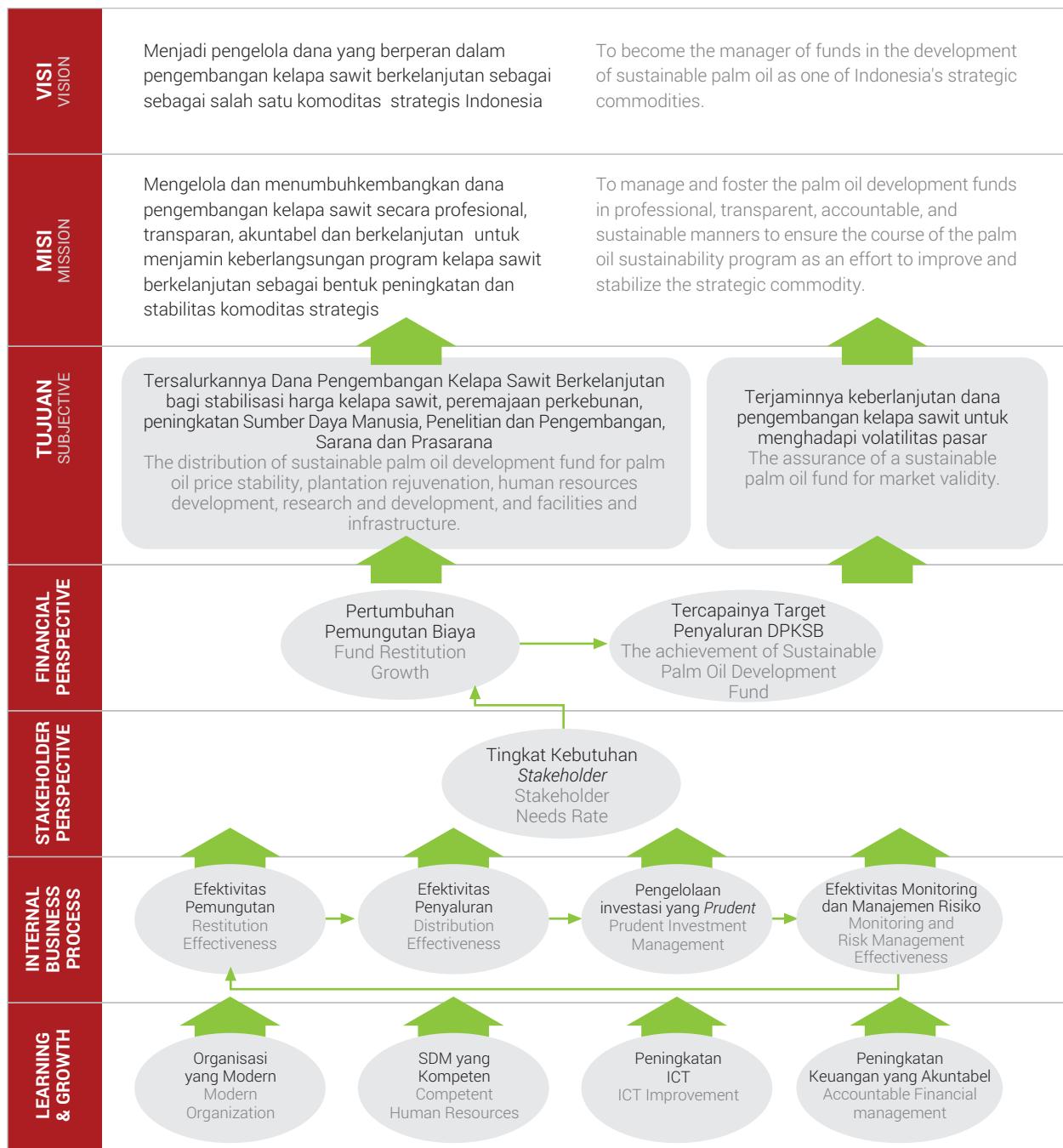
- Administering organization and completing legal devices (regulations/provisions/decrees) as the platform to provide excellent service in achieving vision and mission;
- Building commitments with related parties (including all stakeholders) in the collection of duties, allocations, and management of Oil Palm Plantation Fund;
- Applying measured service standards by taking into account the professionalism of duties and functions implementation;
- Enhancing human resource quality and quantity as well as preparing reward and punishment system to motivate performance achievement;
- Developing policies to strengthen and expand authorization in Oil Palm Plantation Fund management.
- Improving coordination, synergy, and building long-term partnership with stakeholders and similar fund management agencies; and
- Building technology-based duties and functions implementation system.

Prospek dan Strategi Usaha Business Outlook and Strategies

Berbagai tantangan tersebut menjadi acuan langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh BPDPKS ke depan. Sasaran strategis tersebut telah dimuat dalam Rencana Strategis Bisnis BPDPKS Tahun 2015 - 2019 yang ditunjukkan dalam gambar berikut:

These challenges become the reference for strategic measures to be implemented by the IECFPO in the future. These strategic goals are contained in IECFPO Business Strategic Plan 2015-2019 as shown in the following figure.

Gambar Peta Strategi BPDPKS 2015-2019 Figure of IECFPO 2015-2019 Strategy Map







Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

Analisis Pembahasan Kinerja
Operasional dan Keuangan
Operational and Financial Performance
Discussion Analysis

Tata Kelola BPDPKS
IECFPO Governance

Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
IECFPO Social Responsibility

Laporan Keuangan Audited
Audited Financial Statements



KASI AUDITOR ISPO

selection for green auditor

Mei
2016



Pendahuluan Introduction



Sebagai wujud tanggungjawab BPDPKS kepada *stakeholder* maupun Pemegang Saham, BPDPKS senantiasa menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dalam setiap kegiatan usahanya, dalam rangka meningkatkan nilai Perusahaan jangka panjang, baik bagi seluruh *stakeholder* maupun Pemegang Saham.

As the form of IECFPO's accountability to Stakeholder and Shareholders, IECFPO constantly implements Good Corporate Governance (GCG) in each and every business activities. It aims to improve the long term Company value, either for stakeholders or shareholders.

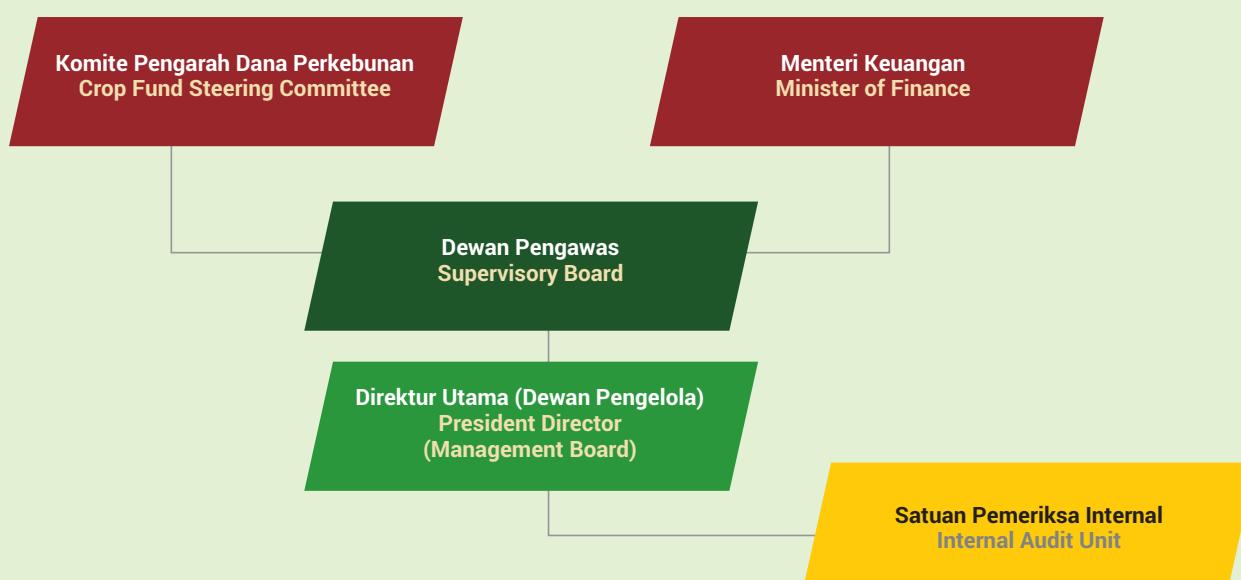
Dikarenakan mekanisme GCG sangat berpengaruh terhadap penetapan dan pencapaian tujuan dan pengembangan budaya kerja di lingkungan Perusahaan. BPDPKS selalu berupaya untuk dapat menerapkan implementasi GCG pada setiap lini bisnisnya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, kewajaran, independensi dan tanggung jawab) guna mempertahankan eksistensi perusahaan dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha di masa-masa mendatang.

Since GCG mechanism has certain effect to determination and achievement of objectives and development of work culture in the Company. IECFPO constantly strives to implement GCG on every business line based on GCG principles (transparency, accountability, fairness, independence and responsibility). It aims to maintain the company's existence in facing challenges and business competition in the future.

Dalam rangka mendukung berjalannya implementasi tata kelola perusahaan yang baik, BPDPKS membentuk Struktur Tata Kelola sebagai berikut:

To support the streamline of GCG implementation, IECFPO established the following Governance Structure:

Struktur Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Structure



Selain pembentukan struktur tata kelola Perusahaan, BPDPKS juga sedang menyusun kebijakan-kebijakan operasional dalam rangka mendukung terlaksananya penerapan GCG di BPDPKS, saat ini tahun buku 2016, BPDPKS sedang menyusun Kebijakan Teknologi Informasi dan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa serta membentuk Komite Audit dalam rangka membantu pengawasan Dewan Pengawas BPDPKS.

In addition to the establishment of corporate governance structure, IECFPO was also preparing operational policies to support the implementation of GCG in IECFPO. In fiscal year of 2016, IECFPO prepared Information Technology Policy and Procurement Policy and established Audit Committee to assist supervision duty of IECFPO Supervisory Board.

Informasi Pengelolaan Keuangan BPDPKS

IECFPO Financial Management Information

BPDPKS merupakan instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan BLU secara penuh melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.01/2015 tentang Penetapan BPDPKS pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) secara penuh.

IECFPO is a government institution applying a comprehensive Public Service Agency financial pattern through Decree of Minister of Finance Number 650/KMK.01/2015 concerning IECFPO to the Minister of Finance as the Government Institution applying comprehensive Financial Management of Public Service Agency (PK-BLU).

Komite Pengarah Dana Perkebunan

Crop Fund Steering Committee



Komite Pengarah Dana Perkebunan dibentuk dengan tujuan untuk memberikan arahan kepada pengelola BPDPKS. Komite Pengarah Dana perkebunan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan Pasal 25 dan Perpres Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Crop Fund Steering Committee was established to direct the IECFPO management. Crop Fund Steering Committee in carrying out its duties and responsibilities is in accordance with Regulation of the Government of the Republic of Indonesia No. 24 of 2015 concerning Crop Fund Collection Article 25 and Presidential Regulation Number 61 of 2015 concerning Collection and Use of Oil Palm Crop Fund

Komposisi Komite Pengarah Dana Perkebunan

Composition of Crop Fund Steering Committee

Komite Pengarah Dana Perkebunan merupakan jabatan tetap dan memperbolehkan jabatan ex-officio dari kementerian terkait. Komite Pengarah terdiri atas:

1. Ketua: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Anggota:
 - a. Menteri Pertanian;
 - b. Menteri Keuangan;
 - c. Menteri Perindustrian;
 - d. Menteri Perdagangan;
 - e. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - f. Menteri BUMN;
 - g. Menteri BAPENAS.

Crop Fund Steering Committee is a permanent position. It also allows ex-officio position from related ministry. Steering Committee consists of:

1. Chairman: Coordinating Minister for Economic Affairs;
2. Member:
 - a. Minister of Agriculture;
 - b. Minister of Finance;
 - c. Minister of Industry;
 - d. Minister of Trade;
 - e. Minister of Energy and Mineral Resources;
 - f. Minister of SOEs;
 - g. Ministry of National Development Planning.

Tugas dan Kewajiban Komite Pengarah Dana Perkebunan

Duties and Responsibilities of Crop Fund Steering Committee

Tugas pokok Komite Pengarah ada dua yakni memberikan arahan kebijakan, visi, misi dan kebijakan dari penggunaan dana perkebunan kelapa sawit terutama menetapkan rancangan kebijakan pengembangan dan pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Kemudian, tugas utama berikutnya adalah menunjuk dan mengangkat Dewan Pengawas dan Direktur Eksekutif.

Adapun tugas Komite Pengarah Dana Perkebunan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan dalam penghimpunan dan penggunaan dana termasuk kebijakan alokasi aset yang berdasarkan pendekatan portofolio; dan
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dalam penghimpunan dan penggunaan dana termasuk kebijakan alokasi aset yang berdasarkan pendekatan portofolio.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengarah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pihak lain yang dipandang perlu; dan
2. Menunjuk narasumber utama (*prominent*) yang berasal dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan kelapa sawit, dan eksportir atas komoditas perkebunan kelapa sawit dan/atau turunannya.

There are two principal duties of the steering committee namely to provide directives for the vision, mission, and policies on the use of CPO fund mainly in implementing sustainable palm oil development and management policy plan. To appoint and assign Supervisory Board and Executive Directors.

Duties of Crop Fund Steering Committee as regulated in Presidential Regulation No. 61 of 2015 concerning Collection and Use of Oil Palm Crop Fund are as follows:

1. Formulating policies in the collection and utilization of funds, including asset allocation policy based on portfolio approach; and
2. Conducting supervision on the implementation of policies in the collection and utilization of funds, including asset allocation policy based on portfolio approach.

In running its duties, the Steering Committee may take the following measures:

1. Involving ministries, institutions, local governments, and other parties considered important; and
2. Appointing prominent source from palm oil business owners, palm oil-based industry business owners, and CPO and/or CPO derivative commodity exporters.

Komite Pengarah Dana Perkebunan Crop Fund Steering Committee

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pengarah Dana Perkebunan Crop Fund Steering Committee Activities Implementation Report

Selama tahun 2016, Komite Pengarah Dana Perkebunan telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam pengawasan terhadap BPDPKS, diantaranya adalah:

1. Memberikan arahan kepada BPDPKS diantaranya terkait:

- Alokasi dana dan rencana kerja tahun 2016 agar segera diajukan kepada Komite Pengarah Dana Perkebunan
- BPDPKS agar berkonsultasi lebih lanjut dengan Kementerian Perdagangan dalam pengelolaan investasi dana sawi dan menyusun rancangan SOP tata kelola BPDPKS
- Struktur Organisasi Perusahaan agar di revisi untuk membagi tugas kerja yang lebih adil
- Menyusun Manual Book yang mengatur tugas dan hubungan kelembagaan yang jelas dan utuh diantara Komite Pengarah Dana Perkebunan, Dewan Pengawas dan Manajemen BPDPKS
- Mengeluarkan ketentuan honor dan insentif Komite Pengarah dan Sekretariat Komite Pengarah berdasarkan Perpres No.61 Tahun 2015 jo. Perpres No.24 Tahun 2016
- Melakukan penyempurnaan terhadap remunerasi dari Direksi sebab belum sesuai dengan nilai yang ditetapkan Komite Pengarah Dan Perkebunan pada tanggal 22 Oktober 2015 yang sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi professional Direksi dan Staf

2. Melakukan pembahasan serta evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

3. Melakukan rapat sebanyak 5 kali rapat yaitu pada tanggal 25 Januari, 3 Mei, 16 Juni, 29 Juli dan 16 November selama tahun buku 2016.

Throughout 2016, concerning Collection and Use of Oil Palm Crop Fund has held various activities in supervising IECFPO, i.e.:

1. Providing directives to IECFPO among others related to:
 - Fund allocation and work plan of 2016 for approval from Crop Fund Steering Committee
 - IECFPO must consult the Ministry of Trade in managing palm fund investment and preparing SOP draft of IECFPO governance
 - The Company's Organizational Structure must be revised to achieve fairer division of tasks.
 - Preparing Manual Book governing duties, clearer and comprehensive institutional relation among Crop Fund Steering Committee, Supervisory Board, and IECFPO Management
 - Issuing provision on honorarium and incentive of Steering Committee and Steering Committee Secretariat in accordance with Presidential Regulation No. 61 of 2015 in conjunction with Presidential Regulation No. 24 of 2016
 - Improving the remuneration of the Board of Directors because the remuneration was not in accordance with the values set by the Steering Committee dated October 22, 2015 that conformed to professional requirement and qualification of the Board of Directors and its Staff
2. Holding regular discussion and evaluation quarterly.
3. Has conducted 5 meetings i.e. on January 25, May 3, June 16, July 29, and November 16 throughout fiscal year of 2016.

Dewan Pengawas

Supervisory Board



Dewan Pengawas merupakan organ utama Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG.

Supervisory Board is the main organ of the Company in charge and collectively responsible for supervising the management policies, advising the Directors, and ensuring that the Company implements GCG.

Dewan Pengawas Supervisory Board

Pada tahun 2016, Komposisi Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Pemegang Saham terdiri dari ketua Dewan dan anggota Dewan. Jumlah Dewan Pengawas BPDPKS sebanyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari unsur Pemerintah sebanyak 6 (enam) orang dan unsur Profesional sebanyak 3 (tiga) orang.

Pada tahun 2016, Komposisi Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Pemegang Saham terdiri dari ketua Dewan dan anggota Dewan. Jumlah Dewan Pengawas BPDPKS sebanyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari unsur Pemerintah sebanyak 6 (enam) orang dan unsur Profesional sebanyak 3 (tiga) orang.

Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas Requirements, Appointment, and Dismissal of the Supervisory Board

Calon anggota Dewan Pengawas BPDKS wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Persyaratan kemampuan mencakup memahami masalah manajemen yang berkaitan dengan fungsi salah satu manajemen, mempunyai pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan serta memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai. Adapun Persyaratan kepatutan terdiri dari integritas, dedikasi, ketersediaan waktu yang cukup, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.

Pengangkatan Dewan Pengawas berlandaskan pada uji kemampuan dan kepatutan Pemegang Saham Perusahaan. Adapun untuk pemberhentian Dewan Pengawas dilakukan apabila:

- Masa jabatannya berakhir
- Mengundurkan diri
- Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
- Meninggal dunia
- Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau negara
- Tidak memenuhi atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Anggaran Dasar dan/atau dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Candidates of IECFPO's Supervisory Board members must meet fit and proper requirements as specified in the Articles of Association. The fit requirements include understanding management issues on one of management function, having sufficient knowledge in the field of business enterprise and having adequate integrity, competence and reputation. The proper requirements consist of integrity, dedication, sufficient time, never declared bankrupt, never been a member of the Board of Directors and Board of Supervisors found guilty of causing a company to be declared bankrupt, and never been charged for criminal acts harming the state finances and / or related to the financial sector.

Appointment of Supervisory Board is based on fit and proper test of the Company's Shareholders. A member of Supervisory Board can be discharged under the following reasons:

- End of tenure
- Resigned
- Unable to serve properly
- Passes away
- Involves in any action harming the Company and/or the Country
- Does not comply with or violates the provisions of the applicable laws or regulations and the Articles of Association and / or is found guilty under court decisions having permanent legal force;

Komposisi Dewan Pengawas

Composition of the Supervisory Board

Pada tahun 2016, Komposisi Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Pemegang Saham terdiri dari ketua Dewan dan anggota Dewan. Jumlah Dewan Pengawas BPDPKS sebanyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari unsur Pemerintah sebanyak 6 (enam) orang dan unsur Profesional sebanyak 3 (tiga) orang. Dewan Pengawas dari unsur pemerintah berasal dari pejabat Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diusulkan oleh masing-masing menteri kepada Menteri Keuangan. Sedangkan Dewan Pengawas dari unsur profesional diusulkan oleh Komite Pengarah kepada Menteri Keuangan.

In 2016, composition of the Supervisory Board was in accordance with Decree of Shareholders issued by Chairman and members of the Board. The Supervisory Board is composed of 9 (nine) members, consisting of 6 (six) governmental representatives and 3 (three) professionals. The Governmental element in the Supervisory Board is represented by the Ministry of Finance, Ministry of Agriculture, Ministry of Industry, Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Trade, and the Coordinating Ministry for Economic Affairs officials proposed by respective ministers to the Minister of Finance. On the other hand, professional members of the Supervisory Board were proposed by the Steering Committee to the Minister of Finance.

Komposisi Dewan Pengawas BPDPKS tahun 2016 The composition of IECFPO Supervisory Board in 2016

Nama Pejabat Name of Official	Jabatan Position	Representative Representative	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Rusman Heriawan	Ketua Chairman	Kementerian Pertanian Ministry of Agriculture	
Lukita Dinarsyah Tuwo	Anggota Member	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Coordinating Ministry for Economic Affairs	
Suahasil Nazara	Anggota Member	Kementerian Keuangan Ministry of Finance	
Arlinda	Anggota Member	Kementerian Perdagangan Ministry of Trade	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/KMK.05/2015 Tanggal 26 Juni 2015 Minister of Finance Decree Number 714/KMK.05/2015 dated Friday, June 26, 2015
Rida Mulyana	Anggota Member	Kementerian ESDM Ministry of Energy and Mineral Resources	
Panggah Susanto	Anggota Member	Kementerian Perindustrian Ministry of Industry	
Gamal Nasir	Anggota Member	Kementerian Pertanian Ministry of Agriculture	
Loso Judijanto	Anggota Member	Kementerian Negara PPN/ Bappenas Ministry of National Development Planning/Bappenas	
Joko Supriyono	Anggota Member	GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) IPOA (Indonesian Palm Oil Association)	

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas

Diversity Policy of the Supervisory Board Composition

BPDPKS tidak menerapkan suatu kebijakan khusus terkait dengan keberagaman komposisi Dewan Pengawas, akan tetapi BPDPKS telah memperhatikan keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dengan memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi Pendidikan, Pengalaman Kerja, Jenis Kelamin dan Usia.

Informasi mengenai pendidikan, pengalaman kerja jenis kelamin dan usia Dewan Pengawas lebih jelasnya telah diuraikan pada Bab Laporan Kepada Pemegang Saham dibagian profil Dewan Pengawas dalam Laporan Tahunan ini.

Disamping itu, dalam rangka menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga "fairness" serta mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan Perusahaan, BPDPK memiliki Komisaris Independen yang dijabat oleh Sdr. Joko Supriyono.

IECFPO did not apply any specific policy regarding diversity of Supervisory Board composition. IECFPO has considered diversity of Supervisory Board composition by meeting diversity elements i.e. combinations of Education, Work Experience, Gender, and Age.

Information on education, work experience, gender, and age of the Supervisory Board are clearly described in Report to Shareholders Section in the profile of the Supervisory Board of this Annual Report.

In addition, to create the more objective and independent climate, to maintain "fairness", and to protect the Company's interest, IECFPO appointed an Independent Commissioners served by Mr. Joko Supriyono.

Hubungan Afiliasi dan Kepengurusan di Perusahaan Lain

Affiliation and Managerial Relations in Other Company

Hubungan afiliasi Dewan Pengawas dilihat dari sifat hubungan keluarga, keuangan, kepemilikan saham dan kepengurusan di Perusahaan lain (rangkap jabatan) yang menimbulkan benturan kepentingan

Affiliate relationship of Supervisory Board is viewed from familial, financial, shareholding, and managerial natures in other Company (concurrent position) arising to conflict of interest



Sifat Afiliasi Dewan Komisaris Berdasarkan Sifat Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepemilikan Saham

Affiliate relationship nature of Supervisory Board by the Nature of Financial, Familial, and Shareholding Relationship

Nama Anggota Dewan Pengawas Name of Supervisory Board Members	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relation With			Hubungan Keluarga Dengan Familial Relation With			Hubungan Kepemilikan Saham Shareholding Relation		
	Direksi Board of Directors	Dewan Pengawas Supervisory Board	Pemegang Saham Shareholders	Direksi Board of Directors	Dewan Pengawas Supervisory Board	Pemegang Saham Shareholders	Direksi Board of Directors	Dewan Pengawas Supervisory Board	Pemegang Saham Shareholders
Rusman Heriawan	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None
Lukita Dinarsyah Tuwo	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None
Suahasil Nazara	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None
Arlinda	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None
Rida Mulyana	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None
Panggah Susanto	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None
Gamal Nasir	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None
Loso Judijanto	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None
Joko Supriyono	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None	Tidak None

Selama tahun 2016, tidak terdapat hubungan afiliasi keuangan, keluarga dan kepemilikan Saham Dewan Pengawas dengan Direksi, Dewan Pengawas dan Pemegang Saham Utama Pengendali

Throughout 2016, there was no financial, family and Shareholding affiliation relations among Supervisory Board and Board of Directors, Supervisory Board and Major Controlling Shareholders

Pedoman, Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas

Guidelines, Duties and Responsibilities of the Supervisory Board

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Pengawas mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/KMK.05/2015 tanggal 26 Juni 2015. Sejalan dengan pedoman tersebut, tugas dan kewajiban Dewan Pengawas adalah:

Tugas Dewan Komisaris

Duties of the Supervisory Board:

- Melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas Pejabat pengelola;
- Menyampaikan rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan penghimpunan dan penggunaan Dana oleh Pejabat pengelola kepada Komite Pengarah;
- Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite Pengarah

In performing its duties and responsibilities, Supervisory Board refers to Minister of Finance Decree Number 714/KMK.05/2015 dated June 26, 2015. Pursuant to such guidelines, the duties and responsibilities of Supervisory Board are:

- Conducting supervision and development of the Management duty implementation.
- Submitting recommendation for the implementation of Fund Collection and Utilization by the Management to the Steering Committee;
- Conducting other relevant duties assigned by Steering Committee

Dewan Pengawas Supervisory Board

Kewajiban Dewan Komisaris

Obligations of the Supervisory Board

1. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum (BLU);
 2. Melaporkan kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU;
 3. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLU; dan
 4. Memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan kinerja BLU kepada Pejabat Pengelola BLU.
1. Providing opinion and suggestion to the Minister of Industry and the Minister of Finance on Business and Budgeting Strategic Plans proposed by Public Service Agency Management;
 2. Reporting to Minister of Industry and Minister of Finance concerning any symptoms of declining Public Service Agency performance;
 3. Keeping record on the development of Public Service Agency activities, providing opinions and suggestions to the Minister of Industry and Minister of Finance on any issues deemed important for Public Service Agency management; and
 4. Providing inputs, suggestions, or feedbacks on the performance of Public Service Agency financial statements to Public Service Agency Management.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Tahun Buku 2016

Report to Supervisory Board's Duties and Responsibilities Implementation
in Fiscal Year of 2016

Dewan Pengawas BPDPKS secara proaktif melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi. Pengawasan dilakukan secara langsung termasuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi. Selama tahun 2016, Dewan Pengawas BPDPKS telah melakukan fungsi, tugas, peran dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

IECFPO Supervisory Board proactively conducted supervision and provided inputs to the Board of Directors. Supervision was carried out directly including monitored the follow up of Supervisory Board's recommendations to the Board of Directors. Throughout 2016, IECFPO Supervisory Board had conducted the following functions, duties, roles, and responsibilities:

Program Pengenalan Dewan Pengawas Baru

Introduction Program for the New Member of Supervisory Board Program

Latar belakang Anggota Dewan Pengawas yang merupakan representasi dari beberapa pemegang saham, Dewan Pengawas BPDPKS selalu mengadakan Program Pengenalan anggota Dewan Pengawas baru dengan harapan para anggota Dewan Pengawas dapat saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif dan sebagai ajang memberikan pengenalan mengenai kondisi BPDPKS.

Pada tahun 2016 tidak ada Pengangkatan anggota Dewan Pengawas baru, sehingga tidak ada penyelenggaraan program pengenalan bagi anggota Dewan Pengawas baru.

Background of Supervisory Board Members who are the representatives of several shareholders, IECFPO Supervisory Board regularly holds Introduction Program for the New Member of Supervisory Board. It is expected that the Supervisory Board members may get up close and personal in addition to establish a solid, comprehensive and effective team and to familiarize such member to IECFPO's conditions.

In 2016, there was no new Supervisory Board member appointed, thus there was no Introduction Program for the New Member of Supervisory Board.

Rapat Dewan Pengawas

Supervisory Board Meetings

Setiap tahunnya, Dewan Pengawas selalu mengadakan rapat bersama Direksi dalam rangka membahas kinerja dan masalah-masalah strategis yang dihadapi BPDKS. Selama tahun 2016 Dewan Pengawas telah melakukan rapat bersama Direksi sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian sebagai berikut:

Annually, Supervisory Board regularly holds joint meeting with the Board of Directors. It aims to discuss performance and strategic issues faced by IECFPO. Throughout 2016, Supervisory Board has held 10 (ten) joint meeting with the Board of Directors, with the following details:

Rapat Internal Dewan pengawas Supervisory Board Internal Meetings

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
16 Februari 2016 Februari 16, 2016	<ul style="list-style-type: none"> 1. Progres Dana Pungutan dan Laporan Keuangan s/d Desember 2015 2. Progres Program Bio-Diesel Sawit terakhir 3. Progres Persiapan/Implementasi Peremajaan Kelapa Sawit 4. Progres Riset Sawit 5. Wacana Dukungan BPDP Sawit untuk Desa Sawit Bebas Api 6. Hal-hal lain yang memerlukan Pertimbangan Dewas 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Progress of Restitution and Financial Statements to December 2015 Progress 2. Progress of the current Palm Bio-Diesel Program 3. Progress of Palm Replanting Preparation/Implementation 4. Progress of Palm Research 5. Agenda of IECFPO Support on the Fire-Free Palm Oil Village 6. Other issues that required Consideration of the Board
22 Maret 2016 March 22, 2016	<ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan dan Capaian Penghimpunan Dana. 2. Progress Program B20. 3. Progress Program Kemitraan Riset. 4. Progress Kemitraan Pendidikan dan Pelatihan SDM Sawit. 5. Progress Program Replanting. 6. Masalah Manajemen BPDP Sawit. 7. Hal-hal lain terkait yang memerlukan Pertimbangan Dewan Pengawas. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Financial Statements and Fund Raising Progress 2. B20 Program Progress 3. Research Partnership Program Progress 4. Palm Human Resource Education and Training Partnership Progress 5. Replanting Program Progress 6. Managerial Issues faced by IECFPO 7. Other issues that required Consideration of the Supervisory Board
19 April 2016 April 19, 2016	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan Perpres 24/2016-revisi Perpres 61 2. Progres reorganisasi BPDP sawit dan usulan penggantian 2 Direksi 3. Laporan Keuangan dan Kinerja s.d Maret 2016 4. Progres Bioenergi B20 5. Progres Peremajaan Kelapa Sawit 6. Progres Kemitraan Riset 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Explanation of Presidential Regulation 24/2016 revision of Presidential Regulation No. 61 2. Progress of IECFPO reorganization and proposal for the replacement of 2 Directors 3. Financial and Performance Report to March 2016 4. B20 Bioenergy Progress 5. Progress of Palm Replanting 6. Research Partnership Progress

Dewan Pengawas Supervisory Board

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
	<ul style="list-style-type: none"> 7. Progres Pendidikan dan Pelatihan SDM Sawit 8. Progres Kemitraan dan Sosialisasi Sawit 9. Hal-Hal lain yang memerlukan pertimbangan Dewan Pengawas 7. Palm Human Resource Education and Training Progress 8. Palm Partnership and Socialization Progress 9. Other issues that required consideration of the Board 	<ul style="list-style-type: none"> 9. Direktur Penyaluran Dana Sawit Director of Palm Fund Distribution 10. Direktur Promosi dan Kemitraan Sawit Director of Palm Promotion and Partnership
24 Mei 2016 May 24, 2016	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Komite Pengarah, Dewan Pengawas dan Dewan Direksi 2. Laporan Keuangan dan Kinerja BPDP Sawit 3. Progres Pelaksanaan B20, Peremajaan Sawit, Pendidikan dan Latihan, Kerjasama Riset, dan Kemitraan 4. Kebijakan dan Rencana Aksi yang perlu diketahui dan disetujui Dewan Pengawas 5. Hal-hal lain yang memerlukan Pertimbangan Dewan Pengawas 1. Follow up on Steering Committee, Supervisory Board, and Board of Directors Meeting Resolutions 2. IECFPO Financial and Performance Report 3. Progress of B20 Implementation, Palm Replanting, Education and Training, Research Cooperation, and Partnership 4. Policy and Action Plan that the Supervisory Board should acknowledge and approve 5. Other issues that required Consideration of the Supervisory Board 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rusman Heriawan 2. Rida Mulyana 3. Lukita Dinarsyah Tuwo 4. Loso Judijanto 5. Joko Supriyono 6. Suahasil Nazara 7. Panggah Susanto 8. Arlinda 9. Gamal Nasir 10. Direktur Utama BPDP Sawit President Director of IECFPO 11. Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management Directorate 12. Direktur Penyaluran Dana Sawit Director of Palm Fund Distribution 13. Direktur Promosi dan Kemitraan Sawit Director of Palm Promotion and Partnership
23 Juni 2016 June 23, 2016	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Komite Pengarah, Dewas dan Dewan Direksi 2. Evaluasi Satu Tahun Perjalanan BPDP Kelapa Sawit 3. Laporan Keuangan dan Capaian Penghimpunan Dana Mei 2016 4. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program B-20 5. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Peremajaan Sawit 6. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan 7. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kerjasama Riset 8. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Promosi dan Kemitraan 9. Hal-Hal Lain Terkait Yang Memerlukan Pertimbangan Dewan Pengawas 1. Follow up on Steering Committee, Supervisory Board, and Board of Directors Meeting Resolutions 2. IECFPO's Annual Evaluation 3. Financial Statements and Fund Raising Progress of May 2016 4. B-20 Program Implementation Progress Report 5. Palm Replanting Implementation Progress Report 6. Education and Training Implementation Progress Report 7. Research Cooperation Implementation Progress Report 8. Promotion and Partnership Implementation Progress Report 9. Other issues that required Consideration of the Supervisory Board 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rusman Heriawan 2. Rida Mulyana 3. Lukita Dinarsyah Tuwo 4. Loso Judijanto 5. Joko Supriyono 6. Suahasil Nazara 7. Arlinda 8. Direktur Utama BPDP Sawit President Director of IECFPO 9. Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management Directorate 10. Direktur Promosi dan Kemitraan Sawit Director of Palm Promotion and Partnership 11. Senior staf Divisi Perencanaan dan Pengelolaan Dana Senior staff to the Fund Planning and Management Division 12. Senior staf Divisi Program Pelayanan Riset Senior staff to Research Service Program Division 13. Satuan Pengawas Internal Internal Audit Unit

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
26 Juli 2016 July 26, 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Komite Pengarah, Dewas dan Dewan Direksi 2. Laporan Keuangan Juni 2016 3. Capaian Kinerja BPDPKS periode s.d. Triwulan II/Semester I Tahun 2016 4. Laporan Capaian Penghimpunan Dana Juni 2016 dan Pengelolaan Dana Juni 2016 5. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program B-20 6. Laporan Perkembangan Replanting 7. Laporan Perkembangan Sarana dan Prasarana Serta Pemberdayaan Petani 8. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan 9. Laporan Perkembangan Kerjasama Riset 10. Laporan Perkembangan Kemitraan 11. Kebijakan dan Rencana Aksi yang perlu diketahui dan disetujui Dewan Pengawas 1. Follow up on Steering Committee, Supervisory Board, and Board of Directors Meeting Resolutions 2. Financial Statement of June 2016 3. IECFPO's Performance achievement as of the Second Quarter/the First Semester of 2016 4. Fund Raising Performance Report of June 2016 and Fund Management of June 2016 5. B-20 Program Implementation Progress Report 6. Replanting Progress Report 7. Development of Facilities and Infrastructures as well as Farmers Empowerment Progress Report 8. Education and Training Implementation Progress Report 9. Research Cooperation Progress Report 10. Partnership Progress Report 11. Policy and Action Plan that the Supervisory Board should acknowledge and approve 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rusman Heriawan 2. Rida Mulyana 3. Lukita Dinarsyah Tuwo 4. Loso Judijanto 5. Panggah Susanto 6. Arlinda 7. Direktur Utama BPDP Sawit President Director of IECFPO 8. Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management Directors 9. Direktur Promosi dan Kemitraan Sawit Director of Palm Promotion and Partnership 10. Senior staf Divisi Perencanaan dan Pengelolaan Dana Senior staff to the Fund Planning and Management Division 11. Senior staf Divisi Program Pelayanan Riset Senior staff to Research Service Program Division 12. Satuan Pengawas Internal Internal Audit Unit
24 Agustus 2016 August 24, 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Komite Pengarah, Dewas dan Dewan Direksi 2. Laporan Keuangan Juli 2016 3. Laporan Capaian Penghimpunan Dana Juli 2016 dan Pengelolaan Dana Juli 2016 4. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program B-20 5. Laporan Perkembangan Replanting, Pelatihan, dan Sarana Prasarana 6. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan 7. Laporan Perkembangan Kerjasama Riset 8. Laporan Perkembangan Promosi dan Kemitraan 9. Kebijakan dan Rencana Aksi yang perlu diketahui dan disetujui Dewan Pengawas 1. Follow up on Steering Committee, Supervisory Board, and Board of Directors Meeting Resolutions 2. Financial Statement of July 2016 3. Fund Raising Performance Report of July 2016 and Fund Management of July 2016 4. B-20 Program Implementation Progress Report 5. Replanting, Training, and Facilities and Infrastructures Progress Report 6. Education and Training Implementation Progress Report 7. Research Cooperation Progress Report 8. Promotion and Partnership Progress Report 9. Policy and Action Plan that the Supervisory Board should acknowledge and approve 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rusman Heriawan 2. Lukita Dinarsyah Tuwo 3. Loso Judijanto 4. Suahasil Nazara 5. Arlinda 6. Gamal Nasir 7. Joko Supriyono 8. Direktur Utama BPDP Sawit President Director of IECFPO 9. Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management Directorate 10. Direktur Promosi dan Kemitraan Sawit Director of Palm Promotion and Partnership 11. Senior Staf Divisi Akuntansi dan Pelaporan Senior Staff to the Accounting and Reporting Division 12. Senior staf Divisi Program Pelayanan Riset Senior staff to Research Service Program Division 13. Kepala Satuan Pengawas Internal Head of Internal Control Unit

Dewan Pengawas Supervisory Board

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
27 September 2016 September 27, 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Komite Pengarah, Dewas dan Dewan Direksi 2. Laporan Keuangan Agustus 2016 3. Laporan Capaian Penghimpunan Dana Agustus 2016 dan Pengelolaan Dana Juli 2016 4. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program B-20 5. Laporan Perkembangan Replanting, Pelatihan, dan Sarana Prasarana 6. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan 7. Laporan Perkembangan Kerjasama Riset 8. Laporan Perkembangan Promosi dan Kemitraan 9. Kebijakan dan Rencana Aksi yang perlu diketahui dan disetujui Dewan Pengawas 1. Follow up on Steering Committee, Supervisory Board, and Board of Directors Meeting Resolutions 2. Financial Statement of August 2016 3. Fund Raising Performance Report of August 2016 and Fund Management of August 2016 4. B-20 Program Implementation Progress Report 5. Replanting, Training, and Facilities and Infrastructures Progress Report 6. Education and Training Implementation Progress Report 7. Research Cooperation Progress Report 8. Promotion and Partnership Progress Report 9. Policy and Action Plan that the Supervisory Board should acknowledge and approve 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rusman Heriawan 2. Lukita Dinarsyah Tuwo 3. Loso Judijanto 4. Suahasil Nazara 5. Arlinda 6. Gamal Nasir 7. Rida Mulyana 8. Direktur Utama BPDP Sawit President Director of IECFPO 9. Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management Directorate 10. Direktur Promosi dan Kemitraan Sawit Director of Palm Promotion and Partnership 11. Kepala Divisi Kemitraan dan Hubungan Kelembagaan Head of Partnership and Institutionalism Relation Division 12. Kepala Satuan Pemeriksa Internal Head of Internal Audit Unit 13. Senior Staf Divisi Akuntansi dan Pelaporan Senior Staff to the Accounting and Reporting Division 14. Senior staf Divisi Program Pelayanan Riset Senior staff to Research Service Program Division 15. Senior Staf Divisi Akuntansi dan Pelaporan Senior Staff to the Accounting and Reporting Division 16. Senior staf Divisi Program Pelayanan Riset Senior staff to Research Service Program Division
27 Oktober 2016 October 27, 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Komite Pengarah, Dewas dan Dewan Direksi 2. Laporan Keuangan September 2016 3. Laporan Capaian Penghimpunan Dana September 2016 4. Laporan Pengelolaan Dana September 2016 5. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program B-20 6. 6. Laporan Perkembangan Replanting, Pelatihan, serta Sarana Prasarana 7. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan 8. Laporan Perkembangan Kerjasama Riset 9. Laporan Perkembangan Promosi dan Kemitraan 10. Kebijakan dan Rencana Aksi yang perlu diketahui dan disetujui Dewan Pengawas 1. Follow up on Steering Committee, Supervisory Board, and Board of Directors Meeting Resolutions 2. Financial Statement of September 2016 3. Fund Raising Progress Report of September 2016 4. Fund Management Report of September 2016 5. B-20 6 Program Implementation Progress Report 6. Replanting, Training, and Facilities and Infrastructures Progress Report 7. Education and Training Implementation Progress Report 8. Research Cooperation Progress Report 9. Promotion and Partnership Progress Report 10. Policy and Action Plan that the Supervisory Board should acknowledge and approve 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rusman Heriawan 2. Suahasil Nazara 3. Lukita Dinarsyah Tuwo 4. Loso Judijanto 5. Gamal Nasir 6. Arlinda 7. Rida Mulyana 8. Direktur Utama BPDP Sawit President Director of IECFPO 9. Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management Directorate 10. Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Fund Planning and Management Director 11. Direktur Penghimpunan Dana Director of Fund Raising 12. Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan Head of Accounting and Reporting Division 13. Kepala Divisi Unit Penyaluran Riset Head of Research Distribution Unit Division 14. Kepala Satuan Pengawas Internal Head of Internal Control Unit 15. Kepala Divisi Lembaga Kemasyarakatan dan Civil Society Head of Community Institutions and Civil Society Division
23 November 2016 November 23, 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Pengawas dan Dewan Direksi 2. Laporan Keuangan Oktober 2016 3. Laporan Capaian Penghimpunan Dana Oktober 2016 4. Laporan Pengelolaan Dana Oktober 2016 1. Follow up on Supervisory Board and Board of Directors Meeting Resolutions 2. Financial Statement of October 2016 3. Fund Raising Progress Report of October 2016 4. Fund Management Report of October 2016 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rusman Heriawan 2. Arlinda 3. Lukita Dinarsyah Tuwo 4. Gamal Nasir 5. Direktur Utama BPDP Sawit President Director of IECFPO 6. Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management Directorate

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
	5. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program B-20 6. Laporan Perkembangan Replanting, Pelatihan, serta Sarana Prasarana 7. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan 8. Laporan Perkembangan Kerjasama Riset 9. Laporan Perkembangan Promosi dan Kemitraan	5. B-20 Program Implementation Progress Report 6. Replanting, Training, and Facilities and Infrastructures Progress Report 7. Education and Training Implementation Progress Report 8. Research Cooperation Progress Report 9. Promotion and Partnership Progress Report
Tingkat Kehadiran Masing-Masing Anggota Dewan Pengawas		Tingkat Kehadiran Masing-Masing Anggota Dewan Pengawas
1. Sdr.Rusman Heriawan (Ketua Dewan) telah menghadiri rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali rapat dengan persentase kehadiran sebesar 100% 2. Sdr.Lukita Dinarsyah Tuwo (Anggota Dewan) telah menghadiri rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali rapat dengan persentase kehadiran sebesar 100% 3. Sdr. Suahasil Nazara (Anggota Dewan) telah menghadiri rapat sebanyak 6 (enam) kali rapat dengan persentase kehadiran sebesar 60% 4. Sdr.Arlinda (Anggota Dewan) telah menghadiri rapat sebanyak 9 (sembilan) kali rapat dengan persentase kehadiran sebesar 90% 5. Sdr.Rida Mulyana (Anggota Dewan) telah menghadiri rapat sebanyak 5 (lima) kali rapat dengan persentase kehadiran sebesar 50% 6. Sdr.Panggah Susanto (Anggota Dewan) telah menghadiri rapat sebanyak2(dua) kali rapat dengan persentase kehadiran sebesar 20% 7. Sdr.Gamal Nasir (Anggota Dewan) telah menghadiri rapat sebanyak6 (enam) kali rapat dengan persentase kehadiran sebesar 60% 8. Sdr.Loso Judijanto (Anggota Dewan) telah menghadiri rapat sebanyak9 (sembilan) kali rapat dengan persentase kehadiran sebesar 90% 9. Sdr.Joko Supriyono (Anggota Dewan) telah menghadiri rapat sebanyak6 (enam) kali rapat dengan persentase kehadiran sebesar 60%.		1. Mr. Rusman Heriawan (the Chairman) has attended 10 (ten) meetings with the attendance percentage of 100% 2. Mr. Lukita DinarsyahTuwo (the Member) has attended 10 (ten) meetings with the attendance percentage of 100% 3. Mr. Suahasil Nazara (the Member) has attended 6 (six) meetings with the attendance percentage of 60% 4. Mr. Arlinda (the Member) has attended 9 (nine) meetings with the attendance percentage of 90% 5. Mr. Rida Mulyana (the Member) has attended 5 (five) meetings with the attendance percentage of 50% 6. Mr. Panggah Susanto (the Member) has attended 2 (two) meetings with the attendance percentage of 20% 7. Mr. Gamal Nasir (the Member) has attended 6 (six) meetings with the attendance percentage of 60% 8. Mr. Loso Judijanto (the Member) has attended 9 (nine) meetings with the attendance percentage of 90% 9. Mr. Joko Supriyono (the Member) has attended 6 (six) meetings with the attendance percentage of 60%.

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Supervisory Board's Performance Assessment

Sejalan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/KMK.05/2015 tanggal 26 Juni 2015 Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

In accordance with the Decree of the Minister of Finance No. 714/KMK.05/2015 dated June 26, 2015 the Supervisory Board reported on the performance of its duties to the Minister of Industry and the Minister of Finance at regular basis of at least 1 (once) in a semester and at any time as necessary.

Komite Audit Audit Committee



Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Pengawas untuk bekerja secara kolektif dan berfungsi menjaga efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, khususnya dari segi pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal serta pemantauan atas tindaklanjut hasil pemeriksaan audit (eksternal/internal) dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Februari tahun 2016, BPDPKS telah membentuk Komite Audit yang terdiri dari 1 orang Ketua dan 2 orang Anggota sesuai dengan Keputusan Direktur Utama BPDPKS No.KEP-08/DPKS/2016 tentang Pembentukan Komite Audit pada BPDPKS.

The Audit Committee is a committee established by the Supervisory Board to work collectively. It has the function of safeguarding the effectiveness of its duties and responsibilities, particularly in terms of monitoring and evaluation on the planning and implementation of internal audits and monitoring of the follow-up on audits (external / internal) results. It aims to assess the adequacy of internal controls including the adequacy of the financial reporting process. In 2016, IECFPO had established Audit Committee consisting of 1 Chairman and 2 Members in accordance with Supervisory Board Decree No KEP-08/DPKS/2016.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Audit

Qualification of Education and Work Experience for Audit Committee Member

BPDPKS telah menentukan persyaratan dalam menentukan kualifikasi untuk dapat menjadi anggota Komite Audit, antara lain (1) memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan / pemeriksaan, (2) tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan terhadap perusahaan, (3) mampu berkomunikasi secara efektif, (4) dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya, (5) memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi.

Kompetensi dan keahlian Ketua Komite Audit dapat dilihat pada profil ringkas sebagai berikut:

IECFPO has determined the requirements in determining the qualification for Audit Committee members, among others (1) having good integrity and adequate knowledge and work experience in the supervisory/audit field, (2) not having personal interests/link that may detriment and conflict on the company, (3) able to communicate effectively, (4) can provide sufficient time to complete the task, (5) having expertise in finance or accounting.

Competence and expertise for a Chairman of Audit Committee can be seen in the following brief profile:



Loso Judijanto

Dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Pengawas
Can be viewed in the Profile of the Supervisory Board

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Audit

Appointment and Dismissal of Audit Committee Member

Pengangkatan anggota Komite Audit diputuskan melalui Keputusan Keputusan Direktur Utama BPDPKS No.KEP-08/DPKS/2016 tentang Pembentukan Komite Audit pada BPDPKS tanggal 22 Februari Tahun 2016. Anggota Komite Audit dapat berhenti atau diberhentikan meskipun jabatannya belum berakhir, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia.

The appointment of Audit Committee members is determined by Decree of IECFPO President Director No.KEP-08/DPKS/ dated February 22, 2016 on Establishment of Audit Committee at IECFPO. Audit Committee Members can resign or be dismissed before the end of their tenure, in case of resignation and/or death.

Komite Audit Audit Committee

Jumlah dan Komposisi Komite Audit

Number and Composition of Audit Committee

Jumlah Komite Audit BPPKS pada tahun buku 2016 sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri 1 orang Ketua dan 2 orang Anggota dengan komposisi sebagai berikut:

Number of Audit Committee members in fiscal year of 2016 was 3 (three) members comprising or 1 Chairman and 2 Members with the following composition:

Nama Name	Jabatan Position
Loso Judijanto	Ketua/Anggota Dewan Pengawas Chairman/Supervisory Board Members
Hary Nugroho S.	Anggota Member
Moehammad Hatta	Anggota Member

Pedoman Kerja Komite Audit

Work Guidelines for Audit Committee

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit mengacu pada Keputusan Direktur Utama BPDPKS No.KEP-08/DPKS/2016 tanggal 22 Februari 2016.

Cakupan dari keputusan Direktur Utama tersebut terdiri dari penetapan Susunan Komite Audit Tahun 2016, Tugas dan tanggung jawab sebagai Komite Audit, Fungsi Komite Audit dan Honorarium bagi Komite Audit

In exercising their duties and obligations, the Audit Committee refers to Decree of IECFPO President Director No. KEP-08/DPKS/2016 dated February 22, 2016.

The scope and resolutions in the Decree cover the stipulation of Audit Committee composition for 2016, duties and responsibilities of Audit Committee, functions of Audit Committee, and salaries for the Audit Committee.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Audit Committee Duties and Responsibilities

Komite Audit BPDPKS sesuai dengan arahan Dewan Komisaris dan Keputusan Direktur Utama adalah bertanggungjawab dan melaporkan hasil pekerjaanya kepada Dewan Pengawas BPDPKS.

Sejalan dengan Keputusan Direktur Utama BPDPKS No.KEP-08/DPKS/2016, fungsi Komite Audit BPDPKS adalah:

- Melakukan penelaahan atas laporan-laporan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas
- Melakukan supervise atas pelaksanaan pengendalian internal BPDPKS
- Melakukan tugas lainnya sebagaimana arahan Dewan Pengawas

The IECFPO Audit Committee, according to the directives of the Board of Commissioners and the Decree of the President Director, holds the responsibility to report the result of its works to IECFPO Supervisory Board.

In accordance with the Decree of IECFPO President Director No. 08/DPKS/2016, the followings are the functions of IECFPO Audit Committee:

- Reviewing the reports submitted by the Board of Directors to the Supervisory Board.
- Supervising the implementation of internal control at IECFPO.
- Carrying out other duties as directed by the Supervisory Board.

Rapat Komite Audit

Audit Committee Meeting

Rapat Komite Audit diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, minimal sebulan sekali. Rapat dipimpin oleh ketua Komite Audit atau Anggota Komite Audit. Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak, dengan ketentuan bahwa keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Audit Committee Meetings are held based on the Company's requirements, at least once in a month. Such meeting is chaired by the chairman of Audit Committee or Audit Committee Member. Audit Committee Meeting Resolutions are taken amicably. In the event that such meeting fails to take any amicable resolutions, such resolutions shall be taken by voting, provided that the resolutions are taken by majority vote.



Sekretaris Dewan Pengawas

Secretary to the Supervisory Board



Pada tahun 2016, Sekretaris Dewan Pengawas dijabat oleh Reni Kustiari sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor KEP-22/DPKS/ 2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas.

In 2016, Reni Kustiari served as the Secretary to the Supervisory Board in accordance with the Decree of the President Director No. KEP-22 / DPKS / 2015 dated December 30, 2015 on the Establishment of the Secretariat to the Supervisory Board.

Sekretaris Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas guna mendukung kelancaran tugas pengawasan Dewan Pengawas. Pengangkatan Dewan Pengawas berdasarkan pada pendidikan dan pengalaman kerja yang dapat dilihat pada profil Sekretaris Dewan Pengawas sebagai berikut:

Secretary to the Supervisory Board is appointed and dismissed by the Supervisory Board to streamline any supervisory duty of the Supervisory Board. The appointment of Supervisory Board is based on education level and work experience that can be viewed in the profile of Secretary to the Supervisory Board.



Reni Kustiari

Tempat Tanggal Lahir:
Bengkulu, 18 Oktober 1958

Pendidikan:
Doctor of Philosophy in Agricultural Economics, Bogor Agricultural University, Bogor, 2001-2007; Master of Agricultural Economics, University of Missouri, USA, 1992-1994; Bachelor in Agricultural Statistics, Bogor Agricultural University, Bogor, 1979-1982.

Place and Date of Birth:
Bengkulu, 18 October 1958

Education:
Doctor of Philosophy in Agricultural Economics, Bogor Agricultural University, Bogor, 2001-2007; Master of Agricultural Economics, University of Missouri, USA, 1992-1994; Bachelor in Agricultural Statistics, Bogor Agricultural University, Bogor, 1979-1982.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Pengawas

Duties and Responsibilities of Secretary to the Supervisory Board

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Pengawas, antara lain:

- Mengadministrasikan dan mendokumentasikan seluruh data dan informasi terkait dengan Dewan Pengawas;
- Menyediakan dan menyampaikan informasi yang penting tentang Rapat Dewan Pengawas kepada Manajemen BPDPKS;
- Memberikan dukungan kepada Dewan Pengawas guna memperlancar tugas-tugas Dewan Pengawas;
- Sebagai penghubung antara Dewan Pengawas dengan

Duties and Responsibilities of Secretary to the Supervisory Board include:

- Administering and documenting all Supervisory Board related data and information;
- Preparing and delivering important information on Supervisory Board meeting to IECFPO Management;
- Supporting the Supervisory Board to facilitate the duties of Supervisory Board; and
- Liaising between the Supervisory Board and the Management.

Direksi

Board of Directors



Direksi merupakan organ utama Perusahaan yang bertanggung jawab penuh secara kolektif (kolegial) dalam pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara.

Board of Directors is the Company's main organ collectively (collegially) responsible in the Company management for the Company's interest and objectives. Each and every Board of Directors member has equal position including the President Director.

Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama (kolegial).

Duties of the President Director as primus inter pares is to coordinate the Board of Directors' activities. Each and every Board of Directors member is able to perform their duties and make any decision pursuant to the division of task and authorities. However, performance of duties by each and every Board of Directors member remains collegial responsibility.

Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Requirements, Appointment and Dismissal of the Board of Directors

Calon anggota Direksi BPDKS wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Persyaratan kemampuan mencakup memahami masalah manajemen yang berkaitan dengan fungsi salah satu manajemen, mempunyai pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan serta memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai. Adapun Persyaratan kepatutan terdiri dari pengalaman, keahlian, integritas, kepemimpinan, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.

Anggota Direksi di angkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses transparan, anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. Pemberhentian anggota Direksi sepenuhnya merupakan kewenangan Direksi Induk Perusahaan melalui RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

Candidates of IECFPO's Board of Directors members must meet fit and proper requirements as specified in the Articles of Association. The fit requirements include understanding management issues on one of management function, having sufficient knowledge in the field of business enterprise and having adequate integrity, competence and reputation. The proper requirements consist of experience, expertise, integrity, leadership, never declared bankrupt, never been a member of the Board of Directors and Supervisory Board found guilty of causing a company to be declared bankrupt, and never been charged for criminal acts harming the state finances and / or related to the financial sector.

Board of Directors members are appointed and dismissed by the GMS through a transparent process, the Board of Directors members shall be appointed from the candidate(s) proposed by the Shareholders and the candidacy shall be binding for the GMS. Dismissal of the Board of Directors members is a sole authority of the Board of Directors through GMS in accordance with the applicable legislation. GMS may dismiss Board of Directors Members at any given time by stating the reason for such dismissal.

Jumlah dan Komposisi Direksi

Number and Composition of the Board of Directors

Selama tahun 2016, jumlah anggota Direksi mengalami perubahan yaitu dari 6 (enam) orang menjadi 4 orang, dimana perubahan terjadi pada:

1. Pemberhentian Direktur Penghimpunan Dana yang dijabat oleh Sdr. Witjaksana Darmosarkor dan mengangkat Sdr. Hendrajat Natawidjaja dengan jabatan yang sama.
2. Pemberhentian Penyalur Dana yang dijabat oleh Sdr. Dadan Kusdiana

Throughout 2016, Board of Directors membership was changed from 6 members to 4 members. Such change occurred to:

1. Dismissal of Fund Raising Director served by Mr. Witjaksana Darmosarkoro and appointed Mr. Hendrajat Natawidjaja to serve the same position.
2. Dismissal of Fund Distribution served by Mr. Dadan Kusdiana

Direksi Board of Directors

3. Pemberhentian Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana yang dijabat oleh Sdr. R.C. Eko Santoso Budianto dan mengangkat Sdr. Agustinus Antonius dengan jabatan yang sama.
4. Pemberhentian Direktur Kemitraan yang dijabat oleh Sdr. Agustinus Antonius
5. Pemberhentian Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang dijabat oleh Sdr. Yuniar Yanuar Rasyid

Sehingga Komposisi Direksi BPDPKS sebagai berikut:

3. Dismissal of Fund Planning and Management Director served by Mr. R.C. Eko Santoso Budianto appointed Mr. Agustinus Antonius with the same position.
4. Dismissal of Partnership Directors served by Mr. Agustinus Antonius
5. Dismissal of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management served by Mr. Yuniar Yanuar Rasyid

Thus the Composition IECFPO Supervisory Board is as follows:

Komposisi Direksi BPDPKS Tahun 2016 The composition of IECFPO Board of Directors in 2016

Nama Name	Jabatan Position
Bayu Krisnamurthi	Direktur Utama President Director
Catur Ariayonto Widodo	Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management Director
Agustinus Antonius	Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Director of Planning and Fund Management
Hendrajat Natawidjaja	Direktur Penghimpun Dana Director of Fund Raising

Kebijakan Keberagaman Komposisi Direksi

Diversity Policy in the Board of Directors Composition

BPDPKS tidak menerapkan suatu kebijakan khusus terkait dengan keberagaman komposisi Direksi, akan tetapi BPDPKS telah memperhatikan keberagaman Komposisi Direksi dengan memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi Pendidikan, Pengalaman Kerja, Jenis Kelamin dan Usia.

Informasi mengenai pendidikan, pengalaman kerja jenis kelamin dan usia Direksi lebih jelasnya telah diuraikan pada Bab Laporan Kepada Pemegang Saham dibagian profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

IECFPO did not apply any specific policy regarding diversity of Board of Directors composition. IECFPO has considered diversity of Board of Directors composition by meeting diversity elements i.e. combinations of Education, Work Experience, Gender, and Age.

Information on education, work experience, gender, and age of the Board of Directors are clearly described in Report to Shareholders Section in the profile of the Board of Directors of this Annual Report.

Hubungan Afiliasi dan Kepengurusan di Perusahaan Lain

Affiliation and Managerial Relations in Other Company

Hubungan afiliasi Direksi dilihat dari sifat hubungan keluarga, keuangan, kepemilikan saham dan kepengurusan di Perusahaan lain (rangkap jabatan) yang menimbulkan benturan kepentingan.

Affiliate relationship of Board of Directors is viewed from familial, financial, shareholding, and managerial natures in other Company (concurrent position) arising to conflict of interest

Sifat Afiliasi Direksi Berdasarkan Sifat Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepemilikan Saham

Affiliate relationship nature of Board of Directors by the Nature of Financial, Familial, and Shareholding Relationship

Nama Pejabat Name of Board of Directors Members	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relation With			Hubungan Keluarga Dengan Familial Relation With			Hubungan Kepemilikan Saham Shareholding Relation		
	Direksi Board of Directors	Dewan Pengawas Supervisory Board	Pemegang Saham Shareholders	Direksi Board of Directors	Dewan Pengawas Supervisory Board	Pemegang Saham Shareholders	Direksi Board of Directors	Dewan Pengawas Supervisory Board	Pemegang Saham Shareholders
Bayu Krishnamurthi	Tidak	None	Tidak	None	Tidak	None	Tidak	None	Tidak
Catur Ariayanto Widodo	Tidak	None	Tidak	None	Tidak	None	Tidak	None	Tidak
Agustinus Antonius	Tidak	None	Tidak	None	Tidak	None	Tidak	None	Tidak
Hendrajat Natawidjaja	Tidak	None	Tidak	None	Tidak	None	Tidak	None	Tidak

Selama tahun 2016, tidak terdapat hubungan afiliasi keuangan, keluarga dan kemilikan Saham Direksi dengan Direksi, Dewan Pengawas dan Pemegang Saham Utama Pengendali

Throughout 2016, there was no financial, family and Shareholding affiliation relations among Board of Directors and fellow Board of Directors, Supervisory Board and Major Controlling Shareholders



Direksi Board of Directors

**Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada
Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No.113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola
Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 11 Juni 2015.**

Board of Directors in executing its duties and responsibilities refers to Copy to the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Regulation No.113/PMK.01/2015 concerning Organization and Work Governance of Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil dated June 11, 2015.

Pedoman, Tugas dan Tanggungjawab Direksi
Guidelines, Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 11 Juni 2015.

Direksi BPDPKS bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPDPKS untuk kepentingan dan tujuan BPDPKS. Direksi bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas pengelolaan BPDPKS sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BPDPKS. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Berikut merupakan tugas khusus masing-masing Anggota Direksi BPDPKS:

Board of Directors in executing its duties and responsibilities refers to Copy to the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Regulation No.113/PMK.01/2015 concerning Organization and Work Governance of Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil dated June 11, 2015.

The Board of Directors holds full responsibility for IECFPO management for IECFPO interests and objectives. The Board of Directors is answerable to the Minister of Finance as the embodiment of IECFPO management accountability in accordance with the principles of good governance. In carrying out its duties and responsibilities, each of the Directors has clear duties and responsibilities in accordance with their respective functions. The followings are the special duties of each IECFPO Board of Directors Members.

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities of
Direktur Utama President Director	Direktur Utama dalam memimpin dan mengelola BPDPKS mempunyai fungsi merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan umum BPDPKS berdasarkan prinsip kehati-hatian, efektif dan efisien, sesuai dengan visi, misi, mengkoordinasikan kegiatan para Direktur, serta pengembangan kebijakan komunikasi, pengawasan intern, kepatuhan dan hukum. President Director in chairing and managing IECFPO functions to plan, to develop, and to establish IECFPO general policies based on the prudential principle in effective and efficient manners according to Company vision and mission, to coordinate Directors' activities, and to develop policies on communication, internal control, compliance, and law.

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities of
Direktorat Penghimpunan Dana Fund Collection Directorate	Direktorat Penghimpunan Dana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana penghimpunan dana untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, promosi kelapa sawit, pengembangan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit yang berasal dari pemungutan biaya dan iuran pelaku usaha dan penghimpunan dana lainnya.
Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana Fund Planning and Management Directorate	Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana yang bertugas merumuskan kebijakan perencanaan strategi bisnis, mengembangkan rencana pengalokasian dana, pengembangan dan penempatan dana yang dikelola pada instrumen investasi.
Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Finance, General Affairs, and Compliance	Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana bisnis anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan, penyelesaian transaksi (settlement), pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum, pengelolaan risiko organisasi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi

Report on the Board of Directors' Duties and Responsibilities Implementation

Program Pengenalan Direksi Baru

Introduction Program for new Board of Directors member

Dalam rangka memberikan pengenalan mengenai BPDPKS serta guna saling mengenal sesama anggota Direksi, menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif, BPDPKS selalu mengadakan program pengenalan bagi Direksi yang baru. Program pengenalan untuk anggota Direksi baru dilakukan secara informal dengan melakukan kumpul bersama diruangan dan masing-masing anggota Direksi baru saling berkenalan dengan para karyawan BPDPKS.

In order to provide an introduction on IECFPO and to get up close and personal to fellow Board of Directors members, to work together as a solid, comprehensive and effective team, IECFPO always holds an introduction program for the new Board of Directors members. Introduction program for the new Board of Directors members was held in informal manner. It was held by gathering in a certain hall and the new members would get to know with IECFPO employees.

Direksi Board of Directors

Setiap tahunnya, Direksi selalu mengadakan rapat dengan Dewan Pengawas dalam rangka mebahas kinera Perusahaan dan membahas isu-isu strategis Perusahaan. Pada tahun 2016, Direksi telah melakukan rapat dengan Dewan Pengawas sebanyak 10 kali.

Annually, the Board of Directors always holds meetings with the Supervisory Board to discuss the Company's performance and discuss the Company's strategic issues. In 2016, the Board of Directors has conducted 10 meetings with Supervisory Board.

Rapat Direksi

Board of Directors Meeting

Setiap tahunnya, Direksi selalu mengadakan rapat dengan Dewan Pengawas dalam rangka mebahas kinera Perusahaan dan membahas isu-isu strategis Perusahaan. Pada tahun 2016, Direksi telah melakukan rapat dengan Dewan Pengawas sebanyak 10 kali.

Waktu pelaksanaan, agenda rapat dan peserta rapat telah di jelaskan dalam Bab Dewan Pengawas pada bagian GCG Laporan Tahunan ini, adapun untuk tingkat kehadiranya Direksi dalam rapat gabungan adalah sebagai berikut:

Annually, the Board of Directors always holds meetings with the Supervisory Board to discuss the Company's performance and discuss the Company's strategic issues. In 2016, the Board of Directors has conducted 10 meetings with Supervisory Board.

The meeting schedule, agenda and participants were described in the Supervisory Board Section in the GCG section of this Annual Report, as for the joint meeting attendance level is described as follows:

Frekuensi Rapa Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2016
Frequency of Board of Directors and Board of Commissioners Joint Meeting in 2016

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Kehadiran Frequency Attendance	Percentase Kehadiran Attendance Percentage
Bayu Krisnamurthi	Direktur Utama President Director	10 Kali Times	100%
Catur Ariayanto Widodo	Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management Directorate	9 Kali Times	90%
Agustinus Antonius	Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Director of Planning and Fund Management	2 Kali Times	0,2%
Hendrajat Natawidjaja	Direktur Penghimpunan Dana Director of Fund Raising	4 Kali Times	0,4%

Keputusan-Keputusan Direksi Board of Directors Decisions

Selama tahun 2016 anggota Direksi telah mengeluarkan berbagai keputusan-keputusan antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan unit Layanan Pengadaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit No.30/DPKS/2016 tanggal 1 Juni 2016
2. Pengangkatan Sdr.Prayudha Moejo sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal Badan Pengelola Dana Perkebunan No.KEP.52/DPKS/2016 tanggal 30 Agustus 2016
3. Pengangkatan Sdri.Sylvia Daniarty, SE., M.M.,NIP 197111181999032008 Sebagai Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit No.KEP.53/DPKS/2016 tanggal 30 Agustus 2016.

Throughout 2016, the Board of Directors members has issued the following decisions:

1. Determination of Procurement Service Unit of IECFPO No.30/DPKS/2016 dated June 1, 2016
2. Appointment of Mr. PrayudhaMoejo as the Head of IECFPO Internal Control Unit No.KEP.52/DPKS/2016 dated August 30, 2016
3. Appointment of Mrs. Sylvia Daniarty, SE., M.M., Employee Reg. No. 197111181999032008 as the Head of IECFPO Compliance and Risk Management Division No.KEP.53/DPKS/2016 dated August 30, 2016.

Penilaian Kinerja Direksi Board of Directors' Performance Assessment

Penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan tugas dan tanggung jawab, pencapaian Indikator Kinerja. Penilaian tersebut dilakukan pada saat pertanggungjawaban laporan tahunan.

The Board of Directors' Performance Assessment must be executed based on the duties and responsibilities, achievement of Performance Indicators. The assessment was conducted on annual report accountability

Komite di Bawah Direksi Committee under the Board of Directors

Sampai dengan tahun 2016, Direksi BPDPKS belum membentuk Komite di bawah Direksi sehingga tidak terdapat informasi mengenai Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Direksi berikut dasar penilaiannya.

As of 2016, IECFPO Board of Directors had yet not established a Committee(s) under the Board of Directors, so there is no information on the performance of each committee under the Board of Directors and its evaluation base.

Audit Internal

Internal Audit



Audit internal BPDPKS dijalankan oleh Divisi Satuan Pengawasan Internal (SPI). Pembentukan Divisi SPI ini dilakukan pada tahun 2016 dengan tujuan menentukan kehandalan informasi yang dibuat manajemen serta untuk menetukan tingkat efektivitas dan efisiensi atas berbagai kegiatan operasional Perusahaan. Selaras hal tersebut, BPDPKS membentuk Audit Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana Surat Keputusan Direksi No.KEP-52/DPKS/2016 tentang Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Internal BPKS.

IECFPO Internal Audit is carried out by Internal Audit Division Internal Audit Division was established in 2016. Its objectives are to determine the information reliability made by the management and effectiveness and efficiency level over various operational activities. Therefore, IECFPO established Internal Audit appointed and dismissed by the President Director under approval of the Board of Commissioners as specified in the Board of Directors Decree No.KEP-52/DPKS/2016 concerning the Appointment of the Head of IECFPO Internal Audit Unit.

Pada tahun 2016, Divisi SPI BPDPKS dipimpin oleh Sdr. Prayudha Moejo dengan dibantu oleh 3 (tiga) auditor. Kedudukan Kepala Audit Internal dalam struktur Perusahaan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

In 2016, IECFPO Internal Audit Division was chaired by Mr. Prayudha Moejo under the assistance of 3 (three) auditors. The position of the Head of Internal Audit in the Company structure is under and answerable to the President Director.

Pedoman, Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Internal Guidelines, Duties and Responsibilities of Internal Audit Unit

Dalam mekanisme kerjanya, Unit Audit Internal mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 /PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tanggal 11 Juni 2015.

Tugas dan tanggung jawab SPI antara lain:

1. Melaksanakan pemeriksaan internal terhadap pelaksanaan tugas BPDPKS.
2. Melakukan audit berbasis risiko khususnya pada aktivitasusaha Lembaga Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
3. Melakukan *review* terhadap laporan keuangan untukmeyakinkan bahwa isi, penyajian, dan pengungkapannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan standarakuntansi keuangan yang berlaku.

In its work mechanism, Internal Audit Unit refers to Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 113 /PMK.01/2015 Concerning Organization and Work Governance of Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil dated June 11, 2015.

Duties and Responsibilities of Internal Audit Unit include:

1. Conducting internal assessment to IECFPO duties performance.
2. Implementing a risk-based audit, especially on the business activities of the Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil;
3. Reviewing the financial statements to ensure that the statements' content, presentation, and disclosure are in accordance with government accounting standards and applicable financial accounting standards.

Akuntan Publik Public Accountant



Pengawasan terhadap pengelolaan BPDPKS, selain dilakukan oleh Audit Internal juga dilakukan oleh Akuntan Publik (Auditor Eksternal) dalam rangka memastikan integritas penyajian laporan keuangan kepada pemegang saham.

Supervision over the IECFPO management, it is not only conducted by Internal Audit but also by Public Accountants (External Auditor) in order to ensure the integrity of financial statements presentation to shareholders.

Pemilihan auditor eksternal telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, dimana Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya boleh melakukan audit paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik maksimal 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Pada tahun 2016, BPDPKS di audit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali. Kantor Akuntan Publik tersebut telah melakukan audit sejak tahun 2016 dan tahun ini merupakan tahun ke 2 (dua). Informasi akuntan Publik terkait Nama Akuntan, Nama Kantor Akuntan Publik, dan Jasa Lain yang Diberikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

The appointment of external auditor has complied with Regulation of the Minister of Finance No.17 / PMK.01 / 2008 concerning Public Accountant Services, in which the Public Accounting Firm (KAP) may only conduct audits for a maximum of 6 (six) consecutive years and a maximum of 3 (three) consecutive fiscal years for Public Accountant.

In 2016, IECFPO was audited by Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Public Accounting Firm. Such Public Accounting Firm has been conducting audit since 2016 and this current year was their second year. Public Accountant Information related to Accountant Name, Public Accounting Firm Name, and Other Services Provided can be seen in the following table:

Rapat Internal Dewan pengawas Table of IECFPO Audit in Fiscal Year of 2015-2016

Tahun Buku Tahun Buku	Akuntan Publik Akuntan Publik	Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik	Jasa Lain Jasa Lain	Opini Opini
2016	Rudi M, Tambunan, CA, CPA	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali	- Penyusunan Pedoman Akuntansi Accounting Guideliness Preparation - Laporan Financial Managerial Managerial Financial Report	Laporan keuangan terlampir disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan BLU-BPDPKS tanggal 31 Desember 2015, dan aktivitas usaha serta arus kasnya untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. The attached financial statements is presented in reasonable manner in all material matters. Financial position of Public Service Agency-IECFPO dated December 31, 2015 and such business activity as well as its cash flow for a year ended on such date, was in accordance with Financial Accounting Standard applied in Indonesia.
2015	Rudi M, Tambunan, CA, CPA	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali	Tidak Ada N/A	Laporan keuangan terlampir disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan BLU-BPDPKS tanggal 31 Desember 2015, dan aktivitas usaha serta arus kasnya untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. The attached financial statements is presented in reasonable manner in all material matters. Financial position of Public Service Agency-IECFPO dated December 31, 2015 and such business activity as well as its cash flow for a year ended on such date, was in accordance with Financial Accounting Standard applied in Indonesia.

Manajemen Risiko

Risk Management



BPDPKS merupakan salah satu badan yang sarat dengan risiko, karena melibatkan pengelolaan uang dalam berbagai bentuk pembiayaan. Namun demikian, tingkat risiko tersebut bergantung pada kemampuan dan kompetensi manajemen dalam mengantisipasi risiko dengan penanganan yang tepat. Untuk itu, penerapan manajemen risiko di BPDPKS dilakukan secara efektif dan terintegrasi, dengan kerangka manajemen risiko yang dapat memberi arah ruang lingkup risiko yang harus dikelola BPDPKS. Pengelolaan manajemen risiko di BPDPKS berada pada Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

IECFPO is one of risk-laden agencies, since it involves cash management in various forms of funding. However, the risk level depends on the ability and competence of management in mitigating risk with appropriate handling. Therefore, the implementation of risk management in IECFPO is conducted effectively and integrated, with a risk management framework that can provide the scope of risk that IECFPO must manage. Risks in IECFPO are managed by Risk Compliance and Management Division.

Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko di pimpin oleh Sdri. Sylvia Daniarti yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama. Pengangkatan pimpinan Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah berdasarkan pada Pendidikan dan Pengalaman kerja serta sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Risk Compliance and Management Division is chaired by Mrs. Sylvia Daniarti who's appointed and dismissed by the President Director. The appointment of the Risk Compliance and Management Division chairman is based on the Education and Work Experience as well as pursuant to the Company's requirement.

Pedoman, Tugas dan Tanggungjawab Unit Manajemen Risiko Perusahaan

Guidelines, Duties and Responsibilities of the Company Risk Management Unit

Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan, BPDPKS mengacu pada peraturan eksternal yaitu peraturan PMK Nomor 191/PMK.09/2008 dan telah dirubah menjadi PMK Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Tugas dan tanggungjawab Unit Manajemen Risiko Perusahaan meliputi:

1. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi Risiko, kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Menyempurnakan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal BPDPKS yang mempengaruhi kecukupan pungutan, profil Risiko, dan ketidakefektifan penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.

Implementation of the Company Risk Management, IECFPO refers to the external regulation of the Minister of Finance Regulation No. 191/PMK.09/2008 and amended by the Minister of Finance Regulation No. 12/PMK.09/2016 on Risk Management Implementation in the Ministry of Finance environment.

Duties and Responsibilities of the Company Risk Management Unit cover:

1. Developing Risk Management policies and the amendments, including Risk Management strategy, risk level and Risk tolerance, Risk Management framework and contingency plan to anticipate abnormal condition.
2. Improving the Risk Management process periodically or incidentally as a result of a change in external and internal conditions of IECFPO affecting the adequacy of levies, Risk profile, and ineffectiveness of Risk Management implementation based on evaluation results.

Manajemen Risiko Risk Management

Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan, BPDPKS mengacu pada peraturan eksternal yaitu peraturan PMK Nomor 191/PMK.09/2008 dan telah dirubah menjadi PMK Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Implementation of the Company Risk Management, IECFPO refers to the external regulation of the Minister of Finance Regulation No. 191/PMK.09/2008 and amended by the Minister of Finance Regulation No. 12/PMK.09/2016 on Risk Management Implementation in the Ministry of Finance environment.

3. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis BPDPKS yang telah ditetapkan sebelumnya, atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui *limit* yang telah ditetapkan.
 4. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko BPDPKS memiliki kebijakan manajemen risiko sesuai ukuran dan kompleksitas serta risiko usaha. Prosedur berbasis risiko telah mencakup semua produk/aktivitas yang mengandung risiko. Limit risiko telah ditetapkan oleh masing-masing Direktorat dan dievaluasi sesuai kebutuhan.
 5. Melakukan identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko BPDPKS terhadap aktivitas dan produk baru yang akan diluncurkan sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan dan peraturan-peraturan lainnya. Dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Memastikan setiap produk dan aktifitas baru telah dilakukan uji kepatuhan dan kajian manajemen risiko.
 - b. Memastikan kecukupan Kebijakan dan Prosedur.
 - c. Memberikan perhatian yang lebih pada potensi risiko yang dinilai tinggi.
3. Determination of business policies and/or decisions that deviate from normal procedures, such as exceeding significant business expansion compared to established IECFPO business plans, or taking risk positions/exposures that exceed the established limits.
 4. d. Adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes, as well as Risk Management Information System of IECFPO have risk management policies based on the size and complexity and business risks. Risk-based procedures have covered risk-containing products/activities. Risk limits were established by each Directorate and evaluated as necessary.
 5. Identifying, measuring, monitoring and controlling IECFPO's risks to new soon-to-be launched activities and products in accordance with the Ministry of Finance provisions and other regulations. With the following descriptions:
 - a. Ensuring that every new product and activity has been tested for compliance and risk management review.
 - b. Ensuring the adequacy of Policies and Procedures.
 - c. More attentive to the risk potential that was deemed high.

Penilaian Kematangan Risiko BPDPKS IECFPO's Risk Maturity Assessment

Dalam rangka menentukan penilaian kematangan Risiko di BPDPKS, Divisi Manajemen Risiko sudah menerapkan peraturan Kematangan Risiko sebagai berikut:

To determine the risk maturity assessment in IECFPO, the Risk Management Division has implemented the Risk Maturity Regulations as follow:

Parameter Penilaian Assessment Parameter				
Tingkat Kematangan Level Maturity	Kepemimpinan Leadership	Proses Manajemen Risiko Process Management Risk	Aktivitas Penanganan Risiko Activity Handling Risk	Hasil Penerapan Manajemen Risiko Implementation Result Risk Management
Belum Sadar Risiko Risk Naive	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Manajemen risiko sangat rendah Commitment and understanding leader to implementation Risk Management very low	Proses manajemen risiko dilaksanakan secara sangat tidak lengkap dan identifikasi sangat tidak komprehensif Process management risk implemented in a very incomplete and identification not very comprehensive	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko sangat rendah Total percentage mitigation that implemented and achievement declined level risk very low	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sangat rendah Achievement objectives achievement strategic very low
Sadar Risiko Risk Aware	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi manajemen risiko rendah Commitment and understanding leader to implementation Risk Management low	Proses manajemen risiko dilaksanakan secara sangat tidak lengkap dan identifikasi tidak komprehensif Process management risk implemented in a very incomplete and identification no comprehensive	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko rendah Total percentage mitigation that implemented and achievement declined level low risk	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis rendah Achievement objectives achievement low strategic
Risiko Ditetapkan Risk Defined	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi manajemen risiko sedang Commitment and understanding leader to implementation risk management intermediate	Proses manajemen risiko dilaksanakan secara cukup lengkap dan identifikasi cukup komprehensif Process management risk implemented adequately complete and identification adequate comprehensive	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko sedang Total percentage mitigation that implemented and achievement declined level intermediate risk	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sedang Achievement objectives achievement intermediate strategic
Risiko Dikelola Risk Managed	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi manajemen risiko tinggi Commitment and understanding leader to implementation risk management High	Proses manajemen risiko dilaksanakan secara cukup lengkap dan identifikasi komprehensif Process management risk implemented adequately complete and identification comprehensive	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko tinggi Total percentage mitigation that implemented and achievement declined level high risk	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis tinggi Achievement objectives achievement high strategic
Dapat Menangani Risiko Risk Enabled	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi manajemen risiko sangat tinggi Commitment and understanding leader to implementation risk management very high	Proses manajemen risiko dilaksanakan secara sangat lengkap dan identifikasi sangat komprehensif Process management risk implemented in a very complete and identification very comprehensive	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko sangat tinggi Total percentage mitigation that implemented and achievement declined level risk very high	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sangat tinggi Achievement objectives achievement strategic very High

Laporan Unit Manajemen Risiko Perusahaan

The Company's Risk Management Unit Report

Realisasi Program Kerja Divisi Manajemen Risiko

Work Program Realization of Risk Management Division

Selama tahun 2016, Divisi Manajemen Risiko telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan program kerja yang direncanakan. Realisasi atas Program Kerja Divisi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- Melakukan pembaharuan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko, SOP, Komite Manajemen Risiko sesuai ketentuan Kementerian Keuangan yang baru dan telah disampaikan kepada BPDPKS.
- Meningkatkan budaya risiko pada seluruh Direktorat di BPDPKS dengan melakukan Training sejak Juni 2016 sampai dengan November 2016 seluruh pegawai BPDPKS.
- Membuat Profil Risiko sesuai ketentuan Kementerian Keuangan per Dirut (manajemen) dan per Direktorat masing-masing sesuai sasaran pada kontrak kerja.
- Melakukan monitoring atas kinerja Direktorat pada sasaran kinerja profil risiko.
- Melakukan kajian atas kinerja masing-masing Direktorat sesuai sasaran yang telah ditetapkan di Profil Risiko.
- Penyempurnaan pengidentifikasi risiko melekat (*inherent risk*) BPDPKS untuk seluruh risiko (8 jenis risiko), khususnya Pungutan. Pengelolaan, *Replanting*, Biodiesel, Riset dan sistem untuk mitigasi risiko (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) dari waktu ke waktu untuk menggambarkan risiko BPDPKS yang lebih tepat.

Throughout 2016, the Risk Management Division had executed its tasks and responsibilities in accordance with the established work program. The following are the Work Program Realization of the Risk Management Division:

- Updating Risk Management Implementation Guidelines, SOPs, Risk Management Committee in accordance with the Ministry of Finance's new provisions and submitted to IECFPO.
- Improving risk culture in IECFPO's Directorates by conducting Training since June 2016 to November 2016 for all IECFPO's employees.
- Drawing up Risk Profile that is in accordance with the Minister of Finance provisions per President Director (management) and per Directorates respectively by their objectives as contained in employment contract.
- Monitoring the Directorates' performance on its risk profile's performance objectives.
- Reviewing the respective Directorates' performance by the objectives established in the Risk Profile.
- Improving the identification of IECFPO inherent risk for all risks (8 risk types) particularly Levies. Management, Replanting, Biodiesel, and system for risk mitigation (Risk Management Implementation Quality) from time to time to accurately describe IECFPO's risk.

Profil-Profil Risiko BPDPKS dan Mitigasi Risiko

IECFPO's Risk Profiles and Risk Mitigation

Pada tahun 2016, Unit Manajemen Risiko Perusahaan memfokuskan pengelolaan perbaikan dan mitigasi terhadap potensi risiko-risiko yang bisa merugikan BPDPKS baik di bidang Penerimaan, Belanja, Pembiayaan, Strategik, Fraud, Kepatuhan, Operasional dan Reputasi. Jenis risiko (Profil Risiko) yang dihadapi Perusahaan dan Upaya Pengelolaan Risiko (mitigasi) dapat dilihat pada tabel berikut:

In 2016 The Risk Management Unit focuses on the management of the improvement and mitigation to potential risks that may harm IECFPO in the terms of Revenue, Expenditure, Financing, Strategic, Fraud, Compliance, Operational and Reputation. Risk Types (Risk Profile) faced by the Company and Risk Management Efforts (mitigation) can be seen in the following table:

Jenis Risiko Risk Types	Mitigasi (Upaya Pengelolaan Risiko) Mitigation (Risk Management Efforts)
1 Risiko Penerimaan Revenue Risk	Melakukan komunikasi 3 (tiga) arah antara exportir, Sucofindo dan Bea Cukai. Conducting a 3 (three) way communication among exporter, Sucofindo, and Customs.
2 Risiko Belanja Expenditure Risk	Melakukan monitoring awal dengan minta persetujuan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang akan mengevaluasi pengeluaran belanja Conducting initial monitoring by requesting applying for approval from the PPK (Commitment Making Official) who will evaluate the expenditure
3 Risiko Pembiayaan Funding Risk	Mengantisipasi pembiayaan ini harus benar-benar tepat sasaran dan dilampirkan bukti-bukti terlaksananya pembiayaan tersebut Anticipating that this funding must accurate and such fundings' proofs must be attached
4 Risiko Strategik Strategic Risk	Melakukan review strategik bisnis dari waktu ke waktu baik secara triwulan maupun secara tahunan yang disesuaikan dengan perubahan internal maupun eksternal BPDPKS Reviewing business strategic from time to time either quarterly or annually. It must be adjusted to the internal and external changes occurred in IECFPO
5 Risiko Fraud Fraud Risk	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi setiap bulan dengan semua Direktorat dan satu minggu sekali guna menentukan sasaran setiap bulan yang sudah ditetapkan masing-masing Direktorat dalam profil risiko untuk menjalankan Visi Misi BPDPKS • Melakukan rapat Direksi dalam rangka evaluasi kinerja selama 1 minggu berjalan dan untuk 1 minggu kedepan dalam bulan tersebut • Khusus operasional dilakukan day by day, yaitu monitoring pekerjaan dalam 1 hari tersebut. <ul style="list-style-type: none"> • Conducting weekly and monthly coordination with all Directorates to determine each month's target established by each Directorate in risk profile to carry out IECFPO's Vision of Mission • Conducting the Board of Directors meeting to evaluate the performance of current week and following week in such month • For day-by-day operation, i.e. whole day monitoring for the particular day.
6 Risiko Kepatuhan Compliance Risk	<p>Melakukan identifikasi dan analisa terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya eksposur risiko kepatuhan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penerapan <i>Good Governance</i> (GG) secara efektif untuk memastikan dan memantau kepatuhan terhadap setiap peraturan dan persyaratan secara internal maupun eksternal. Melakukan pemantauan terhadap setiap perubahan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan penerapannya di lingkungan BPDPKS. <p>Identifying and analyzing the factors that may lead to increased compliance risk exposure through:</p> <ol style="list-style-type: none"> The implementation of Good Governance in effective manner to endure and monitor compliance with any internal and external regulations and requirements. Monitoring any amendment to the applicable laws and regulations and ensuring their implementation within IECFPO.

Manajemen Risiko Risk Management

Jenis Risiko Risk Types	Mitigasi (Upaya Pengelolaan Risiko) Mitigation (Risk Management Efforts)
	<ul style="list-style-type: none"> c. Melakukan penilaian secara aktif dan berkala terhadap kecukupan kebijakan Pedoman dan Prosedur Internal yang dimiliki oleh semua Direktorat untuk memastikan kesesuaianya terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku d. Melakukan identifikasi dan analisa kepatuhan (<i>compliance analysis</i>) atas rencana dan pengembangan produk dan aktivitas baru guna memastikan kepatuhannya terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. e. Melakukan pemantauan terhadap terlaksananya prinsip kehati-hatian BPDPKS. <ul style="list-style-type: none"> c. Conducting an active and periodic assessment on the adequacy of the Internal Guidelines and Procedures policies established for all Directorates to ensure its compliance with applicable laws and regulations d. Conducting compliance identification and analysis on plans and developments of new products and activities. It aims to ensure its compliance with the applicable legislation. e. Monitoring the implementation of prudential principles in IECFPO.
7 Risiko Operasional Operational Risk	<p>Menyusun kebijakan dan kerangka pengawasan internal serta perangkat penilaian guna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • membantu unit-unit usaha/fungsional di semua Direktorat (PPK), • memperkecil kerugian yang tidak diharapkan • memungkinkan pelaksanaan produk dan aktivitas baru dengan risiko yang terjaga. <p>Preparing internal monitoring policies and framework as well as the assessment tools to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • supporting the business units/functions in all Directorate (PPK), • minimizing unexpected losses • enabling the implementation of new products and activities with sustained risks.
8 Risiko Reputasi Reputation Risk	<p>Melakukan pemantauan terhadap setiap berita yang berkaitan dengan BPDPKS di media massa melalui Divisi <i>Corporate Secretary</i>. Selain itu, optimalisasi fungsi unit <i>customer complaint</i>, merupakan salah satu usaha yang dilakukan BPDPKS untuk meningkatkan pengelolaan risiko reputasi. Unit ini berfungsi untuk menerima dan menyelesaikan keluhan dari stakeholder terkait dengan produk dan pelayanan BPDPKS.</p> <p>Monitoring any IECFPO-related news in the mass media through the Corporate Secretary Division. In addition, the optimization of customer complaint unit function, is one of the efforts made IECFPO to improve the reputation risk management. This unit serves to receive and resolve complaints from stakeholders related to IECFPO's products and services.</p>

Kebijakan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Remuneration Policy for Supervisory Board and Board of Directors



BPDPKS dalam menentukan Remunerasi Bagi Dewan Pengawas Dan Direksi Mengacu Pada Salinan Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum tanggal 16 Februari 2006.

In determining Remuneration for Supervisory Board and Board of Directors, IECFPO refers to Copy to the Regulation of the Minister of Finance No.10/PMK.02/2006 concerning Guidelines to Determination of Remuneration for Managerial Staff of Supervisory Board and Public Service Agencies dated February 16, 2016.

Kebijakan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Remuneration Policy for Supervisory Board and Board of Directors

Besaran remunerasi untuk Dewan Pengawas dan Direksi diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan yang selanjutnya Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai besaran remunerasi untuk Dewan Pengawas dan Direksi.

Amount of remuneration for Supervisory Board and Board of Directors is proposed to Minister/Head of Agency to the Minister of Finance. Director General of Budgeting and Financial Balance which subsequently the Minister of Finance shall stipulate Regulation of the Minister of Finance concerning the amount of remuneration for the Board of Trustees and Board of Directors.

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Indicators of Remuneration Determination for Supervisory Board and Board of Directors

Besaran Remunerasi ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

The amount of Remuneration is determined by considering the following factors:

	Proposionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLU serta tingkat pelayanan;	Proportionality, consideration on size and total assets managed by Public Service Agency and the service level;
	Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;	Equality, by observing similar service industry;
	Kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLU yang bersangkutan;	Adequacy, i.e. adjusting the revenue capability of such Public Service Agency;
	Kinerja operasional BLU yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.	Public Service Agency operational performance stipulated by the Minister/Head of Agency at least must consider the financial indicators, services, quality and benefits for the community.

Struktur Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Structure of Remuneration for Supervisory Board and Board of Directors

No	Remunerasi Dewan Pengawas Remuneration for Supervisory Board	Remunerasi Direksi Remuneration for Board of Directors
1	Honorarium	Honorarium
2	Insentif	Incentive
3	Bonus atas prestasi	Achievement bonus
4	Pensiun	Pension
5	Pesangon	Severance Pay



Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Dalam rangka menjaga keamanan harta milik Perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan BPDPKS menerapkan Sistem Pengendalian Internal pada setiap setiap jajaran manajemen.

IECFPO has implemented Internal Control System on every managerial level to safeguard the Company's assets, to check the accounting data accuracy and correctness, to promote efficiency, and to support compliance with management policy.

Konsep Sistem Pengendalian Internal BPDPKS mengacu pada Sistem Pengendalian Internal yang dikembangkan oleh The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Komponen Umum Sistem Pengendalian Internal BPDPKS mencakup antara lain:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

IECFPO's Internal Control System Concepts refer to the Internal Control System developed by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). IECFPO's Internal Control System General Components include:

1. Control Environment
2. Risk Assessment
3. Control Activities
4. Information & Communication
5. Monitoring

Perkara Hukum Legal Disputes

BPDPKS senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan juga peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan dengan lingkup usaha Perusahaan.

IECFPO constantly focuses on the compliance aspects with the applicable regulations and also the regulations related to the Company's business scope.

Perkara Penting yang sedang Dihadapi oleh Perusahaan dan Entitas Anak Significant Disputes Faced by the Company and Subsidiaries

Selama tahun 2016, BPDPKS tidak memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana. Sehingga tidak ada informasi terkait dengan pokok perkara, status penyelesaian, pengaruh terhadap Perusahaan, nilai nominal tuntutan dan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Perusahaan.

Selama tahun 2016, BPDPKS tidak memiliki entitas anak, sehingga tidak ada informasi terkait pokok perkara, status penyelesaian, pengaruh terhadap Entitas Anak, nilai nominal tuntutan dan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Entitas Anak.

Throughout 2016, IECFPO did not face any legal, civil or criminal issues. Thus there is no information regarding the principal case, settlement status, impact to the Company, the nominal value of the charges and administrative sanctions imposed on the Company.

Throughout 2016, IECFPO did not have any subsidiaries, thus there is no information regarding the principal case, settlement status, impact to the Subsidiaries, the nominal value of the charges and administrative sanctions imposed on the Company.

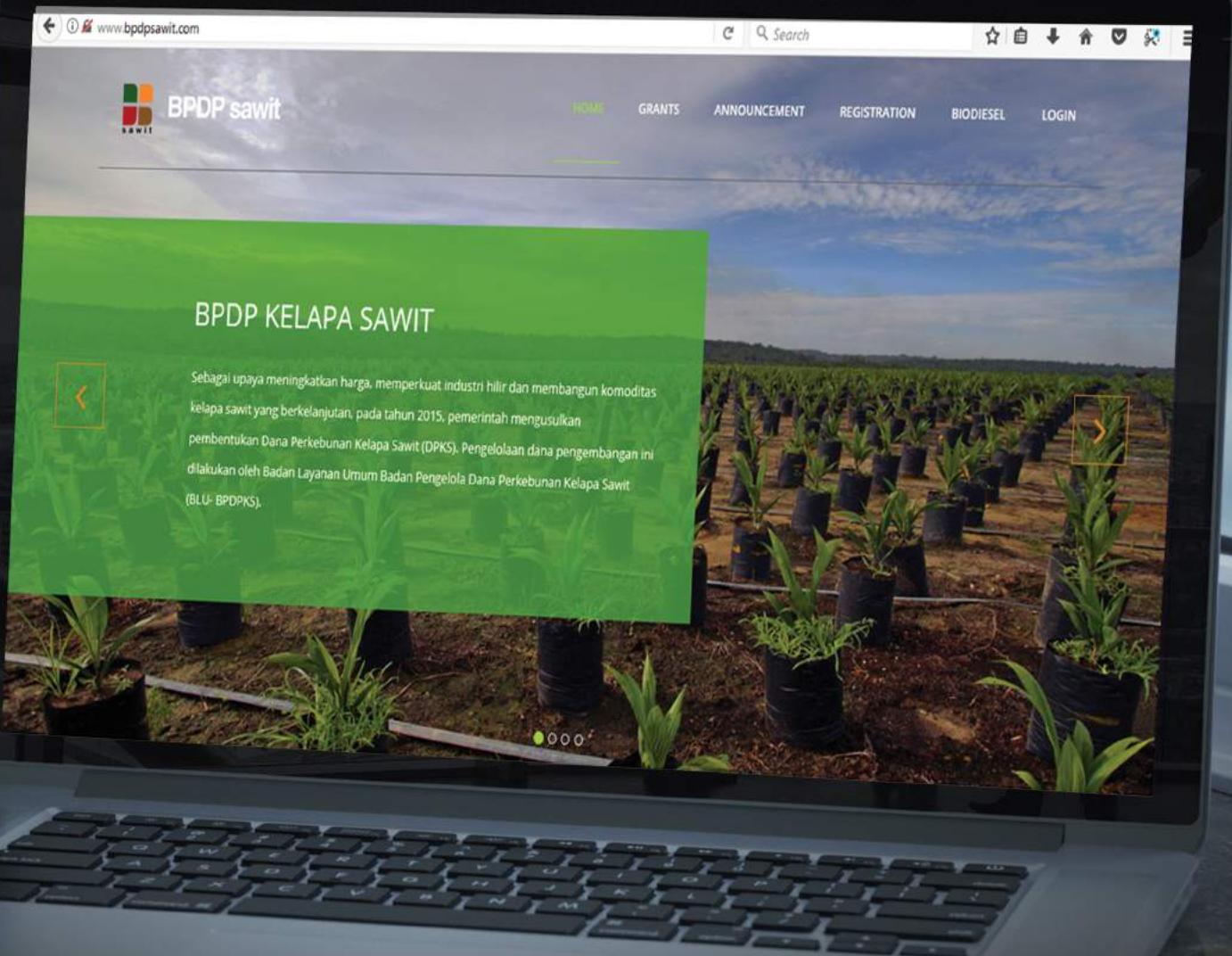
Perkara Penting yang sedang Dihadapi oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang Menjabat Significant Disputes Faced by Incumbent Member(s) of the Board of Commissioners and Board of Directors

Selama tahun 2016, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi BPDPKS yang sedang menjabat tidak memiliki permasalahan hukum, sehingga tidak ada informasi terkait perkara gugatan, status penyelesaian pengaruh terhadap Perusahaan, nilai nominal tuntutan dan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.

Throughout 2016, incumbent member(s) of the Board of Commissioners and Board of Directors of IECFPO did not face any legal issues, so there is no information related to the lawsuit, the settlement status, impact on the Company, the nominal value of the lawsuit and the administrative sanctions imposed on the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Company Information and Data



**Ketersediaan informasi kepada
Pemegang Saham dan Pemangku
Kepentingan menjadi komitmen
BPDPKS demi kelancaran
komunikasi dan pemenuhan
informasi yang dibutuhkan.**

**IECFPO is committed to make all
Information available for Shareholders and
Stakeholders. It aims to streamline the
communication and to provide necessary
information.**

Sarana dan media utama yang digunakan BPDPKS dalam menyampaikan informasi kepada *stakeholder* dan Pemegang Saham diantaranya melalui Website: <http://www.bpdpsawit.com>. Konten informasi yang disampaikan melalui website cukup lengkap dan terkini, antara lain terkait dengan informasi kegiatan operasional BPDPKS serta berbagai informasi penting lainnya.

Main infrastructure and media used by IECFPO in delivering information to stakeholders and Shareholders among others are through Website:<http://www.bpdpsawit.com>. Information contents delivered via website are comprehensive and updated, i.e. information on IECFPO operational activities and various significant information.

Kode Etik Perusahaan Code of Conduct

Kode Etik BPDPKS terdiri dari Etika Bisnis dan Etika Kerja yang merupakan tanggung jawab seluruh manajemen BPDPKS mencakup pegawai, Direksi, Dewan Pengawas dan Komite di bawah Dewan Pengawas untuk bertingkah laku sesuai dengan budaya perusahaan.

IECFPO Code of Conduct comprises of Business and Work Ethics. It constitutes as IECFPO management's responsibilities covering employees, Board of Directors, Supervisory Board, and Committees under the Supervisory Board for proper conduct within the Company.

Dalam menjalankan usahanya, BPDPKS menerapkan etika bisnis/usaha dan etika kerja, dimana etika bisnis menjadi acuan bagi BPDPKS dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan stakeholder. Sementara etika kerja merupakan sistem yang dianut oleh setiap Pimpinan dan Pegawai dalam melaksanakan tugasnya termasuk etika hubungan antar Pegawai dan BPDPKS. Penerapan Etika Bisnis dan Etika Kerja secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan sikap disiplin Pegawai serta dapat mendorong terwujudnya perilaku yang profesional, bertanggungjawab, wajar, patut dan dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan rekan sekerja maupun para mitra kerja.

Kode Etik menuntun pegawai dalam bersikap dan berperilaku. Pegawai dapat dikenakan sanksi moral apabila melanggar kode etik yang penyampaiannya dilakukan secara tertutup atau terbuka. Untuk itu telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan No.293/KMK.01/2007 Tentang Pendeklegasian Wewenang Kepada Para Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan Untuk Memberikan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk di dalamnya BPDPKS. Selama tahun 2016, tidak terdapat pelanggaran kode etik, sehingga tidak ada informasi sanksi yang diberikan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Insan BPDPKS berlandaskan pada nilai-nilai dan budaya Perusahaan yaitu: Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan. Uraian lebih lengkap mengenai Budaya Perusahaan telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan Bagian Nilai-Nilai Dan Budaya Perusahaan. Dalam rangka penegakan kode etik, BPDPKS membangun budaya kepatuhan di seluruh lini organisasi dengan melakukan sosialisasi Nilai-Nilai Budaya Perusahaan pada Pegawai BPDPKS melalui acara-acara besar Perusahaan seperti employee gathering yang secara rutin dilakukan oleh BPDPK dalam rangka membangun menambah semangat dan kekompakan dalam berkerja.

In managing its business, IECFPO applies business ethics and work ethics; business ethics serve as a reference for IECFPO in conducting business activities including interacting with stakeholders. Work ethics, on the other hand, serve as a system held by all Leaders and Employees in performing their duties including relationship ethics between Employees and IECFPO. Consistent implementation of business ethics and work ethics is expected to improve the Employees' discipline and promote professional, responsible, reasonable, feasible, and reliable conducts in engaging business relation with fellow employees and partner.

Code of Ethics guides the employees in their attitude and behavior. Employees may be subjected to sanctions when committing violation against the codes of conduct in which the disclosure is done in secrecy or transparently. Therefore, the Ministry of Finance Decree Number 293/KMK.01/2007 concerning Delegation of Authority to Officials in the Ministry of Finance for Providing Moral Penalties for Violations of Code of Ethics for Civil Servants in the Ministry of Finance including the IECFPO. Throughout 2016, there was no violation of the code of conducts, thus there is no sanction information provided.

In carrying out its duties and responsibilities, IECFPO personnel's conducts are based on the Company's values and culture: Integrity, Professionalism, Synergy, Service and Perfection. A more comprehensive description of Corporate Culture has been described in Company Profile Section of Corporate Values and Culture section. To enforce the code of ethics, IECFPO established compliance culture across all organizational levels by disseminating Corporate Cultural Values to IECFPO Employees through major corporate events such as employee gathering which was regularly conducted by IECFPO. It aimed to improve spirit and cooperation in working.

Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System



Reputasi Perusahaan merupakan aset yang berharga dan dipengaruhi oleh kepercayaan, kejujuran dan integritas. BPDPKS menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasional BPDPKS dapat dimungkinkan muncul pengaduan pelanggaran dari pihak *stakeholder*. Oleh karena itu, BPDPKS menyediakan sarana bagi stakeholder untuk menyampaikan pengaduan atas dugaan pelanggaran di lingkungan BPDPKS sebagai salah satu bentuk komitmen manajemen terhadap implementasi tata kelola yang berkesinambungan.

The Company's reputation serves as an indispensable asset. It is affected by trust, honesty, and integrity. IECFPO realized that in IECFPO's operational activities, complaint of alleged violation may be submitted by stakeholders. Therefore, IECFPO provides a means for the stakeholders to submit complaints of alleged violations occurred in IECFPO as a form of management's commitment to the implementation of sustainable governance.

Seluruh organ BPDPKS, yaitu Dewan Pengawas, Direksi,dan seluruh elemen maupun pegawai BPDPKS hingga pemangku kepentingan lainnya dapat melaporkan adanya pelanggaran. Sedangkan pihak yang dapat dilaporkan sebagai pelaku pelanggaran adalah Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai Perusahaan.

Sistem pelaporan pelanggaran BPDPKS mengacu pada *Whistleblowing System* Kementerian Keuangan. *Whistleblowing System* Kementerian Keuangan adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan bagi individu yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pelapor dapat melaporkan pelanggaran yang terjadi melalui:
Alamat :

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 6
JALAN DR. WAHIDIN NO.1 JAKARTA 10710,
KOTAK POS 21
Telepon : (021) 345-4236
Fax : (021) 352-3252
SMS : 0815-99-6666-2
E-Mail : pengaduan.itjen@depkeu.go.id

Semua laporan pelanggaranakan diteruskan kepada Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) yang merupakanpihak eksternal Perusahaan.Selama tahun 2016, tidak terdapat pelaporan pelanggaran sehingga tidak ada informasi terkait dengan Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai.

IECFPO organs i.e. Supervisory Board, Board of Directors, and all elements or employees of IECFPO to stakeholders may submit any violation. Whereas reportable party as the alleged violation perpetrator are Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees of the Company.

IECFPO whistleblowing system refers to Minister of Finance's Whistleblowing system Whistleblowing System of the Ministry of Finance is an application provided by the Ministry of Finance for individuals who own any information and want to report any alleged violations occurred in the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

Whistleblower may report any violation via:
Address:

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 6
JALAN DR. WAHIDIN NO.1 JAKARTA 10710,
KOTAK POS 21
Telepon : (021) 345-4236
Fax : (021) 352-3252
SMS : 0815-99-6666-2
E-Mail : pengaduan.itjen@depkeu.go.id

All reports of violations must be forwarded to the ISpecial Investigation Inspectorate (IBI) which is an external party of the Company. Throughout 2016, there was no reporting of the violation, thusse there is no information related to Sanction / follow up on the resolved complaint.

Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Service Procurement



Dalam setiap aktivitasnya, BPDPKS selalu berupaya untuk mengimplementasikan GCG termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa. Implementasi GCG dalam proses pengadaan barang dan jasa dilakukan guna menjamin proses pengadaan barang dan jasa yang sehat, efektif dan efisien.

In every activity, IECFPO always strives to implement GCG including in the process of procurement of goods and services. Implementation of GCG in the procurement process of goods and services is carried out to ensure the healthy, effective and efficient procurement process of goods and services.

Sejalan dengan Keputusan Direktur Utama No.30/DPKS/2016 tanggal 1 Juni 2016, BPDKS telah membentuk Divisi Layanan Pengadaan guna mengelola fungsi Pengadaan Barang dan Jasa yang sebelumnya dikelola oleh Unit Layanan Pengadaan Direktora Jendral Pembendaharaan.

In line with President Director Decree No.30/DPKS/2016 dated June 1, 2016, IECFPO has established Procurement Services Division to manage the Procurement of Goods and Services which was previously handled by the Procurement Services Unit of the Directorate General of Treasury.

Struktur Organisasi dan Tugas ULP

Organizational Structure and Duties of the Procurement Services Unit

Untuk memastikan implementasi dan menjaga proses pengadaan barang dan jasa agar berjalan secara baik dan dengan pengendalian yang efektif dan efisien, BPDPKS membentuk Unit Layana Pengadaan (ULP) yang terdiri dari Kepala, Sekretariat, Kelompok Kerja dan Staf Pendukung.

To ensure and maintain that the procurement of goods and services is well implemented with effective and efficient control, IECFPO established Procurement Services Unit comprising of the Head, Secretariat, Work Group, and Supporting Staff.

Tugas dan kewenangan Unit Layanan Pengadaan BPDPKS

Duties and Authorities of the Procurement Services Unit

ULP Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Mempunyai Tugas:

1. Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
3. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
4. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
5. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
6. Menjawab sanggahan;
7. Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PPK;
8. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
9. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/ spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Direktur Utama;
11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
12. Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan ULP Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
13. Melaksanakan pengadaan barang/jas dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE Kementerian Keuangan;
14. Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan
15. Mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survei harga, daftar kebutuhan barang/jasa, dan daftar hitam penyedia.

Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil (IECFPO) Procurement Services Unit holds the duties of:

1. Reviewing Procurement of Goods/Services General Plan with Commitment Making Official;
2. Preparing procurement of goods/services selection plan;
3. Announcing the implementation of the procurement of goods/services on IECFPO's website;
4. Assessing the qualification of the procurement of goods/services through pre- or post-qualification;
5. Conducting administration, technical, and pricing evaluation for any incoming offer(s);
6. Responding to any rebuttal;
7. Submitting selection results and copies of goods/services provider selection documents to Commitment Making Official;
8. Keeping goods/services provider selection original document;
9. Proposing change in Independent Estimated Price, Terms of Reference/technical specification for works, and contract design to Commitment-Making Official;
10. Preparing reports on Procurement process and result for the President Director;
11. Providing accountability for the implementation of the Goods/Services Procurement to Budget User/Budget User Proxy;
12. Preparing and implementing Goods/Services Procurement strategies in the Procurement Services Unit of the Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil;
13. Conducting goods/services procurement using LPSE (e-procurement service) of the Ministry of Finance;
14. Evaluating completed goods/services procurement processes; and
15. Managing procurement management information system which covers procurement documents, price survey list, goods/services requirement list, and provider blacklist.

Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Service Procurement

ULP Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
2. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
3. Dalam penetapan penyedia barang /jasa ULP terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari:
 - a. Pemimpin BLU untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai di atas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah)
 - b. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemimpin BLU untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah).
4. Mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan
5. Memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Service Procurement Guidelines

Dalam melaksanakan kegiatan terkait barang dan jasa, BPDPKS menerapkan kebijakan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa mengacu pada Keputusan Direktur Utama BPDPKS No.30/DPKS/ 2016 tetang Penetapan Unit Layanan Pengadaan tanggal 1 Juni 2016. Muatan dalam Keputusan Direktur Utama tersebut adalah terkait dengan tugas dan tanggung jawab Unit Pengadaan Barang dan Jasa.

Indonesia Estate Crop Fund for Palm Oil (IECFPO) Procurement Services Unit holds the duties of:

1. Establishing Procurement Documents;
2. Determining the amount of Bid Security;
3. In determining goods/services provider, the Procurement Services Unit must firstly obtain written approval from:
 - a. Head of Public Service Agency for Goods/Services Procurement valued above Rp50,000,000,000 (fifty billion Rupiah).
 - b. Other officials appointed by the Head of Public Service Agency for Goods/Services Procurement valued up to Rp50,000,000,000 (fifty billion Rupiah).
4. proposing to the Budget User/Budget User Proxy to put Goods/Services Providers in a blacklist for any act or deed of fraud, forgery, or other violations they committed as a sanction; and
5. imposing administrative sanction to Goods/Services Providers for their violations, deeds, or acts as applied in the Presidential Regulation Number 54 of 2010 on Government Goods/Services Procurement.

In carrying out goods and services-related activities, IECFPO applies the policy on Goods and Services Procurement which refers to the Decree of IECFPO President Director No. 30/DPKS/2016 on Determination of Procurement Services Unit dated June 01, 2016. The President Director Decree contains the duties and responsibilities of the Goods and Services Procurement Unit.

Konsep Pengadaan Barang dan Jasa BPDPKS

Goods and Service Procurement Concept at IECFPO

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Service Procurement Principles

Pengadaan Barang dan Jasa di BPDPKS dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

Goods and Services Procurement at IECFPO are carried out with the following principles:

ADIL & WAJAR FAIR AND REASONABLE	Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan atau jasa yang memenuhi syarat	Providing equal treatment to eligible goods and/or services provider candidates.
AKUNTABEL ACCOUNTABLE	Mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauahkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan	Meeting the targets and can be accounted for to avoid potential misuse and deviation.
EFEKTIF EFFECTIVE	Pengadaan barang dan atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan	Goods and/or services procurement must be according to the predetermined requirements and give benefits to the best extent as targeted.
EFISIEN EFFICIENT	Pengadaan barang dan atau jasa harus diusahakan untuk mendapatkan yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah	Goods and/or services procurement must be sought to gain optimal and the best yields in timely manner, by employing minimum funds and capacity fairly, not based only on the lowest price.
KOMPETITIF COMPETITIVE	Pengadaan barang dan atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang dan atau jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan	Goods and/or services procurement must be open to all goods and/or services providers, conducted through healthy competition among equal goods and/or services providers who meet certain terms/criteria according to clear and transparent provisions and procedures.
TRANSPARAN TRANSPARENT	Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan atau jasa yang berminat	All provisions and information on goods and/or services providers, including administrative and technical requirements for the procurement, evaluation procedures, evaluation results, and determination of goods and/or services provider candidates are transparent for interested goods and/or services provider participants.

Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Service Procurement

Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement Mechanism

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Proses pengadaan barang/jasa BPDPKS dilaksanakan melalui metode Pelelangan Umum, Pelelangan Sederhana, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan Kontes/Sayembara.

Pursuant to Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 4 of 2015 on Government Goods/Services Procurement, the Goods/Services Procurement Process is carried out through Public Tender, Simple Tender, Direct Appointment, Direct Procurement, and Contest/Competition.

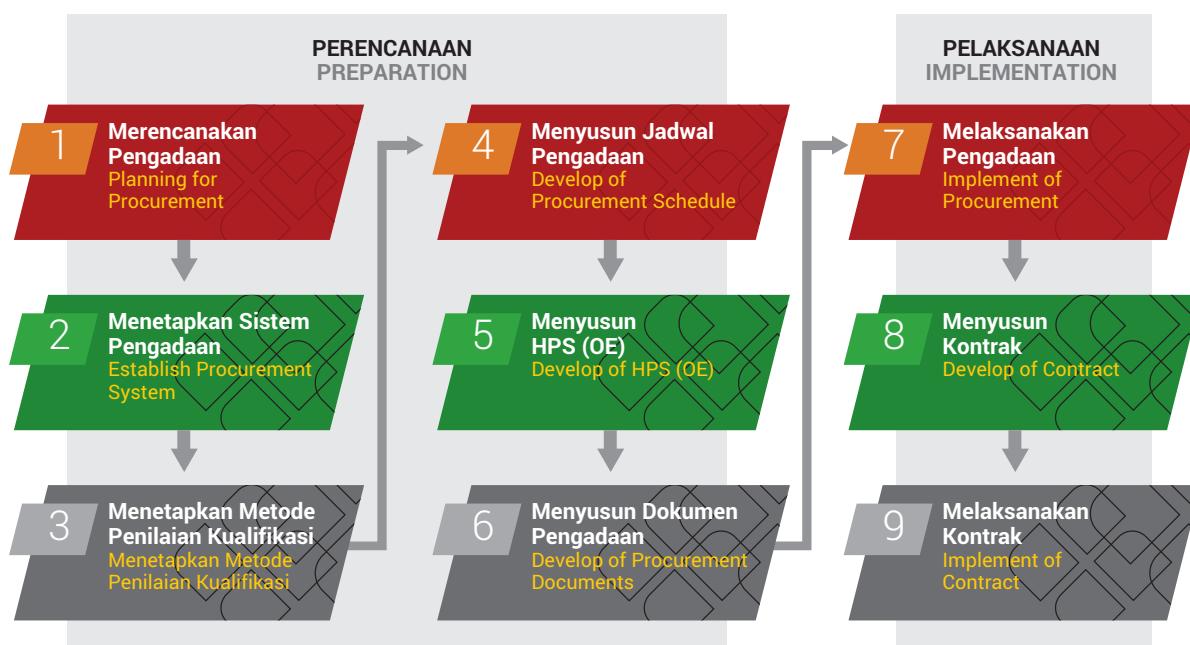
	Mekanisme Mechanism	Definisi Definition	
1	Pelelangan Umum Public Tender	Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.	a method for selecting Goods/Other Services Provider for all jobs that can be participated by all qualified Goods/Construction Work/Other Services Provider.
2	Pelelangan Sederhana Simple Tender	Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	a method for selecting Goods/Other Services Provider for a work valued at maximum Rp5,000,000,000 (five billion rupiah).
3	Penunjukan Langsung Direct Appointment	Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.	a method for selecting Goods/Services Provider by directly appointing one (1) Goods/Services Provider.
4	Pengadaan Langsung Direct Procurement	Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan langsung/seleksi/penunjukan langsung.	the Goods/Services Procurement authority is directly carried out by a Goods/Services Provider without Direct Tender/selection/direct appointment.
5	Sayembara Competition	metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan sedangkan Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.	a method for selecting Service Provider which contests original ideas, creativity, and specific innovation whose prices/costs cannot be determined based on retail price; meanwhile, Contest is a method for selecting Goods Provider which contests goods/particular objects without market price and whose prices/costs cannot be determined based on retail price.

Siklus Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Service Procurement Process Cycle

Pengadaan adalah seluruh proses akuisisi dari pihak lain (termasuk aspek logistik) dan mencakup barang, jasa, dan pekerjaan. Proses ini mencakup seluruh daur hidup sejak konsep awal dan penentuan kebutuhan hingga ke akhir masa manfaat atau akhir kontrak jasa. Siklus proses pengadaan barang dan jasa BPDPKS memiliki 9 tahapan yang digambarkan dalam skema berikut ini :

Procurement is the whole acquisition process from another party (including the logistics) which covers goods, services, and works. The process covers the whole cycle from the initial concept, determination of needs, to the end of the useful life or the end of the service contract. IECFPO goods and services procurement cycle consist of 9 phases described in the following scheme:



Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Service Procurement Activities

Selama tahun 2016, jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang telah diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan operasi Perusahaan, baik yang menggunakan metode pelelangan umum, sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung dan sayembara adalah sebagai berikut:

Throughout 2016, the volumes of goods and services procurement packages completed to meet the Company's operational requirements, either through public tender, simple tender, direct appointment, direct procurement, or competition are shown below:

No	Metode Pelelangan Method Bidding	Jumlah Total
1	Pelelangan Umum	General Bidding
2	E-Purchasing/E-katalog	Simple Bidding
3	Penunjukan Langsung	Direct Appointment
4	Pengadaan Langsung	Direct Procurement
5	Sayembara	Competition
Jumlah		286
Total		

Teknologi Informasi Information Technology



BPDPKS berkomitmen untuk senantiasa menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dengan kualitas dan standar yang tinggi. Untuk mendukung penerapan GCG dalam kaitannya dengan teknologi informasi, BPDPKS menyadari perlunya penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi (*IT Governance*) ke dalam proses bisnis BPDPKS. Saat ini kedudukan Teknologi Informasi di BPDPKS adalah sebagai pendukung untuk mencapai efisiensi dan efektivitas proses bisnis.

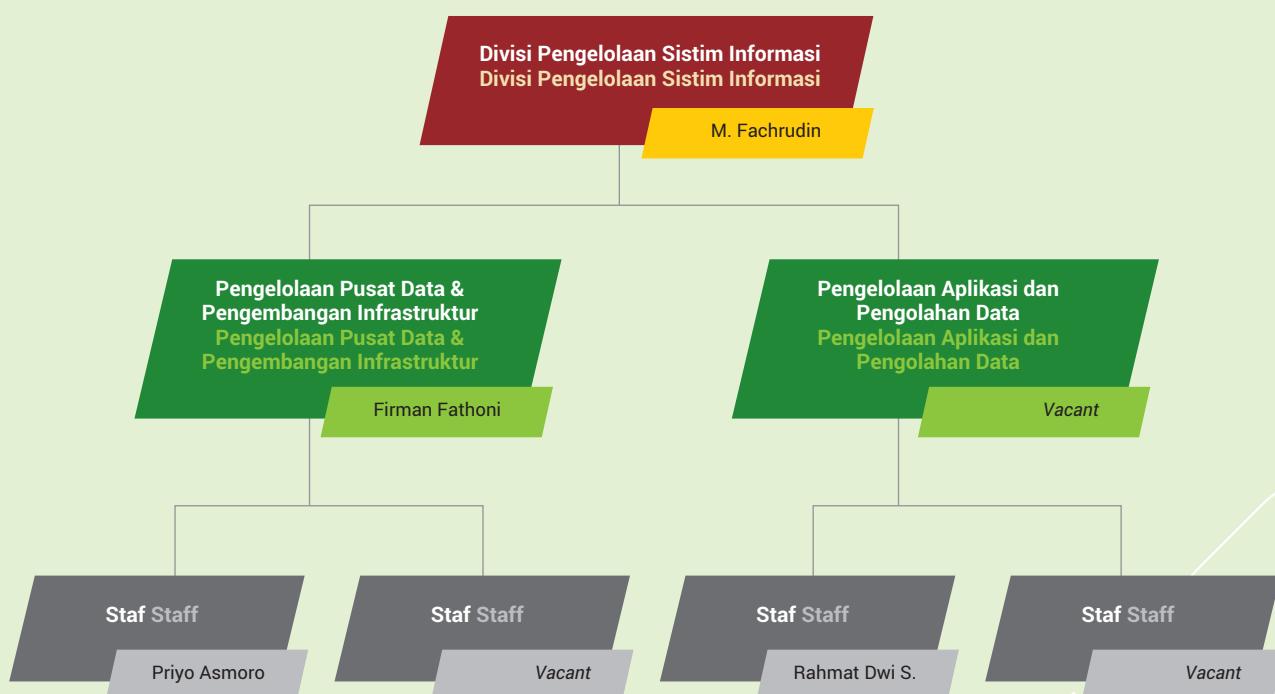
IECFPO is committed to constantly implement high quality and standard Good Corporate Governance. IECFPO is aware the importance of IT Governance into IECFPO's business process to support GCG implementation in terms of IT. Currently, IT plays a role in supporting IECFPO's achievement of business process's efficiency and effectiveness.

Struktur Divisi Pengelolaan Informasi

Structure of Information Management Division

Fungsi Pengelolaan Teknologi Informasi BPDPKS dikelola oleh Divisi Direktorat Pengelolaan Informasi yang dipimpin oleh Sdr.M.Fachrudin dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang karyawan.

Fungsi Pengelolaan Teknologi Informasi BPDPKS dikelola oleh Divisi Direktorat Pengelolaan Informasi yang dipimpin oleh Sdr.M.Fachrudin dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang karyawan.



Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Pengelolaan Sistem Informasi

Duties and Responsibilities of Information System Management Division

1. Mengkoordinir kegiatan Pengembangan sistem informasi dan transaksi elektronik yang terintegrasi dan mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh BPDP Sawit.
2. Mengkoordinir penyiapan data/informasi yang dibutuhkan baik untuk kepentingan pencatatan seluruh transaksi yang dilaksanakan oleh BPDP Sawit maupun untuk menunjang kebutuhan laporan kepentingan internal maupun eksternal.
3. Menentukan arah teknis sistem informasi.
4. Memastikan berjalannya rencana bisnis anggaran dalam Deputi Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi.
5. Mengatur dan memonitor serta mengevaluasi sistem kerja organisasi di Deputi Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi.
6. Pengembangan SDM di Deputi Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi.

1. Coordinating integrated information system and electronic transactions development program and covering all activities performed by IECFPO.
2. Coordinating the preparation of data/information necessary either for the recording of all transactions performed by IECFPO or for supporting the reporting needs for internal and external parties.
3. Determining the direction of Information system technicalities.
4. Ensuring the operation of budgeting business in IT Management Directorate Deputy.
5. Regulating, monitoring, and evaluating organization's operation system in the IT Management Directorate Deputy.
6. HR Development in IT Management Directorate Deputy.

Roadmap Teknologi Informasi Information Technology Roadmap

Fungsi Pengelolaan Teknologi Informasi BPDPKS dikelola oleh Divisi Direktorat Pengelolaan Informasi yang dipimpin oleh Sdr.M.Fachrudin dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang karyawan.

Target intended to be achieved by IECFPO from IT implementation in 2-17 is Improvement and maintenance of Information/Infrastructure system. Currently, IECFPO's IT is under the information and infrastructure system phase. IECFPO's IT Management Division Roadmap of 2016-2018 is as follows:

2016

Sistem Informasi dan Infrastruktur Information and Infrastructure System

Q2: Jaringan Wireless, Server File Sharing, Interner Provider, Ruang Server Operasional, PABX

Q2: Wireless Network, File Sharing Server, Internet Provider, Operational Server Space, PABX

Q3: Server Anti Virus, Server Active Directory, Server Backup, Server Mgmt & Monitoring

Q3: Anti-Virus Server, Active Directory Server, Backup Server, Mgmt& Monitoring Server

Q4: Enterprise Resource Planning System, Conference System Lisensi Tambahan untuk Office 365

Q4: Enterprise Resource Planning System, Conference System, Additional License for Office 365

2017

Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi/Infrastruktur Improvement and Maintenance of Information/Infrastructure System

Dukungan berkelanjutan terhadap ERP System

Sustainable support for ERP System

Dukungan System Operasional Harian

Daily Operational System Support

Dukungan Infrastruktur Operasional

Operational Infrastructure Support

Portal Informasi dan Publikasi BPDP Sawit

IECFPO's Information and Publication Portal

2018

Implementasi IT Governance Implementation of IT Governance

Standarisasi Prosedur dan Manajemen IT (ISO 20000)

IT Procedure and Management Standardization (ISO 20000)

Standarisasi Keamanan Informasi (ISO 27001)

Information Security Standardization (ISO 27001)

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Divisi Pengelolaan Informasi Tahun 2016

IT Management Division's Activities Implementation Report of 2016

Pada tahun 2016, Divisi Direktirat Pengelolaan Informasi

telah melakukan Pengembangan Infrastruktur terhadap:

1. Pembangunan Data Center BPDPKS
2. PABX System
3. Integrated UPS
4. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet
5. Pembangunan Active Directory Server dan File Sharing Server
6. Pembangunan Jaringan Internet Dedicated
7. Pengembangan Sistem Pengamanan IT
 - Antivirus Server
 - Firewall
 - Interner Management System
8. Pemanfaatan Trunking System PABX
9. Kajian terhadap pengembangan infrastruktur yang telah dilakukan

In 2016, IT Management Directorate Division has conducted Infrastructure Development for:

1. IECFPO Data Center Development
2. PABX System
3. Integrated UPS
4. Internet Network Infrastructure Development
5. Active Directory Server and File Sharing Server Development
6. Dedicated Internet Network Development
7. IT Security System Development
 - Antivirus Server
 - Firewall
 - Interner Management System
8. PABX System Trunking Utilization
9. Review on infrastructure development conducted.

Pencapaian Pengembangan Sistem Informasi BPDPKS Tahun 2016

IECFPO Information System Development Achievement of 2016

1. Telah dikembangkan sistem rekonsiliasi data pungutan Ekspor Kelapa Sawit guna melakukan rekonsiliasi antara data rekening koran Bank dengan data LS dari Sucofindo
2. Telah diimplementasikan sistem manajemen persuratan yang berfungsi untuk mengadministrasikan surat dinas secara digital dan informasi disposisi dilengkapi dengan tindak lanjut.

1. Oil Palm Export restitution data reconciliation system has been under development. It is utilized for reconciling the Bank checking account data and LS data from Sucofindo
2. Mailing management system functioned to digitally manage official letter and disposition information has been implemented.



TEAM BUILDING AND EMPLOYEE IMPROVEMENT PROGRAM

MFO GREEN SAVANA SENTUL
EMBER - 3 DECEMBER 2016

teambuildingandemployeeimprovementprogramteambuildingandemployeeimprovementprogramteambuildingandema



Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
IECFPO Social Responsibility

BOSS VS LEADER Dimanakah Kita Sebaiknya Berposisi?

Arahan Kadewas pada Pembukaan
Team Building Pegawai
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Sentul Bogor, 30 November 2016





Program tanggung jawab sosial merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Oleh karena itu konsep tanggung jawab sosial dimaknai sebagai sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Social responsibility program is a Company commitment which supports the realization of sustainable development. Hence, the concept of social responsibility is defined as a Company's responsibility to create a harmonious, balanced relationship according to the environment, values, norms, and culture of the local community. This is in accordance with the provision of Article 74 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.

BPDPKS merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana perkebunan kelapa sawit, tidak terlepas hubungannya dengan berbagai *stakeholders*. BPDPKS menyadari bahwa kesinambungan dan pencapaian kinerja Badan ditentukan diantaranya oleh hubungan yang harmonis antara BPDPKS dengan *stakeholders*. Sejalan dengan visinya untuk menjadi pengelola dana yang berperan dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan sebagai salah satu komoditas strategis Indonesia, BPDPKS berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada *stakeholders*.

Pada tahun 2016, kegiatan tanggung jawab sosial BPDPKS dapat dilihat pada berbagai kegiatan yang terkait ketenagakerjaan, lingkungan, *stakeholders* dan masyarakat. Hal ini menjadi bukti komitmen BPDPKS dalam membangun kepedulian seiring jalannya operasional BPDPKS.

IECFPO is a work unit under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia formed as a Public Service Agency which collects, administers, manages, reserves, and distributes CPO fund, in its relations with the stakeholders. IECFPO realizes that the continuity and achievement of corporate performance is among others determined by harmonious relations between IECFPO and the stakeholders. In line with the vision to become a fund manager which involves in sustainable oil palm development as one of Indonesia's strategic commodities, IECFPO is committed to providing the best services to stakeholders.

The IECFPO social responsibility in 2016 can be seen from the Company's activities concerning employment, environment, stakeholders, and the community. This proves IECFPO's commitment in building awareness along with the implementation of IECFPO operations.

1

Tanggung Jawab Terhadap Ketenagakerjaan Responsibility to Employment

BPDPKS senantiasa memperhatikan kesejahteraan pegawai dengan berusaha memfasilitasi kebutuhan pegawai, dengan harapan terjalin hubungan saling membutuhkan sehingga terjadi keterikatan antara pegawai dengan BPDPKS yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan BPDPKS serta mengurangi adanya *turn over* pegawai. Pegawai merupakan bagian penting dari usaha BPDPKS, oleh karena itu BPDPKS memberikan perhatian besar terhadap aspek kepegawaian, termasuk didalamnya aspek kesehatan, dan keselamatan kerja (K3), pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan jenjang karir pegawai. BPDPKS sangat menghormati hak asasi manusia dengan selalu memberikan perlakuan setara kepada setiap pegawai tanpa membedakan suku, agama dan ras. BPDPKS senantiasa menjaga keharmonisan masyarakat sekitar dan mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Dalam hal praktik ketenagakerjaan, BPDPKS memberikan perhatian terhadap tanggung jawab sosial kepada pegawai dalam bentuk kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pengembangan pegawai serta keselamatan dan kesehatan kerja. Bentuk kegiatan terkait tanggung jawab sosial terhadap pegawai dilakukan dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif melalui kegiatan sebagai berikut:

IECFPO always pays attention to employee welfare by seeking to facilitate their needs, with the expectation to create mutual dependency which forms a bond between the employees and IECFPO to synergize in achieving IECFPO goals and reducing employee turnover. Employees are crucial part of IECFPO business, and therefore, employment affairs receive large attention. This includes the aspects of occupational health and safety (OHS), education and training, and employee career development. IECFPO respects human rights by giving equal treatment to every employee regardless of ethnicity, religion, and race. IECFPO constantly maintains harmony with the surrounding community and complies with applicable employment regulations.

In employment practices, IECFPO proves its social responsibility to the employees through employee welfare, employee education and development, and occupational health and safety. The social responsibility activities for the employees are performed by creating safe, comfortable, and conducive work environment through the followings:

Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

Improvement of Employee Welfare



Program peningkatan kesejahteraan pegawai yang telah dilaksanakan pada tahun 2016, antara lain melalui pemberian fasilitas kepada pegawai berupa kompensasi, seperti uang transport, uang makan, uang pensiun, tunjangan hari raya, uang jabatan, bonus, uang pendidikan, uang pengobatan, pakaian dinas, uang cuti, dan uang kematian.

Employee welfare improvement program carried out throughout 2016 covered the provision of facilities to the employees such as compensations, transport allowance, meal allowance, retirement allowance, religious holiday allowance, positional allowance, bonus, education allowance, medical allowance, uniform, leave allowance, and death allowance.

Pengembangan Pegawai Berkelanjutan

Sustainable Employee Development



Terkait dengan pengembangan karir, BPDPKS memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai pria dan wanita. BPDPKS membuat sistem jenjang karir (*career path*) yang didasarkan pada kualifikasi jabatan dan kompetensi pegawai yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja. BPDPKS secara konsisten berupaya mengembangkan kompetensi pegawai melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, training, maupun studi banding serta pelatihan manajemen dan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan BPDPKS.

For career development, IECFPO provides equal opportunity to male and female employees. IECFPO establishes career path system based on position qualification and employee competence which are integrated with performance assessment system. IECFPO consistently strives to develop employee competence through education and training programs, comparative studies, and managerial and technical trainings tailored to IECFPO needs.

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja Gender Equality and Work Opportunity

BPDPKS menerapkan prinsip non diskriminasi dalam pengelolaan SDM. Rekrutmen pegawai dilakukan secara transparan dan fair tanpa adanya nepotisme dari kalangan internal dan eksternal. Proses rekrutmen pegawai mempertimbangkan kesesuaian kompetensi calon pegawai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan. BPDPKS menjamin kesetaraan gender dan kesempatan kerja yang luas bagi semua pegawai tanpa memandang jenis kelamin, suku maupun agama dan kepercayaan pegawai.

IECFPO has non-discriminatory principle in managing human resources. Employee recruitment is carried out fairly and transparently, by closing the opportunity for nepotism through internal and external parties. Employee recruitment process considers the suitability of employee candidate's competency with the vacant position. IECFPO guarantees gender equality and extensive work opportunity to all employees regardless of their sex, ethnicity, religion, or belief.

Sarana Kesehatan Health Facilities

Demi terwujudnya tenaga kerja yang kuat dan produktif serta dan menjaga agar kondisi pegawai selalu dalam kondisi terpantau kesehatannya, BPDPKS menyediakan dan memberikan fasilitas kesehatan kepada pegawainya. BPDPKS mengikutsertakan seluruh pegawainya dalam Asuransi Kesehatan dan program Jaminan Kesehatan. Secara rutin Pegawai di fasilitasi untuk melakukan kegiatan olahraga.

To encourage strong and productive manpower and to maintain and monitor employees' health, IECFPO provides health facilities to its employees. IECFPO participates all of its employees in Health Insurance Program. On a regular basis, the Employees are provided with sport facilities.



Program Lainnya

Other Programs



Dalam rangka menciptakan hubungan harmonis antara pegawai dan mempererat keakraban dan kekompakkan diantara karyawan, pada tanggal 30 November- 3 Desember 2016 BPDPKS telah menyelenggarakan *Team Building And Employee Improvement Program* yang di ikuti seluruh pegawai bertempat di Neo Green Savana Sentul. Tujuan kegiatan ini antara lain untuk meningkatkan motivasi, kreativitas, kerjasama tim, dan sekaligus memberikan penyegaran dalam menjalani tugas sehari-hari kepada peserta.

To create harmonious relationship among employees and strengthen their solidarity, IECFPO held the Team Building and Employee Improvement Program on November 30-December 03, 2016 at the NEO+ Green Savana Hotel, Sentul with participation from all employees. The event aimed, among others, at improving employee motivation, creativity, and teamwork, as well as providing escapade from their daily duties.

2

Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Responsibility to Environment

Terkait tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, BPDPKS berkomitmen menciptakan keseimbangan antara kegiatan operasi dengan lingkungan sekitar. Untuk itu BPDPKS melaksanakan beberapa langkah pengurangan dampak negatif dari operasional dan mengadakan program pelestarian lingkungan. *Green office* merupakan sebuah strategi bisnis jangka panjang yang selain bertujuan profit juga mencetak *benefit* kepada pemberdayaan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Kebijakan BPDPKS mengenai *green office* telah diterapkan dalam kegiatan operasional BPDPKS yang mencakup mengenai penggunaan material, emisi, kebijakan terhadap pengusaha sawit dan program lain mengenai lingkungan hidup.

To realize social responsibility to environment, IECFPO is committed to create balance between operational activities and the surrounding environment. To that reason, IECFPO conducts some measures to reduce negative impact of its operations and establishes environmental preservation program. *Green office* program is a long-term business strategy which not only aims to yield profit, but also serves to create sustainable benefits for the environmental empowerment and preservation. The green office policy has been implemented in IECFPO operational activities, which comprise material consumption, emission, policy on palm oil business owners, and other environmental programs.

Penggunaan Material Material Consumption

Dalam hal penggunaan material, BPDPKS menerapkan beberapa praktik dalam kegiatan operasional bisnis, khususnya pada operasional kantor yang efektif dan efisien. Upaya pelestarian lingkungan diwujudkan melalui penerapan berbagai praktik positif.

In terms of material consumption, IECFPO applies some practices in business operational activities, particularly for effective and efficient office operations. The environmental preservation effort is materialized through the implementation of various positive practices.



BPDPKS telah mengimplementasikan *paperless system* atau program 3R (*Re-use, Reduce & Recycle*). Paperless system diharapkan dapat semakin mengefektifkan proses administrasi dalam mendukung implementasi program *green office* di lingkungan BPDPKS. Penerapan *green office* diharapkan dapat mendorong *cost efficiency* yang sejalan dengan prinsip dan konteks keberlanjutan. Kebijakan penghematan kertas dilakukan dengan cara penyimpanan dokumen dalam bentuk *soft copy*, pemanfaatan email sebagai media menyebarluaskan pengumuman atau sosialisasi di internal perusahaan, penggunaan kertas bekas ataupun print bolak-balik, pemanfaatan kertas bekas dalam mencetak dokumen yang belum final, sehingga hanya mencetak halaman yang paling penting.

IECFPO has implemented the paperless system or 3R (Reuse, Reduce, and Recycle) program. Paperless system is expected to improve the effectiveness of administration process in supporting the green office program in IECFPO. The green office implementation is expected to encourage cost efficiency which is in line with sustainability principle and context. Paper saving policy is applied by storing documents in soft copies, using e-mails to distribute internal announcements or socializations, paper reusing and double-sided printing, paper reusing for non-finalized document printing, and printing only important pages on paper.



BPDPKS senantiasa berupaya melakukan penghematan energi dalam setiap operasional usahanya, dimana diharapkan dengan menggunakan energi secara efisien dapat menyebabkan berkurangnya biaya operasional, serta meningkatnya nilai lingkungan, serta kenyamanan dalam bekerja.

IECFPO always strives to apply energy efficiency in its business operations, with the hope to reduce operational cost, improve environmental value, and create comfort at work.

Penghematan energi di BPDPKS dilakukan melalui serangkaian peningkatan kualitas spesifikasi peralatan penunjang yang berada di gedung kantor yaitu seperti penggunaan listrik dengan pemakaian lampu hemat energi maupun penyeletelan suhu ruangan yang wajar, mematikan komputer dan peralatan elektronik lainnya jika tidak digunakan dalam waktu yang lama, misalnya saat makan siang, saat rapat dan lain-lain. BPDPKS juga melakukan pemasangan papan peringatan "MATIKAN yang tidak perlu".

Energy efficiency at IECFPO is applied through a set of quality improvements to the supporting equipment specifications at the office building, such as using energy-saving lighting, reasonable room temperature setting, turning off computers and other electronic devices during off times such as lunch break, meetings, etc. IECFPO also installs warning boards written with "MATIKAN yang tidak perlu" (TURN OFF if unused).



Penghematan Air Water Saving

Dalam rangka memberikan kesadaran kepada pegawai untuk mengurangi penggunaan air dan melakukan konsumsi air agar dilakukan secara efisien melalui upaya penghematan penggunaan air, BPDPKS melakukan pemasangan papan peringatan "Gunakan Air Secukupnya", serta menutup kran air apabila tidak diperlukan.

In order to inflict employee awareness of water consumption reduction and efficiency, IECFPO installs warning boards, written with "Gunakan Air Secukupnya" (Use Water Wisely) and closes water faucets if unused.



Pencapaian Udara Bersih dan Udara Sehat Clean and Healthy Air Accomplishment

Mengurangi polusi udara dengan cara pegawai dilarang untuk merokok di seluruh area dalam gedung, area merokok hanya diperbolehkan di tempat yang telah disediakan.

Air pollution reduction is applied by prohibiting employees from smoking inside the building. Smoking is allowed only at the designed places.



3

Tanggung Jawab Terhadap Mitra dan Stakeholders Responsibility to Partners and Stakeholders

Mitra dan stakeholders merupakan salah satu aspek penting dalam operasional dan memiliki daya dukung yang sangat besar terhadap keberlangsungan usaha BPDPKS. Oleh karenanya, BPDPKS senantiasa menjaga hubungan baik dengan mitra dan stakeholders melalui pelaksanaan serangkaian program yang memberikan dampak positif BPDPKS dan segenap mitra dan stakeholders. Selama tahun 2016, implementasi kegiatan yang dilakukan dikemas dalam berbagai kegiatan diantaranya:

Partners and stakeholders are among the crucial aspects in the operations. They have very large support towards the sustainability of IECFPO business. This is why IECFPO always maintains good relations with the partners and stakeholders through a number of programs that bring positive impacts to IECFPO and all partners and stakeholders. In 2016, these programs were realized through the following activities:



BPDPKS berpartisipasi dalam kegiatan Pertemuan Nasional Sawit Indonesia 2016. Acara yang digelar pada tanggal 27 Januari 2016 di Gedung Dhanapala Jakarta ini bertemakan, "Sawit Indonesia More Sustainable Than Ever, Menyatukan Langkah Membangun Sawit Indonesia Berkelaanjutan".

IECFPO participation in the Indonesian Palm Oil Conference 2016. The event held on January 27, 2016 at the Dhanapala Building, Jakarta bore the theme, "Sawit Indonesia More Sustainable than Ever, Menyatukan Langkah Membangun Sawit Indonesia Berkelaanjutan" (Indonesian Palm Oil More Sustainable than Ever, Uniting Steps to Build Sustainable Indonesian Palm Oil).



Selain itu BPDPKS juga telah melaksanakan Buka Puasa bersama Mitra dan Stakeholder pada tanggal 16 Juni 2016 serta acara Halal Bihalal dan Stakeholder Gathering pada tanggal 21 Juli 2016.

IECFPO also held Iftar (communal fast breaking) with the Partners and Stakeholders on June 16, 2016 and Religious Gathering and Stakeholder Gathering on July 21, 2016.

4

Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat Responsibility to the Community

BPDPKS meyakini bahwa kinerja lembaganya harus memiliki dampak positif terhadap masyarakat dan diharapkan akan memberikan dampak yang positif pula untuk pengembangan bisnis BPDPKS secara berkelanjutan. Masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan yang berperan besar dalam menjamin kelangsungan usaha BPDPKS dalam jangka panjang. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat luas adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Sawit, hal ini merupakan komitmen BPDPKS dalam berbagi ilmu kepada masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2016 adalah acara buka puasa bersama 200 jamaah Aisyiyah dan 150 anak asuh Aisyiyah wilayah Jakarta Selatan. Acara tersebut dikemas dalam rangkaian kegiatan yang menggabungkan semangat kebersamaan, edukasi dan keceriaan. Dimana dalam kegiatan tersebut disampaikan mengenai cara mengolah makanan yang sehat dari produk turunan sawit.

IECFPO believes that its institutional performance must bring positive impact on the community and on the Company's business development on a sustainable basis. The community is a stakeholder with huge role in supporting IECFPO's business continuity in the long run. The social responsibility to the community is among others shown through the provision of palm oil education to the public, as a knowledge sharing commitment. On June 29, 2016, the Company held an iftar with 200 members of Aisyiyah assembly and 150 foster children of Aisyiyah of South Jakarta region. The event was meant to spread the spirit of togetherness, education, and fun. During the event was also introduced healthy food processing techniques from palm oil derivative products.





Laporan Keuangan Audited Audited Financial Statements



dbsd&a
Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Registered Public Accountants
Branch License Number 862/KM.1/2015

B K R
INTERNATIONAL

An independent member of BKR INTERNATIONAL
with offices throughout the World

**BADAN LAYANAN UMUM/PUBLIC SERVICE AGENCY
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT/
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
ATAS LAPORAN KEUANGAN/ON FINANCIAL STATEMENTS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR/FOR THE YEARS ENDED
31 DESEMBER 2016 DAN 2015/DECEMBER 31, 2016 AND 2015**

Nomor Laporan/Report Number : R.1.15/003/03/2017
Tanggal Laporan/Report Date : 15 Maret 2017/March 15, 2017

BRANCH OFFICE
Ruko Perumahan Puri Gading PG 1 No. 27
Jatimelati Pondok Melati
Bekasi 17415
Phone : (62-21) 843 01494
Fax : (62-21) 843 01496
E-mail : tambunanrudi@yahoo.com

HEAD OFFICE
Menara Kuningan 11th Floor
Jl. HR Rasuna Said Blok X-7 Kav 5
Jakarta 12940 Indonesia



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Graha Mandiri Lantai 5, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Jakarta 10310
Telepon (021) 39832091-94; Faksimile (021) 39832095; Website : bpd.p.or.id

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT
SURAT PERNYATAAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL
31 DESEMBER 2016

OIL PALM PLANTATION
FUND MANAGEMENT AGENCY
STATEMENT LETTER REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2016

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1.	Nama : Dono Boestami	: Name
Alamat kantor :	Graha Mandiri Lantai 5	: Office address
Alamat Domisili :	Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat	
	Jl. Kebun Anggrek No. 16 Unit 7, RT 001/ RW 005	: Residential address
Nomor telepon :	Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan	
Jabatan :	(021) 39832091	: Phone number
	Direktur Utama / President Director	: Title
2.	Nama : Catur Ariyanto Widodo	: Name
Alamat kantor :	Graha Mandiri Lantai 5	: Office address
Alamat Domisili :	Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat	
	Jl. Kostrad No. 43, RT 006/ RW 004	: Residential address
Nomor telepon :	Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan	
Jabatan :	(021) 39832091	: Phone number
	Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko/ Director of Finance, General, Compliance and Risk Management	: Title

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP Sawit);
 2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 220/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 3.
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA);
 2. Financial statements have been prepared and presented in accordance with Regulation of the Minister of Finance of Indonesia No. 220/PMK.05/2016, dated December 30, 2016, which is a comprehensive basis of accounting other than the Financial Standard in Indonesia;
 3.
 - a. All information contained in the financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;
 - b. The financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP Sawit).
4. *We are responsible for internal control system of Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA).*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made in truthful manner.

Jakarta, 15 Maret, 2017 / March 15, 2017

Direktur Utama /
President Director

Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko/
Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management



Dono Boestami

Catur Ariyanto Widodo
NIP 19710222 199201 1 001

dbsd&a

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Registered Public Accountants
Branch License Number 862/KM.1/2015

BRANCH OFFICE
Ruko Perumahan Puri Gading PG 1 No. 27
Jatimelati Pondok Melati
Bekasi 17415
Phone : (62-21) 843 01494
Fax : (62-21) 843 01496
E-mail : tambunanrudi@yahoo.com

BKR
INTERNATIONAL

An independent member of **BKR INTERNATIONAL**
with offices throughout the World

Nomor Laporan/*Report Number:* R.1.15/003/03/2017

Kepada:
Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Dewan Pengawas, dan
Direksi Badan Layanan Umum -
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala
Sawit (BLU-BPDPKS)

To:
*Finance Minister of the Republic of
Indonesia,
Supervisory Board, and
Directors of Public Service Agency -
Oil Palm Plantation Fund Management
Agency (PSA-OPPFMA)*

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Layanan Umum-Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit (BLU-BPDPKS), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggungjawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian intern yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

We have audited the accompanying financial statements of Public Service Agency-Oil Palm Plantation Fund Management Agency (PSA-OPPFMA), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2016, and the statement of activity, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and the summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management responsibility on the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

HEAD OFFICE
Menara Kuningan 11th Floor
Jl. HR Rasuna Said Blok X-7 Kav 5
Jakarta 12940 Indonesia



Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Tanggungjawab auditor

Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar-standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian intern entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini audit kami.

Seperti yang telah dijelaskan pada Catatan 2 atas laporan keuangan, bahwa laporan keuangan dan kebijakan akuntansi BLU-BPDPKS tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 220/PMK.05/2016, tanggal 30 Desember 2016 yang merupakan basis akuntansi komprehensif, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Auditing Standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and Government Auditing Standards established by the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

As explained in Note 2 to the financial statements, that preparation of PSA-OPPFMA financial statements and accounting policies are based on the Regulation of Finance Minister of the Republic of Indonesia, Number 220/PMK.05/2016, dated December 30, 2016, which is a comprehensive basis of accounting, and in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.

ii


Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Opini

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BLU-BPDPKS tanggal 31 Desember 2016, dan aktivitas usaha serta arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan basis akuntansi yang dijelaskan pada Catatan 2 atas laporan keuangan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) adalah satuan kerja pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang ditugaskan menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana perkebunan kelapa sawit.

Pada 10 Juni 2015, BPDPKS ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan BLU secara penuh melalui Keputusan Menteri Keuangan, Nomor 650/KMK.05/2015 tentang Penetapan BPDPKS pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) secara penuh.

Opinion

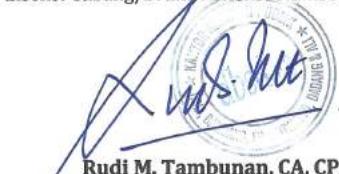
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, financial position of PSA-OPPFMA as at December 31, 2016, and the result of their operations and cash flows for the year then ended, in conformity with accounting basis described in the Note 2 to the financial statements, and in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.

Other matters

Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA) is work unit of the Ministry of Finance of Republic of Indonesia, which legal entity as a Public Service Agency (PSA), which is assigned to collect, administer, manage, save, and distribute the funds of palm oil plantation.

On June 10, 2015, OPPFMA has been fully determined as a government institution which implementing Financial Management of Public Service Agency (FM-PSA) regarding the Decree of Finance Minister Number 650/KMK.05/2015 on Ascertainment of Oil Palm Plantation Fund Management Agency to Fully Implementing Financial Management of Public Service Agency.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI
Nomor Lisensi Cabang/Branch License Number: 862/KM.1/2015



Rudi M. Tambunan, CA, CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik/
Public Accountant Registration Number: AP.0053

Jakarta,
15 Maret 2017/March 15, 2017

The accompanying financial statements are not intended to present financial position, results of operations, changes in equity and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures, and practices to audit to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Pada 31 Desember 2016 dan
31 Desember 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PUBLIC SERVICE AGENCY
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2016 and
December 31, 2015
(Expressed in full of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember 2016 <i>December 31, 2016</i>	Catatan/ Notes	31 Desember 2015 <i>December 31, 2015</i>	
ASET				ASSETS
Aset Lancar				Current Assets
Kas dan setara kas	5.729.108.049.237	3	2.480.372.585.456	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi jangka pendek	-	4	3.961.777.000.000	<i>Short term investment</i>
Piutang	25.294.448.346	5	4.133.850.372	<i>Receivables</i>
Persediaan	233.902.900	6	48.810.500	<i>Inventories</i>
Beban dibayar di muka	3.004.121.833	7	504.388.500	<i>Prepaid expenses</i>
Jumlah Aset Lancar	5.757.640.522.316		6.446.836.634.928	<i>Total Current Assets</i>
Aset Tidak Lancar				Non-Current Assets
Aset tetap - bersih	13.975.498.859	8	-	<i>Fixed assets - net</i>
Aset tak berwujud - bersih	1.118.734.373	9	232.833.333	<i>Intangible assets - net</i>
Jumlah Aset Tidak Lancar	15.094.233.232		232.833.333	<i>Total Non-Current Assets</i>
JUMLAH ASET	5.772.734.755.548		6.447.069.468.161	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Utang pajak	10.645.000	10	240.940.475	<i>Tax payables</i>
Beban yang masih harus dibayar	10.671.910.364	11	17.098.091.466	<i>Accrued expenses</i>
JUMLAH LIABILITAS	10.682.555.364		17.339.031.941	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Penyesuaian surplus tahun berjalan	(3.027.019.999)		(1.006.500)	<i>Prior year surplus</i>
Surplus tahun lalu	4.429.730.436.220		-	<i>Retained surplus</i>
Surplus tahun berjalan	1.335.348.783.963		6.429.731.442.720	<i>Current year surplus</i>
JUMLAH EKUITAS	5.762.052.200.184		6.429.730.436.220	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	5.772.734.755.548		6.447.069.468.161	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an
integral part of the financial statements

BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGETAHUAN DAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PUBLIC SERVICE AGENCY
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY
STATEMENT OF ACTIVITY
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in full of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember 2016 <i>December 31, 2016</i>	Catatan/ <i>Notes</i>	31 Desember 2015 <i>December 31, 2015</i>	
PENDAPATAN OPERASIONAL				OPERATING INCOME
Pendapatan Operasional Jasa Layanan		2.2.a		Operating Income from Services
Pendapatan pungutan dana				Income from fund collection of
perkebunan kelapa sawit	11.690.819.130.021	13	6.902.212.717.058	palm oil plantation
Pendapatan atas pengelolaan dana	630.385.493.948	14	78.806.500.796	Income from fund management
Jumlah Pendapatan	12.321.204.623.969		6.981.019.217.854	Total Income
BEBAN USAHA		2.2.b		OPERATING EXPENSES
Beban pembayaran selisih harga biodiesel	10.683.276.780.982	15	467.217.788.632	Biodiesel price variance payment expenses
Beban surveyor	103.108.856.431	15	53.315.463.300	Surveyor expenses
Beban penyaluran dana riset	52.760.887.446	15	10.254.345.405	Research fund expenses
Beban promosi kelapa sawit	35.366.464.339	15	9.744.245.138	Palm oil promotion expenses
Beban gaji dan tunjangan	37.470.710.066	15	6.799.388.074	Salaries and allowances expenses
Beban perjalanan dinas operasional	3.921.903.428	15	1.197.380.318	Operational travelling expenses
Beban barang keperluan perkantoran	3.953.442.713	15	866.438.132	Office supplies expenses
Beban pengembangan SDM kelapa sawit	44.560.036.252	15	672.574.200	Palm oil HR development expenses
Beban penyaluran dana peremajaan				Palm oil plantation replanting
kebun kelapa sawit	9.311.029.449	15	623.491.181	fund expenses
Beban jasa profesional	2.916.463.725	15	319.300.000	Professional expenses
Beban sewa	5.964.760.667	15	252.972.500	Rent expenses
Beban perencanaan dan pengelolaan dana	601.027.349	15	-	Planning and fund management expenses
Beban pelatihan dan diklat pegawai	472.583.000	15	-	Employee training expenses
Beban pemeliharaan	444.856.458	15	-	Maintenance expenses
Beban penyusutan dan amortisasi	1.726.037.701	15	24.016.667	Depreciation and amortization expenses
Beban lainnya	-	15	371.587	Other expenses
Jumlah Beban Usaha	10.985.855.840.006		551.287.775.134	Total Operating Expenses
SURPLUS USAHA	1.335.348.783.963		6.429.731.442.720	OPERATING SURPLUS
PENDAPATAN DI LUAR USAHA				NON OPERATING INCOME
Pendapatan di luar usaha lainnya		-		Other non operating income
Jumlah Pendapatan di Luar Usaha		-		Total Non Operating Income
BEBAN DI LUAR USAHA				NON OPERATING EXPENSES
Beban di Luar Usaha Lainnya		-		Other non operating expenses
Jumlah Beban di Luar Usaha		-		Total Non Operating Expenses
POS LUAR BIASA				EXTRAORDINARY ITEMS
Pendapatan luar biasa		-		Extraordinary income
Beban luar biasa		-		Extraordinary expenses
Jumlah Pos Luar Biasa		-		Total Extraordinary Items
SURPLUS SEBELUM				SURPLUS BEFORE
SETOR KE KAS NEGARA	1.335.348.783.963		6.429.731.442.720	DEPOSIT TO STATE TREASURY
Setoran ke Kas Negara		-		Deposit to State Treasury
SURPLUS SETELAH				SURPLUS AFTER
SETOR KE KAS NEGARA	1.335.348.783.963		6.429.731.442.720	DEPOSIT TO STATE TREASURY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an
integral part of the financial statements

**BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PUBLIC SERVICE AGENCY
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in full of Rupiah,
unless otherwise stated)

Penyertaan Modal Pemerintah/ Government Capital	Akumulasi Surplus/ Accumulated Surplus	Total Ekuitas/ Total Equity	
<i>Balance of Equity as at July 01, 2015</i>			
-	-	-	
Penyesuaian surplus tahun berjalan	[1.006.500]	(1.006.500)	
Surplus tahun berjalan	6.429.731.442.720	6.429.731.442.720	
Saldo Ekuitas pada 31 Desember 2015	6.429.730.436.220	6.429.730.436.220	<i>Balance of Equity as at December 31, 2015</i>
<i>Deposit to state treasury</i>			
-	-	-	
Penyesuaian surplus tahun berjalan	(2.000.000.000.000)	(2.000.000.000.000)	
Surplus tahun berjalan	[3.027.019.999]	(3.027.019.999)	
Saldo Ekuitas pada 31 Desember 2016	5.762.052.200.184	5.762.052.200.184	<i>Balance of Equity as at December 31, 2016</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

*The accompanying notes form an
integral part of the financial statements*

BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PUBLIC SERVICE AGENCY
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in full of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember 2016 <i>December 31, 2016</i>	31 Desember 2015 <i>December 31, 2015</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit	11.690.819.130.021	6.902.212.717.058
Pendapatan atas pengelolaan dana	609.290.410.833	74.672.648.773
Pendapatan usaha lainnya	485.141	1.651
Pungutan pajak	996.423.361.459	48.450.643.313
Potongan iuran BPJS kesehatan	28.350.000	-
Beban personalia	(36.436.989.190)	(6.728.146.074)
Beban barang keperluan perkantoran	(3.859.660.549)	(799.714.800)
Beban jasa	(11.853.540.725)	(1.076.661.000)
Beban perjalanan dinas	(3.921.903.428)	(1.197.380.318)
Beban pemeliharaan	(444.856.458)	-
Beban usaha lain	-	(371.587)
Beban surveyor	(103.083.349.511)	(42.699.699.900)
Beban pembayaran selisih harga biodiesel	(10.683.277.080.982)	(467.217.788.632)
Beban penyaluran dana riset	(59.165.708.152)	(3.849.511.971)
Beban penyaluran dana peremajaan kebun kelapa sawit	(9.315.452.049)	(623.491.181)
Beban pengembangan SDM sawit	(44.560.036.252)	(672.574.200)
Beban promosi kelapa sawit	(35.467.036.789)	(9.744.245.138)
Beban perencanaan dan pengelolaan dana	(601.027.349)	-
Setoran atas pungutan pajak	(996.653.656.934)	(48.209.702.838)
Setoran potongan iuran BPJS	(28.350.000)	-
Pembelian persediaan	(1.213.789.445)	(110.287.700)
Koreksi nilai ekuitas	(3.067.398.260)	-
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	1.303.611.901.381	6.442.406.435.456
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		
Income from fund collection		
pal oil plantation		
Income from fund management		
Other operating income		
Tax collection		
P BPJS		
Personel expenses		
Office supplies		
Services expenses		
Official travelling expenses		
Maintenance expenses		
Other operating expenses		
Surveyor expenses		
Biodiesel price variance payment expenses		
Research fund expenses		
Palm oil plantation replanting		
fund expenses		
Palm oil HR development expenses		
Palm oil promotion expenses		
Planning and management of fund expenses		
Deposit of tax collection		
Discount on regular deposit to BPJS		
Inventory purchasing		
correction of equity value		
Net cash flows provided from operating activities		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penyaluran investasi pada instrumen jangka pendek	3.961.777.000.000	(3.961.777.000.000)
Pembelian aset tetap	(15.287.292.600)	-
Pembelian aset tidak berwujud	(1.366.145.000)	(256.850.000)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	3.945.123.562.400	(3.962.033.850.000)
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES		
Investment on short term instrument		
Acquisition of fixed assets		
Acquisition of intangible assets		
Net cash flows provided from (used for) investing activities		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penyertaan modal pemerintah	-	-
Setoran ke kas negara	(2.000.000.000.000)	-
Arus kas bersih (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(2.000.000.000.000)	-
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES		
Government capital		
Deposit to state treasury		
Net cash flows (used for) financing activities		
Net increase in cash and cash equivalent		
Cash and cash equivalent at the beginning of the year		
CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE END OF THE YEAR		

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of the financial statements

BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PUBLIC SERVICE AGENCY
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
*(Expressed in full of Rupiah,
unless otherwise stated)*

1. UMUM

a. Sejarah Pendirian

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) adalah satuan kerja pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana perkebunan kelapa sawit.

Pada tanggal 10 Juni 2015, BPDPKS ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan BLU secara penuh melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.01/2015 tentang Penetapan BPDPKS pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) secara penuh.

Pendapatan BPDPKS akan dicatat di dalam APBN melalui prosedur pengesahan pada akhir periode pelaporan. Dengan demikian pendapatan BPDPKS diakui sebagai pendapatan negara pada saat pengesahan pendapatan tersebut. Sementara untuk pendapatan yang digunakan untuk biaya operasional BPDPKS akan masuk dalam realisasi APBN pada saat yang sama dengan pengesahan pendapatan.

BPDPKS hanya melaporkan pendapatan tersebut ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Biro Perencanaan Keuangan Kementerian Keuangan.

b. Visi dan Misi BPDPKS

Visi dan misi yang ingin dicapai oleh BPDPKS adalah:

Visi

Menjadi pengelola dana yang berperan dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan sebagai salah satu komoditas strategis Indonesia.

Misi

Mengelola dan menumbuhkembangkan dana kelapa sawit secara profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan untuk menjamin keberlangsungan program kelapa sawit berkelanjutan sebagai bentuk peningkatan dan stabilitas komoditas strategis.

1. GENERAL

a. Establishment of Organization

Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA) is a Public Service Agency (PSA) of the Ministry of Finance of Republic of Indonesia, which assigned to collect, administer, manage, save and distribute funds of palm oil plantation.

On June 10, 2015, OPPFMA has been fully determined as a government institution which implementing Financial Management of Public Service Agency (FM-PSA) regarding the Decree of Finance Minister Number 650/KMK.05/2015 on Ascertainment of Oil Palm Plantation Fund Management Agency to Fully Implementing Financial Management of Public Service Agency.

OPPFMA income is recorded on state budget through the ratification procedure by the end of reporting period. It means, OPPFMA revenues recognized as state revenue at the time of ratification of those revenue. Meanwhile, the income used for operating expenses for OPPFMA will recognized in the realization of the state budget at the same time as approval of related revenue.

OPPFMA only report the revenue to the Directorate General of Treasury and Financial Planning Bureau of Ministry of Finance.

b. Vision and Mission of OPPFMA

Vision and mission to be achieved by the OPPFMA are:

Vision

To become crop fund management which have an important role to develop sustainable palm oil as a Indonesian strategic commodity.

Mission

To manage and maintain the development funds of palm oil professionally, transparently, accountable, and to ensure the continuity of sustainable palm oil program as an improvement and stability efforts of strategic commodities.

BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGETAHUAN DAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PUBLIC SERVICE AGENCY
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in full of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

c. Tempat dan Kedudukan BPDPKS

BPDPKS berkedudukan di Graha Mandiri Lantai 5, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Jakarta Pusat.

d. Landasan Hukum (Regulasi) BLU

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perkebunan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan ini telah dirubah dengan PP Nomor 74 tahun 2012.
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penghimpunan Dana dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, beserta perubahannya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2015.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tertanggal 24 April 2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang Kementerian/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak tertagih.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tertanggal 11 Juni 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

1. GENERAL (Continued)

c. Office Address of OPPFMA

OPPFMA is located at Graha Mandiri, 5th Floor, at Jalan Imam Bonjol Number 61, Central Jakarta.

d. Legal Basis of PSA

The Oil Palm Plantation Fund Management Agency held under the following laws and regulations:

1. Constitution Act Number 17 of 2003 about State Financial, dated April 5, 2003.
2. Constitution Act Number 1 of 2004 about State Treasury, dated January 14, 2004.
3. Constitution Act Number 39 of 2004 about State Plantations, dated October 17, 2014.
4. Government Regulation Number 23 of 2005 about Financial Management of Public Service Agency, dated June 13, 2005. This regulation has been changed by Government Regulation Number 74 of 2012.
5. Presidential Decree Number 61 of 2015, dated May 25, 2015 about Collection and Utilization of Palm Oil Plantation Funds, with the amendment Presidential Regulation Number 24 of 2015.
6. Regulation of Finance Minister Number 69/PMK. 06/2014 about the Quality of Receivables State Ministry/Institution and Recognition of Allowance for Doubtful Accounts on April 24, 2014.
7. Regulation of Finance Minister Number 90/PMK. 06/2014 about Depreciation of State Property in the Form of Fixed Assets in the Central Government Entities.
8. Regulation of Finance Minister Number 113/PMK.01/2015 about Organization Structure and Work Order of Oil Palm Plantation Fund Management Agency, dated June 11, 2015.
9. Regulation of Finance Minister Number 251/PMK.06/2015 on Procedures for State Assets Amortization of Intangible Assets Form of the Central Government Entities.
10. Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 29 of 2015, about Supply and Utilization of Biofuels with Biodiesel Type in Terms of Financing by Oil Palm Plantation Fund Management Agency.

BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PUBLIC SERVICE AGENCY
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
*(Expressed in full of Rupiah,
unless otherwise stated)*

1. UMUM (Lanjutan)

d. Landasan Hukum (Regulasi) BLU (Lanjutan)

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.05/2015 tentang Penetapan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
14. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor PER-03/DPKS/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Dana Pembiayaan Biodiesel oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
15. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor PER-16/DPKS/2016 tentang Sistem Akuntansi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
16. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, Tahun 2015.

e. Susunan Manajemen dan Dewan Pengawas BPDPKS

Pejabat Pengelola BPDPKS merupakan Pejabat/Pegawai yang bertanggungjawab atas kinerja operasional BPDPKS yang terdiri dari Kepala, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, dimana sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLU- BPDPKS.

1. GENERAL (Continued)

d. Legal Basis of PSA (Continued)

11. Regulation of Finance Minister of the Republic of Indonesia Number 220/PMK.05/2016 on Accounting and Financial Reporting Public Service Board.
12. The Ministry of Finance Decree Number 59/KMK.6/2013 on Table Benefit Period in the Context of State-Owned Assets Depreciation of Fixed Assets Form of the Central Government Entities.
13. The Ministry of Finance Decree Number 650/KMK.05/2015 on Establishment of Fund Management Agency of Oil Palm Plantation At the Ministry of Finance, Government agencies Applying For Financial Management of General Services Agency.
14. Regulation of the Fund Management Board Director of Oil Palm Plantations Number PER-03/DPKS/2015 on Procedures Biodiesel Financing Fund Payment by Fund Management Agency of Oil Palm Plantation.
15. Regulation Fund Management Board Director of Oil Palm Plantations Number PER-16/DPKS/2016 regarding Accounting System Fund Management Agency of Oil Palm Plantation.
16. Financial Accounting Standards (FAS) in Indonesia, Year 2015.

e. Structure of OPPFMA Management and Board of Supervisory

The Official Management of OPPFMA that responsible for operational performance of OPPFMA consists of the Chairman, the Financial Officer and the Technical Officer, which the title name are based on applicable nomenclature in the PSA- OPPFMA.

BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PUBLIC SERVICE AGENCY
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in full of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

**e. Susunan Manajemen dan Dewan Pengawas
BPDPKS (Lanjutan)**

Pejabat Pengelola BPDPKS untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah:

2016:

31 Desember 2016

Nama/Name

December 31, 2016

Direktur Utama	Bayu Krisnamurthi	President Director
Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Catur Ariyanto Widodo	Director of Finance, General, Compliance and Risk Management
Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana	Agustinus Antonius	Director of Planning and Fund Management
Direktur Penghimpunan Dana	Hendrajat Natawidjaja	Director of Fund Raising
Direktur Penyaluran Dana	---	Director of Fund Distribution
Direktur Kemitraan	---	Director of Partnership

2015:

31 Desember 2015

Nama/Name

December 31, 2015

Direktur Utama	Bayu Krisnamurthi	President Director
Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Yuniar Yanuar Rasyid	Director of Finance, General, Compliance and Risk Management
Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana	R.C. Eko Santoso Budianto	Director of Planning and Fund Management
Direktur Penghimpunan Dana	Witjaksana Darmosarkoro	Director of Fund Raising
Direktur Penyaluran Dana	Dadan Kusdiana	Director of Fund Distribution
Direktur Kemitraan	Agustinus Antonius	Director of Partnership

Dewan Pengawas adalah bagian dari BPDPKS yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BPDPKS.

Dewan Pengawas BPDPKS untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 terdiri dari:

The Supervisory Board is the part of OPPFMA who is responsible in supervising the management of OPPFMA.

The Supervisory Board for the years ended December 31, 2016 and 2015 are as follows:

BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PUBLIC SERVICE AGENCY
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in full of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

**e. Susunan Manajemen dan Dewan Pengawas
BPDPKS (Lanjutan)**

2016:

31 Desember 2016

1. GENERAL (Continued)

**e. Structure of OPPFMA Management and Board
of Supervisory (Continued)**

2016:

December 31, 2016

Ketua	Rusman Heriawan	Chairman
Anggota	Lukita Dinarsyah Tuwo	Member
Anggota	Suahasil Nazara	Member
Anggota	Arlinda	Member
Anggota	Rida Mulyana	Member
Anggota	Panggah Susanto	Member
Anggota	Gamal Nasir	Member
Anggota	Loso Judijanto	Member
Anggota	Joko Supriyono	Member

2015:

31 Desember 2015

2015:

December 31, 2015

Ketua	Rusman Heriawan	Chairman
Anggota	Lukita Dinarsyah Tuwo	Member
Anggota	Suahasil Nazara	Member
Anggota	Arlinda	Member
Anggota	Rida Mulyana	Member
Anggota	Panggah Susanto	Member
Anggota	Gamal Nasir	Member
Anggota	Loso Judijanto	Member

f. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015, tentang Struktur organisasi BPDPKS, BPDPKS berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan dengan pembinaan teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, sedangkan pembinaan administrasi dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan tersebut, struktur organisasi BPDPKS terdiri dari:

- 1) Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko
- 2) Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana
- 3) Direktorat Penghimpunan Dana
- 4) Direktorat Penyaluran Dana
- 5) Direktorat Kemitraan
- 6) Satuan Pemeriksaan Intern

f. Organizational Structure

Based on Regulation of Finance Minister Number 113/PMK.01/2015 about Organization Structure of OPPFMA, the OPPFMA is under coordination of and responsible to Finance Minister with the technical development shall be carried by the Director General of Treasury and its administrative development shall be carried out by the Secretary General.

According to those Regulation of Finance Minister, organizational structure of OPPFMA consists of:

- 1) Finance, General, Compliance and Risk Management Directorate
- 2) Planning and Fund Management Directorate
- 3) Funding Directorate
- 4) Fund Distribution Directorate
- 5) Partnership Directorate
- 6) Internal Inspection Unit

BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PUBLIC SERVICE AGENCY
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in full of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan BLU-BPDPKS, harus mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tertanggal 30 Desember 2016 tentang Pedoman Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan BLU.

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali jika dinyatakan lain, dan disusun dengan dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

Peranan laporan keuangan adalah sebagai media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan secara tepat, relevan, dan dapat diandalkan bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan. Selain itu, tujuan khusus laporan keuangan BPDPKS adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai utama dan pemakai lainnya untuk mengetahui prestasi keuangan, sumber daya ekonomis yang dimiliki, transaksi atau kejadian-kejadian penting lain yang mempengaruhi kondisi keuangan.

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan BPDPKS adalah kemandirian entitas, kesinambungan entitas dan keterukuran dalam mata uang. BPDPKS juga menerapkan kebijakan akuntansi yang memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yaitu nilai historis, substansi mengungguli bentuk, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap, penyajian wajar, dan prinsip kehati-hatian.

2.1. Kebijakan Akuntansi untuk Laporan Posisi Keuangan

a. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BPDPKS sebagai akibat peristiwa masa lalu dan atas manfaat lainnya di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset BPDPKS diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset BPDPKS dalam laporan posisi keuangan diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICY

The accounting policies applied in managing the PSA-OPPFMA should refer to the Regulation of Finance Minister Number 220/PMK.05/2016, dated December 30, 2016 about Guidelines on Accounting and Financial Reporting for PSA.

The financial statements have been presented based on historical cost, unless otherwise stated, and prepared on the accrual basis. The reporting currency used in the financial statements is Rupiah (IDR).

The role of financial statements is as a media for communicating financial information precisely, relevantly, and reliably for users in decision making. In addition, the special purpose of OPPFMA financial statement is to provide useful information for the primary user and other users to know the financial achievement, the economic resources owned by organization, transactions or events that altering resources, as well as other important information affecting financial condition.

The basic assumptions of OPPFMA financial statements are economic entity assumptions, going concern, and monetary unit. OPPFMA also applies accounting policies that comply with the accounting principles, that are: historical, substance over form, periodicity, consistency, full disclosure, fair presentation, and prudential principles.

2.1. Statement of Financial Position Accounting Policies

a. Assets

Assets are the economic resources controlled and/or owned by OPPFMA as a result of past events and the economic benefit, social benefits of the future that are expected to be obtained, either by government or by society, and can be measured in a monetary unit. OPPFMA's assets are recognized when received or when the ownership transferred.

Assets of OPPFMA in the statement of financial position are classified into Current Assets and Non Current Assets.

BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PUBLIC SERVICE AGENCY
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in full of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

2.1. Kebijakan Akuntansi untuk Laporan Posisi Keuangan (Lanjutan)

a. **Aset** (Lanjutan)

Kebijakan akuntansi BPDPKS dalam mengukur/menilai aset yang di kelola adalah sebagai berikut:

Aset lancar adalah aset berupa kas dan setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi, dan/atau aset selain kas yang diharapkan untuk direalisasi menjadi kas, dimiliki untuk dijual atau diperdagangkan atau dipakai habis dalam waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal Laporan Posisi Keuangan. Berdasarkan definisi tersebut, maka aset lancar BPDPKS dalam Laporan Posisi Keuangan diklasifikasikan menjadi beberapa akun pokok, yaitu:

1) Kas dan setara kas

Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan investasi atau kegiatan operasional BPDPKS. Sedangkan saldo Bank adalah saldo rekening giro BPDPKS yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membayai kegiatan investasi maupun kegiatan operasional BPDPKS. Yang dimaksud saldo bank adalah seluruh saldo rekening giro BPDPKS yang terdapat pada setiap bank. Deposito yang dapat dimasukkan ke dalam kas dan bank adalah deposito yang berjangka waktu sampai tiga bulan.

Kas dan bank dalam laporan posisi keuangan diklasifikasikan menjadi kas di benda hara pengeluaran, kas di benda hara penerimaan, kas di bank, kas di bank kustodian, deposito satu bulan, dan deposito tiga bulan. Mutasi atas kas dan bank diakui pada saat terjadi transaksi kas/bank yang berupa penerimaan dan pengeluaran uang, penerimaan cek atau bilyet giro yaitu setelah dilakukan kliring pada bank, penyetoran/transfer uang tunai ke bank, penarikan cek, penerimaan, serta pencairan deposito yang jatuh tempo sampai dengan tiga bulan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICY
(Continued)

2.1. Statement of Financial Position Accounting Policies (Continued)

a. **Assets** (Continued)

The OPPFMA accounting policies in measuring/assessing the assets under management is as follows:

Current assets are assets in the form of cash and cash equivalents of which usage is not restricted, and/or assets other than cash expected to be realized into cash, held for trading or used in less than 12 months from the Statement of Financial Position date. Based on that definition, then the OPPFMA current assets on the Statement of Financial Position are classified into several main accounts, as follows:

1) Cash and cash equivalents

Cash is a payment instrument that is ready and free to be used to finance investment and operational activities of OPPFMA. While the bank account balance is a checking account balance of OPPFMA that can be used freely to financing the investment activies and also operation of the OPPFMA. The definition of bank balances are all OPPFMA current account balances contained in each. Bank deposits that can be incorporated into the cash and banks are the deposits with a maturity up to three months.

Cash and bank in the statements of financial position are classified into cash in treasurer-expenditures, cash in treasurer-receipt, cash in bank, cash in the bank custodian, and one month deposits. The mutation of cash and bank transactions are recognized when cash or bank receipts and disbursements, check receipts or current accounts ticket after the bank clearances, cash deposit/transfer to the bank, check withdrawal, receipt, and deposits disbursement with original maturities of three months.

BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PUBLIC SERVICE AGENCY
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in full of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICY
(Continued)

2.1. Kebijakan Akuntansi untuk Laporan Posisi Keuangan (Lanjutan)

2.1. Statement of Financial Position Accounting Policies (Continued)

b. Aset (Lanjutan)

b. Assets (Continued)

2) Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah penempatan dana BPDPKS pada instrumen investasi yang berjangka waktu kurang dari satu tahun. Investasi ini dapat berupa:

- a) Penempatan dana di bank
- b) Penempatan dana pada surat ber harga atau efek
- c) Penempatan dana pada reksadana

Investasi jangka pendek diakui dan dicatat pada saat BPDPKS telah mendapatkan hak kepemilikan atas investasi instrumen tersebut. Investasi jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah bersih/pokok atas nilai investasi yang bersangkutan. Apabila nilai investasi terukur tersebut mempunyai nilai pasar yang terukur secara handal, maka nilai tersebut dapat disesuaikan dengan harga pasar.

3) Piutang

Piutang adalah klaim atau tagihan BPDPKS yang diharapkan bisa dicairkan/direalisasikan menjadi kas dalam satu periode akuntansi.

Piutang dicatat pada saat timbulnya tagihan berdasarkan bukti tagihan yang bersangkutan, kecuali piutang bunga yang diakui melalui ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan bunga pada tahun berjalan sampai dengan akhir periode pelaporan yang belum diterima secara tunai.

Piutang dinyatakan sebesar nilai bersih yang dapat ditagih dari pihak lain, berdasarkan bukti tagihan yang bersangkutan. Sedangkan piutang bunga diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aset.

2) Short-term investments

Short-term investments are the placement of OPPFMA fund in investment instruments with original maturities less than one year. These investments may includes:

- a) Investment in banks
- b) Investment in bonds or stock
- c) Investment in mutual fund

Short-term investments are recognized and recorded at the time the OPPFMA acquires the ownership of investment instrument. Short-term investments are stated at net/initial value of these investments amount. If this investment value can be measured at a reliable market value, it can be adjusted to the market prices.

3) Receivables

Receivables are the OPPFMA claims that are reasonably expected to be converted into cash within an accounting period.

Receivables are recorded at the time the bills occurred based on the relevant evidences, except for interest receivables that are recognized through an adjusting entry for the interest income in the current year that is still not converted into cash until the end of reporting period.

Receivables stated at their collectable net amount from other parties, based on the relevant evidences. Whereas, the interest receivable is recognized based on proportion of time that calculates upon the effective result of assets.

BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PUBLIC SERVICE AGENCY
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
*(Expressed in full of Rupiah,
unless otherwise stated)*

- | | |
|--|--|
| <p>2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)</p> <p>2.1. Kebijakan Akuntansi untuk Laporan Posisi Keuangan (Lanjutan)</p> <p>a. Aset (Lanjutan)</p> <p>4) Perlengkapan kantor</p> <p>Perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan dalam rangka mendukung semua kegiatan operasional BPDPKS yang habis pakai dalam satu periode akuntansi dan barang-barang tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual, termasuk juga alat tulis kantor.</p> <p>Penggunaan perlengkapan kantor diakui pada akhir pelaporan akuntansi melalui ayat jurnal penyesuaian, yaitu sebesar nilai perolehan barang-barang yang masih tersedia digunakan.</p> <p>Perlengkapan kantor dinilai dan dicatat sebesar harga perolehan perlengkapan kantor yang dihitung dengan menggunakan metode harga terakhir.</p> <p>5) Beban dibayar di muka</p> <p>Beban dibayar di muka atau pembayaran biaya di muka adalah beban-beban yang telah dibayarkan oleh BPDPKS pada saat terjadinya pemindahan hak yang manfaatnya akan digunakan pada periode kegiatan masa yang akan datang. Beban dibayar di muka diakui saat pembayaran biaya tersebut dilakukan, atau jika sudah terjadi perpindahan hak dan dicatat sebesar jumlah pembayaran yang dilakukan. Beban dibayar di muka berkurang dan diakui sebagai beban pada saat telah menggunakan manfaat dari jasa tersebut.</p> <p>6) Aset tak berwujud</p> <p>Aset tak berwujud adalah aset bukan moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Aset tak berwujud harus diakui sebesar biaya perolehannya.</p> | <p>2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICY
(Continued)</p> <p>2.1. Statement of Financial Position Accounting Policies (Continued)</p> <p>a. Assets (Continued)</p> <p>4) Office supplies</p> <p><i>Office supplies are the goods that expendable in one accounting period items to support the operational activities of OPPFMA and are not intended for sale, including stationery.</i></p> <p><i>The usage of office equipment is recognized at the end of the accounting period through an adjusting entry for the acquisition price of supplies that are still available to use.</i></p> <p><i>Office supplies are valued and recorded at historical cost that is calculated by using the final price method.</i></p> <p>5) Prepaid expenses</p> <p><i>Prepaid expenses or payment in advance are expenses that have been paid by the OPPFMA at the time of the transfer of rights which the benefit will be used in the future. Prepaid expenses are recognized when payment is done or the transfer of rights has occurred. These transactions are recorded at the paid amount. Prepaid expenses will be reduced and recognized as expenses when the related benefits of services have been used.</i></p> <p>6) Intangible assets</p> <p><i>Intangible assets are non monetary assets which can be identified and has no physical form and held for use in generating or delivering goods or services, leased to others or administrative purposes. Intangible assets must be recognized at acquisition cost.</i></p> |
|--|--|

BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGETAHUAN DAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PUBLIC SERVICE AGENCY
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in full of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICY
(Continued)

2.1. Kebijakan Akuntansi untuk Laporan Posisi Keuangan (Lanjutan)

2.1. Statement of Financial Position Accounting Policies (Continued)

a. Aset (Lanjutan)

a. Assets (Continued)

6) Aset tak berwujud (Lanjutan)

6) Intangible assets (Lanjutan)

Bila aset tak berwujud tersebut diperoleh melalui *self-development*, maka biaya perolehan atas aset tersebut adalah sebesar biaya pengembangan yang telah dikeluarkan untuk membuat aset tersebut. Aset tak berwujud diamortisasikan selama estimasi masa manfaat atas aset tersebut.

When intangible assets are acquired through self-development, the acquisition cost of the assets is equal to the cost of the development that has been expended to make the assets. Intangible assets are amortized over their estimated useful life of the assets.

b. Kewajiban dan Ekuitas

b. Liabilities and Equity

Kewajiban

Liabilities

Kewajiban adalah utang masa kini BPDPKS yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya akan menimbulkan arus keluar sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh BPDPKS. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Liabilities are OPPFMA present debt arising from past events of which the settlement will causes an outflow of the OPPFMA economic resources. Liabilities can be classified as current and long-term liabilities.

1) Kewajiban jangka pendek

1) Short-term liabilities

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali (dilunasi) dalam satu periode akuntansi atau dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan.

Short-term liabilities are the liabilities to be paid and settled in an accounting period or less than 12 months.

Kewajiban jangka pendek BPDPKS dalam Laporan Posisi Keuangan diklasifikasikan menjadi utang pajak dan utang jangka pendek lainnya.

OPPFMA short-term liabilities on the Statement of Financial Position are classified into tax debt and other short-term debt.

Kewajiban jangka pendek BPDPKS dalam Laporan Posisi Keuangan disajikan menurut jenisnya sesuai dengan tingkat likuiditasnya (jatuh tempo).

OPPFMA short-terms liabilities on the Statement of Financial Position are presented by type in accordance with the level of liquidity (due date).

Pada akhir periode akuntansi kewajiban jangka pendek dinilai menurut nilai nominalnya dan kewajiban dalam mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan.

At the end of the accounting period, short-term liabilities will be appraised at the nominal value and liabilities in foreign currency must be translated and expressed in Rupiah currency using the median exchange rate of Bank Indonesia on the statement of financial position date.

BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PUBLIC SERVICE AGENCY
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in full of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICY
(Continued)

2.1. Kebijakan Akuntansi untuk Laporan Posisi Keuangan (Lanjutan)

2.1. Statement of Financial Position Accounting Policies (Continued)

b. Kewajiban dan Ekuitas (Lanjutan)

b. Liabilities and Equity (Continued)

2) Kewajiban jangka panjang

2) Long-term liabilities

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang pemenuhan dan/atau penyelesaiannya lebih dari satu tahun yang timbul karena transaksi-transaksi untuk mendapatkan aset/barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan pada periode-periode yang akan datang didasarkan pada perjanjian kontrak serah terima aset/barang atau jasa atau transaksi pengelolaan atas pihak ketiga.

Long-term liabilities are liabilities of which compliance is more than one year settlement. These liabilities arise as results of transaction to obtain the assets/goods or services for which payment is made in the future periods based on handover contractual agreements of assets/goods or transaction service of fund management for third parties.

Kewajiban jangka panjang diakui dan dicatat saat terjadinya transaksi sebesar jumlah yang disetujui berdasarkan perjanjian kontrak atau saat terjadi penyerahan dana pihak ketiga untuk dikelola dan diserahkan kembali pada waktu lebih dari setahun.

Long-term liabilities are recognized and recorded at transaction date at the amount agreed under the contract or at the time of the funds delivered to the third party to be managed and delivered back in more than one year.

Ekuitas

Equity

Ekuitas adalah hak residual atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki. Ekuitas terdiri atas ekuitas tidak terikat, ekuitas terikat temporer, dan ekuitas terikat permanen.

Equity is the residual rights in the assets after deducted all liabilities owned. Equity consists of unrestricted equity, temporary restricted equity and permanent restricted equity.

Ekuitas tidak terikat disajikan di dalam kelompok Ekuitas pada Laporan Posisi Keuangan yaitu sebesar saldoanya.

Unrestricted equity presented in the Equity section of the Statement of Financial Position for its balance.

2.2. Kebijakan Akuntansi untuk Laporan Aktivitas

2.2. Accounting Policies of Statement of Activity

a. Pendapatan

a. Income

Pendapatan BPDPKS diakui dalam laporan aktivitas apabila terjadi kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Hal ini berarti pengakuan pendapatan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset atau penurunan kewajiban.

Income of OPPFMA is recognized in the activity statement of activity when increase in future economic benefits related to an increase in assets or decrease in liabilities occurred and can be measured reliably. It means that the recognition of revenue is in assets or decrease in conformity with the recognition of increase liabilities.

BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGETAHUAN DAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PUBLIC SERVICE AGENCY
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in full of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

2.2. Kebijakan Akuntansi untuk Laporan Aktivitas (Lanjutan)

a. Pendapatan (Lanjutan)

1) Pendapatan usaha

Pendapatan usaha adalah pendapatan yang didapat BPDPKS dari kegiatan usaha pokok selama periode akuntansi tertentu.

Pendapatan operasional yang berasal dari jasa layanan BPDPKS mencakup pendapatan yang diperoleh dari hasil-hasil usaha operasional.

Pendapatan operasional BPDPKS yang berasal dari jasa layanan terdiri atas: pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit, pendapatan atas pengelolaan dana dan pendapatan usaha lainnya.

b. Beban usaha

Beban Usaha adalah seluruh beban baik secara langsung maupun tidak langsung dimanfaatkan dalam menunjang kegiatan/ aktivitas usaha pokok BPDPKS.

Beban usaha terdiri atas:

- 1) Beban operasional
- 2) Beban surveyor
- 3) Beban pembayaran selisih harga biodiesel dan riset
- 4) Beban penyaluran dana peremajaan perkebunan kelapa sawit
- 5) Beban pengembangan sumber daya manusia kelapa sawit
- 6) Beban promosi kelapa sawit
- 7) Beban perencanaan dan pengelolaan dana

2.3. Kebijakan Akuntansi untuk Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi arus keluar dan masuk kas BPDPKS sampai 31 Desember tahun 2016.

Laporan arus kas terdiri atas tiga aktivitas yaitu aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICY
(Continued)

2.2. Accounting Policies of Statement of Activity
(Continued)

a. Income (Continued)

1) Operating income

Operating income is generated from OPPFMA business activities during the current accounting period.

The operating income derived from the services activity of OPPFMA is generated from the OPPFMA operational core activities.

OPPFMA operational income from services are include: income from fund collection of palm oil plantations, income from fund management and also other operating income.

b. Operating expenses

Operating expenses are all direct or indirect expenses that used to support activities of core business of OPPFMA.

Operating expenses consists of:

- 1) Operational expenses
- 2) Surveyor expenses
- 3) Biodiesel price variance payment and research expenses
- 4) Palm oil plantation replanting fund expenses
- 5) Palm oil human resources development expenses
- 6) Palm oil promotion expenses
- 7) Planning and fund management expenses

2.3. Accounting Policies of Statement of Cash Flows

Statement of cash flows presents information about IECF's cash inflow and outflow until end December 31, 2016.

Statement of cash flows consist of three activities: operating, investing, and financing activities.

BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PUBLIC SERVICE AGENCY
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
*(Expressed in full of Rupiah,
unless otherwise stated)*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)

2.3. Kebijakan Akuntansi untuk Laporan Arus Kas
(Lanjutan)

Dalam penyusunan laporan arus kas, BPDPKS menggunakan metode langsung.

a. Aktivitas operasional

Aktivitas operasional menunjukkan kas yang masuk dan keluar dari kegiatan operasional/bisnis utama BPDPKS.

Di dalam aktivitas ini, arus kas yang masuk berasal dari pungutan dana perkebunan kelapa sawit, pendapatan atas pengelolaan dana, jasa giro, pungutan pajak, dan juga atas pungutan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Arus kas yang keluar berasal dari penyaluran dan beban operasional, penyetoran pungutan pajak, penyetoran pengembalian gaji/honor staf/pegawai, penyetoran pungutan BPJS dan beban bukan usaha.

b. Aktivitas investasi

Aktivitas operasional adalah penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan perolehan dan pelepasan atas aset jangka panjang serta investasi jangka pendek lain, selain setara kas, yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa depan.

c. Aktivitas pendanaan

Aktivitas pendanaan merupakan penerimaan atau arus kas masing yang berkaitan dengan pendanaan ekuitas dari pemerintah dan hal-hal yang terkait dengan pembayaran ataupun penyetoran dari surplus operasional BPDPKS pada setiap periode akuntansi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICY
(Continued)

2.3. Accounting Policies of Statement of Cash Flows (Continued)

In preparing the cash flows statement, ECF uses the direct method.

a. Operating activities

Operating activities present cash inflow and outflow from all operating activities.

Cash inflows come from income fund restiture palm oil plantation, income from managed account, bank interest, taxes collection and Social Security Administrator Agency (SSAA) fee.

Cash outflow comes from disbursements and operational expenses, taxes payment, staffs/employees salaries/wages, payment for SSAA and the other non operating expenses.

b. Investing activities

Investing activities are cash receipts and payments in connection with acquisition and disposal of long-term investment and other short-term investments, except for cash equivalents that aims to generate income and cash in future.

c. Financing activities

Financing activities are the cash receipts related to the equity financing from the government and the payment or deposit of OPPFMA surplus in any accounting period to the State Treasury.

BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGETAHUAN DAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PUBLIC SERVICE AGENCY
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in full of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. KAS DAN SETARA KAS

Untuk kas dan setara kas BPDPKS pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, rinciannya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016 <i>December 31, 2016</i>	31 Desember 2015 <i>December 31, 2015</i>	
Kas di benda			Cash on treasury
Kas di brankas	29.925.237	14.911.386	<i>Cash in safes</i>
Kas di bank			Cash in banks
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	105.864.219.888	216.515.199.075	<i>PT Bank Mandiri (Persero), Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	24.765.539.510	101.242.600.093	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	6.343.206.193	86.996.902.504	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk</i>
Sub Jumlah	136.972.965.591	404.754.701.672	<i>Sub Total</i>
Deposito berjangka			Time deposits
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	2.458.681.883.156	1.058.934.038.263	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	476.154.653.469	660.184.931.507	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	1.342.233.563.918	356.484.002.628	<i>PT Bank Mandiri (Persero), Tbk</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero)	601.941.078.285	-	<i>PT Bank Tabungan Negara (Persero)</i>
PT Bank Bukopin	412.468.979.581	-	<i>PT Bank Bukopin</i>
PT Bank Jabar	300.625.000.000	-	<i>PT Bank Jabar</i>
Sub Jumlah	5.592.105.158.409	2.075.602.972.398	<i>Sub Total</i>
Jumlah	5.729.108.049.237	2.480.372.585.456	Total

Kas dan setara kas merupakan keseluruhan saldo kas yang dimiliki oleh BPDPKS per 31 Desember 2016 yang berada pada akun kas di benda, kas di bank dan deposito sampai dengan enam bulan.

Kas di benda terdiri dari kas yang berada di Bendahara Pengeluaran dan juga Kas di Bendahara Penerimaan. Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2016 adalah kas yang ditarik dari kas BLU (Bendahara Penerimaan) yang masih tersisa di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2016 yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional BPDPKS.

Deposito merupakan deposito jangka pendek sampai dengan tiga bulan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk kas dan setara kas yang bersumber dari hasil pendapatan usaha BPDPKS.

Berikut ini adalah tingkat suku bunga deposito dari bank-bank dimana BPDPKS menginvestasikan dana sebagai deposito berjangka pada tahun-tahun 2016 dan 2015.

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS

The details of cash and cash equivalents of OPPFMA as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

	31 Desember 2016 <i>December 31, 2016</i>	31 Desember 2015 <i>December 31, 2015</i>	
Cash on treasury			Cash in safes
<i>Cash in safes</i>	29.925.237	14.911.386	<i>Cash in banks</i>
Cash in banks			<i>PT Bank Mandiri (Persero), Tbk</i>
<i>PT Bank Mandiri (Persero), Tbk</i>	105.864.219.888	216.515.199.075	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk</i>
<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk</i>	24.765.539.510	101.242.600.093	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk</i>
<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk</i>	6.343.206.193	86.996.902.504	<i>Sub Total</i>
Sub Total	136.972.965.591	404.754.701.672	Time deposits
Time deposits			<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk</i>
<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk</i>	2.458.681.883.156	1.058.934.038.263	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk</i>
<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk</i>	476.154.653.469	660.184.931.507	<i>PT Bank Mandiri (Persero), Tbk</i>
<i>PT Bank Mandiri (Persero), Tbk</i>	1.342.233.563.918	356.484.002.628	<i>PT Bank Tabungan Negara (Persero)</i>
<i>PT Bank Tabungan Negara (Persero)</i>	601.941.078.285	-	<i>PT Bank Bukopin</i>
<i>PT Bank Bukopin</i>	412.468.979.581	-	<i>PT Bank Jabar</i>
<i>PT Bank Jabar</i>	300.625.000.000	-	<i>Sub Total</i>
Sub Total	5.592.105.158.409	2.075.602.972.398	Total
Total	5.729.108.049.237	2.480.372.585.456	

Cash and cash equivalents is the overall OPPFMA cash balance per December 31, 2016 on the treasury cash account, cash in bank, and deposits up to six months.

Cash in treasurer consists of cash in the Treasurer-Expenditures and the Treasure-Receipts. Cash in the Treasurer-Expenditures on December 31, 2016 was withdrawn cash from PSA cash (Treasurer-Receipts) remaining on expenditure treasurer on December 31, 2016; which are used to support OPPFMA operational activities.

Deposits are short-term deposits up to three months which can be categorized as a form of cash and cash equivalents and comes from OPPFMA operating income.

Below are the rate of the time deposits applied by banks which OPPFMA invested its funds as time deposits for years 2016 and 2015:

BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PUBLIC SERVICE AGENCY
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in full of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS (Continued)

Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka/Rate of Time Deposits
Tahun/Year
2016

No	Bank	Suku Bunga Terendah/ Lowest Interest Rate	Suku Bunga Tertinggi/ Highest Interest Rate
1.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	6,75%	7,25%
2.	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	6,75%	6,75%
3.	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	6,75%	6,75%
4.	PT Bank Tabungan Negara (Persero)	7,75%	7,75%
5.	PT Bank Bukopin	7,00%	7,50%
6.	PT. Bank Jabar	7,50%	9,00%

Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka/Rate of Time Deposits
Tahun/Year
2015

No	Bank	Suku Bunga Terendah/Lowest Interest Rate	Suku Bunga Tertinggi/ Highest Interest Rate
1.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	4,00%	9,50%
2.	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	7,75%	9,00%
3.	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	4,00%	9,00%

Untuk tahun 2016, per 31 Desember 2016, jumlah Deposito Berjangka BPDPKS meningkat signifikan, yaitu dari Rp2.075.602.972.398 pada tahun 2015, menjadi Rp5.592.105.158.409 pada tahun 2016.

In year 2016, as of December 31, 2016, the OPPFMA's Time Deposits were increased significantly, from Rp2.075.602.972.398 in year 2015, increased to Rp5.592.105.158.409 in year 2016.

4. INVESTASI JANGKA PENDEK

Untuk investasi jangka pendek BPDPKS pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, rinciannya adalah sebagai berikut:

4. SHORT-TERM INVESTMENT

The details of short-term investment of OPPFMA as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

	31 Desember 2016 December 31, 2016	31 Desember 2015 December 31, 2015	
Investasi jangka pendek	-	3.961.777.000.000	Short-term investment
Jumlah	<u><u>-</u></u>	<u><u>3.961.777.000.000</u></u>	Total

BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGETAHUAN DAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PUBLIC SERVICE AGENCY
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in full of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. INVESTASI JANGKA PENDEK (Lanjutan)

Investasi jangka pendek pada tahun 2015 merupakan pembelian Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Investasi jangka pendek tersebut ditujukan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo.

Pada tahun 2016, per 31 Desember 2016, investasi jangka pendek tersebut sudah jatuh tempo, dan tidak dilakukan pembelian lanjut oleh BPDPKS.

Berikut adalah data investasi jangka pendek pada tahun 2015:

No	Keterangan/ Description	Harga Nominal/ Nominal Price	Harga Pembelian/ Purchase Price	Pendapatan Bunga/ Interest Revenue	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Tanggal Pembelian/ Settlement Date	Jatuh Tempo/ Maturity Date
1.	SPNNT20160130	1.500.000.000.000	1.491.297.000.000	8.703.000.000	7,10%	30-Des-15	30-Jan-16
2.	SPNNT20160229	2.500.000.000.000	2.470.480.000.000	29.520.000.000	7,15%	30-Des-15	29-Feb-16
	Jumlah	4.000.000.000.000	3.961.777.000.000	38.223.000.000			

5. PIUTANG

Untuk piutang BPDPKS pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, rinciannya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016 <i>December 31, 2016</i>	31 Desember 2015 <i>December 31, 2015</i>	
Piutang usaha lain-lain	66.000.000	-	Other receivables
Piutang bunga deposito	25.228.448.346	2.497.266.911	Deposit interest receivables
Piutang kupon SPN	-	1.548.068.852	TB coupon receivables
Piutang jasa giro	-	88.514.609	Bank interest receivables
Sub Jumlah	25.294.448.346	4.133.850.372	<i>Sub Total</i>
Penyisihan piutang	-	-	Allowance for doubtful accounts
Jumlah	25.294.448.346	4.133.850.372	Total

Piutang BPDPKS pada tahun 2016 utamanya adalah dari piutang bunga deposito yang jumlah mencapai Rp25.228.443.346.

Pada tahun 2016 ini tidak terdapat lagi piutang yang berasal dari kupon TB, karena BPDPKS tidak lagi memiliki investasi jangka pendek dalam bentuk kupon TB tersebut (lihat Catatan Nomor 4 di atas).

4. SHORT-TERM INVESTMENT (Continued)

Short-term investment in year 2015, is a purchase of Treasury Bills (TB). Those investments are intended as held to maturity investment.

In year 2016, as of December 2016, the short-term investments were due and were not continued by OPPFMA.

Below are the short-term investment in the year of 2015:

5. RECEIVABLES

The details of receivables of OPPFMA as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

	31 Desember 2016 <i>December 31, 2016</i>	31 Desember 2015 <i>December 31, 2015</i>	
Piutang usaha lain-lain	66.000.000	-	Other receivables
Piutang bunga deposito	25.228.448.346	2.497.266.911	Deposit interest receivables
Piutang kupon SPN	-	1.548.068.852	TB coupon receivables
Piutang jasa giro	-	88.514.609	Bank interest receivables
Sub Jumlah	25.294.448.346	4.133.850.372	<i>Sub Total</i>
Penyisihan piutang	-	-	Allowance for doubtful accounts
Jumlah	25.294.448.346	4.133.850.372	Total

The OPPFMA receivables in year 2016 mostly are from deposit interest receivables which amounted Rp25.228.443.346.

In year 2016, receivables from short-term investment in TB coupon were not occurred since those short-term investment in TB coupon were due (see Note Number 4 above).

BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PUBLIC SERVICE AGENCY
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in full of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. PERSEDIAAN

Untuk persediaan BPDPKS pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, rinciannya adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2016</u> <u>December 31, 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u> <u>December 31, 2015</u>	
Perlengkapan kantor dan barang promosi	233.902.900	48.810.500	<i>Office supplies and promotion goods</i>
Jumlah	233.902.900	48.810.500	Total

Jumlah persediaan BPDPKS mengalami peningkatan pada tahun 2016, dari Rp48.810.500 pada tahun 2015 menjadi Rp233.902.900, terdiri dari perlengkapan kantor dan barang-barang promosi.

6. INVENTORIES

The details of inventories of OPPFMA as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

	<u>31 Desember 2016</u> <u>December 31, 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u> <u>December 31, 2015</u>	
Perlengkapan kantor dan barang promosi	233.902.900	48.810.500	<i>Office supplies and promotion goods</i>
Jumlah	233.902.900	48.810.500	Total

The inventories of OPPFMA increased in 2016, from Rp48.810.500 in year 2015 to Rp233.902.900 in year 2016, consist of office supplies and promotion goods.

7. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

Untuk beban dibayar di muka BPDPKS pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, rinciannya adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2016</u> <u>December 31, 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u> <u>December 31, 2015</u>	
Sewa kendaraan dibayar di muka	3.004.121.833	504.388.500	<i>Prepaid rent of cars</i>
Jumlah	3.004.121.833	504.388.500	Total

Beban dibayar di muka BPDPKS pada tahun 2016, adalah biaya-biaya yang dibayarkan untuk sewa kendaraan.

7. PREPAID EXPENSES

The details of prepaid expenses of OPPFMA as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

	<u>31 Desember 2016</u> <u>December 31, 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u> <u>December 31, 2015</u>	
Sewa kendaraan dibayar di muka	3.004.121.833	504.388.500	<i>Prepaid rent of cars</i>
Jumlah	3.004.121.833	504.388.500	Total

Prepaid expenses of OPPFMA in year 2016 are the prepaid payment for rent of cars.

The prepaid expenses were increased in year 2016 compared to year 2015, that are, Rp504.388.500 in year 2015, to Rp3.004.121.833 in year 2016.

8. ASET TETAP

Pada tahun 2015, BPDPKS belum memiliki aset tetap, dan di tahun 2016, BPDPKS melakukan pembelian aset tetap terutama alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, peralatan kantor, perlengkapan kantor dan operasional, serta yang terbesar adalah kapitalisasi beban renovasi kantor BPDPKS.

Untuk aset tetap BPDPKS pada tanggal 31 Desember 2016, rinciannya adalah sebagai berikut:

8. FIXED ASSETS

In year 2015, OPPFMA were not yet acquired fixed assets, and in year 2016, OPPFMA acquired some fixed asset such land transport equipment motorized, land transport equipment unmotorized, office equipment, operational tools and equipment, and the capitalization of renovation expenses for OPPFMA office.

The details of fixed assets of OPPFMA as of December 31, 2016 are as follows:

BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGETAHUAN DAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PUBLIC SERVICE AGENCY
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in full of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. ASET TETAP (Lanjutan)

8. FIXED ASSETS (Continued)

	01 Januari 2016 <i>January 01, 2016</i>	Penambahan/ Increase	Pengurangan/ Decrease	31 Desember 2016 <i>December 31, 2016</i>	
Harga Perolehan					
Alat angkutan darat bermotor	-	37.276.000	-	37.276.000	<i>Land transport equipment motorized</i>
Alat angkutan darat tak bermotor	-	12.320.000	-	12.320.000	<i>Land transport equipment unmotorized</i>
Alat kantor	-	1.201.343.220	-	1.201.343.220	<i>Office tools</i>
Alat rumah tangga	-	3.026.169.894	-	3.026.169.894	<i>Household appliance</i>
Alat studio	-	1.839.181.730	-	1.839.181.730	<i>Studio tools</i>
Alat komunikasi	-	229.789.400	-	229.789.400	<i>Communication tool</i>
Unit komputer	-	2.544.029.600	-	2.544.029.600	<i>Computer unit</i>
Peralatan komputer	-	931.719.050	-	931.719.050	<i>Computer equipment</i>
Peralatan olahraga	-	11.220.000	-	11.220.000	<i>Sports equipment</i>
Renovasi	-	5.454.243.706	-	5.454.243.706	<i>Renovation</i>
Sub Jumlah	-	15.287.292.600	-	15.287.292.600	<i>Sub Total</i>
Akumulasi Penyusutan					
Alat angkutan darat bermotor	-	5.325.144	-	5.325.144	<i>Land transport equipment motor</i>
Alat angkutan darat tak bermotor	-	4.455.000	-	4.455.000	<i>Land transport equipment unmotorized</i>
Alat kantor	-	138.933.322	-	138.933.322	<i>Office tools</i>
Alat rumah tangga	-	308.086.189	-	308.086.189	<i>Household appliance</i>
Alat studio	-	184.044.673	-	184.044.673	<i>Studio tools</i>
Alat komunikasi	-	24.176.780	-	24.176.780	<i>Communication tool</i>
Unit komputer	-	484.839.900	-	484.839.900	<i>Computer unit</i>
Peralatan komputer	-	160.062.733	-	160.062.733	<i>Computer equipment</i>
Peralatan olahraga	-	1.870.000	-	1.870.000	<i>Sports equipment</i>
Sub Jumlah	-	1.311.793.741	-	1.311.793.741	<i>Sub Total</i>
Jumlah	-	13.975.498.859			Total

Nilai kapitalisasi atas beban renovasi kantor BPDPKS yang terjadi pada tahun 2016 mencapai nilai sebesar Rp5.454.243.706.

Capitalization of OPPFMA office renovation expenses in year 2016 are amounted as Rp5.454.243.706.

Pembelian aset tetap lainnya yang memiliki nilai yang signifikan adalah untuk alat rumah tangga, sebesar Rp3.026.169.894 dan untuk unit komputer yang mencapai sebesar Rp2.544.029.600.

The other acquisition of fixed assets with the significant amount are for household appliance, amounted Rp3.026.169.894 and for computer unit that amounted Rp2.544.029.600.

BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PUBLIC SERVICE AGENCY
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in full of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. ASET TAK BERWUJUD

Untuk aset tak berwujud BPDPKS pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, rinciannya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016 <i>December 31, 2016</i>	31 Desember 2015 <i>December 31, 2015</i>	
Aplikasi riset	189.750.000	-	Riset application
Office 365	154.550.000	154.550.000	Office 365
Aplikasi ABK	108.680.000	-	ABK application
Aplikasi naskah	106.810.000	-	Script application
Office 365 enterprise 3	67.760.000	-	Office 365 entreprise 3
Website BPDPKS	55.000.000	55.000.000	BPDPKS website
Aplikasi biodiesel	47.300.000	47.300.000	Biodiesel application
Aplikasi SDM/Absen	104.500.000	-	HR/absence applications
Aplikasi Biodiesel II	189.970.000	-	Biodiesel II applications
ERP	112.200.000	-	ERP
Aplikasi Absensi	66.000.000	-	Attendance application
Office 365 (lisensi 2017)	195.525.000	-	Office 365 license 2017
Aplikasi Gaji	59.950.000	-	Salary application
Webste BPDPKS 2016	99.000.000	-	BPDPKS 2016 website
Jumlah Sebelum Amortisasi	1.556.995.000	256.850.000	Total Before Amortization
Amortisasi	(438.260.627)	(24.016.667)	Amortization
Jumlah - Bersih	1.118.734.373	232.833.333	Total - Net

Jumlah aset tak berwujud BPDPKS pada tahun 2016 mengalami peningkatan, dari Rp232.833.333 setelah beban amortisasi di tahun 2015 meningkat menjadi Rp1.118.734.373 setelah beban amortisasi pada tahun 2016.

Total intangible assets of OPPFMA were increased in year 2016, from Rp232.833.333 after amortization expenses in year 2015 to Rp1.118.734.373 after amortization expenses in year 2016.

10. UTANG PAJAK

Untuk utang pajak BPDPKS pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, rinciannya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016 <i>December 31, 2016</i>	31 Desember 2015 <i>December 31, 2015</i>	
Pajak pertambahan nilai	-	92.447.000	Value added tax
PPh pasal 21	10.645.000	127.086.500	Income tax article 21
PPh pasal 23/26	-	18.648.400	Income tax article 23/26
PPh pasal 22	-	2.758.575	Income tax article 23/222
Jumlah	10.645.000	240.940.475	Total

10. TAX PAYABLES

The details of tax payables of OPPFMA as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGETAHUAN DAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PUBLIC SERVICE AGENCY
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in full of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Untuk beban yang masih harus dibayar BPDPKS pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, rinciannya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016 <i>December 31, 2016</i>	31 Desember 2015 <i>December 31, 2015</i>	
Jasa surveyor	10.641.240.320	10.615.763.400	Surveyor fee
Dana riset	-	6.404.833.434	Research fund
Honorarium tenaga honorer	-	6.252.632	Employee honorarium
Uang makan pegawai	-	71.242.000	Employee meals
Listrik	28.280.656	-	Electric
Air	853.400	-	Water
Telepon	1.535.988	-	Telephone
Jumlah	10.671.910.364	17.098.091.466	Total

Jumlah beban yang masih harus dibayar baik untuk tahun 2016 maupun 2015, yaitu masing-masing sebesar Rp10.671.910.364 dan Rp17.098.091.466 terutama adalah beban yang masih harus dibayar untuk jasa surveyor, yaitu masing-masing adalah Rp10.641.240.320 pada tahun 2016 dan sebesar Rp10.615.763.400 pada tahun 2015.

Pada tahun 2016, beban yang masih harus dibayar untuk dana riset adalah Rp0, sementara pada tahun 2015 sebesar Rp6.404.833.434.

12. EKUITAS

Untuk ekuitas BPDPKS pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, rinciannya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016 <i>December 31, 2016</i>	31 Desember 2015 <i>December 31, 2015</i>	
Penyesuaian surplus tahun berjalan	(3.027.019.999)	(1.006.500)	Prior year surplus
Surplus tahun lalu	6.429.730.436.220	-	Retained surplus
Setoran ke kas negara	(2.000.000.000.000)	-	Deposit to state treasury
Surplus tahun berjalan	1.335.348.783.963	6.429.731.442.720	Current year surplus
Jumlah	5.762.052.200.184	6.429.730.436.220	Total

Surplus tahun berjalan BPDPKS pada tahun 2016 ini, mengalami penurunan dari Rp6.429.730.436.220 di tahun 2015 menjadi Rp1.335.348.783.963 di tahun

Total accrued expenses, both in year 2016 and 2015, amounted Rp10.671.910.364 and Rp17.098.091.466, respectively; mostly were for accrued surveyor fee expenses, amounted Rp10.641.240.320 in year 2016 and Rp10.615.763.400 in year 2015.

In year 2016, accrued expenses for research fund were amounted Rp0, while in year 2015 amounted Rp6.404.833.434.

12. EQUITY

The details of equity of OPPFMA as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

Current year surplus of OPPFMA for year 2016 were decreased from Rp6.429.730.436.220 in year 2015 to Rp1.335.348.783.963 in year 2016.

BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PUBLIC SERVICE AGENCY
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
*(Expressed in full of Rupiah,
unless otherwise stated)*

2016.

13. PENDAPATAN PUNGUTAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Jumlah pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit untuk tahun 2016 dan 2015 rinciannya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016 <i>December 31, 2016</i>	31 Desember 2015 <i>December 31, 2015</i>	
Pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit	11.690.819.130.021	6.902.212.717.058	<i>Income from fund collection of palm oil plantation</i>
Jumlah	11.690.819.130.021	6.902.212.717.058	Total

Pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit untuk tahun 2016 mengalami peningkatan signifikan, yaitu dari Rp6.902.212.717.058 pada tahun 2015, naik menjadi Rp11.690.819.130.021 pada tahun 2016.

13. INCOME FROM FUND COLLECTION OF PALM OIL PLANTATION

The details of income from fund collection of palm oil plantation in year 2016 and 2015 are as follows:

Income from fund collection of palm oil plantation in year 2016 were increased significantly, from Rp6.902.212.717.058 in year 2015, increased to Rp11.690.819.130.021 in year.

14. PENDAPATAN ATAS PENGELOLAAN DANA

Jumlah pendapatan atas pengelolaan dana untuk tahun 2016 dan 2015 rinciannya adalah sebagai berikut:

14. INCOME FROM FUND MANAGEMENT

The details of income from fund management in year 2016 and 2015 are as follows:

BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PUBLIC SERVICE AGENCY
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in full of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember 2016 <i>December 31, 2016</i>	31 Desember 2015 <i>December 31, 2015</i>	
Pendapatan bunga deposito berjangka			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	255.428.743.419	16.062.507.679	<i>Time deposit interest income</i>
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	141.088.027.178	12.995.225.924	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	74.201.468.860	11.545.270.683	<i>PT Bank Mandiri (Persero), Tbk</i>
PT Bank Bukopin	21.193.419.337	-	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	82.073.379.899	-	<i>PT Bank Bukopin</i>
PT Bank Jabar	1.773.090.278	-	<i>PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk</i>
Sub Jumlah	575.758.128.971	40.603.004.286	<i>PT Bank Jabar</i>
			<i>Sub Total</i>
Pendapatan jasa giro			
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	13.271.061.014	25.293.780.464	<i>Bank interest income</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	2.367.035.246	8.523.090.480	<i>PT Bank Mandiri (Persero), Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	2.313.852.428	2.838.555.063	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk</i>
Sub Jumlah	17.951.948.688	36.655.426.007	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk</i>
			<i>Sub Total</i>
Pendapatan kupon SPN	36.674.931.148	1.548.068.852	<i>TB coupon income</i>
Pendapatan lainnya	485.141	1.651	<i>Other income</i>
Jumlah	630.385.493.948	78.806.500.796	<i>Total</i>

14. PENDAPATAN ATAS PENGELOLAAN DANA
(Lanjutan)

Pendapatan atas pengelolaan dana BPDPKS pada tahun 2016 mengalami kenaikan signifikan yaitu dari Rp78.806.500.796 di tahun 2015 meningkat menjadi Rp630.385.493.948 pada tahun 2016.

Peningkatan ini terutama berasal dari pendapatan bunga Deposito Berjangka BPDPKS yang meningkat dari Rp40.603.004.286 pada tahun 2015 menjadi Rp575.758.128.971 pada tahun 2016.

15. BEBAN USAHA

Jumlah beban usaha untuk tahun 2016 dan 2015 rinciannya adalah sebagai berikut:

14. INCOME FROM FUND MANAGEMENT (Continued)

The income from fund management of OPPFMA were increased significantly in year 2016, from Rp78.806.500.796 in year 2015 increased to Rp630.385.493.948 in year.

The increase of income from fund management, mostly were from Time Deposit interest income that were increased from Rp40.603.004.286 in year 2015 to Rp575.758.128.971 in year 2016.

15. OPERATING EXPENSES

The details of operating expenses in year 2016 and 2015 are as follows:

BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PUBLIC SERVICE AGENCY
OIL PALM PLANTATION FUND MANAGEMENT AGENCY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in full of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember 2016 <i>December 31, 2016</i>	31 Desember 2015 <i>December 31, 2015</i>	
Beban pembayaran selisih harga biodiesel	10.683.276.780.982	467.217.788.632	<i>Biodiesel price variance payment expenses</i>
Beban surveyor	103.108.856.431	53.315.463.300	<i>Surveyor expenses</i>
Beban penyaluran dana riset	52.760.887.446	10.254.345.405	<i>Research fund expenses</i>
Beban promosi kelapa sawit	35.366.464.339	9.744.245.138	<i>Palm oil promotion expenses</i>
Beban gaji dan tunjangan	37.470.710.066	6.799.388.074	<i>Salaries and allowances expenses</i>
Beban perjalanan dinas operasional	3.921.903.428	1.197.380.318	<i>Operational travelling expenses</i>
Beban barang keperluan perkantoran	3.953.442.713	866.438.132	<i>Office supplies expenses</i>
Beban pengembangan SDM kelapa sawit	44.560.036.252	672.574.200	<i>Palm oil HR development expenses</i>
Beban penyaluran dana peremajaan kebun kelapa sawit	9.311.029.449	623.491.181	<i>Palm oil plantation replanting fund expenses</i>
Beban jasa profesional	2.916.463.725	319.300.000	<i>Professional expenses</i>
Beban sewa	5.964.760.667	252.972.500	<i>Rent expenses</i>
Beban perencanaan dan pengelolaan dana	601.027.349	-	<i>Planning and fund management expenses</i>
Beban pelatihan dan diklat pegawai	472.583.000	-	<i>Employee training expenses</i>
Beban pemeliharaan	444.856.458	-	<i>Maintenance expenses</i>
Beban penyusutan dan amortisasi	1.726.037.701	24.016.667	<i>Depreciation and amortization expenses</i>
Beban lainnya	-	371.587	<i>Other expenses</i>
Jumlah	10.985.855.840.006	551.287.775.134	Total

Beban usaha BPDPKS mengalami peningkatan sangat signifikan ditahun 2016, yaitu dari Rp551.287.775.134 pada tahun 2015, menjadi Rp10.985.855.840.006 di tahun 2016.

Peningkatan ini terutama adalah untuk pembayaran selisih harga biodiesel yang meningkat signifikan dari Rp467.217.788.632 pada tahun tahun 2015 menjadi Rp10.683.276.780.982 pada tahun 2016.

16. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN KEUANGAN

Tidak terdapat peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan BPDPKS yang dapat mempengaruhi secara signifikan kewajaran penyajian laporan keuangan BPDPKS untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016.

17. TANGGUNGJAWAB ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen BPDPKS bertanggungjawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 yang disusun dan diotorisasi pada tanggal 15 Maret 2017.

Operating expenses of OPPFMA were increased very significantly in year 2016, from Rp551.287.775.134 in year 2015, to Rp10.985.855.840.006 in year 2016.

The increase of operating expenses mostly from biodiesel price variance payment that increased significantly from Rp467.217.788.632 in year 2015, to Rp10.683.276.780.982 in year 2016.

16. SUBSEQUENT EVENTS

There is no material subsequent events after the date of OPPFMA financial statements that could affect significantly the fairness of OPPFMA financial statements for the year ended December 31, 2016.

17. RESPONSIBILITY TO FINANCIAL STATEMENTS

Management of OPPFMA is responsible for presentation and disclosure of financial statements for the year ended December 31, 2016 that were prepared and authorized on March 15, 2017.

Analisa Pembahasan Kinerja
Operasional dan Keuangan
Operational and Financial Performance
Discussion Analysis

Tata Kelola BPDPKS
IECFPO Governance

Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
IECFPO Social Responsibility

Laporan Keuangan Audited
Audited Financial Statements



2016

Laporan Tahunan Annual Report



**Badan Pengelola
Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Indonesia Estate Crop Fund Palm Oil**

Graha Mandiri Lt.5
Jl. Imam Bonjol No.61 Menteng, Kota Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10310 - www.bpdp.or.id
Email: info@bpdp.or.id